KOMUNISME DI INDONESIA

JILID V

PENUMPASAN PEMBERONTAKAN PKI DAN SISA-SISANYA (1965 - 1981)

PUSJARAH TNI
BEKERJASAMA DENGAN
YAYASAN KAJIAN CITRA BANGSA (YKCB)
Jakarta 2009

KOMUNISME DI INDONESIA

Jilid V

Penumpasan Pemberontakan PKI dan sisa-sisanya (1965 - 1981)

JAKARTA 2009

TIM PENULIS BUKU

Editor : Saleh As'ad Djamhari

Penulis :

- Saleh As'ad Djamhari
- Suparmo
- Variani
- Yusmar Basri
- Ariwiadi
- G. Ambar Wulan
- Agus Sosro
- I Gde Putu Gunawan
- Syarif Rahmadi
- P. Hasibuan
- Arief Sulistyo
- Artinur Setiawati
- Sutrisminingsih
- Sri Suyanti
- A. Yusuf
- M. Adiono
- A. Rusli
- Konsuwensih
- Syafril Lubis
- YP. Tarigan
- Purwanto

Disusun Oleh : Pusjarah TNI

Diterbitkan Oleh : Pusjarah TNI, bekerjasama dengan : Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB)

Desain Visual & Tata Letak (Materi Siap Cetak) : Sidisi, Jakarta

No ISBN : 978-602-95565-2-0

★★★★

PANGLIMA TNI

SAMBUTAN TERTULIS PANGLIMA TNI PADA BUKU "KOMUNISME DI INDONESIA" PUSAT SEJARAH DAN TRADISI (PUSJARAH) TNI

Dengan mempersembahkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, selaku Panglima TNI dan pribadi saya menyambut gembira, terbitnya buku ***"Komunisme di Indonesia"*** yang diterbitkan oleh Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, sebagai hasil revisi atas buku ***"Bahaya Laten Komunisme di Indonesia"***, yang diterbitkan oleh Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.

Pada hemat saya buku ini merupakan hasil refleksi atau perenungan kembali atas ***"sepenggal"*** perjalanan sejarah TNI. Sudah barang tentu, sebagai bagian dari mata rantai peristiwa ~ walaupun hanya "sepenggal" ~ tetap saja menjadi bagian dari rangkaian perjalanan sejarah secara utuh menyeluruh. Namun demikian, di atas segala-galanya, hikmah terpenting dari setiap ***"episoda"*** sejarah, adalah sampai sejauh mana setiap pelaku sejarah ~ dalam konteks ini TNI ~ dapat memetik ***"hikmah dan pelajaran"*** dari setiap peristiwa sejarah itu sendiri. Sampai di sini, apa yang disebut sebagai ***"obyektivitas"*** dan/atau ***"kebenaran"*** sejarah, menjadi sangat relatifs dan dapat diperdebatkan, karena sifatnya yang dinamis namun setting peristiwanya di batasi oleh dinding ruang dan waktu ~ kapan peristiwa itu terjadi.

Pertanyaannya sekarang, apa ***"hikmah dan pelajaran"*** yang dapat dipetik oleh TNI, atas sepenggal sejarah nasional dan/atau

sejarah TNI yang berkenaan dengan Komunisme di Indonesia? Atas pertanyaan kritis tersebut, mari kita renungkan kembali beberapa pelajaran berharga berikut ini, agar setiap peristiwa sejarah tidak semakin memperlemah melainkan justru semakin mendorong dan memperkuat motivasi pengabdian serta kohesi persatuan dan kesatuan yang semakin kuat dan kokoh.

Pertama, Di depan pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) pada tanggal 5 Oktober 1949, Panglima Besar Sudirman ketika hendak meninggalkan Yogyakarta menuju Magelang karena sakit yang semakin serius, beliau memberi amanat : '***pelihara TNI, pelihara Angkatan Perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga'.*** (Pusat Sejarah TNI, 2004:50). ***Kedua,*** Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman, pada tanggal 12 Nopember 1945, di depan konverensi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), memberi amanat : ***'tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga'*** (Pusat Sejarah TNI, 2004:32).

Ketiga, Amanat dalam rangka pengumuman Markas Besar Tentara di Yogyakarta, tanggal 4 Juli 1946, Jenderal Besar Sudirman mengatakan : ***'supaya memegang teguh disiplin tentara, dan jangan sekali-kali tentara kita mendengarkan dan atau menjalankan perintah dari siapapun juga, kecuali perintah dari pimpinan tentara sendiri'.*** (Pusat Sejarah TNI, 2004). ***Keempat,*** Dengan amat lugas dalam buku War and Management, **Sun Tzu** mengatakan : ***'para Jenderal (militer) adalah kaum pengabdi bangsa. Bila pengabdiannya utuh, negara kukuh. Bila pengabdiannnya cacat, negara runtuh'.*** (Boedidharmo, 1993:106).

Oleh sebab itu menurut pandangan saya, hikmah dan pelajaran berharga yang dapat kita peroleh dari tragedi komunisme di Indonesia, adalah : ***Pertama,*** jangan pernah lagi terjebak dalam perangkap ***"politik Praktis"*** yang sangat merugikan pembinaan profesionalisme keprajuritan: ***Kedua,*** jangan pernah lagi mempertaruhkan ***"loyalitas"*** militer selain hanya kepada bangsa dan

negara atau loyalitas *"tegak lurus"* demi *"soliditas"* militer dan *"integritas"* nasional.

Dalam kerangka itu semua, tentunya TNI tidak ingin mengulangi sejarah masa lalu yang cukup memprihatinkan berkenaan dengan ***Komunisme di Indonesia*** yang telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Semoga buku sejarah ini bermanfaat terutama bagi kader pimpinan dan generasi penerus TNI, maupun setiap warga negara Republik Indonesia khususnya bagi generasi muda pewaris masa depan bangsa dalam melanjutkan perjuangan demi tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta, September 2009
Panglima Tentara Nasional Indonesia

Djoko Santoso
Jenderal TNI

KATA PENGANTAR
KEPALA PUSAT SEJARAH TNI

Apabila kita simak proses perubahan dalam era informasi dewasa ini, nampak adanya perubahan struktur peta politik dunia secara total. Memasuki abad 21, isu ideologi telah terdesak isu global yakni demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Begitu kuatnya perhatian masyarakat dunia terhadap isu global dewasa ini menyebabkan masalah ideologi tergeser dan menjadi tidak populer lagi.

Bagi negara-negara maju dengan masyarakatnya sudah dewasa barangkali ideologi politik bukan lagi menjadi masalah yang perlu dipertimbangkan. Bahkan sejak berakhirnya perang dingin di kawasan Asia Tenggara pada sebagian masyarakat telah terbentuk opini bahwa bahaya laten komunisme tidak perlu dirisaukan lagi.

Berbeda dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia, ideologi masih menjadi persoalan bangsa. Ideologi bahkan kadang diperalat sebagai kendaraan untuk meraih kepentingan dan tujuan politik tertentu. Oleh karena itu adanya opini bahwa kita tidak lagi perlu mencemaskan bahaya laten komunis bagi masyarakat Indonesia, khususnya TNI tentu patut dipertanyakan karena bagaimanapun, kapanpun dan dimanapun TNI bersama Rakyat dituntut untuk selalu memelihara dan meningkatkan kewaspadaan terhadap ideologi komunisme yang mengancam ideologi Pancasila serta kelangsungan hidup negara dan bangsa.

Sikap waspada itu perlu dimiliki oleh setiap individu, perlu dibina serta ditingkatkan demi terwujudnya ketahanan nasional yang mantap. Dengan terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh, kita harapkan mampu meredam berbagai bentuk ancaman terhadap Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945. Dengan selalu berorientasi kepada kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional kita akan lebih peka menghadapi timbulnya setiap gejolak serta mencegah kemungkinan terulangnya peristiwa kelam yang pernah menjadi mala petaka bangsa kita.

Salah satu tragedi akibat dari kekurangwaspadaan kita terhadap ideologi dan gerakan komunis adalah peristiwa pemberontakan kedua kalinya yang dilancarkan oleh PKI pada tahun 1965 atau dikenal dengan G. 30 S/PKI. Dengan merenungkan dan mengambil hikmah serta pelajaran dari rangkaian peristiwa pengkhianatan PKI sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945 dan Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, yang kemudian terulang kembali pada tahun 1965, mudah-mudahan bisa semakin menyadarkan masyarakat Indonesia, khususnya segenap anggota TNI bahwa sampai kini ideologi komunisme terus berkembang, dengan gaya barunya (Neo Komunisme).

Khusus bagi generasi muda yang tidak mengalami kedua peristiwa yang tragis tersebut, perlu memahami sejarah tingkah laku politik PKI dan pengkhianatan PKI dari masa pergerakan nasional hingga tahun 1965 agar lebih peka sehingga mampu mendeteksi setiap gejala awal munculnya bahaya laten komunisme.

Dengan memahami berbagai sepak terjang tingkah laku politik PKI, yang diungkapkan dalam buku ini, diharapkan kita dapat lebih memahami perjalanan sejarah bahwa TNI pernah dimainkan oleh politik, sehingga dalam catatan sejarah TNI pernah terjadi berbagai peristiwa tragis karena adanya intervensi partai Komunis Indonesia. Mudah-mudahan tingkat kepekaan masyarakat Indonesia khususnya anggota TNI terhadap bahaya laten komunis tidak akan pernah lekang dimakan jaman.

Kehadiran kembali buku Komunisme di Indonesia yang merupakan revisi dan cetak ulang terdiri dari lima jilid, buku sejarah ini mengungkapkan adanya upaya-upaya komunis dalam melakukan infiltrasi agar berpihak kepadanya! Adapun judul buku yang direvisi dan cetak ulang tersebut adalah sebagai berikut :

Jilid I : Komunisme di Indonesia, Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948)

Jilid II : Komunisme di Indonesia, Penumpasan Pemberontakan PKI (1948)

Jilid III : Komunisme di Indonesia, Konsolidasi dan infiltrasi PKI (1950 - 1959)

Jilid IV : Komunisme di Indonesia, Pemberontakan G. 30 S/PKI dan Penumpasannya (1960 - 1965).

Jilid V : Komunisme di Indonesia, Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-sisanya (1965 - 1981).

Kami menyadari bahwa tidak ada satupun karya dari tangan manusia yang lahir dalam keadaan sempurna, dan sudah barang tentu, buku "Komunisme di Indonesia" yang telah direvisi dan dicetak ulang ini masih banyak kekurangannya. Untuk menjadi kewajiban kita bersama untuk menyempurnakannya apabila masih ditemui kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan buku ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua.

Jakarta, September 2009
Kepala Pusat Sejarah TNI

KEPALA PUSAT SEJARAH TNI

Pamudjo
Brigadir Jenderal TNI

DARI PENERBIT

Berbicara mengenai sejarah politik Indonesia, tentu kita tidak bias melupakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai mengusung ideologi komunis ini, sepak-terjangnya telah "menghujamkan luka" yang sangat dalam melalui aksi pemberontakannya, Yakni, Pemberontakan PKI Madiun 1948 dan Gerakan 30 September 1965/PKI-dengan tujuan mendirikan Republik Indonesia yang berazaskan Komunisme dan mengganti Dasar Negara Pancasila.

Dokumentasi tertulis dan kesaksian-kesaksian atas gerakan PKI di Indonesia pada saat ini banyak tersedia di banyak pusat-pusat dokumentasi, buku-buku terbitan tokoh-tokoh yang terlibat dan mengetahui peristiwa tersebut, merupakan bagian penting bukti perjalanan sejarah politik Indonesia. Sebab itu, ketika Tim Penulis Pusat Sejarah TNI berkeinginan menerbitkan buku Komunis Di Indonesia melalui **Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB)**, kami menyambut gembira rencana tersebut. Mengingat buku berjudul ***Komunisme Di Indonesia*** yang terdiri dari lima jilid, mampu menghadirkan sejarah Komunisme dengan bukti-bukti otentik sebagai salah satu syarat penulisan sejarah yang obyektif.

Buku ini menjadi sangat penting bagi pemahaman sejarah secara utuh pada masa kini dan masa mendatang. Karena, generasi muda yang memiliki jarak waktu dengan aksi-aksi PKI dan perkembangan Komunisme di Indonesia, akan bisa memahami secara komprehensip, bahwa ideologi komunis, Marxisme/ Leninisme memang tidak bisa diterapkan di Indonesia, yang prulalis namun juga religius. Seperti diketahui, pada masa sekarang banyak tokoh yang terlibat dalam PKI, pemerhati sejarah dan generasi muda, bergerak untuk menghidupkan kembali Komunisme di Indonesia.

Secara khusus kami haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada **Bapak Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso** yang telah meluangkan waktu menulis Kata Sambutan, **Tim Penulis Pusat Sejarah TNI** dan **Bapak Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto)** yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku *Komunisme Di Indonesia* ini. Semoga dengan terbitnya buku *Komunisme Di Indonesia*, bisa bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan negara di masa depan.

Jakarta, September 2009

Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB)

DAFTAR ISI

SAMBUTAN PANGLIMA TNI
KATA PENGANTAR KAPUSJARAH TNI
DARI PENERBIT
DAFTAR ISI V

BAB I
PENDAHULUAN 1

BAB II
SITUASI KONFLIK POLITIK PASCA G30S/PKI 7
1. Usaha-usaha PKI untuk Menyelamatkan Diri 7
2. Sikap Presiden Sukarno mengenai Penyelesaian Politik 12
3. Sikap dan Pendirian ABRI 23
4. Sikap Politisi dan Generasi Muda terhadap Presiden Sukarno 34
5. Surat Perintah 11 Maret 1966 46

BAB III
UPAYA PKI UNTUK MEMBANGUN KEKUATAN KEMBALI 57
1. Kritik Oto Kritik: Tri Panji Partai 57
2. Gerakan PKI illegal di Jawa Tengah 72
3. Gerakan PKI Malam Mbah Suro di Nginggil 75

BAB IV
PEMBERONTAKAN BERSENJATA PKI DI BLITAR SELATAN DAN PENUMPASANNYA 81
1. Perencanaan Pemberontakan Bersenjata 81
2. Persiapan Pemberontakan Bersenjata 84
3. Blitar Selatan sebagai Basis Utama 88

4. Operasi Trisula Menumpas Pemberontakan Bersenjata PKI di Blitar Selatan 101
BAB V
PENYELESAIAN TAHANAN G30S/PKI 117
1. Tindakan Hukum terhadap Tahanan G30S/PKI 117
2. Instalasi Rehabilitasi (Inrehab) Pulau Buru 138

BAB VI
OPERASI TERHADAP SISA-SISA Kekuatan PKI 155
1. Operasi Penangkapan Para Tokoh PKI 155
2. Operasi Terhadap Sisa-sisa PKI di Kalimantan Barat 173
3. Penumpasan Gerakan PKI Malam Iramani di Purwodadi 178

BAB VII
KEGIATAN ILLEGAL SISA-SISA PKI DAN SIMPATISANNYA DI LUAR NEGERI 187
1. Kegiatan Sisa-sisa PKI dan Simpatisannya di Republik Rakyat Cina (RRC) 187
2. Kegiatan Sisa-sisa PKI dan Simpatisannya di Uni Sovyet 192
3. Kegiatan Sisa-sisa PKI dan Simpatisannya di Negara negara Eropa Barat dan Eropa Timur 193
4. Kegiatan Sisa-sisa PKI dan Simpatisannya di beberapa Negara 211

BAB VIII
KEGIATAN SISA-SISA PKI PASCA PULAU BURU DAN TINDAKAN PEMERINTAH 225
1. Heboh Sastra Karya Pramoedya Ananta Toer 225
2. Upaya Mengenalkan Kembali Tokoh-tokoh PKI ke Masyarakat 227

3. Larangan Terhadap Karya-karya Pramoedya Ananta Toer 229
PENUTUP 231
DAFTAR SUMBER 234
INDEKS 239

BAB I
PENDAHULUAN

Kehadiran PKI kembali dalam gelanggang politik nasional setelah melakukan pemberontakan Madiun pada tahun 1948, ditanggapi dengan pelbagai sikap oleh kalangan pemimpin politik Indonesia. Sikap pertama, menganggap bahwa kehadiran PKI dapat dikendalikan. Sikap kedua, ABRI terutama Angkatan Darat, senantiasa bersikap hati-hati, karena pengalaman pahit masa lalu di mana orang-orang PKI menjadikan Angkatan Bersenjata sebagai obyek untuk dipecah belah dan diinfiltrasi ideologi komunis, yang mencapai puncaknya dalam pemberontakan Madiun. Pimpinan Angkatan Bersenjata, terutama mereka yang bertanggung jawab menumpas pemberontakan PKI, senantiasa bersikap waspada terhadap eksistensi dan tingkah laku politiknya yang dinilai membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.

PKI mengetahui, kehadirannya sebagai partai politik mendapat tantangan Angkatan Bersenjata. Mula-mula pimpinan Angkatan Bersenjata diberi predikat "pembela kolonial", kemudian sebagai "kepala batu". Selanjutnya PKI menuduh bahwa pimpinan ABRI bersikap "komunisto phobi" (ketakutan pada komunis). Sejak tahun 1955, tingkah laku politik PKI yang destruktif semakin berkembang pada masa Demokrasi Terpimpin.

Dalam tahun 1964, PKI melancarkan kegiatan politik yang radikal. Secara sistematis melakukan ofensif terhadap lawan-lawan politiknya dengan melempar tuduhan kontra revolusi, anti Pancasila, anti Manipol yang dibarengi dengan aksi-aksi massa, seperti aksi sepihak, demonstrasi, dan aksi corat-coret yang dilakukan oleh kader dan aktivis PKI. BTI memaksakan pembagian tanah milik orang lain, atau menuntut bagi hasil garapan yang tidak wajar.

Sikap radikal PKI sampai kepada puncaknya pada tanggal 30 September 1965. Dengan Gerakan 30 September 1965 atau G30S/PKI, PKI berusaha merebut kekuasaan negara (kudeta). Kudeta

ini mengalami kegagalan, dan peristiwa itulah yang mengantarkan PKI menuju keruntuhannya. Selanjutnya pada 12 Maret 1966, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh Indonesia.

Gerakan 30 September/PKI berhasil ditumpas oleh ABRI bersama rakyat. Kemudian tokoh-tokoh PKI mengadakan semacam mawas diri. Sudisman, anggota Dewan Harian CC PKI menulis *Kritik Oto Kritik (KOK)*, di mana ia mengeritik G30S sebagai "petualangan" dan "avonturisme militer" D.N. Aidit. Dia menganjurkan dilakukan konsolidasi partai, walaupun tanpa membentuknya kembali secara formal. Dalam KOK disebutkan jalan keluar bagi PKI untuk kembali membangun partai. "Jalan keluar" ini merupakan strategi baru PKI yang dikenal dengan nama "Tri Panji" 1965 yaitu pembangunan kembali partai, perjuangan bersenjata di bawah pimpinan klas buruh, dan front persatuan revolusioner atas dasar persekutuan klas buruh dan tani di bawah pimpinan buruh.

Setelah Sudisman tertangkap, Ketua CC PKI baru Ruslan Widjajasastra menerapkan "perjuangan" dengan menitik beratkan panji kedua yaitu Perjuangan Tani Bersenjata dengan memilih Blitar Selatan sebagai Basis Revolusi (Basrev).

Upaya "come back" PKI melalui gerakan pemberontakan bersenjata di Blitar Selatan berhasil ditumpas pada 1970, dan disusul dengan penangkapan tokoh-tokoh dan kadernya. Sejak itu, gerakan komunis berubah menjadi laten.

Dengan tidak terlihatnya secara fisik gerakan kaum komunis bukan berarti gerakan itu tidak ada. Sifatnya laten, mengendap, membeku menunggu momentum yang menguntungkannya tiba, untuk kemudian bergerak kembali ke permukaan (manifes). Aksi yang mungkin memberikan kesempatan tersebut adalah aksi impulsif dan emosional dari kelompok-kelompok ekstrim dalam masyarakat kita. Oleh karena PKI sejak awal telah menerapkan dua bentuk keanggotaan, yaitu yang tercatat dan yang tidak, maka kader-kader inti mereka yang disebut sebagai *Fraksi F* disiapkan untuk melanjutkan aksi dan aktivitasnya. Aktivitas dan aksi-aksi PKI, pasca 1966, dapat juga berasal dari tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia yang masih

hidup di luar negeri, umumnya di Eropa Barat. Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, mereka ini melancarkan "serangan" ideologis terhadap Pancasila dan UUD 1945, serta serangan politis terhadap pemerintah Orde Baru.

Hasil penelitian mental ideologis dan psikologis yang dilakukan ABRI terhadap tokoh-tokoh PKI bekas tahanan Pulau Buru menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka masih menganut garis keras (diehard). Kadar keyakinannya masih tinggi. Mereka memiliki potensi dan kemampuan untuk menyebarluaskan kembali ajaran komunisme, dalam bentuk-bentuk yang lebih subtil.

Masa penahanan di Pulau Buru, ada yang memanfaatkan sebagai "sekolah partai" untuk memantapkan kader. Namun kenyataan yang dihadapi sesudah pembebasan mereka adalah situasi baru, dan masyarakat baru. Pada awal dasawarsa '80, gerakan mereka dimulai dengan gerakan karya intelektual, karya sastra, karya sejarah dan pengagungan tokoh PKI yang belum dikenal oleh masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh komunis Rusia dan Cina pada awal gerakannya. Dari gerakan karya intelektual, kita bisa mewaspadai gerakan-gerakan selanjutnya. Karya intelektual mereka dipelopori oleh Pramoedya Ananta Toer. Pramoedya adalah seorang ideolog dan intelektual komunis, sekaligus sastrawan. Sebagai persembahannya kepada HUT PKI ke-40, pada bulan Mei 1965, ia menulis buku yang berjudul *Persembahan Untuk Partai.* Setelah dibebaskan dari Pulau Buru, ia menerbitkan karya sastranya yang dibuat di Pulau Buru. Pilihan tema sastra ini bukanlah tema yang dipilih secara pribadi, melainkan tema yang dirancang dan dipilih secara kolektif oleh kelompoknya. Karya itu kemudian diberi judul *Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah* dan *Rumah Kaca.* Karya sastra ini dapat dinilai sebagai upaya pengenalan kembali atau perkenalan terhadap "kehebatan orang komunis". Setelah karya-karya Pramoedya terbit, disusul dengan karya-karya yang lain seperti S.I. Puradisastra (Buyung Saleh) seorang sastrawan tokoh Lekra, pendiri PKI pada tahun 1946, K. Werdoyo tokoh buruh komunis yang menyusup ke Partindo, Oei Tjoe Tat wartawan komunis, dan Bakri Siregar, pemimpin Lekra.

Tulisan yang mereka buat bukan lagi karya sastra melainkan karya politik. Kemudian menyusul karya-karya "sejarah" dan biografi tokoh-tokoh komunis. Beberapa artikel lolos dan dimuat dalam media massa surat kabar dan majalah, sebagai upaya untuk setahap demi setahap memperkenalkan pemimpin komunis, dan dengan tema "mengajak" pembaca untuk menafsirkan kembali (reinterprestasi) sejarah.

Bagi generasi muda Indonesia yang lahir setelah tahun 1965, tidak mengetahui secara pribadi hakekat ancaman komunisme, tidak mengenal komunisme, dan tidak mengenal tingkah laku politiknya. Generasi ini memang terbebas dari pengaruh ajaran komunis. Namun, mereka tidak tertutup kemungkinan untuk terpengaruh dan dipengaruhi, karena penyebaran ajaran komunis masih dimungkinkan melalui jalur non komunis. Tanpa dibekali dengan pengertian mendasar tentang kewaspadaan terhadap ancaman bahaya komunisme global ini, generasi muda kita tanpa disadarinya bisa terjerat ikut menyebarkan pikiran-pikiran komunis. Menurut pandangan orang komunis, mereka itu sebagai *nuttige idioten* (orang awam yang berguna).

Pancasila pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia memiliki keunggulan-keunggulan bila dihadapkan dengan komunisme. *Pertama,* Pancasila adalah pandangan hidup yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang wajib percaya dan menyembahNya. Ajaran komunis mengingkari adanya Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan (atheis). Tuhan dianggap sebagai khayalan manusia, ciptaan manusia karena manusia tidak bisa memecahkan persoalan hidupnya. Agama adalah candu bagi manusia. *Kedua,* pandangan hidup Pancasila menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, persatuan, kesatuan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Sebaliknya, komunisme sejak awal menyatakan bahwa umat manusia terdiri atas golongan-golongan atau kelas-kelas yang berbeda dalam masyarakat yang saling berlawanan, kelas penindas dan kelas tertindas. Kelas buruh terbukti hanya bisa ditegakkan dengan bujukan, tipuan, aksi kekerasan, intrik, dijunjung tinggi, dipuji sebagai kelas yang tertindas dan terhisap, karena itu kelas ini merupakan soko gurunya revolusi komunis dan intimidasi

atau konflik terhadap golongan lain. Bahkan terhadap buruh pun yang secara teoritis, dianggap kelas pendukungnya. *Ketiga*, Pancasila bersifat akomodatif, sedangkan Komunisme bersifat agresif. *Keempat*, Pancasila sebagaimana dijabarkan dalam UUD 1945 menganut sistem pemerintahan demokratis berdasarkan kebijaksanaan musyawarah dan mufakat. Komunisme hanya mengenal sentralisme demokrasi yang memusatkan kekuasaan pada perorangan (individu). Kekuatan Komunisme, seperti dikatakan Lenin, terletak pada keunggulannya dalam mengalahkan lawan-lawannya serta kekuatan agitasi dan propagandanya. Dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945, Presiden adalah pimpinan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat dan selanjutnya bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di dalam Majelis itu seluruh rakyat Indonesia terwakili.[1] *Kelima*, Pancasila itu diamalkan melalui pembangunan nasional, dalam empat bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan demikian, tidak ada lagi bidang tersisa yang dapat dijanjikan oleh komunis.

Dengan mendalami nilai-nilai luhur Pancasila, tentu kita semakin sadar dan yakin akan keunggulan Pancasila terhadap komunisme. Hal ini merupakan modal utama untuk menangkal bahaya laten komunisme. Sekalipun demikian, kita harus tetap waspada terhadap segala kemungkinan ancamannya.

> Salah satu tuntuan Reformasi 1998 adalah di lakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Perubahan (amandemen) UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensil.
>
> Dalam kurun waktu 1999 - 2002, UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR. Sidang umum MPR 1999 perubahan pertama, Sidang Tahunan MPR 2000 Perubahan kedua, Sidang Tahunan MPR 2001 Perubahan ketiga dan Sidang Tahunan MPR 2002 Perubahan keempat.

---

1. Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, *www.id.wikipedia.org, advokasi*, maret 2008 hal. 6

BAB II
SITUASI KONFLIK POLITIK PASCA G30S/PKI

1. Usaha-usaha PKI untuk Menyelamatkan Diri

Sejak Partai Komunis Indonesia (PKI) gagal melakukan kudeta pada tanggal 1 Oktober 1965, posisi PKI semakin sulit. Pada hari-hari berikutnya sejak tanggal 2 Oktober 1965, keadaan PKI mengalami krisis. D.N. Aidit yang merasa dirinya kurang aman di ibukota (Jakarta) menyingkir ke Jawa Tengah bersama-sama M.H. Lukman, sedang Njoto masih berada di Sumatra Utara bersama-sama dengan rombongan Dr. Subandrio.

Satu-satunya pucuk pimpinan Commite Central (CC) PKI yang berada di Jakarta tinggal Sudisman, tetapi ia tidak dapat mengambil keputusan untuk menyelamatkan partainya. Massa PKI yang sebenarnya masih utuh, bersikap pasif, karena mereka masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pucuk pimpinan CC PKI. Sedang mereka harus menghadapi situasi yang sangat gawat, tanpa ada pegangan dari pimpinan partai, padahal golongan-golongan yang anti PKI sudah mulai bergerak.

Sesudah mengantar Aidit pada pukul 01.00 malam, Sjam kembali ke Central Commando (Cenko). Kira-kira pukul 01.30 malam, ia bersama-sama Brigjen Supardjo berangkat ke Pondok Gede. Di sana keduanya mengadakan pertemuan dengan Letkol Untung, Kolonel Latief dan Mayor Udara Sujono untuk membicarakan tentang kelanjutan Gerakan 30 September. Setelah diadakan peninjauan, mereka sampai pada penilaian bahwa mustahil dapat melanjutkan gerakan. Kalau pun dilanjutkan belum ada gambaran tentang bentuk dan sifat garakan itu. Akhirnya diambil suatu kesimpulan, bahwa gerakan itu harus dihentikan.

Pada tanggal 2 Oktober 1965 tengah hari, Sjam bersama dengan Brigjen Supardjo meninggalkan Pondok Gede menuju rumah Pono. Di sana mereka membicarakan tentang bagaimana menyelamatkan

Brigjen Supardjo. Akhirnya diputuskan penyelamatan Brigjen Supardjo diserahkan kepada Wandi.

Gagalnya Gerakan 30 September/PKI, membawa pengaruh yang sangat luas dalam percaturan politik di Indonesia. Konflik politik segera timbul ke permukaan, di mana rakyat menuduh bahwa PKI adalah dalang dan pelaku dari peristiwa ini. Berbagai tuntutan datang dari kalangan masyarakat agar Presiden Sukarno segera mengambil tindakan tegas untuk membubarkan PKI, karena PKI dianggap telah melakukan pembunuhan di luar batas-batas kemanusiaan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat.

Berhasilnya ABRI di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto menguasai Halim, basis Gerakan 30 September/PKI membuktikan bahwa baik secara politis maupun militer gerakan G30S/PKI telah gagal. Selanjutnya operasi-operasi dijalankan di daerah-daerah lebih ditujukan kepada bentuk operasi pemulihan keamanan dan ketertiban. Penumpasan dan pembersihan terhadap sisa-sisa PKI.

Dalam mengatasi keadaan pasca Gerakan 30 September, Presiden Sukarno berusaha menenangkan keadaan. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Presiden dalam pidatonya melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta yang disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia menyatakan "telah memanggil semua Panglima ABRI bersama-sama Wakil Perdana Menteri (Waperdam II) Dr. Leimena dan pejabat penting Negara dengan maksud segera menyelesaikan apa yang disebut dengan peristiwa Gerakan 30 September". Selanjutnya Presiden mengatakan : "untuk dapat menyelesaikan persoalan ini, telah diperintahkan supaya tetap tenang dan tertib dan untuk itu perlu dihindarkan kemungkinan bentrokan senjata. Dalam tekad dan perjuangan bangsa Indonesia dewasa ini, saya perintahkan untuk tetap mempertinggi kesiapsiagaan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Dwikora-kepada seluruh rakyat Indonesia, saya serukan tetap tinggal tenang dan kepada semua Menteri dan petugas negara lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya sediakala.

Pimpinan Angkatan Darat dewasa ini langsung di bawah tanggung jawab saya dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat sementara saya tunjuk Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro Asisten III Men/Pangad.

Untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang tersangkut dengan Gerakan 30 September, telah saya tunjuk Mayor Jenderal Soeharto Panglima Komando Strategis "Tjadangan Angkatan Darat (Kostrad) sesuai dengan kebijaksanaan yang saya gariskan".[1]

Sementara itu para pemimpin PKI dan tokoh-tokoh peristiwa G30S semakin kehilangan kepercayaan terhadap diri mereka. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari penangkapan pihak yang berwajib. Pada tanggal 3 Oktober 1965, Pono dan Sjam pergi ke rumah Sudisman di Kayu Awet Rawasari untuk melaporkan, bahwa gerakan telah gagal. Dalam pertemuan itu diambil kesimpulan perlawanan di Jakarta tidak mungkin lagi, kemudian sebagai tindak lanjutnya, Pono ditugasi oleh Sudisman ke Jawa Tengah untuk memberikan laporan kepada D.N. Aidit. Laporan itu pada intinya bahwa Gerakan 30 September telah mengalami kegagalan dan tidak mungkin lagi dilanjutkan.

Setelah mendapat laporan dari Pono di tempat pelariannya di Jawa Tengah, D.N. Aidit kemudian menggariskan kebijaksanaan baru. M.H. Lukman diperintahkan untuk memperjuangkannya di Jakarta. Di Jakarta, M.H. Lukman menemui Njoto, Sudisman, dan dalam pertemuan itu kebijaksanaan yang digariskan oleh D.N. Aidit diolah bersama-sama. Hasilnya ialah dikeluarkannya sebuah statement CC PKI pada tanggal 5 Oktober 1965, yang isi pokoknya menyatakan bahwa :

- PKI tidak ikut campur tangan dalam Gerakan 30 September.
- PKI tidak tahu-menahu tentang anggota-anggota PKI yang tercantum namanya dalam Dewan Revolusi.
- Mendukung penyelesaian secara politis, seperti yang telah digariskan oleh Presiden Sukarno.

---

1. *Berita Yudha*, 24 Oktober 1965

Statement CC PKI ini walaupun tidak meluas, tetapi sempat disiarkan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Denpasar. Dari isi pernyataan tersebut pimpinan PKI telah menggunakan alternatif cuci tangan sesuai dengan rencana yang disusun sebelumnya. Dengan tindakan demikian, seolah-olah tanggung jawab gerakan itu dilimpahkan kepada Letkol Untung cs atau dengan kata lain gerakan itu adalah gerakan intern Angkatan Darat. Nampaknya PKI berusaha melepaskan keterlibatannya, serta beralih ke perjuangan politik dengan menyandarkan diri kepada Presiden Sukarno, karena kewibawaan dan pengaruh politik beliau masih kuat pada waktu itu. Di samping itu, sebagai pencetus ide Nasakom, PKI mengharapkan Presiden Sukarno dapat mempertahankan keberadaan komunisme (dalam hal ini PKI).

Pada tanggal 4 Oktober 1965, Pono yang ditugasi oleh Sudisman pergi ke Jawa Tengah, kembali ke Jakarta dengan membawa pesan dari D.N. Aidit. Pesan itu berisi supaya Sjam menyelamatkan diri dan jangan putus asa serta melanjutkan perjuangan partai. Di samping itu, D.N. Aidit mengirim instruksi melalui M.H. Lukman agar berupaya sedapat mungkin jangan sampai PKI dibubarkan.

Pada tanggal 5 Oktober 1965, Sjam pergi ke rumah Bono alias Walujo. Selanjutnya tanggal 6 Oktober 1965, Sjam bersama-sama dengan Pono dan Hamim mengadakan pembicaraan untuk mengadakan pembagian daerah dalam rangka menyelamatkan diri dan melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Dalam pertemuan itu diputuskan Sjam *ditugasi* ke Jawa Barat, Pono dan Bono alias Walujo ke Jawa Tengah, sedangkan Hamim, Sujono Pradigdo dan Wandi serta *Oloan Hutapea* tetap berada di Jakarta. Hal itu dilakukan karena tidak mungkin tetap berkumpul bersama-sama di Jakarta. Sesuai dengan keputusan tersebut, Syam pada tanggal 9 Oktober 1965 pergi ke Bandung (Jawa Barat), di sana ia berusaha memulihkan kembali kekuatan PKI dengan jalan mencari kader-kader partai di kalangan anak muda untuk dijadikan koordinator dalam melakukan aktivitas PKI khususnya di daerah Bandung (Jawa Barat).

Dalam menghadapi situasi yang demikian, D.N. Aidit berusaha melakukan pendekatan kepada Presiden Sukarno, agar PKI terhindar dari pembubaran. Dari Solo, Aidit tiga kali mengirimkan surat kepada Presiden Sukarno. Surat pertama dibawa oleh Bono alias Walujo, yang mengatakan bahwa D.N. Aidit tidak bisa menghadiri sidang paripurna kabinet tanggal 6 Oktober 1965 di Bogor, karena tidak ada pesawat terbang. Ia menyatakan bahwa keadaan di Jawa Tengah sudah berbalik. ABRI mulai menangkapi anggota-anggota PKI. Isi surat itu juga disertai saran-saran bagaimana seharusnya Presiden Sukarno menyelesaikan persoalan untuk mencegah berlangsungnya bentrokan massa. Bagi mereka yang langsung terlibat G30S/PKI, supaya Presiden Sukarno langsung menyelesaikannya secara politis. Saran ini mempunyai maksud untuk menyelamatkan legalitas PKI.

Pada tanggal 6 Oktober 1965 itu, D.N. Aidit menulis surat kepada Presiden Sukarno, antara lain meminta agar Presiden Sukarno mengeluarkan keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

a. Penyelesaian Dewan Jenderal dan G30S sepenuhnya berada di tangan Presiden/Pangti ABRI.
b. Untuk itu diperlukan larangan untuk mengeluarkan pernyataan yang bersifat mengutuk Dewan Jenderal maupun G30S.
c. Semua alat revolusi terutama ABRI, Orpol/Ormas dan korban supaya bekerja seperti sebelum G30S.
d. Masalah keamanan supaya dikembalikan kepada AKRI dengan bantuan Front Nasional.
e. Kepada alat revolusi supaya berkompetisi melaksanakan lima azimat revolusi.
f. Dilarang tuduh-menuduh dan salah-menyalahkan[2]

---

2. DR. A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 6, Masa Kebangkitan Orde Baru*, hal.304

Sebaliknya D.N. Aidit telah menerima 2 (dua) pucuk surat dari Presiden Sukarno yang kepala suratnya memakai lambang kepresidenan. Isinya sebagai berikut :

"Surat saudara sudah saya terima, mengenai saran-saran yang saudara ajukan sangat saya perhatikan. Sementara ini saya belum dapat mengadakan pidato-pidato yang garis-garisnya sesuai dengan saran-saran saudara. Saya waktu ini membuat pidato-pidato secara umum sementara itu saya akan mengusahakan untuk merobah pikiran para Jenderal dan Panglima untuk tidak hanya memikirkan tugas menumpas G30S saja. Mengingat situasi, memang saudara tidak dapat lagi di Solo lebih lama. Jadi harus menyingkir dan selekasnya kembali ke Jakarta. Selanjutnya laporan-laporan saudara yang lain akan saya perhatikan benar-benar.[3]

2. Sikap Presiden Sukarno mengenai Penyelesaian Politik

Dalam upaya mengatasi keadaan krisis akibat Peristiwa Kudeta G30S/PKI, sikap dan pendirian Presiden Sukarno dapat kita ikuti dari sejumlah pidato dan komandonya. Pada tanggal 6 Oktober 1965, Presiden Sukarno memanggil sidang paripurna Kabinet Dwikora di Bogor. Pada sidang itu Presiden tidak secara tegas menyalahkan Gerakan 30 September yang didalangi PKI, namun selaku Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi ia menandaskan : mengutuk pembunuhan-pembunuhan buas yang dilakukan oleh petualang-petualang kontra revolusioner dari apa yang menamakan dirinya "Gerakan 30 September". Kepada rakyat diingatkan agar tidak membesarkan peristiwa G30S itu sebab menurut Presiden kejadian itu hanya sekedar *een rimpeljte in de oceaan* (suatu riak kecil pada permukaan sebuah samudra).

Dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora di Bogor Presiden Sukarno menegaskan pendiriannya, sebagai berikut :

a. Mengutuk pembunuhan buas terhadap para perwira Angkatan Darat yang telah diangkat sebagai pahlawan revolusi,

3. *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI)*, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Jakarta, 1978, hal.193

b. Menyatakan segala duka atas hilangnya pahlawan revolusi tersebut.
c. Tidak membenarkan pembentukan Dewan Revolusi.
d. Dibutuhkan suasana tenang dan tertib untuk mengambil tindakan seperlunya terhadap oknum-oknum dan semua pihak yang ikut serta dalam peristiwa 30 September dan untuk mencari penyelesaian.
e. Di samping itu agar supaya kita jangan kehilangan akal dan tidak tahu apa yang harus kita perbuat untuk melanjutkan dan menyelamatkan revolusi khususnya terhadap ancaman Nekolim yang sudah tentu akan dilaksanakan jika revolusi Indonesia menjadi kacau balau.
f. Untuk itu Presiden menegaskan agar jangan kita dikemudikan oleh peranan perorangan oleh tindakan-tindakan yang membikin kehidupan bangsa terpecah-pecah membikin Angkatan Bersenjata kita terpecah belah. Ini memang yang dikcheridaki dan ditunggu-tunggu oleh Nekolim. Pelajaran dari masa lampau ialah bahwa gontok-gontokan antara kita selalu diikuti oleh serangan dari pihak Nekolim.

Kemudian, Presiden menyerukan agar ABRI kompak menghadapi masalah yang sudah dekat hidung kita. Para menteri diminta tetap menjalankan tugasnya sehari-hari dan memperkuat ketahanan revolusi. Dalam sidang itu, Laksamana Omar Dhani melaporkan telah menahan sejumlah sukarelawan (sukwan/sukarelawati) di Halim Perdanakusuma yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September.[4]

Njoto, salah seorang pimpinan PKI yang menghadiri sidang paripurna kabinet tersebut, memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuci tangan keterlibatan PKI dalam Gerakan 30 September sesuai dengan instruksi D.N. Aidit.

Dari sidang paripurna kabinet itu semakin tersingkap fakta, bahwa PKI adalah dalang G30S. Sementara itu masyarakat yang pernah diteror oleh PKI, melampiaskan kemarahannya dengan aksi-aksi

4. *Berita Yudha*, 7 Oktober 1966

pembakaran dan pengrusakan Gedung Kantor CC PKI di Jalan Kramat Raya Jakarta, rumah-rumah tokoh PKI dan kantornya menjadi sasaran kemarahan rakyat. Aksi corat-coret yang menuntut supaya pimpinan PKI diadili, disusul dengan aksi-aksi menuntut pembubaran PKI, pembersihan semua aparat atau lembaga pemerintah atau negara dari unsur-unsur G30S/PKI.

Dalam situasi yang demikian, Presiden Sukarno masih belum menanggapi tuntutan rakyat itu. Bahkan dalam sidang Konferensi Anti Pangkalan Militer Asing (KIAPMA) bulan Oktober 1965, hadir pula M.H. Lukman. Kehadiran Lukman ini untuk menunjukkan seolah-olah PKI tidak ada sangkut-pautnya dengan Gerakan 30 September. Kehadiran tokoh-tokoh partai PKI ini sesuai dengan garis kebijaksanaan pimpinan partai, yang telah menginstruksikan kepada Comite Daerah Besar agar para kader bekerja seperti biasa.

Untuk penyelesaian G30S/PKI itu, nampaknya pendapat, sikap dan pendirian Presiden Sukarno sejalan dengan gagasan dan saran D.N. Aidit. Hal ini dapat dilihat dari kebijaksanaan Presiden Sukarno yang tidak memperhatikan atau mengabaikan tuntutan rakyat. Pada tanggal 21 Oktober 1965, Presiden mengeluarkan komando yang pada pokoknya agar semua pihak tenang, bersatu, dan menjauhkan diri dari fitnah-fitnah antara sesama kekuatan revolusi untuk dapat menanggulangi Neo Kolonialisme (Nekolim) dengan siasat subversifnya. Dengan demikian ada usaha-usaha Presiden untuk dengan sadar menanggapi peristiwa G30S/PKI.

Sementara itu, dalam menanggapi aksi-aksi massa yang menuntut pembubaran PKI, Presiden Sukarno dalam rapat Panca Tunggal seluruh Indonesia tanggal 23 Oktober 1965 kembali menegaskan : "Nasakom adalah perlu dan mutlak untuk revolusi Indonesia. PKI adalah unsur Nasakom". Kemudian Presiden Sukarno menyatakan, "di dalam amanat saya terhadap sidang kabinet paripurna Dwikora, dalam wawancara saya dengan wartawan asing dan pidato saya tatkala saya melantik Mayor Jenderal Soeharto menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat, saya tegaskan bahwa kejadian 30 September adalah *"met alles wat er mee samen gaat"*, itu ada yang mendahului, ada yang pada saatnya ada yang komtena proloognya. Faktanya 30

September kemudian *de nasleep* bahwa itu semua adalah boleh dikatakan suatu hal yang biasa, yang normal di dalam revolusi".

Selanjutnya Presiden berkata, "Kita bukan saja menyembuhkan revolusi ini dari pada semua penyakit. Saudara saya minta tangkap perkataan saya,, "penyakit", yaitu berarti bahwa saya tidak membenarkan kejadian peristiwa 30 September. Itu adalah suatu kejadian penyakit. Tetapi dalam amanat saya, saya berkata segala itu sebenarnya adalah yang mengenai 30 September, mengenai yang lain, adalah suatu hal yang dijumpai dalam revolusi. Kemudian seperti yang saya katakan pada waktu melantik Mayor Jenderal Soeharto, peristiwa 30 September sekedar satu goncangan air dalam sungai yang besar yang maha dahsyat turun dari gunung ke samudra raya. Saya pernah memakai perkataan *rimpel.* Rimpel dalam de oceaan *van de revolutie.* Rimpel dalam oceaan inilah kadang-kadang lebih besar daripada istana ini. Tetapi vergeleken met de oceaan, maka goncangan itu sebetulnya sekedar satu *rimpel (tiak).*[5]

Kemudian Presiden menegaskan : "Pendek kata kita harus menjaga revolusi ini, kita harus betul-betul hati-hati. Panca Azimat Revolusi pegang teguh. He, orang-orang Panca Tunggal, Panca Azimat, nomor satu adalah Nasakom, kemudian Pancasila, Trisakti Tavip, Usdek, Manipol".

Sementara itu beberapa partai politik dan organisasi massa telah melihat gelagat Presiden Sukarno enggan membubarkan PKI, mereka membentuk Komando Aksi Pengganyangan Kontra Revolusioner , pada tanggal 23 Oktober 1965, yang terdiri atas NU, IPKI, Partai Katholik, PSII, dan PNI Osa-Osep serta ormas-ormas anti komunis seperti Muhammadiyah, Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI). Kemudian Komando ini berubah menjadi Front Pancasila dan mulai melakukan aksi-aksi menuntut pembubaran PKI serta membantu ABRI di dalam memulihkan keamanan dan ketertiban. Lahirnya Front Pancasila nampaknya mengilhami para mahasiswa untuk menghimpun diri. Pada tanggal 25 Oktober

5. *Kompas*, 30 Oktober 1965, dibandingkan dengan samudra goncangan itu sebetulnya sekedar satu riak.

1965, lahirlah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang diprakarsai oleh Brigjen Sjarif Thayeb, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu pengetahuan (PTIP). KAMI kemudian berkembang menjadi pelopor pendobrak tata kehidupan lama ke arah tata kehidupan baru yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Aksi dalam perjuangan spontan ini selanjutnya merangsang berbagai golongan masyarakat untuk bersama-sama berjuang menegakkan tatanan kehidupan baru berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga terbentuklah berbagai kesatuan-kesatuan aksi. Dalam hubungan ini lahirlah Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), bahkan muncul persatuan tukang becak yang bernama Kesatuan Aksi Buruh Becak Indonesia (KABBI).

Untuk mengalihkan sasaran utama tuntutan rakyat, yaitu pembubaran PKI, Presiden Sukarno selalu menyatakan bahwa musuh utama bangsa Indonesia ialah Neokolonialisme-imperialisme (Nekolim) dan subversif asing. Dalam pertemuannya dengan wakil-wakil partai politik, PNI, NU, PSII, Perti, IP-KI, Partai Katholik dan partai-partai dan ormas-ormas yang menuntut pembubaran PKI akan ikut dibubarkan bersama PKI. Dalam pertemuan itu Presiden Sukarno menyampaikan amanat tertulis antara lain mengatakan, "bahwa revolusi kita adalah revolusi kiri. "Kiri karena apa? Pancasila *of zichzelf is al kiri*. Pancasila itu kiri. Apalagi kalau kita perhatikan dari Pancasila, maka dengan tegas dan jelas saya katakan bahwa revolusi kiri. Tetapi saya melihat sebagai *epiloog* daripada kejadian 30 September itu. Kalau kita tidak waspada revolusi ini akan bergeser ke kanan. Dan kalau revolusi kita bergeser ke kanan, maka saya berkata itulah mala petaka yang sebesar-besarnya".[6]

Menanggapi amanat Presiden Sukarno tersebut, pada tanggal 29 Oktober 1965 wakil-wakil partai politikmengeluarkan pernyataan sebagai berikut :

---

6. *Kompas*, 27 Oktober 1965

a. Menyambut dengan rasa penuh tanggung jawab, kepatuhan dan kesetiaan amanat Paduka Yang Mulia (PYM) Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang disampaikan di dalam sidang musyawarah partai-partai politik pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 1965 di istana Jakarta.
b. Menjadikan amanat tersebut sebagai pegangan dan pedoman kita di dalam membantu PYM Presiden/ Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno menyelesaikan peristiwa kontra revolusi Gerakan 30 September, dalam suasana ketenangan dan ketertiban.
c. Bertekad bulat untuk menghindarkan hal-hal yang dapat memberi kesempatan atau alasan kepada Nekolim untuk memecah belah kesatuan dan persatuan nasional progresif revolusioner serta persatuan antara kami dengan Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan ABRI.
d. Tetap bertekad bulat untuk menyelamatkan revolusi nasional Indonesia yang bersendikan Pancasila dan menentang segala usaha dari kontra revolusi dan Nekolim yang berusaha membelokkan haluan revolusi.
e. Menyerahkan dan mempercayakan sebulat-bulatnya kepada PYM Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Penyambung lidah rakyat Bung Karno penyelesaian peristiwa kontra revolusi Gerakan 30 September secara menyeluruh sesuai dengan rasa keadilan dan rasa tanggung jawab beliau kepada bangsa, negara dan revolusi terutama kepada Tuhan Yang Esa sekarang dan di hari kemudian.

Pernyataan ini ditandatangani oleh wakil-wakil dari NU, KH. Sjaichu; PNI, Ali Sastroamidjojo SH, IP-KI, Ratu Aminah Hidayat, PSII, Harsono Tjokroaminoto, Parkindo, JTC Simorangkir SH, Partai Katholik, FC. Palaunsoeka, Perti, Mardjohan.[7]

---

7. *Kompas*, 30 November 1965

Untuk mengantisipasi keadaan ini, Presiden Sukarno pada tanggal 6 November 1965 kembali mengadakan sidang Paripurna Kabinet Dwikora di Bogor. Sidang Kabinet tersebut merupakan sidang kabinet paripurna yang kedua sejak meletusnya G30S/PKI. Pada sidang ini dibahas perkembangan situasi terakhir baik di dalam maupun di luar negeri. Sidang ini dihadiri oleh 85 menteri. Para Menteri Koordinator (Menko) dan Menteri yang tidak hadir di antaranya Menko/Wakil Ketua MPRS D.N. Aidit, Menko Hankam/Kasab Jenderal Nasution, Menteri/Ketua DPR-GR Arudji Kartawinata, Menteri Fatah Jasin, Menteri/Panglima Angkatan Udara Omar Dhani, Menteri Brigjen M.Jusuf, Menteri Pardede dan Menteri David Cheng, Menteri Negara M.H. Lukman.

Presiden Sukarno dalam Sidang Paripurna Kabinet tersebut mengulangi seruannya bahwa perlu situasi tenang agar dapat diadakan segera penyelesaian politik. Presiden mengakui bahwa revolusi kita mundur delapan tahun karena kejadian G30S. Karena itu, kita harus menyusun kembali revolusi. Dalam sidang paripurna kabinet itu juga, Presiden menyatakan kepada Menteri Njoto yang merupakan orang ketiga dalam PKI bahwa *"kamulah yang bodoh, yang melaksanakan kejadian terkutuk ini, dan kejadian inilah yang mencemarkan nama komunis. Ini adalah penyakit kanak-kanak. Penyakit kanak-kanak ini bukan untuk pertama kalinya dilaksanakan, juga golongan nasionalis pernah juga melaksanakan. Juga golongan agama pernah melaksanakannya dan sekarang golongan kiri melaksanakan untuk kedua kalinya"*.

Dalam sidang paripurna kabinet itu, Presiden Sukarno juga menyatakan bahwa peristiwa G30S itu terkutuk, dia juga mencela Dewan Revolusi yang mendemisionerkan Kabinet Dwikora. Selain itu G30S ditunggangi oleh golongan-golongan partai yang mencari keuntungan untuk golongannya, juga oleh Nekolim, serta subversif asing mempergunakan kesempatan ini. Presiden merasa, bahwa peristiwa G30S dipergunakan oleh golongan-golongan itu untuk membelokkan revolusi kita ke kanan. Ini lebih berbahaya karena menjadi musuhnya revolusi kita. Kemudian Presiden Sukarno

memerintahkan kepada Menteri Penerangan untuk mengambil tindakan terhadap pers yang menyimpang dari garis revolusi.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Sukarno sekali lagi menegaskan tentang falsafah negara dan revolusi kita. Revolusi kita adalah kiri, revolusi kerakyatan yang berdasarkan aliran-aliran dan cita-cita rakyat yaitu aliran Nasionalis, Agama, dan Keadilan sosial atau sosialisme. Sosialisme bukanlah komunis atau PKI saja, tetapi sosialisme adalah cita-cita keadilan rakyat, dan sosialisme Indonesia bukanlah terbatas pada komunisme.[8]

Tiga hari setelah pernyataan Presiden dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora itu, dimana suhu politik yang semakin memanas, pada tanggal 9 November 1965 Komando Aksi Pengganyangan Kontra Revolusi mengeluarkan pernyataan kebulatan tekad.

a. Menyatakan setia kepada Bung Karno.
b. Menuntut pembubaran PKI.
c. Bersihkan golongan plin-plan.

Pendirian Presiden Sukarno mengenai Nasakom sebagai alat pemersatu bangsa, tetap dipertahankan sampai pasca Gerakan 30 September/PKI, dan dinyatakan dalam pelbagai kesempatan acara kenegaraan. Dalam peringatan Hari Pahlawan 10 November 1965 di Istana Negara, ia belum menjawab tuntutan partai-partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat (parpol/ormas) progresif revolusioner supaya Presiden segera membubarkan PKI serta ormas-ormasnya yang mendalangi peristiwa Gerakan 30 September. Presiden Sukarno hanya mengatakan "saya akan pikirkan hal itu" dan mengatakan bahwa dalam menyelesaikan peristiwa Gerakan 30 September ia tetap akan memegang teguh ide Nasakom. Ide Nasakom adalah roman muka revolusi Indonesia dan "peristiwa Gerakan 30 September" yang terkutuk itu telah merugikan revolusi Indonesia. "Saya tetap tahu apa yang harus diperbuat atau terhadap orang-orang yang tersangkut Gerakan 30 September ini, tetapi supaya kita awas, jangan sampai bangsa ini terpecah belah.

8. *Sinar Harapan*, 8 November 1965

Di *sini* ada pengejaran dan yang dikejar-kejar bukannya PKI, tetapi juga yang lain. Revolusi kita adalah revolusi kiri, revolusi Ampera. Lihat bangsa lain kalau kena cobaan, seperti Peristiwa 30 September maka tatkala itu sudah gugur, collapse. Tetapi bangsa Indonesia tetap tegak, menteles. Bangsa Indonesia tetap kuat tidak remuk redam karenanya. Inilah Presiden yang masih tetap pada kepresidenannya, sekalipun kena epilog G30S dan dikacaukan dari luar negeri". Akhirnya Presiden memperingatkan, supaya jangan lagi terjadi bacok-bacokan, bakar-bakaran, benci-membenci, seperti yang terjadi setelah peristiwa Gerakan 30 September. Tindakan itu merupakan kontra revolusi.[9]

Pernyataan, peringatan, perintah Presiden tersebut ternyata tidak berhasil menenangkan situasi. Rakyat masih terus menuntut agar Presiden Sukarno mengambil tindakan tegas terhadap tokoh-tokoh PKI dan membubarkan PKI. Sebaliknya, Presiden Sukarno tetap menolak tuntutan rakyat tersebut. Ia selalu mempertahankan ide Nasakom dan tidak memperhatikan tuntutan-tuntutan yang mendesak agar PKI dibubarkan. Dalam pidatonya dalam peringatan Isra Mi'raj tanggal 22 November 1965, Presiden Sukarno tetap tidak bersedia mengutuk PKI. Beliau menyatakan, *"bahwa Gerakan 30 September yang terkutuk ini adalah suatu self destruction. Kalau kita masih terus gontok-gontokkan dan fitnah-fitnahan hanya menghasilkan keadaan yang mengkhawatirkan. Kalau keadaan Indonesia terus menerus hantam-hantaman satu sama lain, dan terus gontok-gontokkan, maka kita akan hancur. Kita menghancurkan diri sendiri, dan kita juga akan merobek-robek dada kita sendiri.* [10]

Dalam situasi yang demikian, Presiden Sukarno masih juga tidak mengindahkan tuntutan rakyat agar PKI diambil tindakan. Presiden selalu mencari-cari alasan, bahwa Nekolim dan antek-anteknya yang mendalangi Peristiwa Gerakan 30 September. Sikap Presiden ini dinyatakan dalam pidatonya ketika menutup pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Sesko

9. *Sinar Harapan*, 10 November 1965
10. *Sinar Harapan*, 23 November 1965

AU) Angkatan II di Istana Bogor pada tanggal 4 Desember 1965. Kepada para perwira-perwira presiden menyatakan bahwa revolusi itu merupakan gelombang yang maha besar, yaitu suatu phenomena yang lahir dari kalbunya bangsa itu sendiri, revolusi punya jiwa sendiri. Revolusi sendiri timbul dari pada aspirasi rakyat yang menghendaki kehidupan yang lebih dalam tata masyarakat yang adil dan makmur.

Menyinggung mengenai masalah Gerakan 30 September, Presiden mengatakan, "bahwa Nekolim bekerja keras menghendaki kita ambruk, dan gontok-gontokkan. Hentikanlah gontok-gontokkan itu, jangan bakar-bakaran."[11]

Pada sidang Komando Operasi Tertinggi (KOTI) tanggal 17 Desember 1965, Presiden mengemukakan, "aku bukan hanya akan menghukum kepada orang-orang yang langsung tersangkut Gestapu atau Gestok. Tetapi terhadap semua orang yang bertindak di luar hukum dan membelokkan revolusi ke kanan akan diambil tindakan. Kepada orang-orang yang tersangkut Gestapu memang perlu dihukum habis-habisan. Kalau perlu ditembak mati".

Lebih lanjut dikatakan, "siapa yang sekarang ini berbuat sendiri-sendiri membunuh, menyembelih kepada bangsa sendiri apalagi dengan maksud tertentu, sadar atau tidak sadar adalah suatu tindakan yang retrogresif. Mereka itu akan ditindak tegas. Revolusi dalam situasi sekarang harus dipertahankan jangan membelok ke kanan, baik yang disebabkan usaha-usaha dari pihak luar negeri maupun orang-orang kita di dalam negeri. Seluruh rakyat diminta menjaga sebaik-baiknya supaya revolusi tetap kiri. Jangan membelok ke kanan. Kalau membelok ke kanan ini berarti suatu kemunduran, retrogresif. Kaum Nekolim yang selalu berusaha mengkanan-kanankan revolusi kita, akan berhadapan dengan saya".[12]

Pada tanggal 24 Desember 1965 dalam sidang terbatas KOTI diputuskan untuk membentuk dua Panitia Ad Hoc. Panitia yang pertama bertugas meneliti keadaan ekonomi dan keuangan,

11. *Sinar Harapan*, 4 Desember 1965
12. *Sinar Harapan*, 17 Desember 1965

terutama yang menyangkut pengaruh kenaikan harga barang-barang. Panitia yang kedua diberi nama Fact Finding Commission (FFC) bertugas mengumpulkan dari dekat fakta-fakta epilog dari Gerakan 30 September, beserta sebab musababnya. Kemudian mengusulkan tindakan-tindakan kebijaksanaan untuk mengatasi kejadian-kejadian di daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.[13]

FFC tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Dr. Sumarno Sostroatmodjo, yang anggotanya terdiri atas Men/Pangak Inspektur Jenderal Sutjipto Judodihardjo, Menteri Penerangan Achmadi, Menteri Agraria Hermanses, Menteri Negara Oei Tjoe Tat, Ketua Gabungan V/KOTI Brigjen Sunarso, Kilian Sihotang (Parkindo), Chalid Mawardi (NU), dan Zaini Mansur (PNI). Adapun tugas panitia ini adalah menghimpun segala fakta dan keterangan serta bukti-bukti tentang peristiwa G30S dan epilognya.

Hasil panitia pertama tidak ada artinya karena derasnya laju inflasi. Hasil panitia kedua berupa data-data yang diperlukan untuk penyelesaian politik sudah disampaikan kepada Presiden, namun penyelesaian peristiwa Gerakan 30 September masih tetap saja tidak dilakukan. Padahal kesimpulan yang diambil oleh komisi adalah besarnya keinginan rakyat agar Presiden/Pemimpin Besar Revolusi segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya.

Menanggapi situasi politik di tanah air dan terbentuknya FFC, Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu, pada tanggal 31 Desember 1965 mengeluarkan Deklarasi Pendukung Pancasila dan Program Kebulatan Tekad yang menyerukan agar bangsa Indonesia kembali berpegang kepada Pancasila dalam menyelesaikan masalahnya. Deklarasi tersebut sebagai berikut :

a. Setia kepada revolusi Indonesia di bawah pimpinan PBR Sukarno dan tiga kerangka tujuannya :
   1) Mengenai kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

13. *Sinar Harapan*, 24 Desember 1965

2) Masyarakat adil dan makmur artinya sosialisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

3) Dunia baru tanpa penderitaan dan penindasan dalam bentuk apapun.

b. Tetap percaya bahwa hanya pengamalan, penghayatan, dan pengamanan Pancasila, Manipol tanpa disertai istilah-istilah/unsur-unsur yang dapat mengaburkan maknanya serta penyelewengan pengertiannya ke arah pengertian ideologi impor/asing akan menjamin tercapainya tujuan revolusi.

c. Tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan segala potensi progresif revolusioner yang terkandung dalam bangsa Indonesia sebagai syarat mutlak melaksanakan sosialisme Indonesia secara gotong royong.

d. Tetap yakin bahwa agama adalah unsur mutlak dalam nation dan character building bangsa Indonesia, sehingga kebebasan beragama terjamin, dilindungi, dan dibantu sepenuhnya.

e. Tetap berjalan di atas rel revolusi tanpa menyeleweng, artinya menolak-menentang baik imperialisme, neokolonialisme maupun atheisme yang ekstrim kiri.[14]

3. Sikap dan Pendirian ABRI

Pendirian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengenai masalah penyelesaian akibat kudeta G30S/PKI disampaikan oleh Mayor Jenderal Soeharto, setelah beliau ditunjuk sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, kepada Presiden Sukarno. Pendirian ABRI pertama kali disampaikan pada tanggal 2 Oktober 1965, pada kesempatan Jenderal Soeharto menghadap Presiden Sukarno di Istana Bogor. Sebaliknya Presiden Sukarno pun menyampaikan pendiriannya, sehingga terjadilah satu dialog. Dialog ini berlanjut, bahkan sampai beberapa kali. Jenderal Soeharto dikonfrontir dengan Panglima Angkatan

14. *Angkatan Bersendjata*, 3 Djanuari 1965

lainnya, dengan Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo, Laksamana Mulyadi, dan Marsekal Roesmin Nuryadin. Di samping itu, terjadi pula dialog "empat mata", pada kesempatan setelah sidang-sidang Komando Operasi Tertinggi (KOTI), di mana Jenderal Soeharto menjabat Kepala Stafnya.

Dalam menegaskan pendirian ABRI, Presiden Soeharto menjelaskan dalam satu wawancara sejarah dengan Kepala Pusat Sejarah ABRI Brigjen TNI Nugroho Notosusanto, pada tanggal 3 Maret 1976. Antara lain beliau menyatakan : Di samping dialog "empat mata" dengan Bung Karno, dialog-dialog juga terjadi dalam sidang-sidang KOTI, karena kadang-kadang saya dikonfrontir di situ. Dialog tidak hanya satu dua kali akan tetapi terus menerus dan terus terang. Memang terdapat perbedaan-perbedaan antara saya dengan Bung Karno dalam menilai keadaan yang terjadi. Sudah barang tentu karena penilaian berbeda, maka cara mengatasi keadaan itu juga berbeda.

Bahwa dalam dialog-dialog itu saya selalu menyadari bahwa Bung Karno adalah atasan saya, sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Dan kedua, saya menempatkan diri sebagai anak, sebagai yang lebih muda terhadap orang tua. Tetapi saya juga tidak melepaskan diri dari jiwa dan semangat perjuangan saya, sekalipun kepada Bung Karno saya mengakui bahwa beliau adalah pejuang yang besar.

Karena itu dalam rangka dialog tersebut, tidak pernah saya menunjukkan sikap sedikit pun menentang atau kurang ajar kepada beliau. Sebaliknya, saya juga tidak begitu saja menyerah kepada beliau. Begitulah dengan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip di atas saya berdialog dengan Bung Karno, meskipun dalam dialog empat mata. Juga kalau misalnya Bung Karno sedang marah dalam dialog tersebut saya masih diam saja, tetapi kalau Bung Karno sudah berhenti saya mulai lagi, tetapi dalam batas-batas yang telah dikatakan tadi.

Misalnya pada dialog pertama, tanggal 2 Oktober (1965) di Bogor. Setelah saya bisa meyakinkan bahwa daerah Halim Perdanakusuma itu bisa dikuasai keseluruhannya. Sewaktu Bung

Karno ada di Halim kekuatan PKI yang mendalangi peristiwa 30 September dan kekuatan-kekuatan yang digunakan ikut serta dalam pengkhianatan itu juga ada di Halim. Saya mengambil kesimpulan bahwa Halim adalah pusat lawan. Oleh karena itu untuk menguasai lawan, Halim harus segera dikuasai. Sebelum gerakan militer dilakukan, saya sudah menyampaikan pesan kepada Bung Karno, melalui ajudannya Bambang Widjanarko yang berisi : "Apa yang bisa saya perbuat untuk membantu menyelesaikan peristiwa ini". Pada waktu itu juga saya pesankan agar Bung Karno keluar dari Halim paling lambat pukul 12 malam. Sebagai seorang militer (Bambang Widjanarko), sudah mengetahui bahwa saya memang hendak mengadakan sesuatu. "Oleh karena itu kalau membantu saya, sebaiknya bawa Bung Karno meninggalkan Halim sebelum pukul 12 malam". Pesan itu ternyata disampaikan juga kepada Dr. Leimena, sehingga akhirnya memang pukul 11 lebih sedikit Bung Karno sudah pergi ke Bogor, sehingga memudahkan saya untuk dapat membersihkan unsur-unsur kesatuan yang digerakkan Untung yang ikut dalam Gerakan 30 September tersebut, hingga Halim bisa kita kuasai.

Lebih lanjut Presiden Soeharto menyatakan : "..... Dalam pada itu perintah/instruksi untuk menguasai keadaan yang saya minta dari Bung Karno tidak ada jawaban. Sehingga akhirnya beliau mengundang Menteri-menteri Angkatan lainnya untuk berembug di sana dan menunjuk siapa yang harus mengganti sementara Jenderal A. Yani berhubung sudah tidak ada. Keputusan pada waktu itu adalah Jenderal Pranoto sebagai pimpinan daripada Angkatan Darat. Waktu saya pergi ke Bogor dengan sendirinya juga konsep itu diajukan, sehingga pada tanggal 2 Oktober (1965) siang, saya dipanggil. Waktu menghadap, saya berjumpa dengan Pranoto dan juga Panglima Angkatan Udara yang sudah lebih dulu datang. Di situ pun Bung Karno jelas mengatakan bahwa : "Keadaan ini harus segera diatasi dan saya menunjuk Jenderal Pranoto sebagai Panglima Angkatan Darat". Kemudian, saya melaporkan bahwa saya mempertanggung-jawabkan tindakan saya. Beliau memutuskan tetap menunjuk Jenderal Pranoto sebagai Panglima Angkatan Darat.

Saya katakan : "terserah". Sebab memang tidak ada perintah untuk saya, dan oleh karena itu segala sesuatu tindakan saya sebelum itu dikembalikan. Spontan beliau mengatakan : "tidak". Jadi tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Jenderal Pranoto, sedangkan saya langsung memegang pimpinan Angkatan Darat, dan secara bersama-sama menjalankan tugas operasi.

Terus terang kepada saya tidak ada perintah apa-apa. Saya menjalankan operasi dan mengatasi keadaan ini adalah atas inisiatif sendiri. Kalau saya ditugaskan sebagai Panglima untuk pemulihan dari keamanan ini, itu pun tidak ada perintah. Sedangkan sekarang pimpinan Angkatan Darat sudah diserahkan kepada Jenderal Pranoto. Tetapi semua rakyat sudah mengetahui hal itu.

Untuk disangka tidak membangkang dan tidak tunduk kepada keputusan Presiden/Panglima Tertinggi, saya hanya berpegang pada perintah lisan bahwa mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban masih diserahkan kepada saya. Dasar pegangan saya sebetulnya hanya itu saja.

Pada waktu itu saya meminta kalau perintah tertulis tidak bisa, sebaiknya jelaskan kepada rakyat bahwa saya dipercayai dalam tugas itu. Hal itu juga untuk mencegah agar jangan sampai nanti disangka tindakan saya adalah sebagai kelanjutan dari Dewan Jenderal dan saya membangkang perintah/keputusan Bung Karno. Jelasnya permintaan saya, agar supaya Bung Karno berbicara pada rakyat untuk menghilangkan anggapan bahwa tindakan saya bukan sebagai kelanjutan fitnahan PKI karena kudeta itu didahului. Artinya fitnahan bahwa Dewan Jenderal akan mengadakan coup, tetap didahului oleh PKI. Kenyataan saya menjalankan perintah bertentangan dengan keputusan Bung Karno, dengan sendirinya bisa dihubungkan bahwa memang Dewan Jenderal ada, yang kemudian dilanjutkan oleh Soeharto. Padahal sama sekali Dewan Jenderal tidak ada, yang ada hanya Wanjakti. Rapat-rapat Wanjakti memang ada tetapi bukan untuk memikirkan masalah coup dan lain sebagainya.

Akhirnya Bung Karno setuju pidato hanya dengan tape, kemudian disiarkan. Itulah sebetulnya landasan yang pertama sebagai

legalitas di mana saya dipercayai sebagai panglima pemulihan, atau panglima operasi untuk memulihkan keamanan dan ketertiban itu. Ini pun saya kira merupakan satu bahan yang betul-betul perlu diamankan, karena perintah penunjukkan saya sebagai panglima secara tidak tertulis.

Dalam waktu yang tidak begitu lama, Kolonel Latief tertangkap. Dari hasil pemeriksaan pada dirinya ada surat yang dikirimkannya kepada Pranoto. Dalam surat itu jelas tertulis permintaan Kolonel Latief agar Pranoto mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mengamankan kawan-kawan mereka. Dus dilihat daripada surat ini nyata hubungan antara Pranoto dengan peristiwa kudeta PKI. Ditambah lagi adanya laporan bahwa tanggal 28 September, Aidit mengadakan pertemuan dengan Pranoto di Jalan Pramuka. Semua hal itu saya laporkan kepada Bung Karno, termasuk surat Kolonel Latief. Reaksi Bung Karno ialah mengatakan "begitu bodoh". Kemudian beliau mengambil keputusan untuk mencabut pengangkatan Pranoto sebagai Panglima Angkatan Darat dan mengangkat saya sebagai Panglima Angkatan Darat, sekaligus sebagai Kepala Staf KOTI. Kalau tidak salah kejadian itu adalah tanggal 16 Oktober. Jadi beberapa hari saja setelah surat Kolonel Latief yang masih terpegang olehnya ditangkap.

Atas dasar bukti-bukti itulah beliau percaya dan sebetulnya memang pengusulan Pranoto untuk mengganti Jenderal Yani adalah juga usulan dari PKI, yaitu Aidit cs pada waktu di Halim. Sesudah keputusan beliau mengangkat saya sebagai Kepala Staf KOTI inilah yang terus-menerus merupakan tambahan dari segi perjuangan atau revolusi hanya merupakan revolusi saja. Jadi belum sempat sampai kepada ombak apalagi gelombang badai, tanpa "rimpel" saja. Oleh karena itu tidak perlu diusulkan soal yang kecil, yang perlu keselamatan dari perjuangan dan revolusi.

Antara saya dengan Bung Karno memang berbeda pendapat. Apalagi fakta-fakta sudah terkumpul. Memang bagaimana pun juga perjuangan itu meminta korban. Akan tetapi korban dari Jenderal-jenderal itu tidak kita relakan. Karena mereka bukan menjadi korban

dari perjuangan, tetapi menjadi korban dari maksud yang akan membahayakan Pancasila.

Terus terang hal itu saya tanyakan kepada Bung Karno. Beliau mengatakan, "Ya memang. Fakta PKI menang, dan ini merupakan kekuatan. Oleh karena itu kekuatan ini harus kita himpun. Kita harus jadikan PKI itu menjadi PKI Indonesia, PKI Pancasila". Tetapi saya masih mengemukakan lagi, apakah mungkin dilihat dari segi doktrin ideologi, hal itu akan terwujud. Bung Karno mengatakan, "Kamu seorang prajurit, kerjakan yang diperintahkan. Mengenai perjuangan serahkan kepada saya". Saya mengambil langkah demikian untuk memperkecil pengaruh PKI. Di samping itu, saya mempunyai rencana lain, yaitu akan menggunakan wewenang yang ada pada saya untuk membalas budi kepada rakyat, terutama rakyat desa. Caranya mengadakan pembangunan di desa-desa dengan menghimpun dana-dana yang ada waktu itu dan mengadakan yayasan-yayasan setempat. Setelah dana-dana terkumpul lalu dibeli traktor, bibit ternak, dan sebagainya yang kemudian diserahkan kepada rakyat di desa. Dengan cara ini saya berharap mengambil langkah-langkah untuk menghindarkan pengaruh PKI pada rakyat. Karena cara tersebut saya nilai baik, maka maksud ini akan diteruskan. Keinginan saya tersebut di atas sejak tahun 1965, yakni setelah peristiwa G30S/PKI, telah saya kemukakan kepada Bung Karno. Beliau mengatakan, hal itu merupakan suatu perjuangan untuk melaksanakannya. Memang, itu merupakan suatu perjuangan yang harus saya sukseskan.

Kemudian dalam meninjau hal itu lebih lanjut, karena perbedaan dalam penilaian, menyebabkan berbeda juga dalam mengatasinya. Beliau mengatakan misalnya, "bukan PKI yang salah, dan PKI merupakan kekuatan yang harus dihimpun", itu berarti tidak perlu diambil tindakan. Sedangkan saya menilai PKI sudah benar-benar melakukan tindakan-tindakan coup yang membahayakan Pancasila. Jadi kalau kita tidak mengambil tindakan, berarti kita memberi kesempatan lagi, dengan sendirinya pada suatu waktu nanti tentu mereka akan mengulangi lagi. Oleh karena itu menurut pendapat saya yang pokok adalah kita jangan memberi kesempatan lagi kepada PKI.

Bung Karno menjelaskan bahwa gerakan Partai Komunis Indonesia akan sangat berbahaya, kalau mereka tidak dilegalisir. Jadi kalau mereka itu akan kita hancurkan atau kita larang akan melahirkan gerakan-gerakan illegal (di bawah tanah), dan ini akan lebih berbahaya. Kekuatan PKI di sini akan sulit diatasi. Inilah penilaian beliau.

Sebaliknya saya mengatakan, bukan demikian cara untuk menghadapi pengaruh dari PKI. Caranya adalah apakah kita mampu atau tidak mengajak rakyat. Padahal rakyat yang sekarang ini sudah benar-benar sadar akan bahaya dari komunis. Kalau kita bisa memisahkan mana rakyat yang anti komunis dengan rakyat yang pro komunis, saya yakin masalahnya akan bisa dihadapi. Sekalipun mereka akan bergerak di bawah tanah, dan membutuhkan waktu yang lama, karena akan sangat tergantung bisa dan tidaknya kita membawa rakyat itu ke arah kekuatan untuk menghadapi segala kegiatan dari Partai Komunis Indonesia.

Kemudian beliau mengatakan sebetulnya untuk mengatasi keadaan mudah saja. Soalnya mudah kalau kamu menjalankan perintah saya. Perintahnya adalah agar supaya gerakan mahasiswa dan rakyat yang menentang kebijaksanaan saya dipadamkan.

Saya jelaskan, menurut penilaian saya gerakan mahasiswa dan rakyat itu tidak semata-mata menentang Bung Karno. Akan tetapi justru ingin mengamankan dan mendukung Bung Karno untuk menyelamatkan perjuangan kita ini. Kalaulah Bung Karno betul-betul dapat menyanggupi maksud dan keinginan rakyat itu, yang sudah mulai benar meyakini bahwa Partai Komunis Indonesia merupakan bahaya. Jadi kalau saya disuruh menghancurkan gerakan mahasiswa dan rakyat yang menentang PKI, sebetulnya sama halnya saya menghancurkan kekuatan-kekuatan yang harus mengamankan Pancasila. Dus terbalik. Oleh karena itu, sulit bagi saya untuk melaksanakan perintah semacam itu. Ini merupakan perbedaan ketiga.

Kemudian juga masalah lain, yaitu tindakan terhadap PKI yang harus kita ambil. Bung Karno menilai gerakan rakyat yang sekarang

adalah sebagai suatu usaha untuk menentang Bung Karno, karena di belakang gerakan itu adalah imperialis Amerika dan sebagainya.

Saya meyakinkan bahwa hal itu tidak benar, yang betul adalah rakyat telah menyadari akan bahaya dari komunis, dan justru masih mempunyai kepercayaan besar kepada Bung Karno. Apalagi kami katakan kalau Bung Karno betul-betul tegas seperti tahun 1948 dalam menghadapi peristiwa Madiun : "Pilih Sukarno-Hatta atau Muso", di mana rakyat memilih Sukarno-Hatta, bukan memilih Muso, pastilah hal ini akan terulang lagi. Cobalah ajak rakyat memilih antara PKI dengan Bung Karno, pasti semua akan memilih Bung Karno. Tetapi dalam hal ini rakyat akan melihat dulu dari tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia.

Dalam dialog selanjutnya mengenai pembubaran PKI, Bung Karno menyatakan : "Harto, saya ini terus terang saja, bukan lagi hanya pemimpin rakyat Indonesia. Saya ini telah menjadi pemimpin dunia. Konsep saya dalam rangka membawa kekuatan Nasakom kepada dunia akan saya demonstrasikan kalau itu dapat. Jadi mempersatukan semua unsur-unsur itu untuk kepentingan Nasional. Ini sudah saya jual ke luar negeri dan diterima oleh negara-negara non-aligned (non-blok). Dus, tidak bisa saya bubarkan PKI".

Kemudian saya tanyakan manakah yang harus kita dahulukan kepentingan nasional kita atau kepentingan kemercusuaran kita ke luar. Saya kira, kepentingan Nasional harus kita dahulukan. Nyatanya maksud Bung Karno untuk membawa PKI menjadi kekuatan Pancasila belum berhasil, bahkan sebaliknya, dia (PKI) arbittor dari Bung Karno untuk melaksanakan programnya menguasai keadaan dan membahayakan Pancasila karena jelas yang akan dituju adalah negara komunis. Berarti pantaslah rakyat mempertahankan Pancasila, dan apakah pantas perjuangan kita ini akan dikorbankan hanya untuk kepentingan kemenangan komunis saja, khususnya Partai Komunis Indonesia.

Jadi saya kira lebih baik kita mementingkan diri sendiri daripada kepentingan internasional kita, karena kalau ini betul-betul berhasil, dengan sendirinya ke luar pun kita akan dikagumi, dan akan dianut

oleh dunia. Itulah juga salah satu dari perbedaan penilaian mengenai cara mengatasi keadaan ini.

Kemudian juga, dari berbagai dialog langsung yang nyata berbeda itu, sampai pada usaha saya dikonfrontir di Bogor. Ketika itu, semua Panglima dipanggil termasuk saya sendiri. Bung Karno memberikan indroktinasi tentang perjuangan revolusi dan sebagainya, yang intinya menekankan agar semuanya mematuhi perintah beliau. Kemudian satu persatu para Panglima ditanya, mulai dari Panglima Angkatan Kepolisian, Jenderal Sutjipto, dan saya yang terakhir. Ketiga Panglima terdahulu menerima saja apa yang dikatakannya, saya tidak. Saya memberi tanggapan, "Bahwa saya belum matang dalam hal itu. Akhirnya, saya memang "koppig". Bapak memang sudah mengetahui, kalau saya koppig sejak dahulu". Saya pernah menolak perintah beliau, yaitu waktu Peristiwa 3 Juli 1946 di Yogya. Kepada saya diperintahkan untuk menangkap Panglima saya (Jenderal Soedarsono), saya tidak mau. Surat perintah saya kembalikan. Tetapi akhirnya saya, dengan cara saya sendiri dapat mengamankan apa yang dimaksudkan oleh Bung Karno, yang sesungguhnya tidak mungkin untuk dilaksanakan dengan cara mengembalikan saja perintah itu. Dari sejak itu sebetulnya beliau menilai saya seorang yang koppig sebab tindakan saya itu bukan untuk maksud-maksud yang kurang baik. Akan saya kemukakan nanti pendapat saya antara lain mengenai konfrontasi, di mana dalam berbagai dialog Bung Karno berusaha untuk lebih menaklukkan pendirian saya.

Akhirnya beliau memanggil saya sendirian, waktu itu beliau hanya memakai baju kaos saja. Terus terang saja beliau mengatakan dalam bahasa Jawa : "Djane aku kok kapakke" (Sebenarnya aku mau kau apakan). Saya menjawab : "Sebenarnya Bapak tidak mengerti maksud saya!" Tetapi yang jelas saja, kalau saya mau berbuat buruk artinya menyingkirkan Bung Karno, sebetulnya sudah bisa. Nyatanya sampai sekarang kan tidak. Itulah sebabnya mengapa saya tanyakan soal "Djane aku kok kapakke".

Kemudian saya jelaskan kepada Bapak, apa sesungguhnya yang saya maksud. Harapan orang tua saya dalam mendidik menjadi

orang, bahkan sampai menjadi menantu orang tidak pernah akan lupakan. "Jadilah orang yang bisa mikul duwur mendhem jero kepada orang tua" (menjunjung tinggi nama dan kehormatan orang tua). Lantas beliau mengatakan "tenan lho!" (Sungguh ya!). Itulah sebabnya kalau saya memang berniat buruk terhadap beliau, kesempatan itu sebetulnya sudah lama ada. Mengapa tidak saya lakukan, antara lain karena saya menganggap Bung Karno itu juga sebagai orang tua saya. Sebagai pemimpin dari rakyat Indonesia, saya mengakui lahir batin bahwa beliau sudah banyak berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Sebetulnya tidak keinginan saya, kecuali hanya ingin melanjutkan apa yang menjadi petuah orang tua saya. Tidak hanya saya akan "mikul duwur mendhem jero" pada orang tua yang melahirkan saya dan hidup di dunia ini, tetapi juga saya menganggap Bung Karno itu tak ubahnya sebagai orang tua saya juga, sebagai pemimpin dari rakyat Indonesia.

Dialog-dialog ini terjadi sebelum SP 11 Maret. Kemudian juga ditanyakan kepada saya mengenai "pinandito", dan sebagainya. Pada waktu sesudah 11 Maret, Bung Karno pernah menanyakan apa yang sebaiknya saya (Bung Karno) lakukan. Saya lakukan ibarat pewayangan, kalau sudah menjadi "ratu" selanjutnya mensucikan diri menjadi "pandhita".

Maksud ini lalu saya jelaskan secara panjang lebar kepada beliau. Bung Karno nampaknya belum mempercayai atau tidak mau mengerti maksud saya itu. Tetapi yang jelas kalau saya mau ugal-ugalan atau kurangajar sebetulnya mudah saja dengan mengatakan tidak memerlukan Bung Karno lagi. Kalu toh dipanggil juga, saya tidak begitu mau mendadak. Tetapi jelas saya menunjukkan bahwa saya tidak ada maksud buruk kecuali mengingatkan beliau. Karena saya yakin pada waktu itu, rakyat Indonesia masih di belakang Bapak. Kalau betul-betul bisa menanggapi keinginan rakyat, termasuk pemudanya, saya yakin mereka masih akan mendukung 100 % kepemimpinan Bung Karno. Tetapi janganlah keinginan rakyat itu ditentang, janganlah menentang arus ini dan itu. Bawalah arus ini. Kalau saya disuruh menentang arus ini, merupakan beban yang berat bagi saya untuk melaksanakan "mikul duwur mendhem jero"

pada Bung Karno, bahkan mungkin sebaliknya akan menyangsikan kepemimpinan beliau.

Jadi perkembangan-perkembangan dialog mulai tanggal 2 Oktober sampai pada peristiwa itu berpokok pada perbedaan cara bertindak serta politik luar negeri. Khusus mengenai politik luar negeri, Bung Karno akan merasa malu sekali kalau tidak bisa merealisir ide Nasakom yang sudah dicanangkan di dunia internasional. Pada waktu itu saya mengatakan pemecahan untuk itu mudah saja. Saya akan menjadi bumper untuk mengambil tindakan itu. Saya akan bertindak sebagai Panglima Operasi untuk mengambil tindakan terhadap PKI. Untuk selanjutnya nanti pada kesempatan yang baik, tidak perlu dengan mengatakan saya perintahkan, tetapi cukup dengan mengatakan "saya menyetujui tindakannya". Bukanlah saya yang membubarkan, jadi ke luar saya yang membantu menyelamatkan nama Bung Karno, menjadi komandan bumper terhadap PKI. Jadi tidak perlu Bung Karno secara langsung bertindak.

Memang pemecahan masalah ini sangat berat dan sulit bagi saya. Tetapi kalau hal itu terus menerus demikian, tidak akan pernah selesai. Misalnya, kalau sudah dalam mengambil tindakan, sebaliknya kita akan mendapat tantangan yang hebat dari rakyat.

Begitulah dialog yang saya lakukan, sampai terjadinya peristiwa di Istana pada tanggal 11 Maret. Nah, untuk mengakhiri keadaan panik tersebut, dengan pesan lisan saya minta disampaikan kepada beliau, berilah kepercayaan kepada saya untuk mengatasi keadaan. Bagi beliau lahirnya SP 11 Maret tidak terlalu mengagetkan, sebab sebetulnya itu hanya realisasi dari dialog-dialog yang berulang kali telah kami lakukan. Jadi bagi saya hal itu juga tidak mengagetkan karena sudah sering dibicarakan. Bagi beliau mungkin barangkali tidak ada pilihan lain, sehingga menyatakan : "Saya percayakan kepada Harto untuk mengatasi keadaan". Pendirian saya toh sudah jelas, bagaimana pun tidak rela kalau Bung Karno itu sebagai pejuang yang sudah berjasa hanya dengan begitu saja disingkirkan. Saya akan mencegah timbulnya tindakan-tindakan penggulingan kekuasaan

dan kekerasan. Saya sendiri akan menjauhi cara demikian, juga tidak rela karena akan merupakan hal yang biasa nanti menggulingkan Presiden yang akan datang. Ini pun saya kemukakan kepada beliau sehingga waktu memberikan surat perintah itu memang tidak ada maksud lain. Dan mungkin beliau percaya bahwa saya betul-betul, yang berulangkali saya jelaskan tadi, tidak ada ancaman bagi beliau untuk disingkirkan dan sebagainya."

Jadi bagi orang yang mungkin dapat menilai pribadi Bung Karno, tentu akan muncul pertanyaan-pertanyaan, "kok mudah keluar SP 11 Maret itu, kok mudah ditandatangani, dikeluarkan begitu saja, kok mudah itu, apa dan sebagainya". Tetapi karena yang mengerti prolognya hanya saya dengan Bung Karno saja, saya tidak akan pernah sekarang mengatakan, "wah, saya habis bertengkar dengan Bung Karno". Itu tidak akan pernah terjadi. Karena saya selalu menempatkan diri saya sekali pun berbeda dalam dialog, sebagai bawahan terhadap atasan, anak terhadap orang tua, yang selalu menghargai Bung Karno. Dalam dialog-dialog itu, jiwa pejuang saya memang tidak begitu mudah untuk ditaklukkan oleh beliau. Namun bagaimana pun, sikap saya tetap hormat kepada beliau".[15]

4. Sikap Politisi dan Generasi Muda terhadap Presiden Sukarno

Sikap Presiden Sukarno yang tetap tidak bersedia membubarkan PKI menimbulkan amarah rakyat. Aksi-aksi demonstrasi menuntut pembubaran PKI terjadi di seluruh Indonesia. Untuk menampung aspirasi rakyat tersebut dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, pimpinan ABRI melalui Ketua G-5/Koti Brigjen Sutjipto SH pada tanggal 3 Oktober 1965 membekukan untuk sementara PKI berdasarkan hasil penyelidikan di bidang hukum.

Dalam usaha mendukung tindakan-tindakan pengamanan dan pemulihan ketertiban yang dilaksanakan oleh Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto, pada tanggal 4 Oktober 1965 kekuatan

15. Transkripsi penjelasan Presiden Soeharto tentang latar belakang Lahirnya SP 11 Maret 1966, kepada Kapusjarah ABRI tanggal 3 Maret 1976 (dokumen)

sosial politik di Jakarta yang tergabung dalam Kesatuan aksi pengganyangan Kontra Revolusi Gerakan 30 September telah mengadakan rapat umum di Taman Sunda Kelapa. Dalam rapat itu telah dikeluarkan pernyataan kebulatan tekad, yang isinya antara lain berbunyi sebagai berikut :

a. Kami tetap berdiri sepenuhnya tanpa reserve di belakang Paduka Yang Mulia (PYM) Presiden/Panglima Tertinggi (Pangti) ABRI/ Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan siap membantu pemerintah cq. PBR dalam penumpasan gerakan kontra revolusi Gerakan 30 September sampai ke akar-akarnya.

b. Bahwa kami mendukung serta siap untuk melaksanakan kebijaksanaan PYM/Presiden/Pangti ABRI PBR Bung Karno dalam menumpas Gerakan Kontra Revolusi Gerakan 30 September.

c. Mengutuk sekeras-kerasnya tindakan teror gerombolan kontra revolusi Gerakan 30 September yang telah menteror dan menculik serta membunuh secara keji beberapa perwira tinggi Angkatan Darat.

d. Mendesak kepada PYM/Presiden/Pangti ABRI untuk :

   1) Melarang dan membubarkan partai-partai politik yang mendukung, membantu dan/atau bersimpati terhadap Gerakan 30 September. Menuntut tindakan yang berwajib terhadap Partai Politik (Parpol)/organisasi massa (ormas) yang sehaluan/seazas yaitu PKI berikut semua ormas-ormasnya. Serikat Buruh Pekerjaan Umum (SBPU), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Pemuda Rakyat (PR), Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Badan Pusat Intelijen (BPI) SOBSI, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Himpunan Sarjana Indonesia (HSI), dan lain-lain juga Perguruan Tinggi dan Institut Pendidikan sarang kontra revolusi Gerakan 30 September.

   2) Melarang terbitnya surat kabar dan majalah yang langsung ataupun tidak membantu menyebarkan/

menyiarkan kegiatan-kegiatan Gerakan Kontra Revolusi Gerakan 30 September, antara lain Harian Rakjat, Warta Bhakti, Bintang Timur, Kebudayaan Buruh, Ekonomi Nasional, dan Gelora Indonesia.

3) Menyita semua alat-alat/kekayaan milik organisasi/oknum-oknum kontra revolusi dan sebagainya, dan dijadikan milik negara.[16]

Sementara itu partai Nahdlatul Ulama (NU) pada tanggal 5 Oktober 1965 setelah meninjau situasi politik di tanah air akibat gerakan kontra revolusi 30 September mengeluarkan pernyataan, antara lain sebagai berikut :

Memohon agar Presiden/Pangti ABRI/PBR Bung Karno agar dalam tempo yang singkat membubarkan PKI, Pemuda Rakyat, Gerwani, SBPU, SOBSI dan ormas-ormasnya yang ikut mendalangi dan bekerjasama dengan apa yang menamakan diri Gerakan 30 September.[17]

Untuk mengatasi keadaan setelah terjadinya perebutan kekuasaan yang gagal oleh PKI tanggal 30 September 1965, Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata (Menko Hankam/Kasab) Jenderal A.H. Nasution mengirim surat kepada Presiden mengenai saran usul penyelesaian G30S/PKI pada tanggal 10 Oktober 1965. Jenderal A.H. Nasution menyarankan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta pelaksanaan Penpres No.7 tahun 1959 terhadap partai-partai Politik dan ormas-ormas yang terlibat. Usulan itu berbunyi sebagai berikut :

a. Menegakkan keadilan dengan segera mengadakan mahkamah.
b. Mengangkat segera Menteri/Panglima AD baru (Mayor Jenderal Soeharto satu-satunya calon).
c. Retooling dalam pimpinan AURI yang terlibat.

16. *Berita Yudha*, tanggal 5 Oktober 1965
17. *Berita Yudha*, tanggal 6 Oktober 1965

d. Pelaksanaan Penpres No.7 tahun 1959 tentang Orpol/Ormas yang terlibat (PKI).
e. Untuk mengatasi iklim fitnah yang jadi sumber penghasutan, khianat dan aniaya besar ini, perlu penertiban badan-badan intel dengan tenaga-tenaga berakhlak. Akhirnya supplier fitnah ini kiranya yang paling berdosa.[18]

Sampai akhir tahun 1965 seluruh Kesatuan Aksi, Front Pancasila, bergerak meluas ke seluruh daerah melancarkan demonstrasi-demonstrasi serta tuntutan pembubaran PKI. Mereka secara serempak membantu ABRI dalam usaha menumpas setiap bentuk teror maupun pengacauan yang dilakukan oleh sisa-sisa G30S/PKI. Sementara itu baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat daerah, terutama oleh para panglima daerah militer mulai dilakukan pembekuan terhadap partai politik dan organisasi yang langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam G30S seperti PKI, Pemuda Rakyat, Gerwani, BTI, CGMI, Baperki, Lekra, dan sebagainya. Di samping itu sudah ada instruksi-instruksi untuk membersihkan departemen-departemen dan lembaga-lembaga negara dan jawatan-jawatan dari unsur-unsur G30S. Media massa yang terlibat seperti *Harian Rakjat*, organ PKI dilarang terbit,[19] serta mereka yang terlibat dalam gerakan itu diamankan dan dikelompokkan sesuai dengan kadar keterlibatannya yaitu diklasifikasikan ke dalam Golongan A, B, dan C. Namun dalam laporan Panglima Kopkamtib pada bulan Desember 1965 dapat disimpulkan operasi penumpasan terhadap G30S/PKI telah selesai. Selanjutnya pemulihan keamanan dan ketertiban diserahkan kepada Pepelrada dalam rangka kegiatan membersihkan orpol dan ormas pendukung G30S di daerah-daerah.

Ketidakpuasan rakyat akhirnya meledak dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar. Dimotori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dimulailah aksi-aksi demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa

18. Jenderal A.H. Nasution, *op.cit.*, hal.84
19. *Angkatan Bersendjata*, 7 Januari 1966

Universitas Indonesia dengan jaket kuningnya pada tanggal 10 Januari 1966. Mereka melancarkan aksi-aksi di jalan-jalan di kota Jakarta, dan juga mendatangi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) agar tuntutan mereka disampaikan kepada Presiden Sukarno. Mereka menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah yang dikenal dengan *Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)*, yakni :

- Bubarkan PKI.
- Turunkan harga/perbaiki ekonomi.
- Retool Kabinet Dwikora.

Sementara itu mahasiswa dan pemuda di Bandung mencetuskan "Petisi Ampera" yang ditujukan langsung kepada Presiden Sukarno dan juga kepada DPRGR. Petisi itu berisikan tuntutan untuk pembubaran PKI dan penanggulangan ekonomi dengan penurunan harga.

Aksi-aksi demonstrasi yang semula dilakukan di Jakarta dan Bandung menjalar ke kota-kota seluruh Indonesia. Ternyata aksi demonstrasi itu mendapat dukungan dari berbagai kekuatan lainnya maupun Front Pancasila serta masyarakat umum.

Sementara itu pada tanggal 10 Januari 1966 tersebut, secara khusus Waperdam/Menlu Subandrio melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta menyampaikan pidatonya yang intinya menganjurkan agar seluruh bangsa Indonesia untuk menyusun suatu barisan, yaitu Barisan Sukarno. Dia mengajak secara bersama-sama mempertahankan Bung Karno dan melaksanakan ajaran-ajarannya. Kemudian ia menyatakan "kita tidak bertindak secara liar, melainkan menunggu komando Pemimpin Besar Revolusi. Tindakan para mahasiswa setelah Gestok meletus kita hadapi. Reaksi terhadap kesulitan-kesulitan hidup sehari-hari yang dilakukan para mahasiswa telah melampaui batas kesopanan akhlak bangsa Indonesia".

Reaksi pemerintah terhadap aksi-aksi Tritura itu adalah mengundang KAMI untuk hadir dalam sidang paripurna Kabinet

Dwikora di Bogor pada tanggal 15 Januari 1966. Dalam sidang Kabinet tersebut, Presiden Sukarno mengatakan : "Siapa yang mau ikut saya, ikutlah. Susunlah barisanmu, jangan bertindak liar, tunggu komando".

Selain itu Presiden mengatakan : "Sekarang ada gejala untuk *mendongkel-dongkel*-Sukarno, tetapi saya tidak akan bergeser satu milimeter pun. Saya tidak mau didongkel-dongkel dengan cara gelap-gelapan.....". Kemudian mengenai penurunan harga, Presiden mengatakan : "Siapa yang sanggup menurunkan harga dalam waktu tiga bulan akan saya jadikan menteri. Kalau tidak berhasil, orang yang telah mengatakan sanggup akan saya jebloskan dalam penjara selama lima tahun".

Sekali lagi saya ulangi kalau kita telah memeras otak, masih dikatakan macam-macam, maka tantangan itu saya ulangi. Siapa yang sanggup, baik tentara, organisasi politik, organisasi massa, mahasiswa, wartawan, dan wanita yang sanggup menurunkan harga dalam waktu tiga bulan, akan saya jadikan menteri, tetapi kalau keadaan ekonomi makin buruk, maka saya perintahkan tembak mati atau kalau setidak-tidaknya harga tidak diturunkan; maka orang orang itu akan saya masukkan dalam penjara tidak selama lima tahun tetapi 10 tahun. Saya mengerti akan isi tuntutan mahasiswa, tetapi tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan oleh mereka, terutama dengan adanya kata-kata kasar. Menteri goblok dan sebagainya".

Kemudian Presiden mengatakan, "bahwa istilah yang dipakai untuk petualangan kontra revolusi yang menamakan dirinya Gerakan 30 September yang selama ini dikenal dengan Gestapu lebih tepat disebut dengan Gerakan satu Oktober (Gestok), karena para Jenderal almarhum sebagai akibat keganasan petualangan kontra revolusioner terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965".

Sesuai dengan komando Presiden tersebut, pada tanggal 16 Januari 1966 Menteri Dalam Negeri Dr. Sumarno menginstruksikan kepada semua Kepala Daerah dan karyawan Departemen Dalam Negeri untuk menyusun barisan yang sekompak-kompaknya guna

mempertahankan Presiden Sukarno. Kemudian disertai ancaman akan dilakukan tindakan terhadap siapa saja yang menentang instruksi tersebut.[20]

Menanggapi amanat Presiden untuk membentuk Barisan Sukarno, pimpinan ABRI segera menghadap Presiden tanggal 16 Januari 1966 di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu, Jenderal A.H. Nasution menyatakan pendirian ABRI antara lain menyatakan tetap setia kepada Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi/ Panglima Tertinggi angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian pendirian ABRI mengenai Barisan Sukarno, Brigjen Sunarso sebagai Ketua G-V Koti menyatakan antara lain bahwa pembentukan Barisan Sukarno secara politis dalam arti bukan organisasi barisan. Jika itu terjadi, maka seolah-olah ada barisan yang menepuk dada sebagai Barisan Sukarno. Padahal ABRI dan rakyat yang Pancasilais dalam mental dan politik adalah Barisan Sukarno sejati.[21]

Reaksi-reaksi terus berdatangan terhadap pembentukan Barisan Sukarno tersebut. Isu ini kemudian mencapai puncaknya dengan keluarnya pernyataan ABRI yang menyatakan bahwa seluruh ABRI dan rakyat yang tetap setia kepada Pancasila dan UUD 1945 adalah Barisan Sukarno, sehingga pembentukan secara fisik Barisan Sukarno tidak diperlukan. Pada tanggal 16 Januari 1966, Panglima Pepelrada VI/Siliwangi Mayor Jenderal Ibrahim Adjie memberikan penegasan pelarangan terhadap pembentukan Barisan Sukarno di daerah penguasa perang Jawa Barat, karena dapat merusak persatuan bangsa. Hal ini dituangkan dalam Surat Keputusan No. Kep-03-05/Pepelrada/VI/1966. Men/Pangad Mayor Jenderal Soeharto menegaskan, bahwa pelarangan Barisan Sukarno tergantung kepada keadaan di daerah mereka masing-masing.

Sementara itu pada tanggal 17 Januari 1966 Front Pancasila setelah membahas Amanat PYM Presiden dalam

20. *Angkatan Bersendjata*, 17 Januari 1966
21. *Angkatan Bersendjata*, 17 Januari 1966

sidang paripurna Kabinet dan memadukannya dengan situasi negara dan masyarakat saat itu menyatakan :

a. Menanggapi secara dialektis-kreatif Amanat PYM Presiden/ Pangti ABRI/PBR Sukarno untuk bangkit dan menyusun barisan dengan jalan meningkatkan Kesatuan Aksi menjadi Front Pancasila.

b. Front Pancasila mendukung Komando PYM Presiden/Panglima ABRI/PBR Bung Karno yang sesuai ucapan beliau akan dipertanggungjawabkan kepada Revolusi dan kepada Tuhan YME, yaitu untuk mempertinggi kewaspadaan terhadap Nekolim dan kontra Revolusi dengan jalan meningkatkan pengganyangan Kontrev Gestapu/PKI, kaum vested interest, kaum intrik, dan Nekolim.

c. Front Pancasila adalah benteng penghimpun parpol, ormas, dan golkar progresif revolusioner yang berikrar mengamalkan, menyelamatkan, dan melaksanakan dengan konsekwen Pancasila dan Revolusi Nasional yang diridhoi oleh Tuhan YME.

d. Kesatuan Aksi adalah Tata Tempur Slagorde Front Pancasila yang telah, tengah, dan akan dijadikan palu godam Bangsa Indonesia guna menghancurkan semua musuh Pancasila dan Revolusi yang kini terkonsentrasi dalam Gestapu PKI serta otak-otaknya, kaum intrik vested interest, dan dalam komplotan Nekolim baik dari Barat maupun Timur.

Front Pancasila bahu-membahu dengan ABRI meningkatkan kewaspadaan dan militansinya sesuai dengan dialektika, perjuangan dalam menghadapi musuh-musuh Revolusi, mengeluarkan pernyataan antara lain :

a. Musuh Revolusi telah gagal dalam mencoba merombak dasar Negara Pancasila seperti terbukti pemberontakan dan petualangan Gestapu/PKI. Oleh karena itu mereka berusaha memecah integrasi Front Pancasila/ABRI dalam mengganyang Gestapu PKI selama epiloog.

b. Setelah gagal semua aksinya musuh-musuh Revolusi di dalam dan di luar negeri bersasaran menjatuhkan PBR Bung Karno dan memecah belah persatuan tiga kekuatan pokok yaitu PYM Presiden/Panglima ABRI/PBR Bung Karno, ABRI, dan rakyat. Front Pancasila dengan segala macam intrik dan petualangan, merintangi dialog langsung antara PBR Bung Karno dan Rakyat Progresif revolusioner yang terhimpun dalam Front Pancasila, untuk menjauhkan dan mengisolasikan PYM Presiden/Pangti ABRI/PBR Bung Karno dengan rakyatnya.

c. Menyambut dengan gembira Komando PYM Presiden/ Pangti ABRI/PBR Bung Karno untuk meninjau secara total kebijaksanaan finek sebagai jawaban PYM Presiden/ Pangti ABRI/PBR Bung Karno atas sinyalemen-sinyalemen Kesatuan Aksi Penggayangan Kontrev Gestapu/PKI tertanggal 6 Januari 1966, disusul oleh aksi-aksi mahasiswa di bawah pimpinan KAMI.

d. Front Pancasila yakin bahwa suara jeritan rakyat progresif revolusioner segera akan dipenuhi, yaitu :
   - Pembubaran PKI dan ormas-ormas anteknya dan pembersihan Lembaga Negara dari padanya.
   - Perombakan/penyempurnaan Kabinet yang kian kehilangan wibawa dan kepercayaan rakyat.
   - Dengan Kabinet baru yang kompeten, kompak dan ber-Ampera meletakkan dasar-dasar baru kebijaksanaan ekonomi keuangan dan melaksanakannya dengan penuh kejujuran serta dedikasi sehingga rakyat terangkat dari lembah penderitaan mental dan materiil.
   - Meninjau kembali politik luar negeri dan para penanggung jawab serta pelaksanaannya yang telah gagal memperjuangkan kepentingan Nasional dan Revolusi seperti terbukti dari adanya penyokong-penyokong gelap luar negeri kepada Gestapu/PKI dan dari peristiwa Konperensi Havana.

e. Teruskan perjuangan demi Pancasila dan Revolusi.[22]

Mencegah penyalahgunaan nama Bung Karno, apa yang menamakan Barisan Sukarno dalam bentuk organisasi apapun di daerah hukum Jawa Barat.

- Mencegah penyalahgunaan nama Bung Karno oleh petualangan politik.
- Keseriaan kita terhadap PBR/Bung Karno demi Pancasila sebagai ajarannya tidak hanya dimulai sekarang, akan tetapi telah dimulai sejak Proklamasi tahun 1945 terus-menerus tanpa henti-henti.

Sehubungan dengan ini, KAMI Jawa Barat mendukung sepenuhnya keputusan Pepelrada Jawa Barat tersebut. Sedangkan Mayor Jenderal Soeharto mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pepelrada Jawa Barat itu justru memelihara persatuan nasional. Sejak revolusi, ABRI, Orpol, dan Ormas Jawa Barat sudah menjadi Barisan Sukarno.

Sementara itu, Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mengeluarkan tanggapan setelah membahas amanat Presiden tanggal 15 Januari 1966 tersebut dengan menyatakan :

a. 10.000 mahasiswa UI siap menjadi barisan Jibaku Bung Karno. Siap membela Bung Karno dari rongrongan Nekolim.
b. Sanggup menjadi harapan bangsa dan pengemban Ampera, melanjutkan tradisi leluhur yang telah dipelopori Bung Karno sewaktu menjadi mahasiswa.
c. Aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa UI dewasa ini tidak lain kecuali menjaga kewibawaan Bung Karno dari rongrongan Nekolim, antek-antek Gestok dan pembantu-pembantu beliau yang berjuang hanya untuk kepentingan golongan dan pribadi.

22. *Kompas*, tanggal 18 Januari 1966

d. Mendukung terbentuknya National Union of Student (NUS) yang memang menjadi aspirasi mahasiswa akhir-akhir ini dipelopori oleh KAMI mengusulkan Bung Karno sendiri sebagai ketuanya.

e. Menginstruksikan kepada seluruh mahasiswa UI supaya :
   1) Waspada terhadap unsur-unsur pemecah-belah PBR/ Bung Karno-mahasiswa-rakyat-ABRI-wartawan. Pancatunggal ini adalah pengemban Ampera yang konsekuen untuk mewujudkan sosialisme Pancasila.
   2) Kumpul setiap pagi di halaman UI menunggu instruksi dari pimpinan dan jangan melakukan tindakan sendiri-sendiri.

Pada tanggal 18 Januari 1966, KAMI mahasiswa UI yang tergabung dalam KMI segera kembali melakukan demonstrasi ke kantor Departemen Luar Negeri, meminta agar Dr. Subandrio mencabut dan meralat pidato radionya tanggal 16 Januari 1966 itu yang menghina mahasiswa. Menjawab tuntutan tersebut, Dr. Subandrio mengatakan bahwa dalam pernyataan itu, dia sama sekali tidak merendahkan atau menghina demonstrasi-demonstrasi yang dilancarkan oleh mahasiswa. Hanya demonstrasi-demonstrasi tersebut jangan sampai diselewengkan oleh pihak Nekolim. Ternyata mahasiswa tidak puas terhadap jawaban tersebut dan berteriak-teriak, "ayo ralat, diralat, dan lain-lain", kepada Dr. Subandrio.[23]

Pertentangan politik setelah gagalnya perebutan kekuasaan oleh Gerakan 30 September semakin meruncing. Hal ini disebabkan oleh karena Presiden tidak bersedia mendengarkan tuntutan rakyat agar PKI sebagai dalang G30S dibubarkan. Politik solution yang dijanjikan oleh Presiden tidak pernah dilaksanakannya. Mengingat keadaan yang demikian, para penasehat Presiden memberikan saran-saran, agar Presiden memberikan "political solution" terhadap G30S yang telah dijanjikan, tetapi tidak mendapat tanggapan sewajarnya

23. *Angkatan Bersendjata*, 19 Januari 1966

meskipun telah disampaikan kepada Presiden bahwa situasinya semakin gawat dan tidak dapat lagi dipertahankan kalau tidak cepat-cepat janji itu dipenuhi. Waktu yang baik ialah pada hari Raya Idul Fitri 1966. Dengan keterangan yang demikian, Presiden malah menjadi marah-marah dan merasa didorong-dorong. Oleh karena itu sesudah sembahyang Ied di Masjid Baiturrahim di Istana Merdeka, pada hari Minggu pagi tanggal 23 Januari 1966, Presiden mengatakan karena keadaan dalam negeri belum tenang maka susah mengambil suatu keputusan tentang penyelesaian.

Dalam amanatnya melalui siaran radio, Dr. Subandrio yang menuduh demonstrasi mahasiswa telah melanggar nilai-nilai kesopanan, ternyata mengundang reaksi protes di kalangan mahasiswa. Namun usaha adu domba antar golongan juga terus dilakukan Dr. Subandrio, agar suhu politik semakin memanas. Pada tanggal 14 Februari 1966, pada saat berlangsungnya rapat umum Front Nasional (FN) di Istora Senayan, Dr. Subandrio juga ikut memberikan kata sambutan. Dalam sambutannya, Dr. Subandrio mengatakan bahwa dari mimbar ini saya peringatkan Nekolim dan antek-anteknya yang keplok terlalu pagi, nanti kecewa. Peringatan itu mendapat sambutan para hadirin.

Mendengar teriakan-teriakan yang pro dan kontra itu, Dr. Subandrio menatap ke arah timur sambil berkata lebih lanjut, "Saya merasa lebih "anget" adanya petualangan sana sini. Saya tidak heran kalau di antara kita ada pertentangan....".

Pidato tidak terdengar karena ada teriakan adu domba berulang-ulang. Setelah keadaan tenang, Dr. Subandrio melanjutkan pidatonya dengan mengatakan pertentangan antara kita tidak usah kita sembunyikan, karena itu merupakan ke arah sintesa lebih tinggi dalam revolusi kita.[24]

---

24. Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat, Lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (manuskrip)

5. Surat Perintah 11 Maret 1966

Akibat peristiwa Gerakan 30 September/PKI telah menimbulkan merosotnya kredibilitas pemerintah di mata rakyat. Di samping itu juga, rakyat menganggap bahwa kewibawaan Presiden telah menurun di mata rakyat. Untuk menanggapi situasi yang demikian, Presiden berusaha mengangkat kewibawaannya dengan melakukan reshuffle kabinet Dwikora. Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Sukarno mengumumkan akan diadakan reshuffle kabinet. Sehubungan dengan itu pelantikan kabinet Dwikora yang disempurnakan dilakukan pada tanggal 24 Februari 1966.

Tindakan Presiden itu mengundang amarah para mahasiswa terutama terhadap pernyataan bahwa reshuffle itu bukan karena perjuangan kesatuan-kesatuan aksi, melainkan karena meningkatnya perjuangan revolusi. Apalagi dalam Kabinet itu tidak terdapat beberapa tokoh seperti Menko Hankam/Kasab Jenderal A.H. Nasution, yang gigih menentang G30S/PKI, justru disingkirkan. Namun sebaliknya orang-orang yang diragukan itikad baiknya dan bahkan terlibat G30S/PKI seperti Subandrio, Njoto, dan Oei Tjoe Tat SH, serta Ir. Surachman diangkat sebagai menteri. Kabinet Dwikora yang disempurnakan ini oleh para mahasiswa disebut "Kabinet Gestapu" atau Kabinet 100 menteri karena memang anggotanya lebih dari 100 orang. Para mahasiswa menolak kabinet yang disempurnakan itu. Oleh karena Kabinet Dwikora yang disempurnakan itu sangat mengecewakan rakyat, maka demonstrasi-demonstrasi dilanjutkan.

Meningkatnya aksi-aksi KAMI telah menimbulkan kemarahan Presiden Sukarno. Tanggal 25 Februari 1966 diadakan sidang lengkap Komando Operasi Ganyang Malaysia (KOGAM) yang dipimpin oleh Presiden Sukarno. Untuk membahas tindakan-tindakan terhadap aksi-aksi mahasiswa, sidang itu memutuskan pembubaran KAMI sejak tanggal 26 Februari 1966.[25] Kemudian pada rapat Kogam tanggal 7 Maret 1966, Presiden Sukarno merasa tidak puas

25. *Angkatan Bersendjata*, 27 Februari 1966

terhadap pembubaran KAMI. Dalam suasana yang demikian, pada tanggal 8 Maret 1966 Presiden Sukarno mengeluarkan perintah harian yang memuat materi sebagai berikut :

- Bahwa seluruh rakyat harus patuh kepadanya, karena ia adalah Kepala Negara dan Pemimpin Besar Revolusi sebagai satu-satunya yang kompeten untuk menggariskan kebijaksanaan revolusi bangsa Indonesia yang sedang melaksanakan revolusi dan bagi mereka yang tidak mentaatinya akan ditindak atau dibubarkan organisasinya.
- Bahwa setiap tindakan apapun yang diambilnya bukanlah hasil tuntutan atau desakan dari pihak lain manapun juga, melainkan hanya kehendaknya sendiri.
- Bahwa Nasakom adalah suatu kenyataan obyektif bahkan merupakan wajah revolusi bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga tidaklah mungkin untuk dihapuskan seperti Nas-nya, A-nya, ataupun Kom-nya. Kemutlakan Nasakom menjadi lebih dipentingkan lagi, karena tingkat revolusi nasional saat itu sedang berhadapan langsung dengan Malaysia sebagai proyek Nekolim dalam bentuk Dwikora.
- Masalah G30S akan segera diselesaikan setelah keadaan menjadi tenang seperti sediakala sebagai wahana utama yang secara mutlak memang diperlukan untuk mengumpulkan data-data sebenarnya dalam periode prolog. Fakta kejadian maupun analognya sedemikian rupa sehingga keputusan penyelesaian dapat seadil-adilnya. Karena itu tuduh-menuduh oleh berbagai pihak tidak dapat dibenarkan.

Namun, sebelumnya ucapan-ucapan Presiden Sukarno telah ikut mempertajam situasi politik. Dari ucapannya itu, ia telah secara tidak langsung membela PKI dan faham komunis di Indonesia. Sikapnya tersebut tercermin dalam ucapannya pada waktu rapat umum memperingati hari jadi Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) pada tanggal 1 Maret 1966 di Istana Olahraga Senayan. Presiden berkata, memang suatu revolusi ada rintangan-rintangan,

karena revolusi adalah penjebolan orde lama dan perubahan ke orde baru. Sedang bila sistem atau orde dijebol, maka sisa golongan itu atau sistem jebol itu tidak bisa begitu saja. Menurut ajaran Marxisme memang suatu golongan tidak akan menyerahkan kedudukannya dengan sukarela. Oleh karena itu tentu dalam penjebolan ini ada tantangan-tantangan Orde Lama yang kita jebol itu. Kita yakin segala tantangan akan hancur sama sekali.

Menyinggung adanya siaran gelap, Bung Karno berkata dengan lantang dan tanpa tedeng aling-aling, saya Marxis dan Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Presiden mengatakan, rapat umum ini sebagai demonstrasi kesetiaan kepada Bung Karno. Revolusi kita belum selesai.[26] Adalah goblok dan gila kalau ada orang yang mengatakan bahwa revolusi sudah selesai. Pada kesempatan yang sama, Subandrio dalam amanatnya menuduh bahwa tindakan para mahasiswa di sekitar Istana Merdeka sebagai suatu demonstrasi gila-gilaan. Ini bukan demonstrasi tetapi tindakan kontra revolusi.

Dalam suasana demikian, pemuda, mahasiswa, dan pelajar merusak kantor Departemen Luar Negeri dan membakar kantor berita RRC, Hsin Hua di Jakarta. Suatu aksi yang disokong oleh guru dan buruh dilancarkan ke DPR-GR. Pada waktu itu muncullah Radio Ampera yang menyiarkan perjuangan Tritura, karena Menteri Penerangan telah memerintahkan untuk memboikot berita-berita aksi Tritura.

Untuk menghadapi tindakan-tindakan mahasiswa tersebut, Presiden Sukarno memanggil parta-partai politik dan ormas ke Istana. Pada tanggal 10 Maret 1966, wakil-wakil partai politik dan Muhammadiyah dipanggil ke Istana dan diberi peringatan oleh Presiden. Partai-partai kemudian mengeluarkan pernyataan yang tidak membenarkan aksi-aksi yang dilakukan oleh pemuda, mahasiswa, dan pelajar karena dipandang "membahayakan jalannya revolusi dan merongrong kewibawaan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi ".

---

26. *Angkatan Bersendjata*, 1 Maret 1966

Pernyataan bersama tersebut berbunyi sebagai berikut :

a. Tidak dapat membenarkan cara-cara yang dipergunakan oleh mahasiswa, pelajar, dan pemuda yang akibatnya membahayakan revolusi Indonesia dan merongrong kewibawaan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.
b. Menyadari keadaan sekarang ini sangat gawat dan adanya aktivitas- aktivitas subversif dari pihak Nekolim.
c. Berketetapan hati dan bertekad untuk melaksanakan tanpa reserve Perintah Harian Presiden/Mandataris MPRS/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.[27]

Pernyataan ini kemudian diralat oleh wakil-wakil dari partai politik, sedang aksi-aksi mahasiswa semakin meningkat, karena tuntutan mereka mengenai pembubaran PKI tidak dipenuhi oleh Presiden.

Rakyat yang tidak puas terhadap tindakan-tindakan Pemerintah, kemudian memboikot sidang paripurna Kabinet tanggal 11 Maret 1966 dengan suatu demonstrasi besar. Sidang ini tidak berakhir sebagaimana mestinya karena tokoh-tokoh Orde Lama menyingkir ke Bogor setelah mendapat laporan adanya "pasukan-pasukan liar " di sekitar Istana.

Dalam sidang kabinet Dwikora yang disempurnakan tanggal 11 Maret 1966, Presiden selain menekankan pada Dwikora, yaitu konfrontasi terhadap Nekolim, juga menjelaskan tantangan political defiences, kode etik Menteri, Ajaran-ajaran Presiden, reshuffle kabinet, dan ajaran Marxisme. Mengenai *reshuffle* kabinet Dwikora yang disempurnakan, Presiden menegaskan bahwa tujuannya ialah untuk konfrontasi. Oleh karenanya Nekolim menjadi geger. Dus kabinet ini lebih mengefektifkan penghancuran Nekolim dalam segala bidang. Mengenai pembentukan kabinet Presiden menyatakan : "Syarat mutlak untuk bisa membantu pimpinan revolusi, ialah kekompakan di kalangan kabinet. Kabinet sekarang ini bukan kabinet koalisi, melainkan kabinet yang betul-betul mental kompak, betul-betul mengikuti

27. *Angkatan Bersendjata*, 11 Maret 1966

pimpinan. Sebagai seorang Marxis, kita harus *dialektisdenken*, dus kontras itu biasa".

Selanjutnya Presiden menjelaskan, bahwa kabinet adalah merupakan satu tim walaupun anggota-anggotanya terdiri atas golongan apa saja, tetapi menteri-menteri harus dapat bertindak diatas platform pimpinan dan ajaran-ajaran Presiden. Saya tidak menghendaki *on the omni face* atau sembunyi-sembunyi. Tingkat perjuangan kita selanjutnya perjuangan anti kolonialisme/ imperialisme/feodalisme sebagai syarat mutlak memperjuangkan politik.

Ketika sidang kabinet berlangsung, demonstrasi para pemuda dan pelajar di sekitar Istana tetap berlangsung. Dalam suasana demikian, Brigjen Sabur Komandan Pasukan Pengawal Presiden mengirim surat (secarik kertas) kepada Presiden bahwa di sekitar Istana terlihat pasukan yang tidak jelas identitasnya. Khawatir akan keselamatannya, pada saat kritis itu Presiden segera berangkat Ke Bogor bersama-sama dengan Dr. Subandrio, Chaerul Saleh dan Brigjen Sabur. Mereka menaiki helikopter. Kemudian disusul oleh Dr. Leimena lewat darát. Setelah Présiden ada di Bogor, kemudian menyusul Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen M. Jusuf, dan Brigjen Amir Machmud, untuk menemui Presiden Sukarno. Ketiga Pati ABRI itu berangkat setelah lebih dahulu menemui Letjen Soeharto, yang sedang sakit. Rencana ketiga Pati itu untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya disetujui oleh Letjen Soeharto, bahkan ia berpesan apabila diberi kepercayaan oleh Presiden, ia sanggup untuk mengamankan keadaan. Mereka berangkat ke Bogor dengan menggunakan pesawat helikopter.

Setibanya di Bogor mereka menghadap Presiden Sukarno menyampaikan pesan dari Letjen Soeharto tentang kesanggupannya mengatasi keadaan apabila Presiden memberikán kepercayaan kepadanya. Rupanya hal ini cukup menarik perhatian Presidén. Sejak saat itu sampai pukul 17.00 terjadi dialog yang terus terang, tetapi cukup menegangkan. Akhirnya beliau menanyakan bagaimana bentuk konkret dari pemberian kepercayaan itu. Para perwira itu

mengusulkan agar pemberian kepercayaan itu dituangkan dalam dokumen tertulis dan resmi. Ternyata mereka menyarankan agar Presiden Sukarno memberikan perintah tertulis kepada Jenderal Soeharto untuk bertindak atas nama Presiden mengatasi keadaan. Ternyata Presiden setuju. Ia memerintahkan ketiga perwira tinggi itu bersama Brigjen Sabur untuk menyusun konsep surat tersebut. Ketika itu di Istana Bogor sudah ada tiga Waperdam.[28] Ketiga Waperdam itu adalah Dr. Subandrio, Dr. Leimena, dan Chairul Saleh.

Setelah itu tim dibentuk yang diketuai oleh Jenderal Basuki Rachmat, sedang Sabur sebagai sekretaris. Setelah konsep dapat disetujui kemudian ditik, selanjutnya diberikan kepada Presiden. Sesudah Presiden membaca konsep tersebut dan ketiga Waperdam juga menyetujui isinya, kemudian Presiden memberikan tanda tangannya. Surat itulah yang dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret.

Setelah Letjen Soeharto menerima surat itu, ia langsung berangkat ke Markas Kostrad. Malam itu juga ia memberikan briefing kepada sejumlah pejabat ABRI, pimpinan parpol, dan ormas. Sesudah itu ia memerintahkan kepada Brigjen Sutjipto SH dan beberapa perwira hukum lainnya untuk menyusun konsep surat keputusan pembubaran PKI. Surat itu kemudian ditanda tangani oleh Letjen Soeharto atas nama Presiden Sukarno. Tindakan pembubaran PKI dan menyatakan komunisme sebagai ideologi terlarang di seluruh wilayah Indonesia diambil sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Surat Perintah 11 Maret.

Pada tanggal 12 Maret Presiden Sukarno sedang memimpin rapat para Panglima ABRI di Istana Negara. Hadir pada rapat itu tiga orang Waperdam, Menko Pertahanan Keamanan Mayjen Sarbini, Men/Pangal Laksamana Muljadi, Men/Pangau Laksamana Muda Sri Muljono Herlambang, serta Men/Pangak Jenderal

28. Wawancara dengan Jenderal (Purn) Amir Machmud, Jakarta, 14 April 1983. Lihat juga Dr. H. Subandrio, *Yang Saya Alami Peristiwa G30S*, cet. Pertama, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2006, hal.79

Sutjipto Judodiharjo. Seusai rapat tersebut, Presiden Sukarno kembali ke Bogor pukul 14.00 tanggal 12 Maret 1966 itu juga. RRI Jakarta menyiarkan keputusan Presiden yang ditanda tangani oleh Letjen Soeharto atas nama Presiden mengenai pembubaran PKI. Pembubaran PKI ini dituangkan dalam keputusan No. 1/3/1966.[29] Pada hari itu juga dikeluarkan pula perintah harian Presiden Panglima Tertinggi ABRI yang ditanda tangani oleh Letjen Soeharto ditujukan kepada seluruh anggota ABRI yang isinya antara lain :

a. Bagi rakyat hal ini berarti bahwa hati nurani rakyat yang selama ini dituangkan dalam perjuangan yang penuh keikhlasan, kejujuran, heroisme, dan selalu penuh tawakal kepada Tuhan YME benar benar dilihat, didengar, dan diperhatikan oleh Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang sangat kita cintai, dan juga merupakan bukti kecintaan Pimpinan Besar Revolusi kepada kita semua.

b. Setiap bantuan dukungan dan ikut sertanya rakyat dalam membantu saya hendaknya dilakukan tertib dan tidak bertindak sendiri-sendiri, setiap gerakan dan tindakan dalam rangka bantuan terhadap tugas-tugas ABRI hendaknya disalurkan dalam rangka Demokrasi Terpimpin.

Selanjutnya untuk menjaga tetap lancarnya roda pemerintahan baik di daerah-daerah maupun di pusat, Presiden mengeluarkan Pengumuman No. 3,[30] dan Pengumuman No. 4.[31] Keduanya bertanggal 12 Maret 1966. Begitu pula untuk mencegah spekulasi dan menjaga supaya bahan-bahan kebutuhan rakyat tidak hilang dari pasaran, dikeluarkan Pengumuman No. 2,[32] tanggal 12 Maret itu juga. Semua keputusan itu ditanda tangani oleh Letjen Soeharto atas nama Presiden.

---

29. *Kompas*, 13 Maret 1966
30. *Angkatan Bersendjata*, 14 Maret 1966
31. *Angkatan Bersendjata*, 14 Maret 1966
32. *Angkatan Bersendjata*, 14 Maret 1966.

Presiden Sukarno terkejut mendengar PKI di bubarkan, kemudian ia mengutus Dr. Leimena menemui Letjen Socharto untuk mengeceknya. Presiden Sukarno meminta pertanggungjawaban Letjen Soeharto. Kepada Leimena, Letjen Soeharto menjelaskan bahwa tindakan yang diambilnya, itulah jalan terbaik yang dapat dilakukannya untuk mengatasi keadaan. Sebetulnya Bung Karno juga sudah tahu kalau ia akan mengambil tindakan yang demikian. Rupanya Presiden belum merasa yakin penjelasan itu, sehingga ia mengutus ajudannya Kolonel Bambang Widjanarko. Setibanya di rumah Letjen Soeharto ia menyampaikan kekhawatiran Presiden bahwa apa yang terjadi sekarang adalah suatu coup atas usaha menggulingkan Bung Karno. Kepada Widjanarko, Letjen Soeharto menyatakan agar menyampaikan jaminan Letjen Soeharto bahwa tidak ada penggulingan kekuasaan terhadap Bung Karno.[33]

Kemudian Bambang Widjanarko melaporkan kepada Presiden hasil pembicaraannya dengan Letjen Soeharto pada hari itu juga. Presiden Sukarno merasa masih belum puas dengan penjelasan yang disampaikan oleh kedua utusan terdahulu. Kemudian tiga perwira tinggi yang membawa SP 11 Maret di panggil ke Bogor. Di hadapan Jenderal Basuki Rachmat, Jenderal M. Jusuf dan Jenderal Amir Machmud, Presiden menyatakan dengan nada marah bahwa Surat Perintah 11 Maret yang diberikan kepada Letjen Soeharto bukan untuk membubarkan PKI, tetapi hanya untuk menyelamatkan Pancasila, UUD 1945, dan revolusi. Tidak ada tercantum sepatah kata pun untuk membubarkan PKI, ucap Presiden dengan nada marah. Meskipun ketiga perwira tinggi itu menjelaskan kepada Presiden seperti apa yang telah disampaikan oleh Letjen Soeharto kepada Dr. Leimena, yaitu bahwa PKI dibubarkan karena PKI berkhianat dan akan menghancurkan Pancasila dan UUD 1945, namun Presiden tetap bersikeras pada pendiriannya, bahwa pembubaran PKI itu tidak benar serta tetap menyalahkan tindakan Soeharto. Sampaikan kepada Soeharto bahwa tindakannya itu salah, kata Presiden.

---

33. Keterangan Presiden Soeharto tentang surat perintah 11 Maret kepada Kapusjarah ABRI tgl 3 Maret 1976.

Keputusan pembubaran PKI itu disambut oleh rakyat dengan suatu pawai alegoris yang menunjukkan kekompakkan rakyat, dan ABRI. DPR-GR dalam sidangnya tanggal 16 Maret 1966 mendukung kebijaksanaan yang diambil oleh Pengemban Supersemar. Jenderal Soeharto menyerukan agar mahasiswa dan pelajar kembali ke bangku sekolah. Kepada semua parpol dan ormas juga disarankan agar tidak menerima anggota PKI dan ormasnya, serta kepada seluruh anggota partai terlarang itu segera melaporkan diri paling lambat akhir Maret 1966.

Sementara itu kesiapan untuk menyusun suatu kabinet baru dilakukan pula. ABRI berkesimpulan bahwa kabinet baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan :

a. Struktur kabinet sederhana, riil / rasional, mudah dikendalikan, tidak bersimpang siur, tegas tugas masing-masing menteri, efisien dan efektif dan mampu melaksanakan programnya.
b. Menteri-menteri jujur, cakap, kompak, dipercaya oleh rakyat karena membela Pancasila dan UUD 1945 dengan revolusioner sejati dan bukan antek-antek PKI/Gestapu atau petualangan politik plintat- plintut dan lain sebagainya.
c. Program kabinet mampu mengusahakan dan mewujudkan dalam waktu singkat kesejahteraan rakyat, terutama sandang dan pangan. Berani mengganyang segala bentuk kontra revolusi dan penyelewengan, serta mengetahui sejauh mana kemampuan dan kekuatan untuk tetap meneruskan konfrontasi terhadap Malaysia, Nekolim, dan menyelenggarakan Conefo (Confrence of the new Emerging Forces).[34]

Sebaliknya TNI AD mulai bulan April 1966 melancarkan kampanye kembali ke UUD 1945 secara murni. Pada tanggal 30 April 1966, Jenderal A.H. Nasution meminta dilakukannya

34. MPRS-RI Buku Keenam, Sidang Umum MPRS Keempat Tahun 1966, djilid 1-3 bahan-bahan Musyawarah Penerbitan MPRS, tahun 1972, hal.157

peninjauan kembali segala Ketetapan MPRS dari tahun 1960-1963 . Kejadian-kejadian tersebut akhirnya menimbulkan dualisme kepemimpinan nasional.

Untuk menanggapi perkembangan situasi, pada tanggal 5 Mei 1966, Waperdam Hankam ad. Letjen Soeharto memberikan pertanggung- jawaban kepada rakyat mengenai sikap ABRI terhadap Bung Karno sebagai berikut :

a. Tidak menempatkan Presiden sebagai Kepala Negara dalam perangkat liberalisme parlementer.
b. Juga tidak mendongkel-dongkel Presiden.
c. Sungguh-sungguh menempatkan Bung Karno menurut hakekat kemurnian kedudukan Presiden yang sebenarnya, pemimpin rakyat, penyambung lidah rakyat menurut azas dan sendi UUD 1945.[35]

Pernyataan Letjen Soeharto tersebut kemudian dipertegas dengan pernyataan pimpinan ABRI pada tanggal 5 Mei 1966, mencoba untuk mendudukkan semua lembaga negara sesuai dengan UUD 1945, yang antara lain berbunyi sebagai berikut : Untuk kemurnian pelaksanaan yang berazaskan dan bersendikan kepada UUD 1945, seperti pengejawantahan hati nurani rakyat, Angkatan Bersenjata mendukung kebijaksanaan Presiden Bung Karno mengenai :

a. Rencana ditetapkannya Undang-Undang Pemilihan Umum berdasarkan kekuasaan bersama-sama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal-pasal 2 ayat (1) dan 19 ayat (1), berhubung dengan pasal 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) UUD 1945.
b. Rencana diterapkannya Undang-Undang Susunan Dewan Pertimbangan Agung, berdasarkan kekuasaan bersama Presiden dan Perwakilan Rakyat pasal 16 ayat (1) dan 20 ayat (1) UUD 1945.

---

34. MPRS-RI Buku Keenam, Sidang Umum MPRS Keempat Tahun 1966, djilid 1-3 bahan-bahan Musyawarah Penerbitan MPRS, tahun 1972, hal.157.

c. Rencana ditetapkannya susunan Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung untuk Mengisi kehampaan akibat petualangan kontra revolusi Gerakan 30 September/PKI berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan sepakat bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rotong.

Pelaksanaan yang berazaskan, berlandaskan, berdasarkan, dan bersendikan kepada UUD 1945 dari fungsi :

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara).
b. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (Gotong Royong)
c. Dewan Pertimbangan Agung
d. Mahkamah Agung
e. Badan Pemeriksa Keuangan
f. Dan lain-lain lembaga.[36]

36. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Buku keenam, *Sidang Umum MPRS keempat Tahun 1966*, djilid 1-A, Bahan-bahan Musyawarah, Penerbitan MPRS, tahun 1972, hal.29-30

BAB III
UPAYA PKI UNTUK MEMBANGUN KEKUATAN KEMBALI

1. Kritik Oto Kritik : Tri Panji Partai

Menyadari kegagalan rencananya merebut pemerintahan Republik Indonesia sejak awal Oktober 1965, tokoh-tokoh PKI antara lain D.N. Aidit, M.H. Lukman, Njoto dan lain-lain berpencar meninggalkan Halim Perdanakusuma (Jakarta), sedangkan pasukan pendukung G30S/PKI mengundurkan diri ke Pondok Gede dan kemudian menghentikan perlawanannya. D.N. Aidit yang merasa kurang aman untuk tetap tinggal di Jakarta, menyingkir ke Jawa Tengah. Begitu pula M.H. Lukman, sedangkan Njoto pergi ke Sumatra. Dengan menghilangnya tokoh-tokoh PKI tersebut, Sudisman selaku Kepala Sekretariat Central Comite PKI, yang juga merupakan anggota Politbiro, merupakan pimpinan PKI yang paling senior dalam CC PKI.

Dengan Keputusan Presiden No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 PKI beserta ormas-ormasnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Walaupun pimpinan PKI mengetahui tentang keputusan pembubaran tersebut, mereka tetap melaksanakan aktivitas-aktivitasnya, yang menurut anggapan mereka PKI belum bubar. Mereka masih menganggap dirinya sebagai pimpinan PKI.

Sudisman, sebagai seorang dari anggota Dewan Harian Politbiro CC PKI tetap mengadakan kontak dengan pimpinan PKI lainnya melalui kurir. Ia mengadakan rapat-rapat gelap dengan kader-kader PKI yang masih berada di Ibukota, juga dengan kader-kader PKI yang datang dari daerah. Demikian pula hubungannya dengan D.N. Aidit dipelihara melalui kurir-kurir. Sebagai pimpinan senior ia bertindak sebagai pimpinan CC PKI di Jakarta.

Pada bulan Mei 1966, Sudisman mengeluarkan Statemen Partai Komunis Indonesia dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun PKI tanggal 23 Mei 1966 yang antara lain menetapkan

bahwa "Pekerjaan Partai Komunis Indonesia sekarang ditiitik beratkan pada penyusunan kembali Organisasi Partai ".[1]

Dengan ditangkapnya Njono Ketua CDR (Comite Djakarta Raya) PKI Jakarta, Sudisman memerintahkan Suyono Pradigdo untuk membantu Sukadi (Wakil Sekretaris PKI Jakarta Raya) memimpin dan membangun Kembali PKI di Jakarta. Ia memberi petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

- Penyusunan grup-grup supaya diusahakan dan diarahkan kepada sistem grup tiga orang.
- Kawan-kawan yang tidak sanggup lagi bekerja di Jakarta karena keadaan politik dan untuk penghidupan jangan dicegah, jika berniat meninggalkan Jakarta.
- Supaya diusahakan agar kader-kader penting yang masih sempat dan bisa bekerja dan dapat mempunyai tempat yang mantap dan dapat memecahkan kesulitan hidupnya secara "berdikari" dengan bekerja sebagai buruh atau berdagang kecil-kecilan.[2]

Pertemuan atau rapat-rapat gelap di Jakarta antara Sudisman, Suyono Pradigdo, dan Sukadi dilakukan sebanyak enam kali yaitu di jalan Tirtayasa, jalan Malabar, Taman Kebun Sirih, jalan Cibulan dan Tomang. Dalam rapat-rapat tersebut dibicarakan antara lain hal-hal yang menyangkut Pembangunan Kembali PKI, situasi umum, cara-cara penyelamatan dari operasi-operasi pembersihan, usaha untuk berada kembali ditengah-tengah kaum buruh, dan pembentukan grup-grup. Sebagai pelaksanaannya kemudian dibentuk 30 grup yaitu di lingkungan AURI 14, di lingkungan KKO 6, di lingkungan Ditkes 6, dan yang lainnya tersebar di berbagai lingkungan.

Selain rapat-rapat gelap, bertempat di sebuah rumah di Kayuawet Rawasari Jakarta, yang merupakan markas baru PKI illegal, Sudisman bersama Sukatno dan Rewang, pada bulan September 1966 berhasil menyusun suatu konsepsi Sudisman yang

1. Kupkamtib, *G30S/PKI*, Jakarta, 1978, hal.197
2. *Ibid.*, hal.198

baru berupa "Kritik Oto Kritik" (KOK) dan "Tri Panji Partai".[3] Konsepsi ini berhasil disebarkan dalam waktu yang relatif singkat ke seluruh Indonesia melalui kurir-kurir mereka. Kritik Oto Kritik (KOK) tersebut dimuat dan disebarluaskan juga dalam "Mimbar Rakjat" ke-9 tahun 1966.[4]

Kritik Oto Kritik menurut pengikut Marxis-Leninis adalah tradisi yang senantiasa dilakukan oleh komunis sesuai dengan ajaran Lenin. Intinya Partai Komunis senantiasa mengadakan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan, menyelidiki sebab-sebabnya dan mendiskusikan cara-cara untuk memperbaiki.

Menurut KOK, pengalaman G30S menunjukkan bahwa Politbiro yang dipilih tahun 1951 dan terpilih kembali melalui hasil Kongres VI tahun 1959, telah gagal melaksanakan tugasnya. Politbiro tidak pernah melakukan koreksi (seperti yang dilakukan oleh Musso tahun 1948), bahkan Politbiro telah menyelewengkan Marxisme-Leninisme yang akibatnya PKI gagal dalam mencapai tujuannya. Musso pernah mengadakan Kritik Oto Kritik dengan nama konsepsi "Jalan Baru" tahun 1948. Ia dianggap berhasil mempersatukan dan memperbaiki arah jalan perjuangan PKI sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945. Musso juga dianggap menemukan jalan ke luar bagi PKI untuk menjadi pelopor klas buruh Indonesia.

Dokumen KOK yang lahir setelah G30S/PKI itu menurut kalangan PKI dinilai jujur dan obyektif. Politbiro CC PKI (Sudisman) mengkritik sekeras-kerasnya kesalahan oportunis dan revisionis dalam bidang ideologi, politik dan organisasi (dalam hal ini PKI pimpinan Aidit) selama masa 1951 sampai dengan 1965. Inti kesalahannya adalah mereka tidak menjalankan prinsip-prinsip Marxisme-Leninisme tentang revolusi perebutan kekuasaan dan revolusi yang dilakukan dengan kekuatan senjata. Sebagai puncak kesalahannya adalah kebijaksanaan pimpinan PKI yang menyerahkan nasib dan gerakan yang gagal itu kepada kebijaksanaan Presiden Sukarno.

3. *Persepsi*, No.1 Th.IX Bulan Januari-Februari-Maret, 1987, hal.37
4. Kopkamtib, *op.cit.*, hal.199

Selanjutnya KOK merumuskan konsep strategi baru PKI yang menganjurkan digunakannya konsep yang di kembangkan oleh Mao Ze Dong yaitu perang Revolusioner. Hal itu menurut mereka sangat mungkin dilaksanakan di Indonesia. Lingkungan Indonesia memadai untuk penerapannya karena situasinya tidak jauh berbeda dengan Cina. Partai Komunis Cina (PKC) di bawah pimpinan Mao Ze Dong berhasil memperalat petani. Kekuatan petani di Cina dimanfaatkan sebagai gerakan massa dan desa sebagai basis pemberontakan atau revolusi. Hal ini berbeda dengan ajaran Marxis-Leninis yang menentukan kaum buruh sebagai kekuatan pokok revolusi dalam setiap revolusi komunis di manapun. Namun Mao berhasil membuktikan kebenaran teorinya membangun PKC dengan menggunakan petani sebagai unsur kekuatan revolusi dan berhasil mendirikan negara Republik Rakyat Cina pada tanggal 1 Oktober 1949.

Karena itulah Politbiro CC PKI memandang perlu menyusun analisa lengkap agar dipelajari oleh sisa-sisa anggota PKI untuk mencegah terulangnya kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan yang sama. Dengan melakukan Kritik Oto Kritik dalam bidang ideologi, politik dan organisasi, tujuannya adalah untuk membangun kembali PKI dan agar kaum Marxis-Leninis Indonesia mengarahkan perhatian untuk menciptakan persyaratan revolusi agraria kaum tani bersenjata dengan membangkitkan, mengorganisasi, dan memobilisasi kaum tani dengan revolusi agraria yang anti feodal.

G30S/PKI, bukan dianggap sebagai suatu revolusi karena suatu revolusi hakekatnya adalah merebut kekuasaan negara dengan kekuatan bersenjata, dengan poros kekuatan pada kaum buruh dan tani di bawah pimpinan PKI. Sementara yang terjadi hanyalah avonturisme militer yang meniru cara-cara borjuis. Revolusi seharusnya berdasarkan pada puncak kebangkitan revolusioner dari rakyat dan musuh sedang dalam puncak kelemahannya. Sedangkan G30S/PKI dilaksanakan justru sebaliknya. Karena tidak didasarkan atas kekuatan massa rakyat tetapi dilaksanakan hanya oleh komplotan tertentu saja. G30S dilaksanakan tidak berdasar pada kebangkitan

revolusioner rakyat yang matang dan siap mengangkat senjata, tetapi dilakukan ketika musuh sedang dalam keadaan terkonsolidasi dan kuat dalam segala bidang. G30S menurut KOK telah mengakibatkan kerusakan yang luar biasa dan terbesar dalam sejarah PKI.

KOK yang ditulis Sudisman dan kawan-kawannya ini, khusus mengenai kritik terhadap G30S, bagi kita merupakan dokumen terpenting karena secara langsung merupakan pengakuan PKI dan bukti bahwa PKI adalah dalang perebutan kekuasaan tersebut. Secara singkat dijelaskan di sini inti pokok isi KOK.

a. Kritik di bidang Ideologi

Kelemahan di bidang Ideologi menurut KOK adalah bersumber kepada pimpinan-pimpinan PKI yang kurang menguasai Marxisme-Leninisme, sehingga mereka tidak berhasil memadukan teori revolusioner dengan praktek konkrit revolusioner Indonesia, bahkan telah menempuh jalan yang terlepas dari pedoman teori. Latar belakang sosial mereka (para pimpinan PKI : Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman) bukanlah dari keturunan atau proletar tetapi dari borjuis kecil. Pada umumnya orang tua mereka mempunyai perusahaan-perusahaan kecil, memiliki tanah-tanah pertanian secara perseorangan. Kebiasaan dan pikiran mereka yang dibina sejak kecil terbawa masuk ke dalam partai sehingga timbul subyektivisme dalam meninjau pelbagai masalah. Subyektivisme merupakan kelemahan ideologi yang mendorong timbulnya oportunisme, sehingga berpengaruh terhadap keputusan- keputusan yang diambil PKI.

Situasi pada tahun 1954, pemimpin PKI mengeluarkan kebijaksanaan mencapai kemenangan melalui kemungkinan menguasai Lembaga Perwakilan Rakyat (Parlemen). Sehingga dalam Kongres V bulan Maret, Aidit mengadakan perbaikan strategi dasar, "jalan baru" seperti yang diajukan Musso dengan teori "jalan baru" yang harus ditempuh untuk memenangkan revolusi". Teori ini menghasilkan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP). Intinya, PKI menempuh dua jalan untuk mencapai

tujuannya yaitu jalan legal atau damai dan jalan illegal yang tertutup. Untuk mencapai tujuan ini PKI memerlukan sosok pimpinan yang dapat bekerja sama dengan kekuatan sosial lainnya. Aidit dianggap memenuhi persyaratan sehingga ia terpilih sebagai Sekretaris I CC PKI.[5]

Masalah lain yang menyebabkan lemahnya ideologi adalah menyusupnya revisionisme modern ke dalam PKI. Sesuai dengan kebijaksanaan Partai Komunis Uni Sovyet (PKUS) yang pada dasarnya mengajarkan bahwa sosialisme dapat dicapai secara damai melalui jalan perlementer atau jalan damai. Kebijaksanaan itu kemudian diberlakukan di PKI dan disahkan pada Kongres VI tahun 1959. Garis ini kemudian diperkuat dalam Kongres VII tahun 1962, tanpa pernah dikoreksi melalui Kritik Oto Kritik (KOK). Istilah revisionis ini pertama kali dikembangkan oleh Mao, ketika Nikita Kruschev menggantikan Stalin sebagai pemimpin PKUS. Kebijaksanaan damai (peaceful coexistence) yang diambil oleh Kruschev setelah mengadakan pendekatan dengan Amerika Serikat, karena menyadari kedahsyatan perang nuklir. Menurut Kruschev perang nuklir akan menghancurkan Komunisme. Sikap politik Kruschev ini mendorong Mao menyebut Komunisme Rusia sebagai revisionis dan mengembangkan teorinya sendiri yang disebut Maoisme (gagasan Mao yang teruji berhasil memenangkan revolusi di Cina.[6]

Menyusupnya ideologi borjuis ke dalam tubuh PKI adalah salah satu penyebab lemahnya ideologi penganutnya. Hal ini terjadi ketika upaya PKI menggalang Front Persatuan Nasional antara lain dengan borjuis nasional. Banyak pimpinan pimpinan PKI yang mendapat kedudukan di pemerintahan, banyak pimpinan PKI yang bersikap borjuis, karena ikut merasakan dan berusaha mempertahankan kedudukan yang diterima. Dalam perjalanan politiknya mereka mulai terikat dengan borjuis nasional sehingga kemudian timbul sikap yang tidak tegas dalam memperjuangkan

5. *Persepsi*, Desember 1989, hal.20
6. *Persepsi*, bulan Januari, Februari, Maret, tahun 1987, hal.32

kepentingan partai. Mereka lebih mementingkan kepentingan persekutuannya dari pada kepentingan kaum proletariat. Dalam tindakan terlihat semakin revisionis, merevisi ajaran Marxisme-Leninisme tentang perjuangan kelas, negara dan revolusi, sehingga mereka menjadi kader-kader PKI yang diborjuiskan atau klas buruh yang diborjuiskan.

b. Kritik di bidang Politik : Avonturisme MKTBP

Dalam sidang Pleno CC PKI pada tahun 1951, Aidit dibantu oleh M.H. Lukman dan Njoto berhasil menyingkirkan pimpinan-pimpinan sebelumnya yaitu Alimin dan Tan Ling Djie sebagai kelompok muda yang ambisius. Aidit dan kawan-kawannya mencoba membenahi PKI, yang telah hancur akibat pemberontakan Madiun tahun 1948. Pergantian pimpinan ini tidak melalui pemilihan sebagaimana biasanya berlaku.

Pada tahun 1954, PKI melihat peluang mencapai demokrasi rakyat melalui penguasaan parlemen. Dalam Kongres tahun 1954 dikeluarkan strategi yang diajukan Aidit yaitu "Jalan Baru yang harus ditempuh untuk memenangkan revolusi". Strategi ini menghasilkan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP). Untuk melaksanakannya harus mampu bekerjasama dengan kekuatan sosial lainnya.

Dengan strategi MKTBP di bawah pimpinan Aidit, PKI berhasil menjadi partai terbesar nomor empat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Keberhasilan ini memperkuat kedudukan Aidit. Bahkan dalam Kongres VI tahun 1959 ia terpilih sebagai Ketua CC PKI didampingi oleh M.H. Lukman, Njoto, dan Sudisman sebagai pimpinan lapisan pertama serta Sakirman, Njono, B.Oloan Hutapea, dan Peris Pardede sebagai pimpinan lapisan kedua.

Kongres Nasional PKI VI tahun 1959, mempertegas dukungan PKI kepada Sukarno dengan kebijaksanaan Nasakom. Di sini PKI merubah kebijaksanaannya dari bentuk partai kader ke partai massa sebagai upaya memperoleh dukungan di kalangan rakyat.

Dalam KOK disebutkan bahwa jalan damai yang diterapkan oleh PKI untuk mencapai demokrasi rakyat sebagai tingkat peralihan ke sistem sosialis secara politis bertentangan dengan azas Marxisme-Leninisme. Marxisme-Leninisme mengajarkan untuk mencapai sosialisme harus melalui jalan revolusi proletar. Untuk negeri jajahan atau bekas jajahan atau negeri setengah feodal dapat melalui tingkat demokrasi rakyat terlebih dahulu.[7] Kebijaksanaan politik PKI dianggap semakin tenggelam ke dalam perjuangan parlementer dan perjuangan legal lainnya. Bahkan para pemimpin PKI menjadikan cara damai sebagai prinsip perjuangan bukan sebagai alat, sehingga terjadi kekaburan antara jalan damai dengan perjuangan revolusi bersenjata.

Kebijaksanaan jalan damai dan kemungkinan jalan tidak damai untuk mencapai sosialisme yang dikumandangkan oleh pimpinan PKI, oleh KOK dianggap sebagai dualisme. Dalam kenyataannya pimpinan PKI tidak pernah mempersiapkan kaum buruh dan tani menghadapi kemungkinan jalan tidak damai, sehingga dengan gagalnya G30S, dalam waktu singkat anggota PKI dan orang-orang revolusioner terbunuh sehingga organisasi PKI menjadi pasif. Keadaan ini menurut KOK tidak akan terjadi apabila kebijaksanaan politik PKI tidak menyimpang dari ajaran Marxisme-Leninisme.

Kebijaksanaan politik yang diambil PKI tahun 1954 dalam Kongres V adalah MKTBP. Metode ini dimunculkan sebagai jawaban atas persoalan metode perjuangan yang timbul di kalangan kader-kader PKI mengenai revolusi Indonesia. Kalangan partai mengkritik bahwa ada di antara kader dalam melihat dan mempelajari perjuangan rakyat bersenjata rakyat Tiongkok hanya melihat persamaan-persamaannya saja. Sebaliknya pimpinan partai mengemukakan perbedaan-perbedaan sebagai syarat yang harus diperhitungkan.[8] MKTBP oleh Aidit diperkenalkan sebagai metode revolusi Indonesia, pertama, mengenai perjuangan gerilya

7. Demokrasi Rakyat adalah kekuasaan politik rakyat di bawah pimpinan kias buruh yang bertugas mengadakan perubahan-perubahan demokrasi di lapangan agraria.

8. Jacques Leclerc, "Aidit dan Partai pada Tahun 1950". *Prisma*, LP3ES, 1982, hal.79

di desa-desa terdiri dari buruh dan tani miskin , kedua, aksi-aksi revolusioner oleh kaum buruh terutama buruh transport di kota- kota, dan ketiga, bekerja intensif di kalangan angkatan bersenjata musuh.

Pelaksanaan MKTBP tidak lepas dari garis politik yang ditempuh oleh PKI, yaitu perjuangan secara damai melalui parlementer. Hal itu sesuai dengan program partai, mengubah imbangan kekuatan. Jadi kegiatan politik MKTBP merupakan kegiatan membangkitkan dan mengorganisasi massa dalam rangka garis politik menggalang Front Persatuan Nasional, khususnya bersatu dengan kekuatan tengah.

Dikalangan kaum tani, garis politik PKI di lapangan agraria sesuai dengan kepentingan mayoritas kaum tani, sehingga mendapat kemajuan yang cukup baik tetapi belum mencapai taraf tinggi yaitu melenyapkan feodalisme. Di kalangan kaum buruh, kegiatan PKI juga berkembang meskipun belum mencapai seperti yang diinginkan. Juga di kalangan Angkatan Bersenjata tidak nyata hasilnya.

KOK dengan keras mengkritik MKTBP, mulai dari ide dicetuskannya, bahwa menggunakan pengalaman negeri lain secara dogmatis adalah salah. Tetapi menolak menggunakan pengalaman negeri lain yang telah teruji kebenarannya sebagai salah satu teori revolusi juga salah. MKTBP bukanlah hasil pengolahan pengalaman secara kritis dari negeri lain yang dipadu dengan praktik kongkrit Indonesia. Perjuangan kaum tani untuk melawan penghisap dan penindas feodal apabila mendapat kebijaksanaan yang tepat dapat berkembang ke bentuknya yang tertinggi yaitu revolusi agraria. Dan revolusi itu akan sempurna apabila dilakukan dengan kekuatan bersenjata di bawah pimpinan PKI. Dalam kenyatannya ketika kaum tani Indonesia bergerak bangkit karena garis politik PKI di bidang agraria, gerakan mayoritas kaum tani dibelokkan menjadi gerakan reformis seperti Gerakan Kebudayaan Baru, Gerakan 1001 Malam, bukan gerakan tani revolusioner yaitu revolusi agraria anti feodal.

Gerakan di kalangan buruh sekalipun mengalami kemajuan dengan aksi-aksi yang dilakukan, seperti aksi-aksi pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing milik Belanda, Inggris, dan Belgia, tetapi hasilnya tidak untuk partai. Hal ini terjadi karena pimpinan partai menganggap bahwa perusahaan-perusahaan itu adalah milik pemerintah atau milik nasional. Malahan kemudian aksi-aksi buruh ditekan.

Mengenai Angkatan Bersenjata, ada asumsi bahwa ABRI bukan Angkatan Bersenjata revolusioner. Bekerja di kalangan Angkatan Bersenjata diartikan sebagai mengintegrasikan alat negara yang terpenting dengan rakyat atau mengeratkan hubungan antara rakyat dengan Angkatan Bersenjata. Ini juga berarti mengintegrasikan alat-alat kekerasan, klas penindas dan klas tertindas. Hal ini karena adanya pandangan bahwa Negara RI bukan negara borjuis dan Angkatan Bersenjata pun bukan alat borjuis. Pimpinan partai lupa bahwa ABRI walaupun lahir pada tahun 1945 dalam revolusi, namun sepenuhnya berada dalam tangan reaksioner dan dengan sendirinya menjadi alat kekuasaan yang mengawasi negara. Meskipun banyak Bintara dan Tamtama anak-anak kaum buruh dan tani, tidak akan merubah kedudukan ABRI sebagai alat kekuasaan yang mengabdi kepada kepentingan kelas berkuasa.

Untuk memenuhi tugas memimpin revolusi rakyat yang anti imperialis, anti feodalis, dan anti kapitalis, maka kaum Marxis-Leninis harus tegas meninggalkan jalan damai revisionis dan mengibarkan revolusi rakyat bersenjata seperti pengalaman revolusi rakyat Cina dengan membangun desa-desa terbelakang menjadi basis yang maju, terkonsolidasi secara politik, militer, ekonomis dan budaya.

Dalam mengembangkan garis politik umum tentang kemungkinan peralihan secara damai, pimpinan PKI memperkenalkan "teori dua aspek" dalam kekuasaan negara RI. Aspek yang "anti rakyat" dan aspek yang "pro rakyat". Pimpinan PKI berusaha mengembangkan secara berangsur-angsur aspek "pro rakyat" dan melikuidasi yang "anti rakyat". Kebijaksanaan ini oleh KOK dianggap sebagai puncak penyelewengan Marxisme dan Leninisme. Teori ini

dianggap anti revolusi, teori ini mengajarkan bahwa perjuangan PKI hanyalah mendorong agar aspek "pro rakyat" makin besar dan bisa mendominasi. Sedangkan kekuatan "anti rakyat" dikeluarkan dari pemerintah. Teori ini juga disebut "teori dari atas dan dari bawah". Dari atas berarti PKI harus mendorong kekuasaan negara dengan melakukan tindakan- tindakan revolusioner dan dengan mengadakan perubahan-perubahan personalia pada aparatur negara. Sedangkan dari bawah adalah membangkitkan, mengorganisasi,dan memobilisasi rakyat untuk mencapai perubahan.

Dalam KOK disebutkan bahwa untuk membersihkan diri dari kaum oportunis, PKI harus membuang teori dua aspek dalam kekuasaan negara dan kembali kepada ajaran Marxisme-Leninisme tentang negara. Negara adalah suatu alat kekuasaan klas tertentu dan tidak dapat didamaikan dengan musuhnya.

Kelemahan politik dapat dilihat dari kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinan PKI. Pengaruh kaum borjuis terlihat kerjasama yang mereka lakukan menyebabkan semakin hilangnya "kebebasan", karena terlalu banyak memberikan konsesi kepada borjuis nasional sampai-sampai para pemimpin PKI kehilangan peran untuk bertindak secara bebas. Salah satu contohnya adalah sikap pimpinan PKI terhadap Sukarno. PKI tidak berani bersikap menentang Sukarno. Sebaliknya selalu menonjolkan persamaan dan persatuan dengan Bung Karno. Tidak ada politik Bung Karno yang tidak disokong PKI. Sampai-sampai pimpinan PKI mengakui Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dan pemimpin aspek rakyat dalam kekuasaan negara RI. Dalam tulisan, ucapan, dan pidato pimpinan PKI, sering dikemukakan bahwa tindakan mereka didasari oleh Marxisme-Leninisme tetapi juga berdasarkan ajaran Bung Karno, antara lain tentang Nasakom. Dengan demikian pimpinan PKI tidak mampu mendidik klas buruh dan rakyat pekerja, bahwa pimpinan partai harus berada di tangan golongan proletariat.

Sejak tahun 1960-an, PKI sangat bangga dengan Manipol, ada anggapan bahwa perjuangan rakyat Indonesia di bawah pimpinan PKI berhasil membawa rakyat untuk mengakui kebenaran PKI.

Dengan asumsi bahwa melaksanakan Manipol secara konsekuen sama halnya dengan melaksanakan program PKI. KOK meyalahkan anggapan ini, karena Manipol juga diterima oleh partai lawan PKI. Mereka menerima bila dianggap sesuai dengan program mereka. Program yang lain peranan memimpin klas buruh dan revolusi agraria tidak mereka terima. Yang mereka terima pun belum tentu dilaksanakan. Jadi kaum lawan PKI menerima Manipol hanya untuk menyesuaikan diri dengan arus keadaan. KOK menganggap bahwa PKI menerima Manipol yang juga diterima oleh kaum borjuis nasional, berarti program kaum borjuis nasional diterima oleh PKI. Demikian antara lain yang ditulis dalam naskah KOK tentang kebijaksanaan politik PKI.

c. Kritik di bidang Organisasi

Dalam masalah organisasi, KOK menyalahkan Politbiro CC PKI karena melakukan cara yang salah dan bertentangan dengan prinsip Marxisme-Leninisme. Kesalahan pertama ialah memberikan kesempatan kepada pimpinan PKI membangun saluran tersendiri diluar kontrol Politbiro dan CC. Disini Politbiro tidak ditempatkan pada posisi yang semestinya, tidak dijadikan tempat untuk memecahkan segala soal mengenai urusan partai dan revolusi. Melalui saluran-saluran tersendiri itu pimpinan dapat mengambil langkah-langkah politik dan organisasi, termasuk penempatan kader, sedangkan Politbiro cuma mengesahkan langkah-langkah yang diambil pimpinan.

Kedua, adanya sikap tidak kritis baik dalam Politbiro, CC, maupun badan-badan lain terhadap pimpinan. Sudah menjadi kelaziman, apa yang dikatakan oleh pimpinan dianggap benar, tanpa melalui diskusi maupun pemikiran yang mendalam. Hal ini karena kurangnya pemahaman teori, sehingga kurang landasan untuk para bawahan menyangkal pimpinan meskipun dianggap keliru. Lebih-lebih setelah dibentuk grup teori. Bila ada diskusi, kelompok ini saja yang aktif, sedangkan pimpinan seolah terpisah dari teori Marxisme dan Leninisme. Di samping itu ada pandangan, adalah tidak

normal apabila ada perbedaan prinsip dengan pimpinan. Suasana itu menyebabkan kader enggan mengemukakan pendapatnya. Sebenarnya banyak kader yang tidak menyetujui garis politik dan organisasi yang oportunis serta revisionis, namun pikiran dan perasaan kader itu tidak pernah ditanggapi dengan baik.

Ketiga, dalam tubuh PKI telah ditanamkan kepercayaan yang membesar-besarkan persatuan bulat di kalangan anggota, seolah tidak ada perbedaan pemikiran mengenai hal-hal yang prinsip.

Perubahan taktik PKI dari bentuk partai kader ke partai massa, hal ini disesuaikan dengan cita-citanya merebut kekuasaan negara melalui slogan "pelopor klas proletar yang memimpin perjuangan pembebasan rakyat". Kemudian PKI mengadakan perluasan anggota dan organisasi tanpa mengindahkan kemampuan organisasi untuk mendidiknya dan mengurusnya. Sesungguhnya mengejar jumlah anggota menunjukkan longgarnya anggota organisasi PKI. Setiap orang yang menyatakan setuju dengan program PKI diterima menjadi anggota, sehingga tidak jelas bedanya antara anggota partai atau anggota organisasi massa yang berada di bawah pimpinan partai. Disini syarat keanggotaan berdasarkan pelopor klas buruh ditinggalkan sama sekali. Menurut KOK, kebijaksanaan ini adalah cara liberal yang tidak terpisah dengan politik jalan damai. Sesungguhnya karakter massa bukan ditandai oleh banyaknya anggota melainkan oleh hubungan antara anggota dengan garis politik partai yang membela kepentingan rakyat dan syarat kepeloporan dipegang teguh terdiri dari orang-orang terbaik dari proletariat yang dipersenjatai dengan Marxisme-Leninisme.

Kebijaksanaan yang ditempuh partai dalam rangka meluaskan keanggotaan dan organisasi ialah melalui *plan-plan* jangka pendek yaitu plan 3 tahun pertama, plan 3 tahun kedua, dan plan 4 tahun. Dalam prakteknya hanya merupakan penambahan anggota yang tidak berdisiplin dan tidak menghayati nilai-nilai Marxisme dan Leninisme. Bahkan dalam plan 4 tahun, semua kader tinggi diwajibkan menamatkan pendidikan tingkat akademi, kader menengah harus menamatkan Sekolah Lanjutan Atas dan kader

bawahan harus menamatkan Sekolah Menengah Pertama. Oleh karena itu PKI banyak membangun akademi, perguruan, dan kursus-kursus. Tokoh-tokoh gerakan rakyat diharuskan membuat empat karangan atau skripsi untuk mendapat gelar sarjana Marxis.

Dalam pelaksanaannya yang dipentingkan bukan pendidikan dan latihan kader Marxis tetapi pendidikan intelektual untuk mengisi keperluan pekerjaan dan pelbagai kedudukan di lembaga-lembaga negara. Hal ini bertentangan dengan semboyan mengintegrasikan diri secara total dengan kaum tani, itu omong kosong saja, bukan mengirimkan kader-kader terbaik ke desa, tetapi menarik kader- kader dari desa ke kota atau ke pusat. Jadi di dalam bidang organisasi, PKI telah melakukan kesalahan-kesalahan yang prinsip. Jelas ada usaha menjadikan PKI menjadi partai massa, bukan partai kader, sehingga yang diutamakan adalah kuantitas dan bukan kualitas. Akibatnya, mau tidak mau garis liberal di dalam organisasi akan dan telah muncul. Hal ini memang sukar dihindari, karena adanya garis "damai" yang diikuti PKI pada waktu itu sebagai garis politiknya.

d. Jalan Keluar Menurut Kritik Oto Kritik

Setelah mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesalahan partai dalam periode sesudah tahun 1951 yang telah menimbulkan kerusakan-kerusakan berat pada PKI dan gerakan revolusioner rakyat Indonesia, maka tugas mendesak yang dihadapi oleh kaum Marxis-Leninis Indonesia dewasa ini ialah membangun kembali PKI sebagai partai yang bersih dari subyektivisme, oportunisme, dan revisionisme modern. Untuk membangun kembali partai Marxis-Leninis, kader Partai di semua tingkat dan anggota-anggota partai (PKI) haruslah sependapat tentang kesalahan-kesalahan partai di masa lampau dan mendapatkan jalan keluar (jalan baru) yang harus ditempuh, sebagai pengarah perjuangan di masa yang akan datang. Untuk itu, perlu diadakan gerakan pembetulan pikiran di seluruh partai. Dengan gerakan pembetulan pikiran itu maksudnya

adalah untuk mengubah pikiran yang salah di masa yang lampau menjadi pikiran yang benar. Untuk dapat menempuh jalan yang benar, mutlak harus meninggalkan jalan yang salah.

Jalan keluar/jalan baru itu dapat disimpulkan menjadi tiga pokok :

Pertama, karena revolusi itu adalah revolusi agraria kaum tani bersenjata, maka segala perhatian harus dicurahkan untuk membangun kembali partai di desa-desa.

Kedua, di samping mempelajari ajaran ajaran Marx, Engels, Lenin, dan Stalin, secara khusus juga mempelajari pikiran-pikiran Mao.

Ketiga, perhatian terbesar harus dicurahkan untuk memecahkan masalah membangkitkan, mengorganisasi dan memobilisasi kaum tani. Pengintegrasian partai dengan kaum buruh tani terutama dengan buruh tani yang miskin harus sungguh-sungguh diwujudkan.

Jalan keluar/jalan baru yang harus ditempuh oleh para kader untuk membangun kembali partainya, disimpulkan dalam bentuk Strategi PKI yang baru, yang dikenal dengan nama *Tri Panji Partai.* Panji pertama, pembangunan kembali partai; panji kedua perjuangan tani bersenjata (Perjuta) di bawah pimpinan klas buruh; panji ketiga Front Persatuan Revolusioner atas dasar persekutuan buruh dan tani di bawah pimpinan buruh.[9]

Tri Panji yang baru ini dianggap lebih jelas dan tidak memberi kesempatan berjangkitnya avonturisme dalam politik dan ideologi. Tri Panji lama yang dirumuskan dalam Kongres VI PKI berbunyi:

- Menggalang Front Persatuan Nasional dengan tekanan menarik borjuis nasional.
- Membangun terus PKI ke seluruh negeri.
- Melaksanakan tuntutan-tuntutan revolusi Agustus 1945.[10]

---

9. Politbiro CC PKI, Perang Rakyat di Jalan Kemenangan Revolusi Indonesia, Djakarta, 1967, hal.19 (manuskrip). Lihat juga Sekneg, *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia,* Jakarta, 1994, hal.163

Demikianlah, Politbiro telah melakukan Kritik Oto Kritik atas kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan partai dalam periode sesudah tahun 1951, yang telah menimbulkan kerugian- kerugian yang berat bagi partai (PKI) dan seluruh gerakan revolusionernya.

2. Gerakan PKI illegal di Jawa Tengah

Central Comite PKI Blitar Selatan, pada tanggal 10 November 1967 menugasi Pono (Supono) pergi ke Jawa Tengah untuk membentuk Comite Proyek (Compro). Dalam perjalanan ke Jawa Tengah di Gorang- Gareng (Compro Lawu) Supono bertemu dengan Towidjan, Wakil Sekretaris Comite Daerah Besar PKI ilegal Jawa Tengah. Pada tanggal 19 Desember 1967 di desa Biting (Wonogiri) diadakan rapat Comite Daerah Besar Jawa Tengah yang dihadiri Supono, Towidjan, Hamim, H.S. Bardi, dan Suratmin. Rapat memutuskan pembentukan beberapa Comite Proyek di Jawa Tengah :

- Comite Proyek Muria dipimpin H.S. Bardi
- Comite Proyek Sindoro-Sumbing dipimpin oleh Hamim.
- Comite Proyek Merapi Merbabu dipimpin oleh Suratmin

Towidjan ditugaskan untuk membina kota-kota.[11]

Empat bulan kemudian, pada tanggal 15 Maret 1968 di desa Janti Sleman (Yogyakarta) diadakan rapat evaluasi. Dalam rapat ini dilaporkan bahwa Comite Proyek Merapi Merbabu dan Muria telah dibentuk walaupun menghadapi kesulitan. Disamping itu pada tiap kecamatan di Jawa Tengah telah dibentuk kekuatan inti yang beranggotakan 3-5 orang untuk dilatih pada Sekolah Perlawanan Rakyat (SPR) sebagai tenaga serbaguna partai dalam menggerakkan massa.

Kemudian pada tanggal 20 Juli 1968 di desa Kerjen (Klaten) diselenggarakan pula rapat Comite Daerah Besar yang dihadiri

10. D.N. Aidit, *Untuk Demokrasi Persatuan Mobilisasi*, Dep. Agitrop CC PKI, Djakarta, 1962, hal.8
11. Kopkamtib, *op.cit.*, hal.224

oleh Pono, Towidjan, Syratub, H.S. Bardi dan Hamim. Rapat itu membahas laporan-laporan tentang kesulitan membangkitkan perlawanan kaum tani, karena mereka mempunyai kekuatan gerilya. Dalam rapat itu diputuskan untuk menyederhanakan pelajaran Dialektika Historis Materialisme (DHM) agar mudah diterima oleh kader-kader. Di samping itu diputuskan untuk menghapuskan formasi Detasemen Gerilya (Detga) dengan hanya membentuk regu-regu gerilya atau grup-grup kecil yang tenaganya diambil dari pemuda-pemuda desa.

Pada tanggal 1 November 1968 Comite Daerah Besar Jawa Tengah mengadakan rapat di desa Lanjaran (Boyolali) dan mengangkat Pono sebagai Sekretaris Comite Daerah Besar PKI Ilegal Jawa Tengah. Dalam rapat ini dibahas organisasi dan gerakan PKI Ilegal dalam rangka penyusunan kekuatan bersenjata, dan menghapuskan Comando Proyek- Comando Proyek yang digantikan dengan Front dan Sektor-sektor .

Jawa tengah dibagi atas tiga Front :

a. Front Selatan, meliputi sektor Gunung Kidul di bawah pimpinan Griwo, sektor Kemalang dan Yogya dipimpin Riman, sektor Jatianom/Pedan dipimpin Wardi, sektor Boyolali dipimpin Suto, dan sektor Getasan dipimpin oleh Hamim.
b. Front Tengah, meliputi sektor Salatiga, Purwodadi di bawah pimpinan Djoyo alias Topo dan sektor Demak.
c. Front Utara, dipimpin oleh Sastro yang meliputi sektor Pati Utara dan sektor Blora Selatan.[12]

Front front tersebut langsung di bawah Komando CDB Jawa Tengah :

- Bakar (H.S. Bakri) sebagai Komandan.
- Supono / Pono sebagai Komisaris Politik.

12. Kopkamtib, *op.cit.*, hal.225

- Hamim bagian pendidikan dan Agitprop.
- Towidjan mengurusi kota-kota dan Suratmin bertugas membuka hubungan dengan daerah-daerah di luar Jawa Tengah untuk bekerjasama dalam rangka pembentukan Central Comite PKI ilegal yang baru setelah mengalami kegagalan di Blitar Selatan.

Dalam melakukan gerakannya mereka menggunakan prinsip komando yang sentral-asidental yaitu sistiem komando yang bersifat umum serta desentralisasi mutlak (inisiatif penuh pada sektor-sektor). Pada waktu itu kekuatan persenjataan dari Komando CDB Jawa Tengah sudah tersebar di semua front . PKI ilegal menggunakan Gunung Slamet sebagai pangkalan gerilya, sebagai batu loncatan ke Jawa Barat dengan sasaran daerah Majenang.

Compro Merapi Merbabu Compleks (MMC)

Daerah Compro Merapi Merbabu Compleks di Jawa Tengah sudah dipersiapkan dan dibina oleh PKI sejak tahun lima puluhan. Daerahnya yang berhawa dingin dan berbukit-bukit sangat menguntungkan bagi kegiatan PKI. Di daerah ini pula PKI ilegal berusaha benar-benar mempengaruhi masyarakat pedesaan yang miskin agar masuk dalam barisan. Compro Merapi Merbabu dipimpin oleh Suratmin. Dalam melakukan aksinya PKI ilegal membagikan brosur-brosur yang berisi sejarah kemiskinan kaum tani dan orang desa, guna merangsang tekad dan kesadaran mengangkat senjata untuk merebut kebahagian mereka. Indoktrinasi model ini dilakukan PKI secara intensif kepada penduduk pedalaman, sehingga mereka mampu menunjukkan sikap tolol atau bodoh yang dibuat-buat. Mereka mampu melakukan aksi GTM (Gerakan Tutup Mulut) atau OTM (Operasi Tutup Mulut), apabila ada operasi pembersihan oleh ABRI.

Di desa Puntukrejo dan Ledoksari banyak ditemukan ruba-ruba (rumah bawah tanah) yang dijadikan markas kegiatan mereka. Dalam operasi tersebut diketemukan 8 buah ruba. Jumlah ruba di

Compro Merapi Merbabu lebih dari 150 buah ruba.[13] Penghuni ruba-ruba tersebut adalah tokoh-tokoh penting PKI ilegal Jawa Tengah yang datang dari daerah lain. Ketika ditemukan sebuah ruba besar berukuran 21 meter, penghuninya diultimatum agar segera keluar. Jawaban yang terdengar justru bunyi ledakan. Tatkala ruba dibongkar ditemukan empat mayat yang rusak karena ledakan granat. Dalam operasi tersebut juga ditemukan brosur-brosur ajaran Mao Ze Dong, beberapa bendera PKI ukuran kecil (dipergunakan untuk upacara penyumpahan anggota baru), obat-obatan dan berbagai dokumen yang ditulis tangan. Ditemukannya brosur-brosur, buku-buku dalam bahasa Inggris, merupakan indikasi bahwa tokoh-tokoh PKI ilegal Jawa Tengah dan buronan yang berkaliber "kakap" tengah berada di daerah Compro Merapi Merbabu.

Sementara itu pada bulan Januari 1969, Korem 073 dan Korem 074 mengadakan operasi bersama di Kemusu daerah perbatasan Purwodadi dan Boyolali. Dalam operasi berhasil ditangkap 10 orang anggota PKI yang bersembunyi di dalam ruba-ruba di Kemusu, sejumlah dokumen baru, sejumlah senjata api Sten MK, pistol Colt 38, granat, kepala roket dan peluru dalam jumlah yang cukup besar.[14]

3. Gerakan PKI malam Mbah Suro di Nginggil

Pedukunan atau perguruan mistik adalah salah satu "bentuk organisasi" yang di usahakan oleh sisa-sisa PKI untuk memperoleh pengaruhnya kembali di lingkungan masyarakat. Pada tahun 1966 di mana kondisi sosial ekonomi akibat kudeta G30S/PKI bertambah buruk, kondisi ini dimanfaatkan oleh PKI untuk melakukan kampanye dan mempengaruhi masyarakat. Salah satu pedukunan yang dipergunakan oleh sisa-sisa PKI adalah pedukunan Mbah Suro.

Desa Nginggil kecamatan Menden adalah desa yang terisolasi yang terletak di tepi Bengawan Solo di perbatasan Kabupaten Dati

13. *Angkatan Bersendjata*, 5 Maret 1969 dan 18 Mei 1968.
14. *Angkatan Bersendjata*, 3 Maret 1969; Keterangan Ka Staf Korem 073 Letkol Hediyanto

Blora dan Kabupaten Ngawi. Mbah Suro alias Mulyono alias Surodihardjo, lahir pada tahun 1921,[15] adalah pendiri perguruan Nginggil, yang juga desa kelahirannya.

Pada tahun 1948-1949, Mbah Suro alias Mulyono menjadi salah satu orang anggota Brigade "Jadau" dengan pangkat Sersan. Brigade Jadau adalah Brigade TLRI (Tentara Laut Republik Indonesia), pendukung PKI dan tulang punggung kekuatan PKI dalam pemberontakan Madiun. Karena kesulitan hidup yang dialami sehari-hari dan keadaan masyarakat sekelilingnya melahirkan gagasan untuk menjadikan dirinya sebagai "ahli kebatinan". Ia menjadikan Nginggil tempat pertapaannya dan menyebut dirinya Mbah Suro atau "Pendito Gunung Kendeng". Dengan nama Mbah Suro, ia mulai melakukan praktek kegiatan kleniknya, dengan menyebarkan kepercayaan/kebatinan/perdukunan "Djawa Dipa", sekali pun tidak ada orang yang datang berguru. Sesudah G30S/PKI, para pelarian PKI yang mencari tempat aman menemukan desa Nginggil sebagai tempat persembunyiannya dan menemukan Mbah Suro, yang mengaku sebagai "pendito". Orang-orang PKI dengan agitasi dan propagandanya mempengaruhi masyarakat dengan media Mbah Suro. Mbah Suro kemudian dikeramatkan. Kader-kader PKI giat melancarkan agitasi dan propaganda untuk kekeramatan Mbah Suro. Banyak rakyat terpengaruh karena situasi pada saat itu memang penuh kesulitan hidup. Sebaliknya para kader PKI berkumpul disini dengan berpura-pura sebagai pengunjung Mbah Suro dan sebagai cantrik-cantrik yang sebenarnya adalah pengendalinya. Di antaranya Bambang Sumarjo (PKI), Keman (SOBSI) dan Jusuf (tokoh Bakoksi Cepu).

Keberhasilan agitasi dan propaganda kader-kader Mbah Suro, dan pengaruh pedukunan klenik Mbah Suro semakin meluas. Semua yang ada hubungannya dengan Mbah Suro "dianggap keramat" dan semua "perintahnya wajib" dituruti, temasuk pemeliharaan kucing hitam kesayangannya. Mbah Suro berhasil menghimpun para

15. Ramelan, *Mbah Suro Nginggil-Kisah Hancurnya Petualangan Dukun Klenik Mbah Suro*, Matoa, Djakarta, 1967, hal.74

pengikutnya. Para pengunjung yang datang ke pertapaan "Mbah Suro" tersebut, setiap harinya tidak kurang dari 5.000 orang yang berasal dari daerah Surabaya, Kediri, Malang, Madiun, Semarang dan Jakarta. Mereka berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat, kepada para pengikutnya yang mencapai jumlah kurang lebih 5.000 orang, Mbah Suro juga memberikan wejangan-wejangan, terutama dilakukan pada hari Jum'at Wage , Jum'at Paing, dan Jum'at Legi.[16]

Pertapaan " Mbah Suro" selain dijadikan sarang pengumpulan orang-orang G30S/PKI, juga diketahui sebagai tempat penyusunan kekuatan bersenjata. Melalui para pembantunya antara lain Suradi cs (anggota PKI), Mbah Suro menjadikan Nginggil sebagai pusat gerakan PKI. Sesuai dengan strategi dasar Perjuta komunis, mereka menyusun kekuatan dengan membentuk pasukan-pasukan tempur yang terdiri dari pria dan wanita yang terlatih secara kemiliteran. Pasukan pria diberi nama "Banteng Wulung" dan pasukan wanitanya di beri nama "Banteng Sarinah". Pasukan Banteng Wulung dengan kekuatan 200 orang dipimpin oleh Mbah Suro dan dibantu oleh dua cantrik utusan yakni Letda BT. Suradi dan Letda BT. Legi, Sedangkan pasukan Banteng Sarinah berkekuatan 30 orang. Pasukan-pasukan ini juga mempunyai beberapa pucuk pistol, granat tangan, pedang dan kentes. Mereka menggunakan seragam hitam-hitam, memakai ikat kepala hitam, dan di lengan ada tanda pengenal berwarna merah/ hijau,[17] yang berupa badge dan "tanda kesatuan". Badge berbentuk bulat dengan diameter 5 cm, warna dasar hitam dan didalamnya terdapat tanda "brawijaya" dan pohon beringin dilingkari padi kapas. Sedangkan di bahu sebelah kiri tercantum tanda kesatuan dengan tulisan "Pertapaan Gunung Kendeng".[18] Pasukan- pasukan Mbah Suro juga memelihara kumis, jenggot, dan berambut panjang. Mereka melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak sealiran atau yang dianggap musuh, antara lain pembunuhan terhadap dua orang dari desa Djimbung.

16. Laporan chusus tentang Pertapaan Mbah Suro di Desa Nginggil Randublatung Kabupaten Blora (dokumen).
17. Laporan Kopkamtib pada obyek Mbah Suro di Desa Nginggil (dokumen), *BT(bebas tugas)*
18. *Angkatan Bersendjata*, 14 Maret 1967

Oleh pihak pemerintah maupun oleh Peperda Jawa Tengah, tempat pertapaan "Mbah Suro" dipandang dari segi politik sangatlah tidak menguntungkan terutama pengaruhnya bagi masyarakat daerah setempat, bahkan disinyalir ada gejala-gejala yang mengakibatkan adanya bentrokan politik maupun fisik. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka Peperda Jawa Tengah mengambil keputusan dan kebijaksanaan yaitu memerintahkan "Mbah Suro" agar menutup pertapaan tersebut dan melarang untuk menerima tamu-tamu dari luar terutama anggota anggota ABRI.[19] Perintah tersebut tertuang dalam Surat Keputusan No. : ST-PPD/00360/7/1966 tanggal 12-7-1966 dan Surat Perintah No : Prin PPD/00235/10/1966 tanggal 22-10-1966, yang ditujukan kepada Dan Dim 0721/Pepekuper Blora. Namun perintah penutupan dari Peperda ini rupanya tidak diindahkan oleh Mbah Suro, bahkan pemerintah telah secara bijaksana menawarkan untuk musyawarah agar tidak menimbulkan korban, antara lain dengan jalan pemanggilan "Mbah Suro" agar mau menghadap ke Kodim Blora. Namun usaha itu tidak berhasil , kemudian diadakan panggilan lagi melalui CPM, juga tidak berhasil. Panggilan ketiga dilakukan melahui anggota Koramil Menden, juga tidak berhasil, bahkan anggota tersebut mendapatkan pukulan dari salah seorang cantrik "Mbah Suro" . Anak buah Mbah Suro bahkan melemparkan kata-kata yang tidak senonoh kepada para petugas dari Polres Blora.

Karena tidak berhasil diajak berunding secara damai, maka Dan Dim 0721/Pepekuper mengambil keputusan untuk segera mengadakan penyelesaian persoalan Nginggil ini dengan kekuatan senjata, dan keputusan hal tersebut diserahkan kepada Peperda Jateng. Sambil menunggu keputusan daerah Peperda Jateng, maka Dan Dim 0721/Pepekuper mengambil tindakan blokade baik secara ekonomi maupun pelarangan para pengunjung , Tujuannya adalah :

- Blokade ekonomi dilakukan agar keadaan ekonomi di Nginggil mendapat tekanan yang berat sehingga "Mbah Suro" mau menyerah tanpa syarat.

---

19. Laporan Khusus Kodam VII/Diponegoro No.LC.PKP-073/010/3/1967 (dokumen)

- Blokade pengunjung dilakukan agar tidak menimbulkan korban orang-orang yang tidak berdaya.[20]

Mbah Suro setelah ditangkap.
Sumber : Dijarah AD, Pemberontakan G30S/PKI dan Penumpasannya, Bandung, 1985, hal.210

Atas dasar laporan dari Dan Dim 0721/Pepekuper Blora, maka Peperda Jateng mengeluarkan Surat Telegram Pangdam VII/ Peperda No. STR PPD/0069/3/1967, tanggal 4 Maret 1967, maka diadakanlah tindakan penggerebekan/operasi terhadap pedepokan pertapaan "Mbah Suro" yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1967. Penggerebekan tersebut pada mulanya direncanakan sebagai

20. Laporan khusus tentang Pertapaan Mbah Suro di Desa Nginggil Randublatung Kabupaten Blora (dokumen).

peringatan yang terakhir terhadap Mbah Suro, karena sebelumnya telah berulang kali diperingatkan baik melalui pejabat pemerintah setempat, panggilan dari Kodim 0721/Pepekuper, lewat CPM, maupun Kepolisian.[21] Namun peringatan tersebut tidak dihiraukan, bahkan mereka tetap membandel dan mengadakan perlawanan yang mengakibatkan gugurnya beberapa anggota ABRI. Akhirnya dengan terpaksa ABRI mengambil tindakan tegas dengan menggunakan kekuatan senjata. Padepokan Mbah Suro Nginggil dapat dihancurkan pada tanggal 5 Maret 1967.

21. Laporan Khusus Korem 073 Pelaksana Kuasa Perang "Bakorin" (dokumen)

BAB IV
PEMBERONTAKAN BERSENJATA PKI DI BLITAR SELATAN DAN PENUMPASANNYA

1. Perencanaan Pemberontakan Bersenjata

Pada tanggal 12 Maret 1966, PKI beserta ormas-ormasnya secara resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia. Meskipun demikian, mereka secara ilegal masih melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencari penyelesaian politik Gerakan 30 September, mempertahankan legalitas, dan upaya membangun kembali partai yang telah hancur.

Kehancuran PKI sebagai akibat dari Gerakan 30 September mendorong Politbiro CC PKI melakukan Kritik Oto Kritik, mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama limabelas tahun yaitu dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1965. Di sini ditetapkan perjuangan PKI dengan menerapkan dasar-dasar pelaksanaan pemikiran Mao Ze Dong tentang Perang Rakyat dan pembangunan kekuatan bersenjata di bawah pimpinan PKI dengan membangun daerah-daerah basis di pedesaan.

Perjuangan bersenjata yang direncanakan akan dilaksanakan oleh PKI dengan menerapkan perjuangan bersenjata dalam wujud perang rakyat seperti yang pernah dilakukan oleh Mao Ze Dong di Cina, dengan melihat keadaan kongkrit yang berlaku di Indonesia. Sisa-sisa PKI masih optimis akan dapat mencapai tujuannya dengan asumsi bahwa:

Pertama, Indonesia adalah negara yang penuh dengan perbedaan antara lain kepulauan ada yang besar dan kecil. Perkembangan ekonomi dan politik negerinya tidak sama, demikian juga kepadatan penduduknya tidak sama. Rakyat Indonesia juga telah memiliki tradisi revolusioner berdasarkan pengalaman revolusi Indonesia tahun 1945. Perkembangan keadaan politik dan ekonomi yang tidak sama sebagai akibat sistem masyarakat setengah jajahan dan negeri

setengah feodal, adanya kontradiksi yang tajam antara kelas yang berkuasa. Sistem setengah feodal mengakibatkan adanya perbedaan-perbedaan yang bertentangan satu sama lain. Keadaan ini memberikan kemungkinan yang luas bagi tumbuh dan berkembangnya perang rakyat dan PKI tentang perjuangan bersenjata.

Kedua, dengan asumsi bahwa musuh besar dan kuat. Kenyataannya bahwa setelah PKI melakukan usaha perebutan kekuasaan, ia berhadapan dengan ABRI di bawah pimpinan Jenderal A.H. Nasution dan Mayor Jenderal Soeharto. Karena itu, PKI mengambil sikap berbeda dengan perang yang biasanya.

Ketiga, bahwa kekuatan militer yang dimiliki PKI masih sangat lemah, basis-basis revolusi yang akan digunakan untuk melancarkan perang rakyat belum terbentuk, dan kalaupun sudah ada masih sangat lemah sehingga dengan mudah dapat berpindah tangan.

Keempat, adalah adanya pimpinan partai komunis yang Marxis-Leninis, PKI bangkit kembali dengan semangat tinggi dengan petani sebagai kekuatan utama dalam melaksanakan perang rakyat dan revolusi agraria.[1]

Keempat asumsi di atas, pada dasarnya adalah konsep Mao Ze Dong yang mengarahkan perang menuju kemenangan yaitu faktor "watak" yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan perang revolusioner. Keempat faktor tersebut dikenal dengan nama *"4 watak perang revolusioner Cina"*.[2] Pertama, Cina adalah negara semi kolonial yang besar dengan perkembangan politik dan ekonomi yang kurang seimbang. Kedua, musuh adalah besar dan kuat. Ketiga, tentara merah adalah kecil dan lemah. Keempat mengenai kepemimpinan partai komunis dan revolusi agraria, dan watak inii adalah akibat logis dari watak pertama.

Kesimpulan yang diambil oleh sisa-sisa PKI bahwa untuk masa mendatang kader-kader PKI menggunakan KOK sebagai jalan

---

1. Sudisman, Kritik Oto Kritik, Dokumen Pusjarah ABRI
2. Mayjen TNI Sochijakto, "Strategi sisa-sisa Partai Komunis Indonesia setelah kegagalan Gerakan 30 September 1967", *Persepsi*, Januari-Februari-Maret 1987, No.1 Tahun IX, Lembaga Pertahanan Nasional, Direktorat Khusus, Jakarta, hal.32-33

keluar untuk tindakan masa depan. Jalan keluar itu disimpulkan menjadi pokok perjuangan yaitu : revolusi agraria kaum tani, karena itu seluruh perhatian dicurahkan untuk membangun kembali partai di desa-desa. Para kader di samping mempelajari ajaran-ajaran Mark, Engels, Lenin, dan Stalin, secara khusus harus mempelajari ajaran Mao. Kemudian segala perhatian harus dicurahkan untuk memecahkan masalah membangkitkan, mengorganisasi, dan memobilisasi kaum tani. Jalan keluar ini disimpulkan dalam bentuk strategi PKI yang baru, dan dikenal dengan nama Tri Panji Partai Komunis Indonesia, yang meliputi :

1. Membangun kembali partai.
2. Perjuangan bersenjata (Perjuta) di bawah pimpinan klas buruh.
3. Menggalang Front Persatuan Revolusioner atas dasar persekutuan buruh dan tani di bawah pimpinan kaum buruh.

Pada bulan Desember 1966, Sudisman tertangkap, kemudian PKI mengangkat Ruslan Widjajasastra sebagai Ketua CC PKI. Ruslan Widjajasastra menetapkan bahwa perjuangan tahap kedualah yang perlu dikembangkan yaitu perjuangan bersenjata, memenuhi petunjuk Mao adanya kekuatan senjata di basis, adanya kekuatan militer dan organisasi rakyat yang anti pemerintah.

Tesis perjuangan rakyat bersenjata mengajarkan cara-cara membangun Basrev (Basis Revolusi), membangun comite-comite proyek (compro) dan membentuk Tentara Pembebasan Rakyat (TPR).

Basrev, yang direncanakan PKI harus berpenduduk yang mayoritas menjadi pengikutnya, daerahnya terpencil sehingga sukar dicapai oleh lawan dan daerah ini harus mampu menjadi sumber persediaan makanan dalam waktu yang cukup lama. Compro yang dimaksudkan PKI adalah daerah yang penduduknya sekurang-kurangnya separoh adalah pengikut atau simpatisan PKI, terdiri sekurang-kurangnya sepuluh desa yang saling terkait dan cocok untuk pelaksanaan perang gerilya. Compro-compro ini dipersiapkan untuk menjadi Basrev, sedangkan TPR adalah kekuatan pemukul utama perang revolusioner. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengumpulkan orang-orang tertentu di dalam perkumpulan-

perkumpulan beladiri dan kemudian diarahkan menjadi anggota gerilya rakyat yang sebagian dimasukkan ke dalam organisasi Gerilya Desa (Gerda) dan Detasemen Gerilya (Detga). Untuk melatih keterampilan anggota-anggota gerilya, mereka dimasukkan ke dalam Kursus Komando Perang Rakyat dengan diberi pengetahuan tentang strategi perang revolusioner.

2. Persiapan Pemberontakan Bersenjata

Setelah PKI mengalami kegagalan dalam pemberontakan G30S/PKI tahun 1965 dan telah dibubarkan beserta ormas-ormas yang bernaung di bawahnya serta dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia dengan Keputusan Presiden No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966, maka banyak sisa-sisa tokoh PKI menyembunyikan diri sesuai dengan Tripanji-nya. Namun mereka tetap berusaha untuk menghidupkan kembali partainya dan melakukan aktivitas secara ilegal. Mereka tidak pernah menganggap bahwa partainya bubar, dan berusaha menyusup ke berbagai macam bidang kehidupan secara ilegal dengan memperkecil grup-grup pimpinan partai.

Mereka mempraktekkan strategi dan taktik gerilya Mao Ze Dong yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi PKI ketika sedang menghadapi kehancuran. Agar mudah dipahami pengikutnya, ajaran itu disederhanakan menjadi "ngalah, ngalih, ngalas, dan ngantem" (mundur, pindah, bersembunyi di hutan dan menghantam). Setelah mengalami kehancuran, mereka mengkonsolidasikan kembali kekuatannya di daerah yang terisolasi atau di hutan-hutan (ngalas), kemudian dipergunakan untuk menghantam dari belakang (ngantem).[3] Para pemimpin PKI beserta kader-kadernya yang belum tertangkap, berusaha pindah ke tempat-tempat persembunyian yang aman untuk menyelamatkan diri, dan mengkonsolidasi kembali partainya secara ilegal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mereka membuat evaluasi tentang daerah-daerah mana saja yang sekiranya cocok untuk dijadikan proyek basis untuk melaksanakan taktik dan

3. *Berita Yudha*, 14 April 1967

strategi sesuai dengan ajaran Mao Ze Dong yang dikenal "Dari Desa Mengepung Kota". Mereka berusaha mengintensifkan pengacauan dengan membentuk regu-regu kerja yang sifatnya rahasia dan tertutup. Regu-regu tugasnya melakukan pengacauan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. PKI mempersiapkan kader-kader pilihannya yang terlatih sesuai dengan bidang kerjanya, yaitu:

a. KKM (Kerja di Kalangan Musuh) yaitu regu yang tugasnya bekerja di kalangan musuh untuk membina kembali PKI dengan jalan infiltrasi ke tubuh pemerintah dan lembaga-lembaganya termasuk menyusup dan bekerja dikalangan ABRI, ormas/orpol, kesatuan-kesatuan aksi mahasiswa dan lain-lain.

b. Rekastra (Regu Kader Strategi), adalah regu kerja yang bertugas menyusun dan melaksanakan strategi pengacauan, antara lain mengumpulkan senjata. Hal ini dilakukan oleh PKI dengan jalan mencuri atau merampok gudang senjata. Rekastra dalam kota yang merupakan gerombolan bersenjata PKI gelap bergerak mobil ke beberapa tempat. Unit terkecil disebut sebagai Kastra (Kader strategi). Rekastra berkekuatan + 25 orang.

c. Repan (Regu Penculik) atau regu yang melaksanakan penculikan-penculikan terhadap musuh-musuh PKI yang berada di kalangan masyarakat dan membahayakan arau dapat membongkar segala rahasia gerakan. Regu ini berkekuatan sebesar dua detasemen gerilya (Detga).

d. Retera (Regu Telekomunikasi dan Radio Amatir) adalah regu kerja yang bertugas mengadakan pengacauan telekomunikasi dan radio, seperti menganggu gelombang-gelombang siaran RRI dan sabotase sarana telekomunikasi.

e. Rekam (Regu Kereta Api dan Mobil) adalah regu kerja yang bertugas mengacau bergelindingnya roda-roda kereta api di atas relnya serta penghadangan-penghadangan terhadap mobil-mobil yang lewat.

f. 3P (penculikan, penggarongan, perkosaan) adalah regu kerja yang tugasnya lebih menjurus ke arah perbuatan kriminalitas untuk mengacau ketertiban dan keamanan masyarakat.[4]

Dari kesemua gerakan pengacauan tersebut, PKI lebih mengutamakan pengacauan bidang ekonomi.

Untuk melaksanakan semua pengacauan itu, PKI membagi daerah-daerah operasinya dalam tiga daerah yang sifat dan pelaksanaannya berbeda-beda. Jauh sebelum kudeta Gerakan 30 September/PKI, mereka telah melakukan survei ke daerah-daerah yang diistilahkan turba (turun ke bawah). Ternyata mereka mensurvei daerah pengunduran, yaitu daerah-daerah sebagai tempat mengamankan partai jika sewaktu-waktu keadaan berubah. Daerah yang direncanakan untuk diproyeksikan menjadi daerah yang dibebaskan (liberated area) terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur. Hasil survei tersebut menilai bahwa Sukabumi Selatan di Jawa Barat, bekas tempat kegiatan gerombolan kiri Bambu Runcing dianggap sebagai calon "liberated area" yang paling cocok. Di Jawa Tengah, daerah Merbabu Merapi Kompleks dipilih sebagai daerah yang paling baik. Sedangkan di Jawa Timur pilihan jatuh pada daerah Blitar Selatan, karena daerah ini adalah tempat yang terisolasi dan merupakan basis massa PKI sejak 1948 dan sesudah Pemilu 1955.[5]

Daerah kantong dipilih Jawa Barat, Jakarta dijadikan daerah gerilya atau daerah lampu merah.[6] Oleh karena itu dalam rangka pembinaan kekuatan (machtsvorming), sisa-sisa Gestapu/PKI mengumpulkan tokoh-tokoh pusatnya di Jawa Timur. Daerah Blitar Selatan dipilih sebagai tempat markas gerakan. Dari hasil pemeriksaan terhadap para tokoh yang berhasil ditangkap, dapat diketahui sebab-sebab digunakan Blitar Selatan sebagai basis gerakan. Pertama, daerah tersebut sangat strategis dan dari daerah itu dapat memberikan komandonya ke seluruh Indonesia.

---

4. *Angkatan Bersendjata*, 5 Juni 1968
5. Mayjen TNI Soebijakto, *op.cit.*, hal.40
6. *Angkatan Bersendjata*, 5 Juni 1969

Kedua, daerahnya ideal untuk melakukan gerilya. Ketiga, daerah tersebut adalah basis massa PKI sejak tahun 1948 dan sesudah Pemilu 1955.

Pada awal Februari 1966 pihak Kepolisian di Pekalongan berhasil membongkar organisasi PKI gelap yang bernama Ikatan Bajing Ulung atau disingkat IBU. Organisasi gelap ini sudah tersebar di seluruh daerah Pekalongan. Mereka bertugas merampok dan membunuh penduduk yang mereka pandang kaya. Organisasi gelap tersebut menggunakan para bekas narapidana (residivis). Sebelum mereka melancarkan aksinya, pihak Polri telah berhasil menggulung organisasi ini. Dari hasil pemeriksaan diketahui oorganisasi pengacau keamanan ini dipimpin oleh seorang anggota PKI Batang (Pekalongan) bernama Sadar, Lurah desa Kesepuhan. Sadar juga mengaku bahwa di samping IBU masih ada organisasi lain yang bernama "Rahasia Kucing Hitam" (RKH). Organisasi ini tugasnya menculik dan membunuh, sedangkan kelompok lain bernama GAS bertugas membakar rumah orang-orang kaya.[7]

Sementara itu pada tanggal 26 Mei 1966, sisa-sisa PKI juga mengadakan aksi-aksi kekacauan yang mengakibatkan terjadinya bentrokan fisik di Yogyakarta. Mereka menamakan skenario yang berhasil itu dengan kode "hujan gerimis", sedang skenario yang berkode "hujan lebat" yang direncanakan gagal, karena mereka keburu ditangkap. Dari pengakuan pelaku yang ditangkap, untuk melancarkan aksi-aksi itu, mereka memperoleh biaya dari perkebunan teh dan panili di Tawangmangu dan di daerah Wonosobo, di samping dapat bantuan dari seorang warga negara asing di Solo.

Di Semarang, kader PKI bernama Sukirno alias. Sumanto alias Kadir pada pertengahan 1967, mengaku berhasil membentuk "batalyon" yang anggotanya terdiri atas pegawai-pegawai dan buruh pada kantor Pos dan Telekomunikasi, PJKA, pabrik gula "Rendeng", "pencari puntung rokok", dan beberapa orang anggota

---

7. *Angkatan Bersendjata*, 15 Maret 1967

sebuah partai di kota tersebut.[8] Mereka itu masih mendapatkan buletin-buletin gelap dari Jakarta, antara lain buletin-buletin *Tri Panji Partai, Genderang, Partisan, dan Mimbar Rakjat.* Organisasi membuat surat keterangan palsu, sehingga anggotanya dapat dengan aman melakukan usahanya membina kembali kekuatan PKI. Sukirno juga mengaku mempergunakan tenaga-tenaga bekas tahanan Gestapu/PKI karena dianggap sebagai tenaga-tenaga yang terpercaya dan militan.

Aktivitas kader-kader PKI secara perorangan dalam pelbagai bentuk itu dikategorikan sebagai Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Mereka menyamar sebagai pencari puntung, kenek bus, pembantu rumah tangga, bahkan santri, ustad, dan pedukunan. Tugasnya adalah ber KKM atau mengorganisasi penjahat, pelaku kriminal, membentuk pedukunan klenik (perguruan mistik). Praktek dukun klenik ini diketemukan di daerah Banten, Bogor, dan Cirebon yang terkenal dengan nama "Gerakan Togog", yaitu perguruan mistik gerilya politik PKI yang mengajarkan klenik, memberikan ceramah-ceramah politik, dan pembahasan situasi. Propaganda politik semacam ini ditanamkan kepada murid-murid dengan menggunakan ilmu-ilmu yang katanya dapat membuat kebal dan sakti.[9]

3. Blitar Selatan sebagai Basis Utama

Setelah Sudisman pimpinan PKI ilegal ditangkap, maka pimpinan dan kader-kader PKI yang masih ada merasa tidak aman di Jakarta, sehingga satu persatu mulai mengalihkan perhatiannya ke daerah Jawa Timur. Mereka berkumpul di Blitar Selatan yang telah dipilih sebagai daerah basis untuk melaksanakan aksi-aksi pembangunan kembali PKI dan perang revolusioner sesuai konsep Mao. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan letak geografis, tradisional, dan historis, mereka menetapkan Blitar Selatan sebagai

8. *Berita Yudha*, 2 Juni 1967
9. *Angkatan Bersendjata*, 15 Maret 1967

proyek basis. Banyaknya massa PKI di daerah tersebut merupakan modal bagi PKI. Di samping itu, secara geografis daerah Blitar Selatan daerahnya strategis bagi kegiatan PKI, karena agak terisolir dan jauh dari jangkauan alat-alat pemerintah. Keadaan sosial dan ekonomi penduduk yang serba kurang merupakan agitasi-agitasi dan propaganda. Juga daerah Blitar Selatan yang berbukit-bukit dijadikan tempat berlindung yang aman bagi bromocorah-bromocorah ulung untuk bertahan di daerah tersebut dengan melakukan berbagai macam tindakan kejahatan antara lain pencurian, penggendoran, Dan penggarongan.

Setelah mereka berkumpul di Blitar Selatan, maka masalah pembangunan basis Blitar Selatan diserahkan pimpinannya kepada Comite Daerah Besar Jawa Timur. Sedang pihak Central Comite (Ruslan Widjajasastra, Munir, Rewang, dan Oloan Hutapea) bertugas memimpin pembangunan kembali PKI. Kegiatan di Blitar Selatan secara keseluruhan dilakukan oleh 3 (tiga) kelompok, yaitu Politbiro Central Comite PKI, Comite Daerah Besar, dan Comite Proyek (Compro) Blitar Selatan.

Pada bulan April 1969, Politbiro mengadakan rapat. Ruslan Widjajasastra dipilih sebagai Ketua Politbiro. Adapun susunan organisasinya adalah sebagai berikut :

- Politbiro : 1. Ruslan Widjajasastra (Ketua)
  2. Oloan Hutapea (anggota)
  3. Munir (anggota)
  4. Rewang (anggota)
- Departemen Agitasi Propaganda (Agitprop) : 1. Rewang (Ketua)
  2. Iskandar Subekti (anggota)
  3. Tjugito (anggota)
- Departemen Organisasi : 1. Oloan Hutapea (Ketua)
  2. Ruslan Widjajasastra (anggota)
  3. Suwandi (anggota)

- Departemen Perjuta (Perjuangan Bersenjata) : 1. Munir (Ketua)
  2. Sukatno (anggota)
  3. Pono (anggota)
  4. Pratomo (ex Letkol) (anggota)[10]

Politbiro Blitar Selatan ini kemudian menyusun Tesis Perjuta yang merupakan perpaduan pikiran Mao dan Vo Nguyen Giap yang diterapkan secara berhasil di Cina dan Vietnam. Tesis tersebut menguraikan tentang Panji Perang Rakyat, taktik dan strategi, cara-cara membangun Basis Revolusioner (Basrev) dengan aparat Comite Proyek, Komando Proyek, Detasemen Gerilya, dan Gerilya Desa.

Setelah Tesis Perang Rakyat disusun, Ketua Departemen Perjuta Munir menugasi Sukatno, ex Letkol Inf. Pratomo, dan Tjugito untuk mempersiapkan diktat "Memimpin Perang Rakyat". Pada bulan Oktober 1967 di desa Ngrejo diadakan rapat untuk mensahkan konsep diktat "Memimpin Perang Rakyat". Rapat tersebut dihadiri oleh Politbiro Central Comite PKI (Ruslan Widjajasastra, Oloan Hutapea, Munir dan Rewang), anggota-anggota Pleno Central Comite (Sukatno, Tjugito, dan Iskandar Subekti), pembantu Central Comite PKI (Sutikno, Pratomo, dan Salam), Comite Daerah Besar Jawa Timur (Suwandi, Basuki, Djoko Untung, Sukarman, Rustomo, dan Gatot Sutaryo), mereka pembantu Comite Daerah Besar (Kek Duwur/Ontowiryo dan Bintoro). Rapat berhasil mengesahkan diktat pelajaran "Memimpin Perang Rakyat" dengan nama "Diktat MPG" (Diktat Memimpin Perang Gerilya). Diktat MPG selanjutnya digunakan untuk bahan pelajaran KKPR (Kursus Kilat Perang Rakyat) serta sebagai pedoman dari Comite Proyek-Comite Proyek dalam memimpin gerilya.

Rapat di tempat yang sama pada bulan November 1967 mensahkan pula konsep "Cara Membuat Plan Operasi" (CMPO), yang dihadiri tokoh-tokoh dari Central Comite, Comite Daerah

10. Gerakan 30 september Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI), Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, 1978, hal.205

Besar dan Comite Daerah Besar Jawa Timur (Suwandi), Sunandar dan Djoko Untung), Comite Proyek Blitar Selatan (Gatot Sutaryo dan Bintoro), Comite Proyek Lawu (Basuki), Comite Proyek Pandan (Rustomo) serta Comite Proyek Kelud-Kawi-Arjuno (Sukarman).

Oloan Hutapea ditugasi menyusun "syarat-syarat pembangunan Partai yang Marxis-Leninis" dan kemudian oleh Politbiro disahkan sebagai "Petunjuk Kerja Organisasi", maka struktur organisasi PKI pun dirubah. Kemudian diadakan suatu Comite Baru yang diberi nama Comite Proyek (Compro) yang disusun secara ilegal. Anggota Comite discleksi kembali. Pada umumnya hanya terdiri atas tiga orang, dan Comite Daerah Besar terdiri atas 3-5 orang.[11] Konsep-konsep Program Baru PKI tersebut kemudian disebarluaskan melalui Comite Daerah Besar.

Setelah itu pada bulan November 1967, CC PKI Blitar Selatan mengadakan Kursus Kilat Perang Rakyat (KKPR) selama 10 hari di dusun Belik Bendo, yang diikuti + 30 orang siswa. Para siswa tersebut dicalonkan untuk jabatan-jabatan Komando Proyek, Komisaris Politik Proyek, Komandan Detasemen Gerilya, dan Komisaris Politik Detasemen Gerilya KKPR dipimpin oleh Sukatno. Tujuan pendidikan KKPR adalah agar peserta mampu melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan masing-masing dalam rangka pelaksanaan program PKI. Dalam Kursus tersebut, Rewang mengajar "Kritik Oto Kritik", "Membangun Kembali PKI", oleh Oloan Hutapea, "Materialisme Dialektika Historis" (MDH) oleh Ruslan Widjajasastra; "Thesis Perang Rakyat" oleh Munir, "Ilmu Senjata" oleh ex Letkol Inf. Pratomo, "Ilmu Medan" oleh Lettu Teguh Wahyono, dan Sukatno mengajar "Memimpin Perang Gerilya". Para peserta kursus KKPR ini setelah selesai kursus kembali ke Comite Proyek masing-masing untuk menyiapkan basis Perjuta.

Bagian Agitasi dan Propaganda yang dipim,pin oleh Rewang menerbitkan majalah "Mimbar Rakyat" dan "Bendera Merah". Kedua mejalah itu memberikan informasi kepada kader-kader

11. *Ibid.*, hal.209

PKI mengenai garis politik partai sebagai "bekal" mereka dalam bekerja di kalangan massa.

Pada bulan Juni 1967 Comite Daerah Besar (CDB) Jawa Timur di Blitar Selatan mengadakan rapat. Rapat ini dihadiri Suwandi, Gatot Sutarjo, Sukarman, Basuki, dan Rustomo. Dari Central Comite PKI hadir Ruslan Widjajasastra, Munir, dan Oloan Hutapea. Mereka membahas masalah pembangunan proyek-proyek basis yang disebut Comite Proyek (Compro) di Jawa Timur. Dalam rapat diputuskan untuk membangun beberapa Comite Proyek. Gatot Sutarjo ditugasi membentuk Compro Blitar Selatan. Kepada Sukarman ditugasi membentuk Comite Proyek Kelud, Kawi dan Arjuna (KKA), Comite Proyek Pandan diserahkan kepada Rustomo. Sementara itu direncanakan Comite Proyek Tandes, Comite Proyek Semeru, Comite Proyek Raung yang petugasnya belum ditentukan. Para petugas tersebut ditetapkan sebagai Sekretaris Comite Proyek, untuk menyusun Comite Seksi dan Comite Sub Seksi dan Comite Resor di Compro nya masing-masing.

Pada bulan September 1967, mereka mengadakan rapat yang dihadiri oleh Suwandi, Gatot Sutarjo, Sukarman, Basuki, dan Rustomo. Dari Central Comite hadir pula Ruslan Widjajasatra, Munir, Oloan Hutapea, dan Rewang. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai penjelasan tentang thesis Perjuta, dan pembagian wilayah Comite Proyek. Akhirnya diputuskan masing-masing Comite Proyek membentuk Komando Proyek. Komando ini berkewajiban memimpin kekuatan bersenjata Detasemen Gerilya (DETGA) dan mengadakan Sekolah Perang Rakyat (SPR).

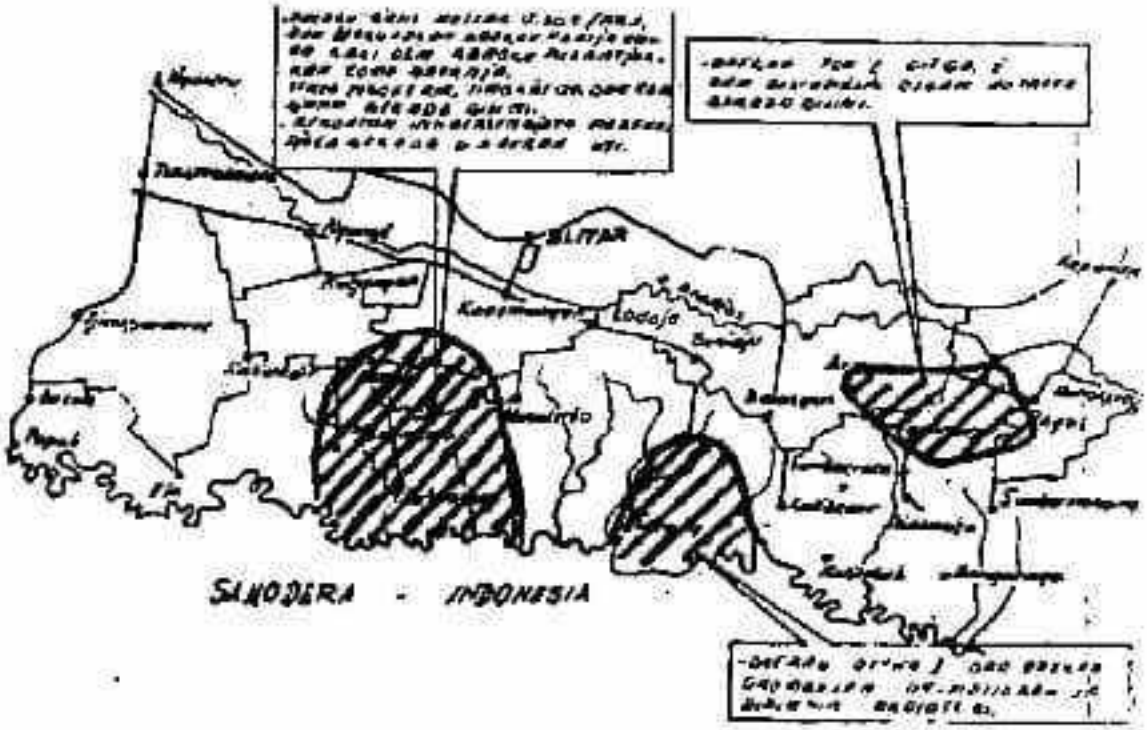

Lokasi daerah basis PKI di Blitar Selatan (Repro : Buku Kopkamtib)

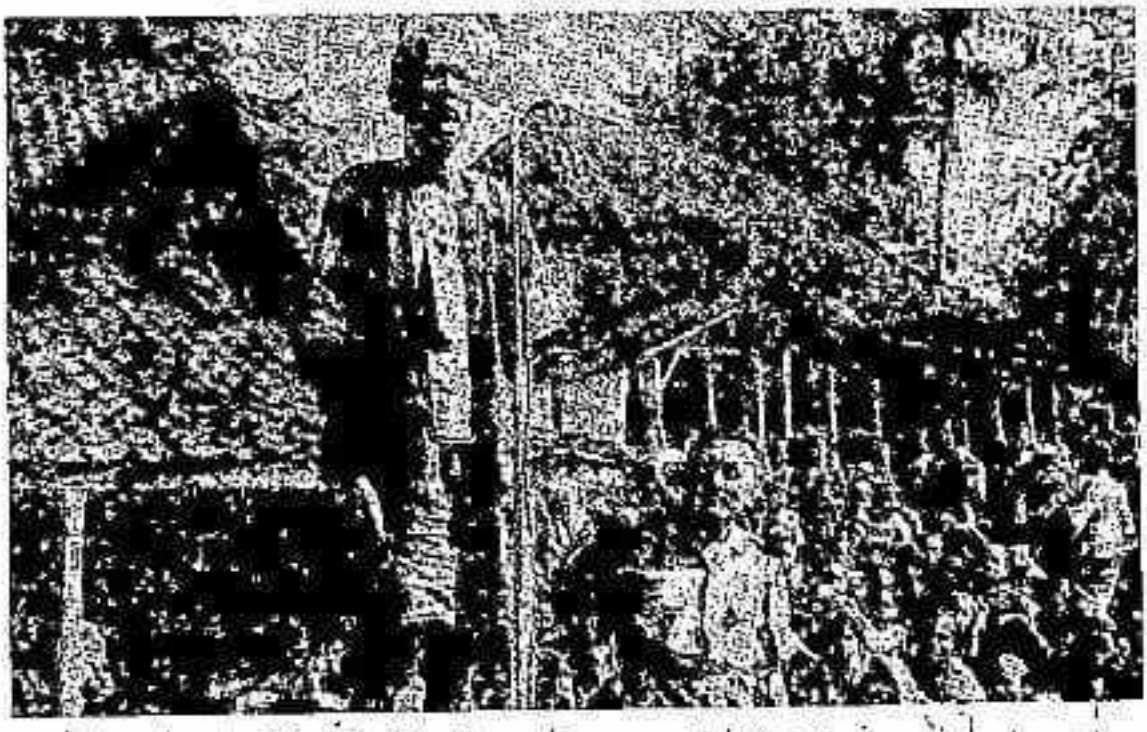

Karso tokoh PKI Blitar Selatan yang telah menyerah tampil di depan rakyat mengajak rakyat membersihkan sisa-sisa pemberontakan PKI (Repro : Buku Kopkamtib)

Gembong PKI Tjugito sedang di interogasi oleh para petugas Komando Operasi Trisula (Repro : Buku Kpkamtib)

a. Kegiatan Comite Proyek Blitar Selatan

Pada bulan Oktober 1967 Comite Proyek Blitar Selatan dibentuk. Daerah Comite Proyek ini berada di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, dan Blitar sendiri. Sebagai Sekretaris Comite (Compro) adalah Gatot Sutarjo, dibantu Suwarno dan Sunarjo. Seorang mantan Kapten A. Suciptadi diangkat sebagai pimpinan Komando Proyek Comite Proyek Blitar Selatan, yang dibebani tugas :

- Harus dapat bekerja baik dan bersatu dengan kaum tani miskin.
- Harus dapat membangun dan mengembangkan kekuatan bersenjata kaum tani dengan memberikan kursus singkat kepada pemuda-pemuda tani dalam Sekolah Perang Rakyat (SPR). Semua anggota Detasemen Gerilya diharuskan mengikuti SPR selama tiga minggu.

Detasemen Gerilya terdiri atas tiga peleton berkekuatan 120 orang. Di tiap desa dalam Comite Proyek dibentuk Gerilya Desa (Gerda). Dalam rangka mewujudkan theis Perjuta, maka massa dan aktivis-aktivis/kader-kader dimobilisasikan untuk mengubah Blitar Selatan yang daerahnya terdapat banyak gua-gua alam dan pegunungan menjadi ruba-ruba (rumah bawah tanah). "Program" Perjuta Comite Proyek Blitar Selatan adalah :

- Mengubah calon daerah basis menjadi basis di sepanjang pegunungan Kapur Selatan yang meliputi Kabupaten Blitar dan Malang. Prioritas pertama meliputi Kecamatan Maron, Suruhwadang, dan Ngeni. Prioritas kedua, adalah Kecamatan Panggungrejo, Binangun, dan Kecamatan Wates. Prioritas ketiga, daerah Kecamatan Kalipare, Donomulyo, dan Kecamatan Sumbermanjing (di Kabuipaten Malang).
- Beberapa kecamatan di Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung sebagai daerah gerilya Detga.[12]

Comite Proyek Blitar Selatan berhasil menyelenggarakan SPR sampai lima angkatan, dan membentuk Detasemen Gerilya (Detga), Gerilya Desa (Gerda), dan beberapa Comite Seksi, antara lain Comite Seksi Blitar, Comite Seksi Malang Selatan, Comite Sub Seksi Maron, Ngeni, Suruhwadang, Binangun, Wates, Kalipare, Donomulyo, dan Comite sub Seksi Sumbermanjing.[13]

Kegiatan gerombolan bersenjata PKI ini sangat menyolok terjadi di daerah Blitar Selatan dan di daerah Tulungagung Selatan. Pada akhir tahun 1967, di daerah-daerah Blitar Selatan mulai muncul gangguan keamanan berupa perampokan, penculikan yang disertai dengan pembunuhan. Hal serupa terjadi pula di Kabupaten Tulungagung, yaitu di Kecamatan-kecamatan Redjotangan, Ngunut, Kalidawir, dan Bojolangu.

Di Kalidawir pada akhir tahun 1967 seorang anggota Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) secara mendadak diserang

12. *Ibid.*, hal.213.
13. *Ibid.*, hal.213

oleh gerombolan perampok yang tujuannya merampas senjatanya. Kemudian terjadi penyerangan terhadap Perkebunan Sekar, Gadung, Binangun, dan Kandangan (Kediri) dengan motif yang sama. Pihak aparat keamanan menilai dari sejumlah perampokan, penculikan, dan penganiayaan ini korbannya selalu dari golongan-golongan dan umat Islam yang sangat gigih dalam menumpas G30S/PKI. Dari hasil penilaian dapat diisimpulkan bahwa perampokan dan pembunuhan itu bermotif politik, misalnya pembunuhan terhadap Kepala Desa Kedung Banteng dan Laredo (Suruhwadang), kecamatan Kademangan. Kepala Desa itu terkenal anti komunis. Ia dibunuh secara kejam. Kekuatan gerombolan itu tidak terlalu besar, sekitar 10 orang.

Kegiatan yang berupa penculikan pembunuhan, dan perampokan, kemudian diketahui dipimpin oleh Sugito dan Sutrisno, anggota PKI yang mengikutsetakan gerombolan perampok Karsobrondol. Pada tanggal 22 Desember 1967 Team Intel Kodim Blitar menangkap seorang perampok bernama Kusno alias Judo. Dari Kusno inilah dapat diketahui adanya organisasi perampok yang bersarang di Blitar Selatan, dan organisasi PGRS (Pasukan Gerilya Rakyat Surabaya). Dalam aksinya, gerombolan perampok ini melakukan 4P yaitu Perampokan, Pengacauan, Pembunuhan, dan Penganiayaan. Menurut keterangan Kusno, PGRS tersebut mempunyai hubungan dengan gerakan-gerakan perampokan dan pengacauan yang dipmpin oleh seorang bekas perwira ABRI bersama-sama pengikut-pengikut mbah Suro. Pada tanggal 27 Januari 1968, Team Intel Kodam VII bersama-sama dengan Team Intel Kodim kota Malang, menangkap Soekartolo alias Soeparman, Giman alias Boediman BA. Dari pemeriksaan dapatlah diketahui bentuk-bentuk organisasi ilegal PKI yang terdiri atas bentuk-bentuk Trio serta tujuh Comite Proyek PKI di seluruh Jawa Timur. Mereka juga mengaku PKI sedang membuat perlindungan-perlindungan di bawah tanah yang disebut Ruba (rumah bawah tanah).

Ruba tempat persembunyian tokoh CDB PKI Jawa Timur Soewandi yang ditangkap oleh Operasi Trisula di Ringin Bandulan (Repro : Buku Kopkamtib)

Ir. Surachmán tokoh pemberontak PKI Blitar Selatan mati dalam suatu pengejaran yang dilakukan oleh rakyat pada bulan Juli 1968

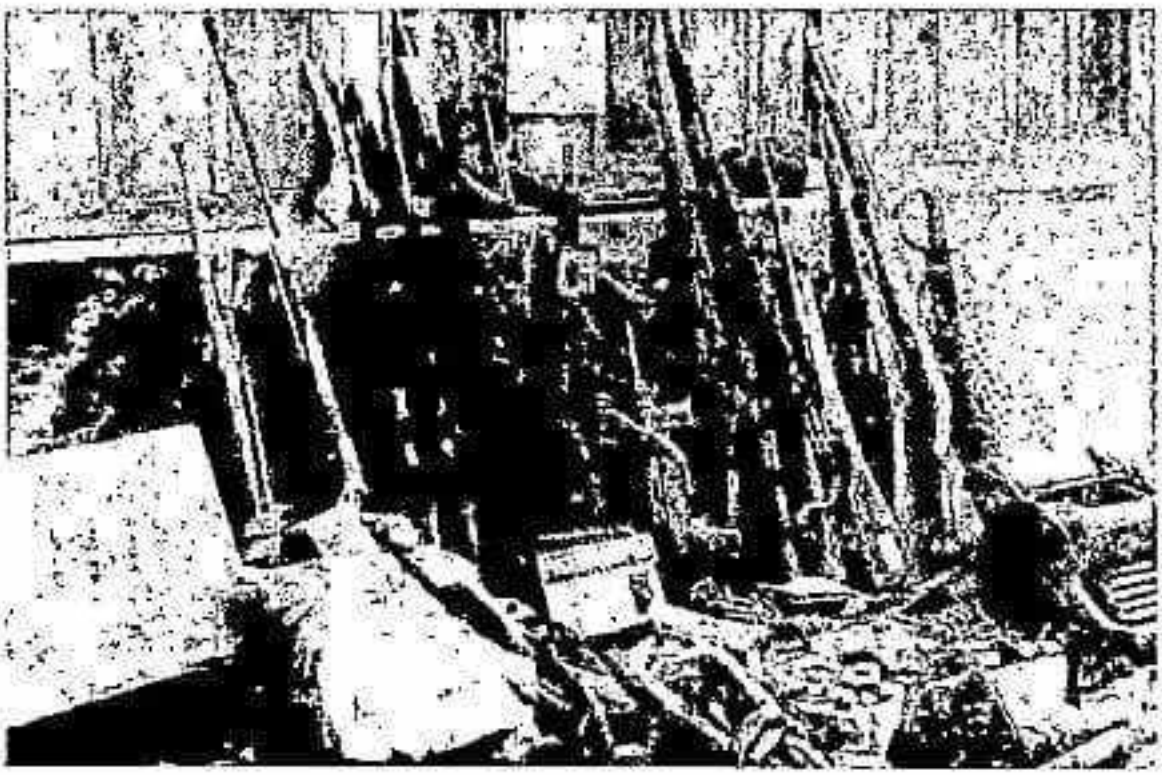

Sebagian senjata dan perlengkapan PKI yang berhasil dirampas di Blitar Selatan oleh Satgas Operasi Trisula (Repro : Kopkamtib)

b. Comite Proyek Pandan

Comite Proyek Pandan berada di pegunungan Pandan di desa Klino, Kecamatan Kedaton termasuk dalam wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Comite Proyek ini dibentuk pada bulan Agustus 1967 oleh Rustomo, Soeradi, Sockardi, dan Kasmidjan. Daerah "kekuasaan" Comite Proyek Pandan ini meliputi Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Madiun Timur (Kompleks Gunung Wilis). Compro ini membentuk pasukan bersenjata yang berkekuatan satu Detga di kompleks Pandan, satu Detga di Tuban, dan satu Detga di kompleks Gunung Wilis. Pada awal bulan Februari 1968, mereka melakukan pengacauan di pinggiran kota Bojonegoro, dan Kandangan (kompleks Wilis). Sebagai pelaksanaan aksi propaganda bersenjatanya, sasarannya adalah teror terhadap lawan politiknya dan obyek-obyek vital. Pada bulan Februari 1968 terjadi pembunuhan terhadap Kyai Abdul Fatah anggota DPR-GR Kabupaten Bojonegoro dan Kyai Taspirin pimpinan GP. Ansor. Keduanya berasal dari desa

Pumpungan Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Kemudian terjadi pembunuhan terhadap Sunan Kepala Desa Pramon, Kecamatan Soko, Tuban.[14]

Sejalan dengan itu terjadi pula beberapa peristiwa sabotase, misalnya sabotase kereta api antara stasiun Babad-Bojonegoro, sabotase kereta api di daerah Baureno, dan sabotase tanggul Bengawan Solo yang terletak di desa Truni/Babad pada bulan Maret 1968. Kesemuanya itu dilakukan oleh sisa-sisa PKI yang dipimpin oleh Sukisman, pimpinan PKI Babad.

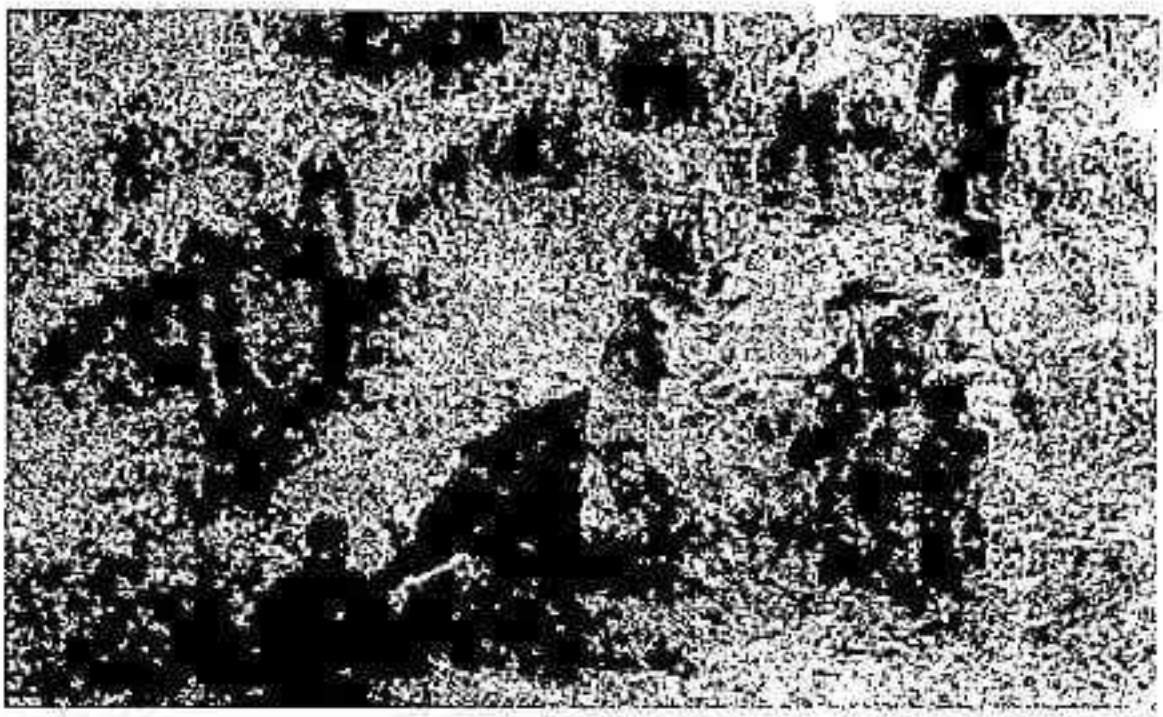

Salah satu di antara beberapa ruba tempat persembunyian PKI diketemukan oleh Komando Operasi Trisula pada tanggal 4 Juli 1968 (Repro : Kopkamtib)

Aksi di Compro ini tidak berlangsung lama, pada pertengahan tahun 1968, basis Compro Pandan di desa Klino/Kedaton berhasil ditemukan oleh Operasi Intel dari Korem 081. Rustomo pimpinan Compro ini melarikan diri bersama beberapa orang kawannya. Akhirnya ia tertangkap di daerah Surabaya, sedang mantan Kapten

14. Operasi Trisula Kodam VIII/Brawijaya, *op.cit.*, hal.8

Kasmidjan tertangkap di Ploso Jombang pada tanggal 7 Agustus 1968, oleh Tim Intel Rem 081 di bawah pimpinan Letda Tony Soeprapto. Suparman petugas Compro Pandan, Soemardi, Soewarinah mantan ketua Gerwani Jawa Timur, mantan Pelda Koesno, berhasil ditangkap. Dengan digulungnya basis Compro, maka kegiatan jeringan aksi ilegal dan teror PKI di daerah mantan Karesidenan Bojonegoro dapat dihentikan berkat kejelian Tim Intel Rem 082 yang dipimpin Mayor Moenabir.

c. Comite Proyek Lawu

Pembangunan Comite Proyek Lawu dimaksudkan untuk dijadikan tempat kedudukan Politbiro Central Comite PKI, sehingga pimpinan PKI dapat secara langsung memimpin gerakan bersenjatanya di Jawa Timur. Untuk itu pada awal bulan Januari 1967, Munir dan Pratomo dari CC PKI telah berada di Gorang Gareng (Daerah Magetan) untuk membantu Basuki dan Sutrisno yang telah berada di daerah ini. Basuki telah berhasil membentuk pasukan gerilya desa (Gerda) yang berjumlah lebih kurang 100 orang yang sudah tersebar di desa-desa di daerah Comite Proyek Lawu. Mereka bertugas sebagai kurir dan penunjuk jalan antara Takeran dan Garongan. Pada awal bulan Januari 1968, di Gorang Gareng diadakan rapat pimpinan Comite Proyek Lawu yang dihadiri oleh Munir, Pratomo, Basuki, dan Sumardi. Mereka membahas pembagian kerja dan penyelenggaraan SPR.

Pimpinan Comite Proyek Lawu terdiri atas Komandan Pratomo, Sekretaris Munir, Wakil Sekretaris Basuki, bagian organisasi : Munir, Basuki, dan Sutikno, Bagian Agitprop Basuki, Komisaris Politik Komando Proyek Sumardi.

Sekolah Perang Rakyat (SPR) hanya bisa diadakan selama tiga hari, diikuti hanya oleh 15 peserta. Kemudian pada bulan Januari 1968 di desa Banjar Panjang dibentuk Detga-Detga. Detasemen Gerilya I bermarkas di Gorang Gareng, Komandannya Djemani dan Suyono sebagai komisaris politik. Detasemen Gerilya II bermarkas di Sarangan dengan Supono sebagai komandan dan Darman sebagai komisaris

politik. Mereka juga membentuk peleton-peleton dan regu-regu di bawah Detasemen Gerilya masing-masing. Jabatan komandan peleton dan regu dipegang oleh mereka yang telah mengikuti Sekolah Perang Rakyat. Para komandan Detga dan Komisaris Politik (Kompol) ini bekerja sama dengan Comite Sub Seksi (CSS) guna mencari tenaga pasukan gerilya, di samping mengurusi akomodasi dan logistik. Detga di daerah basisnya masing-masing juga diharuskan membuat ruba-ruba (rumah bawah tanah), sebagai tempat persembunyiannya.

Compro Lawu melakukan serangkaian pengacauan dengan pembunuhan. Pada bulan Februari 1968 Supomo melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap Carik (juru tulis desa) Tapak, Magetan, Carik desa tersebut dibunuh karena digolongkan sebagai "rumput beracun", yaitu golongan yang harus dibersihkan sebagaimana yang dirumuskan dalam "thesis Perjuta".

Peristiwa pembunuhan tersebut menarik perhatian Tim Intel Rem 081 dan Tim Intel Kodam VIII/Brawijaya. Setelah diadakan Operasi Intel pada tanggal 11 Februari 1968, berhasil ditangkap seorang yang mengaku bernama Pak Gendut. Ternyata dia adalah Koesno, pengawal pribadi dan ajudan DN. Aidit. Sebelumnya ia pernah melarikan diri dari tahanan Batalyon 519. Dari Koesno diperloleh informasi mengenai tokoh PKI persiapan dan kegiatan mereka di daerah Compro Lawu, yang berada di Compro Lawu antara lain Soemiran alias Pak De (BTI Daerah Jawa Timur), Padmo alias Basuki dari CDB Jawa Timur, Kadir alias Soemardi (CDB Jawa Timur) dan Seno alias Munir tokoh CC PKI. Operasi-operasi Intelijen yang berhasil menangkap tokoh-tokoh PKI tersebut berakibat hancurnya Compro Lawu.

4. Operasi Trisula Menumpas Pemberontakan Bersenjata PKI di Blitar Selatan

a. Operasi Intelijen

Untuk menumpas gerakan sisa-sisa G30S/PKI di Blitar Selatan, ABRI melancarkan operasi yang dimulai dengan operasi

intelijen yang dilakukan sejak awal tahun 1967 dan disusul dengan operasi teritorial. Kodam VIII/Brawijaya sebagai inti kekuatan Laksus Kopkamtib Daerah Jawa Timur terus-menerus melakukan pembersihan terhadap sisa-sisa kekuatan G30S/PKI di Jawa Timur yang berada di tengah masyarakat, dalam tubuh ABRI maupun dalam aparatur pemerintah.

Komando Resort Militer se-Jawa Timur selaku pembantu Laksus Kopkamtib diperintahkan untuk melakukan operasi intelijen dan operasi teritorial di daerah masing-masing. Dari hasil operasi intelijen diketahui adanya dua buah Triko yaitu di Surabaya dan Malang, serta tujuh buah Compro yaitu Blitar Selatan, Semeru Selatan, Kelud-Kawi-Arjuna (KKA), Lawu, Pandan, Raung, Argopuro dan Kendeng.

Di antara Compro-compro di atas, Blitar Selatan yang aksi-aksinya menonjol yakni aksi yang mereka sebut dengan propaganda bersenjata (prota). Hasil evaluasi tim intelijen terhadap peristiwa perampasan-perampasan tersebut menyimpulkan bahwa aksi-aksi itu ditujukan kepada orang-orang tertentu, dibarengi dengan perampasan-perampasan senjata. Pada pertengahan tahun 1967 ada indikasi bahwa PKI berada di balik peristiwa kriminal. Indikasi ini menjadi jelas setelah tim intel Kodim Blitar menangkap seorang perampok di daerah Tulungagung pada tanggal 22 Desember 1967. Ia mengaku bernama Kusno. Dari Kusno ini dapat diperoleh informasi bahwa perampok-perampok tersebut dikendalikan oleh PKI dari Blitar Selatan.[15]

Pada tanggal 27 Januari 1968, tim intel Kodam VIII/Brawijaya di Mlang berhasil menangkap perampok yang mengaku bernama Suparman dan Budiman BA. Dari kedua orang itu diperoleh informasi, bahwa PKI telah membentuk tujuh Compro di Jawa Timur. Dan yang paling sempurna adalah Compro Blitar Selatan. Informasi yang lebih lengkap diperoleh dari orang yang mengaku bernama Tahir, anggota CDB Jatim yang ditangkap Intel Kodam

15. Dinas Sejarah Kodam VIII/Brawijaya, *Sari Karya Bhirawa Anoraga*, Surabaya, 1974, hal.80

VIII/Brawijaya yang bekerjasama dengan tim intel Kodim Tulungagung pada bulan Maret 1968 di Tulungagung. Dari hasil pemeriksaannya diperoleh informasi bahwa tokoh-tokoh PKI yang berada di daerah Blitar Selatan adalah : Oloan Hutapea, Ruslan Widjajasastra, Rewang, Tjugito, Munir, Suwandi, Sukatno, Gatot Sutaryo, Suuripto (Iskandar Subekti), dan Marjoko.[16]

Informasi tersebut menjadi lebih kuat setelah tertangkapnya eks Letkol Pratomo mantan Dan.Dim Pandeglang (Jabar) oleh Yon Inf 511 pada tanggal 15 April 1968 di Bakung, Blitar Selatan. Dari hasil pemeriksaannya diperoleh keterangan tentang bentuk organisasi serta komposisi personalia PKI di Blitar Selatan. Diperoleh pula informasi tentang adanya ruang bawa tanah (ruba) yang dibuat di Blitar Selatan sebagai tempat persembunyian tokoh-tokoh penting PKI bila di daerah tersebut terjadi operasi militer. Selain itu juga diketahui bahwa di Blitar Selatan berkumpul tokoh-tokoh PKI tingkat CC dan CDB Jawa Timur.

b. Satuan Tugas Operasi Trisula

Dari hasil evaluasi terhadap situasi keamanan di Blitar Selatan yang meresahkan masyarakat, maka Pangdam VIII/Brawijaya M. Jasin mengeluarkan Rencana Operasi No.01 dan 02 yang kemudian dikukuhkan dengan surat perintah Pangkopkamtib No.X-16/2/1968 tanggal 16 Februari 1968 yang kemudian menjadi Perintah Operasi No.03 tanggal 20 Februari 1968. Selanjutnya Danrem 018 ditunjuk selaku pelaksana Perintah Operasi No.P2-01/2/1968 yang intinya :

1) Melaksanakan kegiatan Operasi Combat Intelijen oleh Kodim-kodim.
2) Penggunaan Satpur-Satpur/Senban yang disusun dalam satuan-satuan infantri B/P Kodim-kodim.
3) Kegiatan-kegiatan operasi teritorial yang mengikutsertakan aparatur pemerintah sipil setempat dan potensi wilayah yang

16. Semdam VIII/Brawijaya, *op.cit.*, hal.7

lain dalam rangka mengembalikan kewibawaan pemerintah dan panca tertib (penempatan/penugasan caretaker Pamong/ Kepala Desa ABRI) di Blitar Selatan.[17]

Pelaksanaan Perintah Operasi 01/2/1968 setelah dievaluasi oleh Kodam VIII/Brawijaya pada umumnya belum mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan-kegiatan Perjuta PKI masih meningkat, terutama di Blitar Selatan dan Tulungagung.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Perintah Operasi 01/2/1968 dituangkan dalam konsep operasi menjadi Perintah Operasi 02/5/1968 yang intinya :

1) Sasaran khusus penghancuran proyek basis PKI Blitar Selatan.
2) Menggunakan dua Ki Brigif Linud untuk operasi penjagaan sebagai tahap pertama di daerah segitiga SMN (Suruhwadang-Maron-Ngeni) yang merupakan desa-desa proyek mutlak PKI.
3) Menggunakan satuan-satuan tempur infantri Yonif 511, Yonif 521, dan bantuan Hansip/Wanra Blitar Selatan dan Tulungagung sebagai pasukan penutup.
4) Mengembalikan/mengamankan kewibawaan pemerintah dengan penempatan caretaker pamong desa ABRI di Blitar Selatan.
5) Pos Komando Operasi Pertempuran di Kademangan.

Untuk pelaksanaan Perintah Operasi pada bulan Mei 1968 dibentuk Komando Operasi Trisula, yang berbentuk Satuan Tugas Operasi Trisula yang unsur-unsurnya terdiri atas : Komandan Kolonel Witarmin, Wakil Komandan Letnan Kolonel B. Sasmito, Kepala Staf Letkol Sugondho dan Perwira Seksi 1 sampai dengan Perwira Seksi 5 beserta wakilnya. Komandan ini dibantu oleh tim pelaksana dari :

17. Semdam VIII/Brawijaya, *op.cit.*, hal.15

- Tim intelijen Kodam VIII/Brawijaya.
- Tim Combat Intelijen Dinas Pelaksana Intelijen Angkatan Darat (Dipiad).
- Kompi Combat Intelijen Brigif Linud 18.
- Tim Operasi Teritorial Sipil di bawah Bupati/Kepala Daerah Blitar.

Kekuatan operasional lima Batalyon Infantri dan dibantu oleh aparat teritorial, satuan yang disiapkan (on call) dan Bantuan Udara Taktis yaitu :

- Batalyon Infantri 531/Para.
- Batalyon Infantri 511.
- Batalyon Infantri 513.
- Batalyon Infantri 521.
- Batalyon Infantri 527.

Satuan-satuan teritorial yang dilibatkan adalah Komando Distrik Militer 0807 Tulungagung, Komando Distrik Militer 0808 Blitar, Komando Distrik Militer 0818 Malang, beserta beberapa Komando Rayon Militer (Koramil) yaitu Koramil : Sumbermanjing Kulon/Pagak, Donomulyo, Kalipare, Kademangan, Binangun, dan Kalidawir. Semua Koramil barada di bawah perintah Komando Satuan Tugas TRisula. Selain kekuatan-kekuatan di atas, Operasi Trisula mendapat bantuan ekuatan dari Angkatan Udara Taktis yang terdiri atas : Satu Kompi Komando Gerak Tjepat (PGT), satu squadron Helikopter yang terdiri atas dua helikopter yang selalu siap membantu Komando Operasi Trisula, dan sebuah pesawat B-25, tiga Mustang, dan tiga Harvard. Adapun satuan-satuan yang disiapkan (on call) ialah Batalyon Zeni Tempur Amphibi di Pasuruan, Batalyon Artileri Medan di Ngawi, Batalyon Infantri 501/Para, dan Grup Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD).[18]

Pada tanggal 28 Mei 1963, Panglima Daerah Militer VIII/ Brawijaya Mayor Jenderal M. Jasin melantik Komandan Komando Satuan Tugas Trisula, Kolonel Witarmin. Selesai pelantikan, langsung

18. Semdam VIII/Brawijaya, *op.cit.*, hal.55.

diadakan paparan dan pembahasan mengenai kebijaksanaan umum, gerakan-gerakan operasi setelah mempelajari pelbagai laporan hasil pengintaian, mempelejari peta, dan rencana-rencana Kodam VIII/Brawijaya. Kesimpulan pembahasan, Operasi dilakukan secara bertahap, yakni tahap penjajagan, tahap penghancuran, tahap pemadatan dan pembersihan, tahap konsolidasi, rehabilitasi teritorial, dan pemerintahan sipil. Diputuskan untuk memadukan dan meningkatkan tiga bentuk operasi yaitu Operasi Tempur, Operasi Intelijen, dan Operasi Teritorial termasuk Operasi Teritorial Sipil dalam tiap tahap operasi.

c. Pelaksanaan Operasi

Operasi Militer dimulai pada tanggal 3 Juni 1968 dipimpin Kolonel Witarmin dengan sasaran Kemantren Suruhwadang, Ngeni, dan Maron. Di sinilah disinyalir tokoh CC PKI dan kader-kader PKI berkumpul. Minggu pertama, tanggal 8 Juni 1968 Satgas Trisula mengadakan gerakan simultan yang terus-menerus, sekali pun medannya cukup berat. Satgas Trisula dalam gerakan operasinya menggunakan batalyon-batalyon : Yon 511, 513, 521, 527, 531/Para, dengan 1 Kie PGT dan Polri.[19]

Gerombolan PKI telah mempersiapkan diri dengan taktik gerilya model Vietcong, yakni dengan membangun ruba-ruba yang saling berhubungan sebagai basisnya. Operasi Trisula menggunakan taktik wals, maksudnya bergerak seperti mesin penggilas jalan, berulang-ulang yang diserta dengan pembersihan (mopping up), di setiap valk (kompleks) yang dipercayakan kepada pelaksananya.

1) Operasi di Ringin Bandulan Kompleks

Tanggal 12 Juli 1968 Perwira Seksi I dari Sektor A yang menjadi wilayah Yonif 521 melaporkan bahwa di wilayah tersebut di hutan Tumpak Kepuh terdapat tokoh

19. *Pembaritwan Angkatan Bersenjata (PAB)*, 19 Agustus 1968, keterangan Pers Dan Satgas Kol. Witarmin kepada Pers Ibukota.

PKI yaitu Ir. Surachman dengan pengawalnya. Selanjutnya Dan Sek mengadakan operasi pembersihan ulangan ke daerah tersebut. Kompi C/521 dengan dibantu satu Ton dari Kompi D/521 beserta empat Ton Hansip dan 322 orang rakyat mengadakan pembersihan sampai Ringin Bandulan dan Pantai Selatan. Kompi B/521 mengadakan pembersihan di hutan sebelah utara Maron dengan kekuatan dua Ton dibantu satu Ton dari Kompi Cadangan dan empat Ton Hansip beserta 500 orang rakyat Maron. Menurut informasi Ir. Surachman berada di daerah tersebut.

Setelah diadakan pembersihan di daerah tersebut, tokoh PKI Ir. Surachman lolos sebelum pasukan-pasukan tersebut datang di tempat itu. Di tempat iitu pasukan hanya menemukan mayat anak laki-laki berumur 10 tahun. Diperkirakan anak tersebut dibunuh untuk menghilangkan jejak mereka.

Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 1968 pukul 06.00 Ki C dari Sub Sektor A/521 bergerak dengan formasi bersayap ke arah pantai Selatan. Kira-kira pukul 10.30, Ton sayap kiri yang dipimpin oleh Peltu Jatimin melihat ada empat orang keluar dari komplek kuburan. Begitu terlihat, seorang lari menuju ke kiri sedangkan yang tiga orang lari menuju ke kanan. Karena ke empat orang tersebut sudah diberi peringatan dengan tiga kali tembakan ke atas tetapi tidak juga mau berhenti, akhirnya Peltu Jatimin selaku Dan Ton memerintahkan menembak langsung ke sasaran. Salah seorang yang melarikan diti itu tertembak, dan sebelum meninggal ia mengaku bernama Gunawan. Orang itu membawa sejumlah barang berupa sepotong sarung hijau, sebuah tas hitam, radio transistor, kacamata kir, dua cincin mas, tiga botol obat, handuk, sisir, dan sikat gigi, satu stel kunci kontak dan kabel tape recorder, serta buku berjudul "Kaum Buruh Sedunia Bersatulah". Identitas orang tersebut belum diketahui. Dan Ton akhirnya memerintahkan kepada rakyat untuk mengubur orang tersebut.

Operasi diteruskan sesuai dengan rencana menuju ke arah pantai selatan. Tanggal 16 Juli 1968, ketika mendekati pantai, Ton sayap tengah yang dipimpin Pelda Imam Syafei menangkap dua orang gerombolan. Seorang di antaranya bernama Isno, kader Intel Ton I Detga I.

Tanggal 17 Juli 1968 gerakan operasi dinyatakan selesai, seluruh pasukan kembali ke pangkalan. Wadan Satgas Trisula Letkol B. Sasmito beserta Dan Sektor A/521 Mayor Soetinah meninjau Sektor A/521. Setelah menerima laporan dan meneliti barang-barang bukti dari orang yang mengaku bernama Gunawan, Wadan Satgas memanggil Tim peneliti Kosatgas dan beberapa orang tawanan untuk mengetahui barang-barang tersebut milik siapa. Tawanan tersebut antara lain Soewandi dari CDB Jatim, Soebiyanto alias Santoso alias Albadi alias Kruwet anak Ir. Sakirman bekas pelajar SMA dan IPPI Bandung, dan Sarlan alias Lie Wie Cung bekas pelajar SMA Surabaya. Di Blitar Selatan Soebiyanto dan Sarlan bertugas sebagai pengawal pribadi Ir. Soerachman. Setelah diadakan penggalian, mayat orang yang mengaku bernama Gunawan tersebut dibawa ke Tumpak Oyot untuk diteliti. Kesimpulan dari tim peneliti berdasarkan keterangan dan saksi-saksi, identitas orang tersebut adalah Ir. Soerahman.

Selanjutnya diperoleh informasi dari Ko Satgas Intel Trisula bahwa tokoh-tokoh PKI yang belum tertangkap meloloskan diri ke daerah Tulungagung melalui hutan-hutan di pantai selatan.

2) Operasi di Gunung Asem Kompleks

Setelah melakukan operasi penggilasan di Sektor C, Batalyon 527 mengadakan operasi kembali di daerah Ngadirenggo Kompleks. Disinyalir di daerah tersebut ada pelarian tokoh-tokoh PKI yang melarikan diri waktu diadakan operasi penggilasan. Kompi D/527 diperkuat

satu Yon Hansip menutup sasaran sebelah barat mulai dari pantai selatan melalui Dukuh Tombak ke utara sampai desa Sumberkoto. Pasukan penutup sebelah timur Kompi Cadangan diperkuat tenaga-tenaga dari Kompi Markas dan 400 tenaga rakyat dari Ngeni dan Hodoyo, bertugas mulai dari muara sungai Ngadirenggo menyusur tepi sungai sampai Dringu.

Kompi D/527 dengan diperkuat dua Ton Kompi A Yon Hansip bergerak dari Gunung Gede ke selatan, sebagai pasukan penyerang. Pada operasi ini kompi-kompi silih berganti mengadakan pergantian tugas sebagai pasukan penggerak dan penutup secara estafet. Gerakan penyerangan dilakukan secara bergelombang terus-menerus.

Dengan gerakan pasukan yang demikian itu, pada tanggal 4 Juli 1968 dapat ditewaskan 23 anggota gerombolan PKI dalam suatu kontak senjata di tepi sungai Ngadirenggo. Lima orang tenggelam di laut karena terdesak oleh pasukan penyerang, seorang di antaranya dikenal bernama Gentong. Selain itu juga menangkap hidup 27 orang PKI dan ditemukan lima ruba dan tujuh gua alam yang digunakan gerombolan PKI. Tanggal 6 Juli 1968 operasi Ngadirenggo berakhir dengan hasil seperti tersebut di atas.

Selanjutnya sisa pasukan yang berkedudukan di Panggungrejo dan Serang, dipimpin oleh Serma Djaib bergerak bersama rakyat dan Kepolisian ke Gunung Asem di dusun Kalibentak. Mereka melakukan pengejaran dan pengepungan di sekitar Gunung Asem. Tanggal 21 Juli 1968, seorang anggota veteran Kalibentak bernama Bejo memberitahu temannya Slamet bahwa ia melihat dua orang sedang bersembunyi di lereng Gunung Asem. Bejo bersama Slamet mendaki lereng Gunung Asem. Setelah diketahui tempat kedua orang tersebut bersembunyi, Slamet melemparnya dengan batu secara bertubi-tubi. Ketika didekati salah seorang sudah tidak bernafas lagi, sedangkan kawannya yang bersenjata segera menyerah.

Slamet dan Bejo mengamankan barang-barang yang dibawa yaitu sebuah radio transistor, sebuah kompas, sebuah pulpen, beberapa pakaian preman serta dokumen-dokumen penting. Orang yang terbunuh itu dikubur oleh rakyat, sedangkan yang menyerah bernama Joko Soeryato diserahkan kepada Posko Utama Sektor C/527 di Rampelombo.

Dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan terhadap Joko Soeryato oleh Lettu Moenajat, diketahui bahwa orang yang terbunuh itu adalah Oloan Hutapea dan Joko Soeryato adalah ajudannya. Hal itu segera dilaporkan ke Ko Satgas Trisula yang diterima oleh Kepala Staf Satgas Trisula Letkol Soegondo. Selanjutnya Mayor Soegiyanto beserta timnya diperintahkan untuk membuktikan kebenaran mayat itu adalah Oloan Hutapea. Setelah diadakan penelitian dan mendengar keterangan saksi-saksi yang mengenal Oloan Hutapea, benarlah mayat itu adalah Oloan Hutapea.

d. Operasi Kompleks Kaligrenjeng

Pada tanggal 13 Juli 1968 pukul 10.30, Pos Pairama 2 menerima laporan dari Hansip Kaligrenjeng bernama Asim, Dugel, dan Karsabalak. Mereka melaporkan bahwa sejak pagi di kampung Kaligrenjeng ada seorang tak dikenal singgah di rumah Slamet. Dugaan mereka orang tersebut adalah pelarian sisa-sisa gerombolan PKI. Agar orang itu tidak meninggalkan rumah, maka Slamet selaku tuan rumah mengajak ngobrol dan menyajikan makanan kepadanya.

Begitu menerima laporan, Pelda Roesnadi dengan enam orang anggota peletonnya disertai tiga orang Hansip menuju sasaran untuk melakukan penyergapan. Orang yang dicurigai itu dengan mudah dapat ditangkap ketika sedang memanaskan badan di dapur.

Kemudian ia dibawa ke Komando Sektor untuk pengusutan lebih lanjut oleh tim Intelijen. Ia bersikap pura-pura bingung dan melaksanakan "3 T". Tetapi setelah dihadapkan dengan tokoh-tokoh

PKI yang telah ditangkap, ia mengaku Roeslan Widjajasastra, Ketua CC PKI.

e. Operasi di Hutan Ilik-Ilik

Pada tanggal 13 Juli 1968 Kapten Soetjiptohadi alias Dullah tertangkap. Dalam pemeriksaaan yang dilakukan oleh tim interogasi ada pengakuan penting. Pada waktu ia ditangkap di hutan Ilik-ilik, ia bersama dengan Moenir alias Sodin. Ia menerangkan Moenir mungkin bersembunyi di sekitar hutan ilik-ilik.

Komandan Sektor B Yonif 511 kemudian melaksanakan operasi penyergapan dengan sasaran hutan Ilik-ilik. Operasi penyergapan dimulai dari desa Sumberejo, satu peleton dari Kompi B Yonif 511 diperkuat dengan tenaga-tenaga Hansip sebanyak satu Kompi dari Kademangan, mengadakan penutupan di sebelah selatan, sedangkan satu regu dari Kompi D yang berada di Tanen diperkuat dengan tenaga-tenaga Hansip mengadakan penutupan di sebelah utara sasaran. Sebelah barat sasaran, ditutup oleh Kompi dari Yonif 521.

Pukul 06.00 pagi tanggal 14 Juli 1968 dimulai gerakan penyergapan. Terlihat ada orang lari turun ke arah sungai. Capa Supardi memerintahkan regu cadangan untuk mengejarnya. Mengetahui dikejar, ia menyelamatkan diri dengan meloncat ke sungai. Tetapi dengan mudah orang itu dapat ditangkap. Fisiknya sangat lemah karena kelaparan.

Dalam pemeriksaan singkat di medan, orang tersebut mengaku bernama Moenir. Selain hasil itu, dapat pula diketemukan ruba-ruba di sekitar daerah itu.

f. Operasi Ayam Alas I, Kompleks Gunung Luweng

Tjugito yang ditangkap pada tanggal 20 Juni 1968 pukul 19.00 dalam pengakuannya kepada Tim C I (Combat Intelijen) Satgas Trisula mengatakan bahwa semua tokoh PKI Compro Blitarelatan telah cerai berai akibat dari Operasi ABRI yang ketat. Mereka

bersembunyi dengan mengadakan gerakan "kritis" yaitu mendekati desa/kampung yang berdekatan dengan pos ABRI. Tempat-tempat yang digunakan bersembunyi di sekitar Suruhwadang dan sepanjang hutan Ilik-ilik di perbatasan kecamatan Sutojayan Kademangan.

Setelah mempelajari situasi hasil laporan Combat Intelijen "Ayam Alas" Brigif Linud 18 yang berkedudukan di Suruhwadang, Rejo Tangan, dan Kademangan, maka Ki P&P/Brigif Linud 18 mengadakan Koordinasi dengan Tim C.I/Satgas Trisula untuk mengadakan gerakan penyergapan. Kekuatan yang dikerahkan terdiri atas Peleton C/Ki P&P dua Tim Combat Intel "Ayam Alas" yang berkedudukan di Pos Rejo Tangan dan Kademangan, peleton Hansip/Wanra dari masing-masing desa/kampung yang dikoordinir oleh Dan Ramil setempat.

Dengan menggunakan gerakan menghilang dan menyergap, Ton Ki C/Ki P&P bergerak secara terbuka dengan taktik loncat katak menyusur pegunungan Luweng. Combat Intel "Ayam Alas" yang berkedudukan di Pos Rejo Tangan dan Kademangan mengadakan penyusuran siang dan malam hari untuk mengadakan pemeriksaan bersama Hansip/Wanra di tempat-tempat yang diperkirakan untuk mencari bekal makan dan minum.

Dari hasil interogasi terhadap tawanan dapat diketahui tempat persembunyian para tokoh PKI. Pos C I/Ki P&P yang berkedudukan di Kademangan mengadakan koordinasi dengan Koramil setempat untuk mengerahkan Ton Hansip/Wanra masing-masing desanya sebagai pasukan penutup. Mereka melakukan pembersihan di sekitar desanya dan mengadakan pemeriksaan terutama di sekitar desa Sumberjati, Tumpakwaru, dan sepanjang kali Dawuhan.

Pada tanggal 20 Juli 1968 Ton Hansip/Wanra bersama Kepala Desa Sumberjati Serma (Purn) Sarwan berhasil menemukan jejak-jejak yang baru ditinggalkan yang mengarah ke hutan Jati Plosorejo. Akhirnya pada pukul 08.00 ditemukan gua alam yang digunakan untuk bersembunyi bekas ketua BTI Sumberjati bernama Matal dengan tiga orang pengikutnya. Mereka ditangkap dan diserahkan kepada Pos C I/Ki P&P Kademangan.

Hasil interogasi terhadap Matal alias Alirejo alias Triman, diketahui mereka bersembunyi di ruba yang terisikan lima orang pelarian PKI. Satu tim yang dipimpin Sertu Wagimin menyergap ruba itu. Setelah diadakan ancaman keras, keluarlah penghuni ruba itu satu persatu. Hasil penyergapan berjumlah 11 orang dan langsung dikirim kepada Komando Sektor B/511. Ternyata setelah diadakan pemeriksaan, satu di antaranya adalah Rewang alias Kalimin Suparto, dari CC PKI Jakarta.

Operasi Trisula yang dipimpin oleh Kolonel Witarmin selama 1 ½ bulan telah dapat menguasai daerah Blitar Selatan dan meringkus tokoh-tokoh dan angota-anggota PKI sebanyak lebih kurang 850 orang. Di antara mereka terdapat tokoh-tokoh tingkat CC[20] dan CDB Jawa Timur, antara lain : Yap Sin Kok, Djoko Untung, Ny. Djoko Untung, Ny. Gatot Sutardjo Tomo, Suharno, Ontowiryo (alias Kek Duwur), Subandi (alias Martolelo), Suwarno (alias Bintoro), Ny. Kartini (alias Ny. Widji, Ny. Tidjan), Sutrisno H.S., dan eks Kapten Kasmidjan (alias Kardjo). Tokoh-tokoh PKI lainnya yang berhasil diringkus,[21] antara lain Kapten Sutjiptadi (Dan Kopur PKI) mantan anggota Brigif 13/Galuh, Liem Hong Min alias Karni, Karno (Agitrop PKI), Karso, Ny. Bintoro, Ny. Suroto, dan beberapa orang Cina yang dijadikan kurir.

Dalam operasi ini telah diketemukan dan dihancurkan ruba-ruba sejumlah 216 buah, 37 di antaranya buatan alam sedangkan sisanya buatan manusia. Demikian pula perwakilan-perwakilan PKI yang tersebar di Blitar Selatan dapat pula dihancurkan. Hasil yang sangat memuaskan ini disebabkan berbaliknya rakyat yang semulanya dipengaruhi PKI, kemudian berbalik membantu pemerintah. Mereka memberikan laporan yang menguntungkan, bahkan seringkali rakyat sendiri yang mengepungnya, sehingga tidak sedikit yang mati karena ketatnya serangan rakyat. Anggota-anggota PKI yang berhasil ditawan kemudian disadarkan dengan jalan diberikan pembinaan mental Pancasila. Kemudian mereka

20. *Kompas*, 12 Agustus 1968
21. *PAR*, 19 Agustus 1968

dimanfaatkan untuk memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat setempat, karena banyak di antara para tahanan itu yang masih mempunyai kharisma dan dipercaya masyarakat. Mereka diberi kebebasan berbicara namun tidak keluar dari tugas yang telah digariskan dan dibebankan oleh Satgas Trisula. Merka menjelaskan kepada penduduk setempat bahwa PKI-lah yang menyebabkan rakyat menjadi miskin dan "buta" terhadap pemerintah, dan PKI-lah yang menjerumuskan rakyat ke dalam jurang yang dalam.

Komandan Operasi Trisula Kolonel Witarmin (Sumber : Disjarah AD Pemberontakan G30S/PKI dan Penumpasannya, Bandung, 1985, hal.228)

Anggota-anggota PKI yang menyerah digunduli kepalanya, dan diserahkan kepada familinya yang terdekat dengan pengawasan dari Pamong Desa setempat. Penggundulan ini dimaksudkan agar memudahkan para petugas mengawasinya. Selama ditahan, mereka diitugaskan untuk membangun desa, memperbaiki jalan dan saluran-saluran air serta menanam pohon untuk penghijauan yang dipimpin oleh Pamong Desa dan petugas Trisula. Penerangan-penerangan terus-menerus diadakan agar masyarakat Blitar Selatan dan sekitarnya mengerti apa arti dan maksud Pancasila yang sebenarnya.

Sejak Operasi Trisula diadakan sejumlah 182 orang anggota Kodam VIII/Brawijaya yang ditangkap, di antaranya terdapat beberapa orang Pamen.[22] Selama Operasi Trisula dilaksanakan, ada

22. PAB, 23 Agustus 1968, Keterangan Pangdam VIII/Brawijaya, Mayjen M. Jasin

tokoh PKI tingkat CC yang belum tertangkap, yaitu Gatot Sutardjo (Sekretaris Compro Blitar Selatan), sedangkan tokoh PKI tingkat CC yang tertangkap terakhir adalah Mardjoko. Operasi Trisula pada tanggal 7 Agustus 1968 berhasil menangkap mantan Kapten Kasmidjan, mantan anggota Batalyon 531/Raiders Brawijaya di Jombang. Ia dikenal sebagai pimpinan Compro Gunung Pandan.

Dalam operasi pembersihan di Blitar Selatan itu, diikut sertakan sejumlah 10.000 orang anggota-anggota Hansip dan rakyat yang bertugas membantu ABRI. Hansip dan rakyat ternyata melaksnakan fungsi bantuan yang sangat efisien, di mana mereka ditugaskan sebagai pagar betis yang makin hari makin merapat dan mengurung ruang gerak sisa-sisa gerombolan PKI di daerah Blitar Selatan. Mereka dikerahkan untuk memagari daerah dan tempat yang diperkirakan tempat persembunyian orang-orang PKI. Dengan sistem itu akhirnya berpuluh-puluh ruba berhasil diketemukan, dan dikosongkan. Operasi Trisula berakhir pada tanggal 7 September 1968. Kemudian dilanjutkan dengan operasi teritorial, yang bertujuan menginsafkan rakyat dari pengaruh PKI.

BAB V
PENYELESAIAN TAHANAN G30S/PKI

1. Tindakan Hukum terhadap Tahanan G30S/PKI

a. Pembersihan Intern

Tindakan politik adalah bentuk tindakan penyelesaian dan juga sebagai upaya dalam rangka pembersihan terhadap golongan/kesatuan/oknum sipil maupun militer yang terlibat dalam organisasi PKI yang menjadi dalang dalam peristiwa G30S/PKI. Untuk mengantisipasi agar dalam melakukan pembersihan tidak terjadi korban maupun kerugian, maka dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan landasan hukum, landasan perikemanusiaan dan landasan keamanan nasional.[1] Dengan demikian segala langkah yang diambil senantiasa berdasarkan ketentuan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam melaksanakan penyelesaian tahanan/tawanan G30S/PKI dilakukan kerjasama sebaik-baiknya dengan departemen-departemen yang bersangkutan, antara lain Kejaksaayy Agung, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Agama, P dan K, Penerangan, Transkop, Menteri Negara Urusan Proyek-proyek, dan instansi-instansi lain yang terkait. Selain itu diadakan pula survey ke daerah-daerah untuk memperoleh bahan guna penyelesaian tahanan/tawanan G30S/PKI yang bersifat luas dan nasional tersebut.

Selanjutnya untuk melakukan kepentingan efisiensi penyelesaian terhadap tawanan-tawanan dan tahanan-tahanan anggota "Gestapu" atau yang tersangkut dalam gerakan kontra revolusioner tersebut perlu segera dibentuk suatu team pemeriksa yang terpusat dan terkoordinir. Team ini dibentuk guna memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan unsur-unsur dan anasir G30S/PKI sehingga diperoleh bahan-bahan selengkapnya untuk keperluan dalam

---

1. Beberapa catatan tentang penyelesaian perkara G30 S/PKI serta pokok-pokok program kerja terpadu 1975/1976, Kopkamtib, hal 1 (Dokumen)

rangka mempertimbangkan pengambilan tindakan penyelesaian yang setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya menurut hukum. Panglima Kostrad selaku pimpinan operasi pemulihan keamanan terhadap petualangan G30S/PKI membentuk Team Pemeriksa Pusat (Taperpu) dan Team Pemeriksa Daerah (Teperda) pada tanggal 29 Oktober 1965. Adapun tugas Team Pemeriksa tersebut, yaitu melakukan pemeriksaan dalam rangka penindakan di bidang hukum pidana bagi tahanan G30S/PKI yang dilanjutkan dengan pelaksanaan interogasi dan pemeriksaan proyustisional sehingga dari sini dapat ditentukan apakah seseorang termasuk tokoh atau bukan tokoh dalam G30S/PKI. Pelaksanaan Teperpu dilakukan oleh Direktur Polisi Militer Angkatan Darat dengan anggota-anggotanya yaitu dari keempat Angkatan dan Departemen Kejaksaan yang bertanggung jawab kepada Panglima Kostrad. Sedang di tiap Pepelrada dapat dibentuk menurut kebutuhan dan Intensitas keadaan suatu Team Pemeriksa Daerah (Teperda) yang susunan serta keanggotaannya ditetapkan oleh Pepelrada serta bertanggung jawab kepada Pepelrada yang bersangkutan.[2]

Badan lain yang dibentuk dalam rangka Operasi Yustisional ini adalah Team Oditur/Jaksa Pusat (Todsapu)dan di tingkat daerah disebut Todsada yang berdasarkan Keputusan Pangkopkamtib No.Kep-70/II/1965. Tugas Todsapu/Todsada ialah melakukan pemeriksaan, pengolahan, dan penyiapan penuntutan perkara-perkara guna mengetahui fakta-fakta serta data dari setiap kasus perkara, seperti :

a. Tersangka sebagai apa dalam PKI/ormasnya, apa hubungannya dengan G30S/PKI.
b. Fakta-fakta apa yang telah diperbuat oleh tersangka.
c. Keterangan saksi-saksi, apakah sudah sesuai dengan perbuatan atau keterangan-keterangan tersangka.
d. Sehubungan dengan barang bukti yang ada, apakah ada hubungannya terhadap apa yang diperbuat oleh tersangka.

---

2. *Angkatan Bersenjata*, 13 Oktober 1965

Dari data-data dan fakta-fakta tersebut, kemudian diadakan pengkualifikasian. Selanjutnya dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Mahmillub, Mahmilti, dan Pengadilan Negeri sebagai badan-badan peradilan yang telah ditunjuk.

Di samping menunggu pelimpahan berkas perkara dari Teperda, Todsapu juga aktif memberikan pengarahan atas perkara yang masih dalam penggarapan/pengolahan Teperda ke arah pembuatan Berkas Perkara (Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan) yang memenuhi syarat-syarat penuntutan, sehingga tidak perlu lagi diadakan pemeriksaan tambahan oleh Oditur/Jaksa yang akan menyidangkan. Dari Berkas Pemeriksaan Pendahuluan haruslah menghasilkan alat-alat bukti yang sah untuk menuju ke pengajuan perkara ke Sidang Mahkamah/Pangadilan nantinya.

Dengan adanya Instruksi Presiden No.09/Kogam/5/1966 tanggal 13 Mei 1966 tentang penertiban/pembersihan personel Aparatur Negara,[3] maka pelaksanaan terhadap mereka yang terlibat baik di kalangan Aparatur Pemerintah/Negara dan di kalangan organisasi politik/massa maupun di kalangan masyarakat dapat berjalan secara terarah serta mempermudah teknis pemeriksaannya. Untuk itu perlu dilakukan usaha pengklasifikasian. Dalam proses pengklasifikasian tersebut dilakukan terhadap tahanan/tawanan G30S/PKI yang telah ada sejak tanggal 1 Oktober 1965 sampai hasil penangkapan/pembersihan/operasi yang terus berlangsung waktu itu.

Klasifikasi tahanan/tawanan yang dilakukan berdasarkan Inpres No.13/Kogam/7/1966, adalah sebagai berikut :[4]

- Klasifikasi A
- Klasifikasi B
- Klasifikasi C

Klasifikasi A (Golongan) adalah mereka yang nyata-nyata terlibat secara langsung. Dalam hal ini golongan tersebut ikut

3. Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Sidang Institusional Masalah Tahanan/Tawanan G30S/ PKI, Kopkamtib, Team Oditur/Jakarta Pusat, hal.14 (Dokumen)
4. *Ibid.*, hal.20

merencanakan, membantu merencanakan atau mengetahui adanya perencanaan gerakan pengkhianatan tetapi tidak melaporkannya kepada yang berwajib. Di samping itu, mereka ini yang dengan kesadaran akan gerakan tersebut, melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan gerakan, yaitu sebagai :

a) Pelaku utama yang mengatur operasi beserta kegiatan fisik lainnya (penculikan, pembunuhan, penyusupan benda bergerak).
b) Pelaku dan pelaksana Gerakan.
c) Orang yang ikut serta dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Golongan B adalah mereka yang nyata-nyata terlibat secara tidak langsung. Mereka ini dianggap telah mengetahui adanya gerakan pengkhiatan serta kegiatan lanjutannya, menunjukkan sikap dalam perbuatan maupun ucapan yang bersifat menyetujui gerakan tersebut dan/atau menentukan atau menghambat usaha-usaha penumpasan gerakan pengkhianatan tersebut. Selain itu, mereka juga termasuk sebagai pengurus/tokoh/anggota bekas partai terlarang PKI atau yang telah bersumpah kepada PKI atau pengurus//tokoh Ormas yang seazas aktivitasnya.

Golongan C adalah mereka yang didapati petunjuk atau patut dapat diiduga terlibat secara langsung atau tidak langsung. Golongan ini, yang menurut anteseden yang ada, pernah terlibat dalam "Peristiwa Madiun" dan setelah terjadinya G30S/PKI tidak secara tegas menentangnya menurut kondisi dan kemampuan yang wajar atau dalam tindakan-tindakannya cenderung untuk selalu menguntungkan bekas PKI. Kriteria lain, yaitu mereka pernah menjadi anggota Ormas yang seazas/bernaung/berlindung di bawah bekas partai terlarang PKI serta yang dalam sikap dan tindakannya memperlihatkan simpatinya kepada bekas PKI.

Peranan klasifikasi yang telah dilakukan terhadap tahanan/tawanan G30S/PKI yang pada tahun 1968 berjumlah 63.893 orang dan diperkirakan akan bertambah 30%, sangat penting dalam menentukan tindakan apa yang akan dikenakan terhadap mereka,

baik hukum pidana maupun bidang politik, keamanan serta bidang administratif. Seperti mereka yang digolongkan ke dalam golongan C langsung diberikan tindakan administratif oleh pimpinan instansi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedang mereka yang digolongkan dalam golongan A dan B segera diserahkan oleh pimpinan instansi di tingkat Pusat kepada Teperpu dan di tingkat Daerah Teperda untuk memperoleh penggolongan yang dinitif. Selama dalam penilaian Teperpu/Teperda terhadap mereka dikenakan tindakan administratif berupa pemberhentian sementara (schorsing). Setelah ada penentuan penggolongan yang definitif oleh Teperpu/Teperda, mereka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri.[5]

Di samping itu, klasifikasi mempermudah pula terhadap sistem dalam memberikan arah danpedoman kepada para petugas dalam rangka mengambil langkah-langkah persiapan ke arah pembebasan tahanan politik (Tapol) G30S/PKI pada waktunya, khususnya dalam pelaksanaan registrasi, inventarisasi, dan pemilahan. Pada dasarnya seluruh tahan politik G30S/PKI pada waktunya akan dibebaskan secara bertahap, tergantung dari individu masing-masing Tapol serta kondisi sosial politik (Sospol), kecuali Golongan A yang memenuhi persayaratan perundang-undangan untuk diajukan ke sidang Pengadilan.

Khusus untuk Golongan A harus diregistrasi/inventarisasi secara uniform dan dibuatkan kartu perorangan yang berwarna merah. Golongan A ini masih dipilah-pilah menjadi :

1) Golongan A yang memenuhi persyaratan perundang-undangan untuk diajukan ke pengadilan, antara lain : alat bukti, dan yang menurut perkiraan akan dijatuhi putusan pengadilan sekurang-kurangnya 12 tahun.
2) Golongan A yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas supaya di masukkan dalam Golongan B.

5. Kebijaksanaan Tindak Screening Dalam Rangka Penertiban/Pembersihan Tubuh Aparatur Pemerintah/Negara dari Sisa-sisa G30S/PKI, Nomor Juklak-2/Kopkam/II/1974, Kopkamtib Team Oditur/Jaksa Pusat, hal.5 (Dokumen)

Mengenai tugas pengregistrasian dan penilaian terhadap Golongan A dilakukan oleh Teperpu/Teperda, Todsapu/Todsada, dan Asisten Teritorial (Aster). Selain itu, Golongan A yang memenuhi syarat-syarat perundang-undangan untuk diajukan ke pengadilan, agar segera diselesaikan proses perkaranya. Mengenai penempatan, Golongan A terpisah dari golongan lain.

Khusus Golongan B diregistrasi/diinventarisasi secara uniform dan dibuatkan kartu perorangan yang berwarna kuning. Tugas pengregistrasian dan pemilahan dilakukan oleh Teperpu/Teperda dengan dibantu tenaga ahli (dokter/psycholog). Dalam hal ini faktor-faktor seperti kedudukan legal/ilegal dalam PKI, pendidikan umum dan pendidikan partai serta kegiatan semasa prolog/epilog adalah unsur yang penting untuk menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Di luar tersebut masih terdapat pemilahan pula berdasarkan :

1) Kondisi fisik Tapol yang bersangkutan (penyakit kronis, menular, tidak dapat sembuh, cacad, usia tua).
2) Perkembangan paham dan tingkah laku sebagai orang komunis selama ditahan, konduite, serta sikap kooperatifnya.

Golongan selanjutnya, yaitu Golongan C dalam registrasinya baik yang telah dibebaskan maupun Golongan C yang berasal dari anggota Aparatur Negara (PNS + ABRI), kartu perorangannya berwarna putih.[6]

Dari proses pelaksanaan pembersihan tersebut, dapat diketahui adanya oknum-oknum yang terlibat masih berkeliaran di dalam masyarakat sekitar 20.000 orang. Oleh sebab itu, perlu terus dilakukan kegiatan pembersihan dan dalam hubungan pengamanan personel yang ketat, di mana setiap Aparatur Pemerintah/ Negara berkewajiban menyelenggarakan tindak screening yang sistematis/tetap dan terus-menerus hingga memperoleh hasil yang maksimal. Pelaksanaan screening terutama ditujukan pada

6. Tindak Lanjut Kebijaksanaan Penyelesaian Tahanan/Politik G30S/PKI, No.Juklak-01/ Kopkamtib/11/1974, Kopkamtib, Team Oditur/Jaksa Pusat, hal.4-7 (Dokumen)

Golongan C yang dikeluarkan dari tubuh Aparatur Pemerintah/ Negara. Untuk seterusnya setiap Aparatur Pemerintah/Negara tetap berkewajiban untuk membersihkan diridari sisa-sisa G30S/ PKI yang belum diketahui. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui dan menentukan siapa-siapa yang terlibat dan yang tidak terlibat. Sebagai sasaran untuk tindak screening ini ditujukan pada seluruh personel (tanpa kecuali) dalam tubuh Apartaur Pemerintah/Negara, baik sipil maupun ABRI, termasuk di dalamnya Perusahaan-perusahaan Negara, Perseroan-perseroan dan semi swasta/swasta penuh.[7]

Untuk melakukan kegiatan penertiban/pembersihan terhadap personel aparatur pemerintah/negara, didirikan badan-badan khusus, di tingkat Pusat dengan nama Team Screening Pusat (Teningpu), di tingkat Daerah dengan nama Team Screening Daerah (Teningda), di Departemen dan Badan Lembaga Pemerintah/ Negara lainnya dengan nama Team Screening Departemen atau Team Screening Badan/Lembaga Pemerintah/ Negara. Pembentukan Teningpu/Teningda didasarkan pada Keputusan Pangkkopkamtib No.Kep-028/Kopkam/10/1969 tentang dasar-dasar kebijakasanaan/pembersihan personel Aparatur Pemerintah/ Negara serta kebijaksanaan pokok akibat G30S/PKI. Oleh sebab itu, semua badan tersebut pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Kopkamtib.

Selain itu Teningpu/Teningda beserta Tening Dep/Lem/Ba/ Ja melakukan pula tugas lain, seperti pengregistrasian untuk golongan C yang masih dan bekas pegawai Aparatur Negara. Sedang untuk pengregistrasian Golongan C yang telah dibebaskan, dilakukan oleh badan-badan intel dengan bantuan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.[8]

7.Kebijakan Tindak Screening Dalam Rangka/Penertiban/Pembersihan Tubuh Aparatur Pemerintah/Negara dari Sisa-sisa G30S/PKI, Nomor Juklak-02/Kopkam/II, 1974, Kopkamtib Team Oditur/Jaksa Pusat, hal.3-4 (Dokumen)

8. Tindak Lanjut Kebijaksanaan Penyelesaian Tahanan Politik G30S/PKI, *Op.Cit.* hal.7

b. Peradilan

Penyelesaian perkara adalah merupakan bagian dari penyelesaian tahanan, dan penyelesaian merupakan bagian yang penting pula dari masalah penyelesaian G30S/PKI. Perkara-perkara tokoh-tokoh G30S/PKI bukanlah sekedar perkara kriminal biasa yang pemeriksaannya bagi orang sipil dalam suatu Pengadilan biasa dan bagi anggota militer di depan suatu Mahkamah Militer, justru karena sifat dan ruang lingkupnya luar biasa ialah langsung menyangkut keamanan dan kehidupan Bangsa, Negara, dan Revolusi Indonesia.

Suatu petualangan kontra revolusi yang hendak menggantikan falsafah bangsa, negara, dan komunisme, dan usaha coup yang dilakukan meskipun dapat segera digagalkan serta tindakan-tindakan yang berupa penculikan dan pembunuhan secara kejam terhadap perwira-perwira tinggi Pimpinan AD, sifat-sifat inilah yang menghendaki suatu penyelesaian perkara-perkara tersebut oleh sutau Mahkamah Militer yang luar biasa. Oleh karena itu Mahkamah Militer Luar Biasa yang berdasarkan Ketetapan Presiden No.16 tanggal 24 Desember tahun 1963 adalah tepat untuk ditunjuk sebagai badan peradilan yang diserahi mengadili tokoh-tokoh yang tersangkut/terlibat dalam G30S/PKI.

Setelah melalui proses Badan Team Pemeriksa dan berlanjut ke tahapan interogasi serta pemeriksaan pro justisia, maka dari sini dapat ditentukan apakah seseorang termasuk tokoh atau bukan tokoh dalam G30S/PKI. Hasil tersebut yang kemudian diserahkan kepada Team Oditur/Jaksa untuk mengadakan pemeriksaan persiapan penuntutan. Dari hasil Team Oditur/Jaksa inilah untuk selanjutnya diserahkan perkara orang yang termasuk tokoh kepada Mahmillub, sedang perkara yang bukan tokoh oknum militer ke Mahkamah Militer/Tinggi (Makmil/Ti), oknum Sipil ke Pengadilan Negeri (Subversi).

Untuk menentukan tahanan/tawanan yang diselesaikan lewat Peradilan diambil sebagai kriteria-klasifikasi tahanan/tawanan yang termasuk Golongan A, yaitu mereka yang nyata-nyata terlibat

secara langsung dalam peristiwa G30S/PKI dan berdasarkan bukti-bukti serta saksi-saksi yang ada, nyata-nyata mempunyai peranan sebagai pemikir, perencana, pengendali, pelaksana atau kegiatan yang membantu pelaksanaan gerakan G30S/PKI, baik gerakan yang mendahului hingga pada waktu kejadian dan sesuah terjadinya G30S/PKI. Terhadap tersangka yang sarana pembuktiannya lengkap untuk penuntutan, diajukan ke sidang Mahkamah/Pangadilan Negeri yang berwenang.

- Seperti tuntutan terhadap Muljono yang disidangkan oleh Mahmillub di Semarang dengan Hakim Ketua Letkol Suparlan SH, telah dikenai hukuman mati pada tanggal 9 Oktober 1968. Muljono bin Ngali alias Walujo (42 tahun) memiliki bukti-bukti yang sah untuk dituntut hukuman mati. Ia yang merupakan pula orang ketiga dari Biro Chusus CC-PKI tingkat Nasional (yang membina Letkol Untung dan ex Men/Pangau Omar Dhani) dan di masa epiloog G30S/PKI membangun CDB PKI ilegal Jawa Tengah, telah menyatakan pengakuannya bahwa ia mendengar adanya Dewan Djenderal dari D.N. Aidit melalui Sjam. Tertuduh ini merupakan pendamping dan penasehat yang memberikan pertimbangan-pertimbangan pikiran kepada D.N. Aidit pada waktu peristiwa G30S/PKI. Bahkan terdakwa ikut menetapkan hari gerakan, pemberian nama Gerakan 30 September, dan mengetik konsep-konsep susunan "Dewan Revolusi" beserta dekrit-dekritnya. Muljono yang dikenal memiliki sembilan nama alias (samaran) tersebut telah terbukti bersalah, yaitu melakukan makar untuk menggulingkan pemerintah RI yang sah dengan kekerasan senjata. Dengan sadar melakukan tindak subversi dan meneruskan petualangan, meneruskan perjuangan serta pembangunan kembali PKI dengan mengadkan rapat-rapat gelap dengan tokoh-tokoh PKI Jawa Tengah. Dikemukakan pula fakta-fakta kegiatannya, antara lain mengadakan dalam persiapan, usaha-usaha untuk menarik beberapa perwira ABRI.

Tertuduh juga telah sengaja meruncingkan situasi, mengadu domba dan mengacau masyarakat, menyelewengkan Pancasila serta Saptamarga. Atas perbuatan-perbuatannya itu, tertuduh

nyata-nyata tidak mempunyai tanggungjawab dan nampak tidak memperlihatkan penyesalannya. Oleh karena itu dengan segala bukti dan saksi-saksi yang menentukan, Hakim Ketua membacakan vonis yang kemudian dilanjutkan dengan pengetokan palu bahwa ia memperoleh hukuman mati.[9]

Selain itu terdapat pula pengalihan penggolongan, yaitu terhadap oknum Golongan A yang tidak/belum memenuhi persyaratan penuntutan dialihkan ke Golongan B dan penyelesaiannya menurut ketentuan-ketentuan yang telah ada. Mengenai pengalihan golongan ini, dalam praktek penyelesaian perkaranya pun tidak selalu berjalan sesuai prosedur yang direncanakan. Walaupun berdasarkan Instruksi Presiden No. Ins-13-Kogam/7/66. Keputusan Pangkopkamtib No. : Kep-028/ Kopkam/10/1968, bahwa terhadap tahanan Golongan A dapat diselesaikan melalui sidang Mahkamah/Pengadilan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1) Saksi nihil, karena telah meninggal dunia.
2) Saksi tinggal satu orang dan bukti-bukti lain nihil. Menurut ketentuan hukum pembuktian, perkara-perkara yang demikian tidak dapat diselesaikan melalui sidang.
3) Para saksi menarik kembali keterangan-keterangan yang pernah diberikan pada pemeriksa pendahuluan dengan alasan lupa karena peristiwanya telah lama terjadi.
4) Hukuman yang akan dijatuhkan diperkirakan kurang dari penahanan.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas dan Juklak No.01/Kopkam/II/1974 tentang tindak lanjut kebijaksanaan "Penyelesaian Tahanan Politik G30S/PKI" perkara-perkara yang demikian dialihkan golongannya untuk selanjutnya diselesaikan berdasarkan kebijaksanaan Pangkopkamtib.[10]

---

9. *Sinar Harapan*, tanggal 27 dan 28 September, 3 Oktober dan 10 Oktober 1968
10. Himpunan Daftar Nominatif Penyelesaian Perkara-perkara G30S/PKI Golongan "A" dari tahun 1975 s.d. 1980 oleh Todsapu-Todsada, Kopkamtib, Jakarta, 1980, hal.2 (Dokumen)

Dalam rangka peningkatan usaha penyelesaian masalah tahanan G30S/PKI, pada bulan Maret 1974 Kopkamtib menetapkan Rencana Operasi Kstaria. Operasi ini dimaksudkan sebagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan penyelesaian masalah tahanan G30S/PKI Golongan A dan B dalam lingkungan Departemen/ Lembaga Non Departemen, Perusahaan-perusahaan milik Negara baik di Pusat/Daerah, Sipil/ABRI. Selain itu ditujukan pula sebagai langkah-langkah pembinaan masyarakat dalam memperbesar kewaspadaan terhadap bahaya laten G30S/PKI dan ketahanan masyarakat terhadap infiltrasi G30S/PKI.

Semenjak dibentuknya Organisasi dan Prosedure Team Odinur/ Jaksa Pusat/Daerah yang selanjutnya disempurnakan dengan Kep. Pangkopkamtib No. : Kep-04/Kopkam/IX/1975 tanggal 16 September 1975, Todsapu/Todsada di dalam melaksanakan tugas pokoknya telah menyelesaikan perkara-perkara G30S/PKI Golongan "A" dengan perincian sebagai berikut :

a) Melalui persidangan (Mahmillub, Mahmil, d an Pengadilan Negeri (Subversi) sejumlah 1009 perkara.
b) Pengalihan Golongan 878 perkara.

Dengan demikian jumlah seluruhnya adalah 1887 perkara.

Khusus daftar rekapitulasi oknum-oknum G30S/PKI Golongan "A" yang terdaftar di Todsapu/Todsada dari tahun 1965 sampai dengan 1980 sejumlah 1.883 orang, dengan perincian sebagai berikut :[11]

1. Aceh : 4 orang
2. Sumut : 119 orang
3. Sumbar dan Riau : 205 orang
4. Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) : 18 orang
5. Jaya : 243 orang
6. Jabar : 259 orang
7. Jateng dan DIY : 355 orang
8. Jatim : 173 orang

11. *Ibid.*, hal.1-4

9.	Kaltim	: 98 orang
10.	Kalsel/Kalteng	: 49 orang
11.	Kalbar	: 79 orang
12.	Sulutteng	: 131 orang
13.	Sulselra	: 53 orang
14.	Maluku	: 9 orang
15.	Nusra	: 54 orang
16.	Irja	: -
17.	Otmilti I/Sum	: 1 orang
18.	Otmilti II/Bar	: 6 orang
19.	Otmilti II/TT	: 15 orang
20.	Otmilti III/Kal	: -
21.	Otmilti IV/Sul	: -
22.	Otmilti V/Nusra	: 2 orang
23.	Otmilti VI/Mal-Irja	: -
24.	Todsapu	: 10 orang

Pengadilan yang menerima perkara-perkara tersebut berdasarkan kewenangannya masing-masing memeriksa dan mengadili yustisiabelnya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat tanpa meninggalkan azas dan sendi keadilan serta berpijak atas dasar-dasar ketelitian serta kematangan berfikir terdapat kepastian hukum, baik kepada oknum G30S/PKI itu sendiri maupun kepada masyarakat.

Dari tahun 1966 sampai 1980 jumlah dari daftar rekapitulasi oknum-oknum G30S/PKI Golongan "A", dari ABRI yaitu 354 orang, non ABRI 655 orang. Jadi jumlah tersebut yang telah selesai disidangkan oleh Mahmillub : 36 orang oleh Mahmil/Tinggi : 396 orang, dan oleh Pengadilan Negeri (subversif) : 577 orang.[12]

Adapun tokoh-tokoh PKI yang disidangkan melalui Mahmillub yang merupakan tindak lanjut Keputusan Presiden RI No.370 tahun 1965 bahwa Mahmillub ditunjuk untuk mengadili tokoh-tokoh Gerakan 30 September/PKI, serta tokoh-tokoh yang disidangkan melalui Mahmil/Ti, adalah sebagai berikut :

12. *Ibid.*, hal.70-144

- Nyono bin Sastroredjo alias Rukma alias Sugiono (anggota Politbiro CC PKI) diadili oleh Mahmillub Jakarta, dan dijatuhi vonis hukuman mati pada tanggal 22 Februari 1966. Ia melakukan tiga kejahatan sekaligus, yaitu : pertama, telah memimpin dan mengatur pemberontakan dengan angkat senjata melawan pemerintah yang telah ada di Indonesia, kedua, sebagai peserta permufakatan jahat, dalam bulan September 1965 bertempat di Ibukota RI sebagai pengatur telah melakukan makar dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintah yang syah, ketiga, Njono dan kawwan-kawannya separtai /PKI antara lain D.N. Aidit, M.H. Lukman, Njoto, Anwar Sanusi, Peris Pardede, telah melakukan komplotan permufakatan untuk melakukan makar, yang berniat untuk menggulingkan pemerintah RI yang syah.[13]

Nyono bin Sastroredjo anggota Polit Biro CCPKI diadili oleh Mahmillub di Jakarta pada tanggal 22 Februari 1966 (Repro : Buku Kopkamtib)

- Mantan Letkol Untung bin Syamsuri (mantan Komandan Batalyon Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, Komandan Gerakan 30 September PKI), diadili oleh Mahmillub di Jakarta, dengan dijatuhi vonis hukuman mati pada tanggal 7 Maret 1966.

13. *Angkatan Bersenjata*, 18 Februari 1966.

Letkol Oentoeng mantan Komandan Batalyon Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa Komandan Gerakan 30 September/PKI dan Ketua Dewan Revolusi PKI diadili oleh Mahmillub di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1966 (Repro : Buku Kopkamtib)

Mantan Brigjen Supardjo Wakil Komandan Gerakan 30 September/PKI diadili oleh Mahmillub di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1967 (Repro : Buku Kopkamtib)

Sudisman Ketua Sekretariat CC PKI diadili oleh Mahmilub di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1966 (Repro : Kopkamtib)

Dr. Subandrio mantan Wakil Menteri II/Menteri Luar Negeri diadili oleh Mahmilub di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1966 (Repro : Buku Kopkamtib)

- Dr. Subandrio (mantan Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri) diadili oleh Mahmillub Jakarta, dengan dijatuhi vonis hukuman mati pada tanggal 24 Oktober 1966.
- Mantan Lettu Inf. Ngadino Hadisuwignyo diadili oleh Mahmillub Jakarta, pada tanggal 27 September 1967 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Mantan Mayor (U) Suyono alias Yoyo diadili oleh Mahmillub Jakarta, pada tanggal 20 Mei 1966 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Mantan Brigjen TNI M.S. Supardjo diadili oleh Mahmillub Jakarta, pada tanggal 13 Maret 1967 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Mantan Kolonel (U) Sudiono diadili oleh Mahmillub Jakarta, pada tanggal 20 September 1972 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Yusuf Muda Dalam (mantan Menteri Bank Central RI) diadili oleh Mahmillub Jakarta, pada tanggal 9 September 1966 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Mantan Laksamana Oemar Dhani (mantan Menteri Pangau) diadili oleh Mahmillub Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1966 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Sudisman alias Suharno Tedy alias Tarno alias Toha (anggota CC PKI) diadili oleh Mahmillub di Jakarta, pada tanggal 27 Juli 1966 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Supono Marsudidjojo (pimpinan Biro Chusus CC PKI) diadili oleh Mahmillub Jakarta, pada tanggal 11 Maret 1972 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Muljono bin Ngali alias Walujo (anggota Pimpinan Biro Chusus CC PKI ilegal) diadili oleh Mahmillub di Semarang, pada tanggal 9 Oktober 1968 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Syam Kamaruzaman (Kepala Biro Chusus CC PKI) diadili oleh Mahmillub di Bandung, pada tanggal 9 Maret 1968 dijatuhi vonis hukuman mati.

- Mantan Kapten Inf. R. Soembodo diadili oleh Mahmillub Surabaya, pada tanggal 18 Februari 1967 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Amar Hanafiah (Sekretaris I CDB PKI Banjarmasin) diadili oleh Mahmillub Banjarmasin,, pada tanggal 14 Agustus 1967 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Tamuri Hidayat (mantan Peltu Pensiunan) diadili oleh Mahmillub Denpasar, pada tanggal 30 September 1967 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Mohammad Nazir alias Amir diadili oleh Mahmillub Medan, pada tanggal 2 September 1966 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Utomo Ramelan (mantan Walikota KDH Tk.II Kodya Surakarta) oleh Mahmillub Yogyakarta, pada tanggal 22 Juni 1967 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Mantan Mayor Djohan Rivai (mantan Bupati Pasaman) diadili oleh Mahmillub Padang, pada tanggal 4 Agustus 1967 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Suwardiningsih bt. Sudirgo alias Asiah alias Mariam alias Bude (eks dosen Akademi Ilmu Sosial Ali Achram Jakarta) diadili Mahmillub Palembang, pada tanggal 9 Juni 1967 dijatuhi vonis hukuman seumur hidup.
- Mantan Kolonel Didi Djockardi (mantan Walikota Bandung) diadili oleh Mahmilti II/Bar Bandung, pada tanggal 30 April 1977 dijatuhi vonis hukuman 19 tahun penjara.
- Mantan Lettu Masiman oleh Mahmil Yogyakarta, pada tanggal 9 November 1968 dijatuhi vonis hukuman 20 tahun penjara.
- Mantan Kapten Suwito bin Ronowasito oleh Mahmil Jateng pada tanggal 6 April 1971 dijatuhi vonis hukuman 15 yahun penjara.
- Mantan Sertu Udara Abdul Munir-Kadir oleh Mahmil Solo, pada tanggal 6 April 1974 dijatuhi hukuman penjara 17 tahun.

- Mantan Mayor Trisnadi oleh Mahmilti II/TT Pekalongan, pada tanggal 24 Januari 1973 dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.
- Mantan Kapten Winata oleh Mahmil Jawa Timur, pada tanggal 16 Januari 1972 dijatuhi vonis hukuman seumur hidup.
- Mantan Serma Suhadi oleh Mahmil Ambon, pada tanggal 27 Juli 1976 dijatuhi vonis hukuman 14 tahun penjara.
- Markus Girot alias Martimo alias Wowor (anggota Dewan Nasional SOBSI) oleh Mahmil Ujung pandang, pada tanggal 16 November 1968 dijatuhi vonis hukuman mati.

Tahanan/tawanan PKI yang disidangkan melalui Pengadilan Negeri (subversif) adalah sebagai berikut :

- Sukatno (anggota CC PKI) diadili di Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 11 Maret 1971 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Tjugito alias Badrun (anggota CC PKI) diadili Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 5 Agustus 1971, dijatuhi vonis penjara seumur hidup.
- Rewang (anggota CC PKI) diadili di Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 31 Desember 1971 dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.
- Mohammad Munir (anggota Polit Biro CC PKI dan Kepala Dep. Perjuta CDB Kompro Blitar Selatan) diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 15 Maret 1971 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Suwandi alias Djoyo (Sekretaris CDB PKI Jawa Timur dan anggota Perjuta CDB PKI Gaya Baru Blitar Selatan) diadili di Pengadilan Negeri Malang, tanggal 11 Juni 1973 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Roestomo (anggota Biro Chusus PKI Jawa Timur) diadili Pengadilan Negeri Malang, tanggal 10 Januari 1975 dijatuhi vonis hukuman mati.

- Gatot Soetardjo (Ketua CDB Jawa Timur) diadili Pengadilan Negeri Malang, tanggal 2 Januari 1976 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Djoko Untung (Ketua CDB/PKI Gaya Baru Blitar Selatan) diadili di Pengadilan Negeri Malang, tanggal 2 Januari 1976 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Abdulgani Muhamad (Pimpinan Biro Chusus PKI aceh) diadili oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 7 Oktober 1974 dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.
- Manganar Silaban (mantan Ketua DPRGR Tk. II Kabupaten Dairi, Sekretaris PKI Kabupaten Dairi) diadili oleh Pengadilan Negeri Sidikalang (Sumatra Utara), tanggal 6 Desember 1973 dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.
- Mus Darsimin (Penghubung I PKI Tebing Tinggi) diadili oleh Pengadilan Negeri Sumatra Utara, tanggal 23 Desember 1972 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Aminah Marianah (Sekretaris CBS PKI Pantai Cermin, Ketua Gerwani Kec. Pantai Cermin) diadili oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 9 Februari 1974 dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.
- Bujung Ketek Gelar Sutan (Wakil PKI Kotabaru) diadili oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanggal 23 Maret 1970 dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.
- Harmen Suhardjo (mantan Kapten-Purn) diadili oleh Pengadilan Negeri Pakanbaru, dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.
- Mochamad Amin Zein (mantan Wakil Sekretaris I CDB PKI Riau) diadili oleh Pengadilan Negeri Pakanbaru, dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.
- Achmad Imron bin Ki agus Husin (Sekretaris 1 CDB PKI Sumatra Selatan) diadili Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 22 Agustus 1967 dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.

- Ruslan Widjajasastra (anggota CC PKI Wakil Ketua DPP/ PKI Ketua Politbiro CC PKI Blitar Selatan), diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 15 Juli 1974 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Lie Tun Tjong alias Haryana (Ketua Biro Chusus Jawa Barat) diadili oleh Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 12 Mei 1976 dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.
- Drs. Susilo bin Sumarto Sastro Sendjojo (mantan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta diadili oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 25 Maret 1971 dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.
- Argo Ismoyo (mantan Walikota Magelang) diadili oleh Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 28 Desember 1977 dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.
- Soenari alias Sarpo (Sekretaris Kompro PKI Semeru Selatan, Sekretaris BTI Jawa Timur) diadili Pengadilan Negeri Lumajang-Jawa Timur, tanggal 1 April 1976 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Soekarman alias Bedjo alias Sidik alias Sarkam (anggota Dewan Harian CDB PKI Jawa Timur – Sekretaris Kompro KKA) diadili oleh Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Mei 1976 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Ishak Muklar (Ketua SOBSI Daerah Kalimantan Timur/ Dewan Harian CDB PKI Kalimantan Timur) diadili Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 11 November 1966 dijatuhi vonis hukuman mati.
- Suwiyo (Pimpinan SOBSI Kalimantan Selatan/Pengurus CDB PKI) diadili Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 9 September 1970 dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.
- Saadi Abdullah bin Ali (CDB PKI Kalimantan Barat) diadili oleh Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 18 September 1967 dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.

- Lasido (anggota PKI, kepala kampung Baru Tanyu), diadili Pengadilan Negeri Ujung Pandang, tahun 1966 dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.
- Umar Lestahulu (Sekretaris I CDB-PKI Maluku), diadili oleh Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 15 April 1975 dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.
- Pujo Prasetyo (Biro Chusus PKI Bali) diadili oleh Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 9 April 1979 dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.

Untuk penyelesaian tahanan Golongan B sesuai dengan kebijaksanaan yang ada, mereka akan dikembalikan ke masyarakat secara bertahap dan selektif serta diusahakan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah sosial baru. Hal tersebut tergantung pada kondisi pribadi tahanan tersebut dan kondisi sospol di daerah masing-masing.

Sebagai kelanjutan kebijaksanaan terhadap Golongan C untuk lebih menertibkan peraturan yang berhubungan dengan perlakuan terhadap mereka, diatur dengan Keputusan Presiden RI tanggal 25 juni 1975, tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat dalam G30S/PKI Golongan C. Terhadap Golongan C ini perlu dilakukan penangkapan dan penahanan untuk diproses lebih lanjut, maka penyelesaiannya dilakukan dengan membebaskannya dari tahanan segera setelah dilakukan pengelompokkannya menjadi Golongan C1, C2, dan C3.

Di samping langkah penyelesaian tersebut, terhadap Pegawai Negeri termasuk pegawai/karyawan perusahaan milik Negara yang masuk Golongan C dikenakan tindakan administratif. Bagi Golongan C1 dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri, bagi Golongan C2 dan C3 dapat dikenakan tindakan administratif lainnya, dengan memperhatikan berat ringannya keterlibatan mereka.

Mengenai pengaturan ketentuan-ketentuan tindakan administratif diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan Keamanan/

Panglima ABRI sepanjang menyangkut anggota ABRI, sedangkan PNS dan karyawan perusahaan milik negara diatur oleh Badan Administratif Kepegawaian negara.

Khusus bagi Golongan C2 dan C3 yang waktu berlakunya Keputusan Presiden ini masih bekerja namun memperoleh pembinaan dan pengawasan khusus, hingga dinyatakan nantinya sebagai warga negara yang baik. Apabila mereka melakukan lagi kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta negara dapat dikenakan tindakan seperlunya terhadap mereka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[14]

2. Instalasi Rehabilitasi (Inrehab) Pulau Buru

Salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam penyelesaian masalah tahanan politik (tapol) G30S/PKI golongan B adalah menempatkan mereka di antaranya di Pulau Buru, Maluku Selatan. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu bahwa pada prinsipnya tahanan Golongan B, baik ABRI maupun non ABRI, suatu saat akan dimasyarakatkan kembali. Pelaksanaannya dengan melihat situasi keamaman dan ketertiban daerah, serta melihat pribadi tahanan itu sendiri. Untuk itu Kaskopkamtib mengeluarkan surat perintah kepada para pelaksana khusus wilayah dan daerah untuk melakukan "pemilahan". Pemilahan ini maksudnya ialah tindakan penyeleksian terhadap tahanan politik G30S/PKI Golongan B untuk dapat mengelompokkan mereka sesuai dengan kadar ketertiban pada tanggal 1 Oktober 1965. Hasil pemilahan tersebut diwujudkan menjadi berbagai jenis pengelompokkan pemisahan penempatan (redislokasi), sesuai dengan jenis pengelompokkannya, perbedaan norma-norma, cara-cara perlakuan, dan pembinaannya.

---

14. *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia G30S/PKI*, Jakarta, Kopkamtib, 1978, hal.255-258

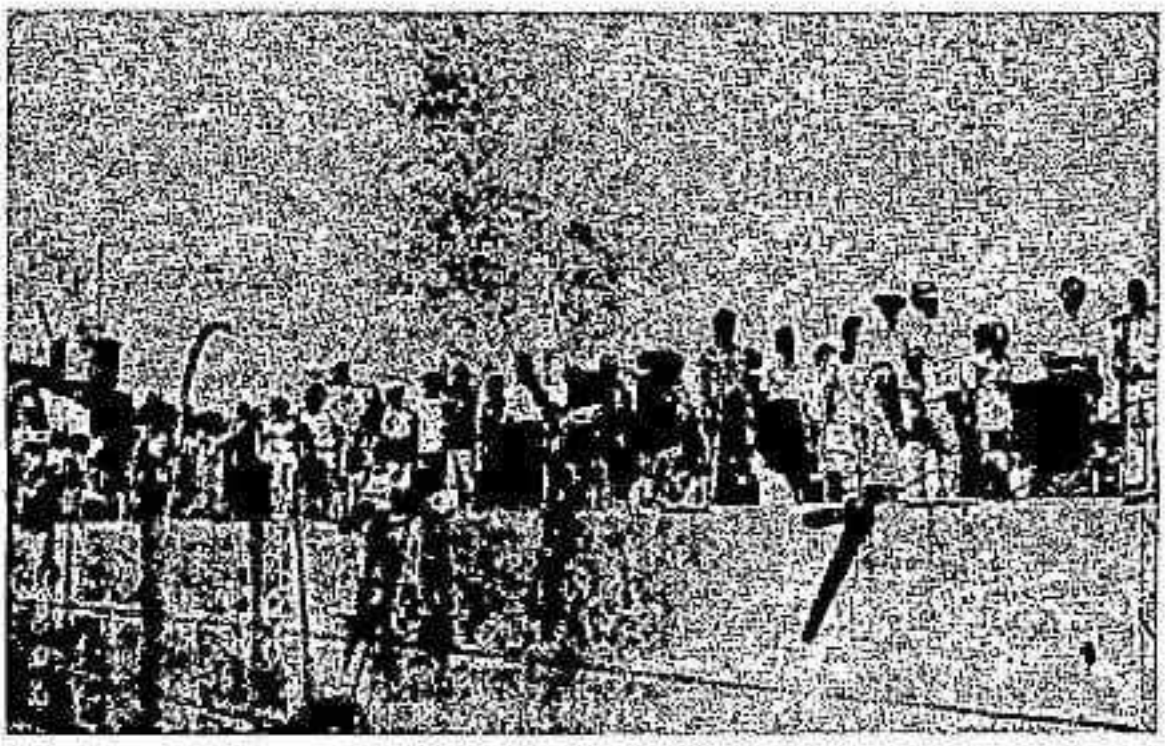

Tahanan yang dibebaskan dari Pulau Buru tiba di Surabaya pada tahun 1974. (Repro: Buku Kopkamtib)

Dalam pelaksanaan penempatan tahanan politik G30S/ PKI Golongan B ini, maka sebagai dasar hukumnya pemerintah mengeluarkan beberapa Keppres, Panpres, Juklak, dan Surat Keputusan Pangkopkamtib. Di antaranya Surat Keputusan Pangkopkamtib Nomor : Kep.009/Kopkam/2/1969, tanggal 26 Februari 1969 tentang penunjukkan Jaksa Agung sebagai penyelenggara dan pelaksana resettlement/ penempatan tahanan/ tawanan G30S/PKI Golongan B di Pulau Buru. Selain itu juga ada Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-041/DA/6/1971 tanggal 24 Juni 1971, tentang organisasi Badan Pelaksana Resettlement Buru (Bapreru). Adapun yang menjadi Ketua Bapreru ini adalah Jaksa Agung, dibantu oleh Staf Perencana dari Dewan Pertimbangan yang terdiri atas wakil-wakil berbagai departemen dan instansi non departemen. Sedangkan di tingkat daerah ditunjuk Pangdam XV/ Pattimura, yang pada waktu itu Brigjen Wing Wiryawan sebagai Ketua Pelaksana Bapreru di Ambon, dan di Tempat Pemanfaatan (Tefaat) Buru pelaksanaannya ditangani oleh Komandan Tefaat

yang membawahi 18 Komandan Unit. Adapun yang menjadi tugas pokok Bapreru ialah :

a. Menampung, memelihara, dan memanfaatkan para tahanan G30S/PKI Golongan B di pulau Buru dalam rangka pemecahan masalah tahanan G30S/PKI pada umumnya, pengasingan oknum-oknum yang dinilai sebagai paling berbahaya dari Golongan B khususnya demi kepentingan peningkatan ketahanan nasional (Surat Keputusan Pangkopkamtib Nomor : Prin-04/Kopkam/I/1979, tanggal 9 Januari 1974.
b. Melaksanakan penyatuan keluarga sesuai dengan Surat Perintah Pangkopkamtib Nomor : Prin-059/Kopkam/41/1972, tanggal 26 Juni 1972 dan Surat Perintah Pangkopkamtib Nomor : Prin-04/Kopkam/I/1979, tanggal 9 Januari 1974.
c. Melaksanakan rencana Operasi Kstaria, yaitu :
   - Melakukan pemilahan terhadap para tapol G30S/PKI untuk menentukan siapa-siapa yang dalam waktu dekat dapat dimasyarakatkan.
   - Membangun desa savana Jaya menjadi tempat tinggal masyarakat yang wajar.
   - Membuka rice-estate di Pulau Buru.

Dalam hal penyelesaian tahanan-tahanan PKI ini, Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1969 menegaskan bahwa penyelesaian tahanan PKI harus dilakukan sesuai dengan kebesaran jiwa Pancasila. Penempatan sejumlah tahanan G30S/PKI di Pulau Buru merupakan manifestasi kebesaran jiwa Pancasila, dan diharapkan merupakan langkah positif penyelesaian masalah tahanan G30S/PKI yang tidak memerlukan penyelesaian pengadilan.[15]

Mengenai dasar penyelesaian tahanan politik G30S/PKI ini pemerintah berpegang pada empat prinsip :

a. Tetap menjamin keamanan negara nasional.
b. Tidak bertentangan dengan rule of law.

---

15. *Berita Yudha*, 20 Oktober 1973

c. Tidak bertentangan dengan perikemanusiaan.

d. Para tahanan dapat dimanfaatkan untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.[16]

Hal tersebut ditegaskan juga oleh Jaksa Agung Sugih Arto sebagai Ketua Bapreru bahwa kebijaksanaan pemerintah dalam rangka penyelesaian tahanan politik (tapol) G30S/PKI adalah supaya mereka (tapol) menjadi warga negara yang Pancasilais, karena mereka pada saatnya akan bebas dan kembali ke masyarakat sebagaimana warga negra lainnya. Selain itu, Jaksa Agung juga menegaskan bahwa penyelesaian para tapol itu dilakukan atas dasar tidak mengganggu keamanan negara dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Juga harus bermanfaat untuk kepentingan pembangunan.[17]

Pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah tersebut dilakukan dengan dua cara, yakni dengan mengadakan bimbingan fisik dan pembinaan mental. Untuk pembinaan mental yang mengarah kepada penghancuran paham komunis dan menggantinya dengan pengisian Jiwa Pancasila, diselenggarakan dengan dasar pemisahan tingkat intelegensia para tapol yang berbeda-beda. Pengisian mental Pancasila dilakukan dengan berbagai cara, seperti ceramah-ceramah, dialog-dialog, dan cara-cara yang sangat efektif dan efisien oleh para tokoh dan para ahli. Begitu pula untuk pendidikan anak-anak dan keluarga mereka pun diusahakan sejauh mungkin agar terhindar dari pengaruh paham komunisme.

Adapun alasan pemerintah memilih Pulau Buru untuk menampung tapol G30S/PKI Golongan B di antranaya adalah , secara politik letaknya jauh dari ibukota yang sensitif politis. Rakyat Maluku umumnya dapat menerima kehadiran para tapol setelah menyadari pentingnya program pemerintah. Keadaan tanah di Pulau Buru ini cocok untuk dijadikan daerah pertanian

16. Kejaksaan Agung RI, Penjelasan Singkat tentang Badan Pelaksana Resettlement Buru (Bapreru) dalam rangka Expose di Staf Kopkamtib, Jakarta, 1974, hal.2 (Dokumen)
17. *Angkatan Bersenjata*, 7 Oktober 1972

yang dapat memberikan produksi pangan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan demikian mereka dapat hidup tanpa membebani pemerintah.

Penentuan areal tempat pemanfaatan (tefaat) Buru dilakukan setelah melalui pembicaraan antara Kopkamtib dan Kejaksaan Agung dengan Departemen Dalam Negeri dan pejabat-pejabat daerah di Maluku. Sesuai dengan Surat Keputusan Pangkopkamtib Nomor : Kep/006/ Kopkam/III/1971 tanggal 24 Maret 1971, luas areal tefaat Pulau Buru + 100.000 ha, berdasar penyerahan dari Raja Kayeli dan Raja Lilialy. Pada tahun 1974, areal itu diperluas lagi menjadi lebih kurang 240.000 ha.

Pelaksanaan penyelesaian masalah tahanan G30S/PKI dengan cara penempatan para tahanan di Pulau Buru, b erarti pemerintah dapat memecahkan paling tidak tiga aspek. Pertama, mengurangi kepadatan penghuni rumah-rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Selain itu juga meringankan beban anggaran belanja pemerintah untuk para tahanan. Sementara itu tenaga mereka dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha produktif.

Kedua, membiasakan mereka (para tapol) hidup di alam bebeas, sebagai masa peralihan sebelum mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat umum.

Ketiga, membantu program pemerintah lainnya yaitu transmigrasi. Pemindahan penduduk dari daerah padat seperti Pulau Jawa ke daerah-daerah yang masih kosong di luar Pulau Jawa lebih bermanfaat. Dengan de,ikian tahanan politik dapat ikut serta membantu usaha-usaha pembangunan nasional yang merata di seluruh Indonesia.[18]

Penempatan Tapol di Pulau Buru itu bukan berarti mereka diasingkan. Di tefaat Buru diusahakan agar mereka kerasan, hidup mandiri. Karena Pulau Buru bukan tempat tahanan atau penjara, tetapi tempat pemanfaatan. Baru kemudian nama tefaat berubah menjadi Instalasi Rehabilitasi (Inrehab) Pulau Buru.

---

18. *Indonesia Raya*, 25 Djanuari 1969

Kebijakan pemerintah mengenai penempatan tapol seperti itu, ada kekhawatiran di kalangan masyarakat. Di tempat baru tersebut dikhawatirkan akan timbul suatu "perkampungan komunis". Untuk itu daerah penampungan, mendapat pengawasan terus-menerus baik oleh alat-alat negra maupun Pemerintah Daerah setempat. Selain itu para tapol tidak hanya bekerja dalam proyek-proyek pembangunan tetapi juga mendapat pendidikan mental spiritual secara terus-menerus. Hal tersebut sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah bahwa terhadap para tapol G30S/PKI Golongan B diadakan perawatan, pengamanan, dan pengawasan atas kehidupan mereka agar tahanan secara bertahap dapat menyadari tindakan-tindakan dan ideologinya yang salah.

Dalam rangka pembinaan fisik (pembangunan ekonomi/pertanian) untuk menjadikan para tapol dan keluarganya dapat berdiri sendiri, selain dibimbing dalam bidang pertanian juga diberikan peningkatan pengetahuan di bidang lain secara terus-menerus. Pada bidang pertanian dilaksanakan tiga pola, yaitu pola A, B, dan C. Pola A adalah persawahan untuk produksi beras agar kebutuhan pangan pokok tidak tergantung daru daerah lain. Pola B adalah pola penunjang, yaitu berupa tanaman jangka pendek, seperti palawija. Sedangkan pola C adalah merupakan pula penyelamatan yang diakibatkan pola-pola lainnya. Dari seluruh areal + 100.000 ha, secara bertahap yang berhasil diubah menjadi daerah persawahan sekitar 14.000 ha.[19] Untuk seorang tapol disediakan + 1 ha tanah garapan. Di samping itu untuk penebangan dan pembukaan hutan tersedia tanah seluas 81.126 ha.[20]

Pengurusan tapol tidak hanya menyangkut aspek keamanan semata-mata, tetapi juga mengandung aspek sosial politis dan sosial budaya yang sangat peka dan rumit. Ideologi para tapol ini tidak mudah "disadarkan" hanya dengan bekerja yang menghasilkan kebutuhan konsumsi dan rawatan rohani. Para tapol ini secara ideologi rata-rata punya daya tahan kuat, gigih, dan kadang-

19. *Angkatan Bersenjata*, 7 Oktober 1972
20. *Minggu Cbas*, Desember 1969

kadang kepala batu (die hard). Mengingat besarnya jumlah tahanan yang dikirim ke Pulau Buru, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Organisasi pembinaan para tapol mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Pemindahan mereka ke Pulau Buru sebagai usaha reduksi pengembalian sikap mental dan ideologi dari komunisme ke Pancasila, sampai benar-benar para tapol dapat kembali dan diterima oleh masyarakat serta warga negara yang Pancasilais.

Pelaksanaan pengiriman para tapol ke Pulau Buru tersebut dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tahun 1969-1970 sebanyak 2.500 orang. Mereka yang berasal dari Jakarta sejumlah 500 orang, dari Jawa Barat 300 orang dan Jawa Timur 400 orang. Tahap kedua yang dilaksanakan tahun 1970-1971 sebanyak 5.000 orang tapol. Mereka berasal dari Jakarta sejumlah 500 orang, dari Jawa Barat 700 orang, dari Jawa Tengah 2.950 orang, dan Jawa Timur 850 orang. Tahap berikutnya dilaksanakan tahun 1971-1972 sebanyak 2.500 orang. Mereka berasal dari Jakarta sejumlah 921 orang, dari Jawa Barat 390 orang, Jawa Tengah 663 orang, dan dari Jawa Timur 526 orang.[21]

Seluruh Tapol itu berasal dari keempat Kodam di Jawa. Setiap tahap pengiriman tapol selalu disertakan tim kesehatan, petugas penerangan, pertanian, dan rohaniwan. Para tapol tersebut walaupun semuanya termasuk klasifikasi Golongan B, tetapi yang dapat dikatakan intelek (berpendidikan tinggi) di antara mereka hanya sekitar 5 %. Golongan intelektual/bependidikan ini dipekerjakan di bidang administrasi. Di antara mereka yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Pramoedya Ananta Toer, Rivai apin, Prof.Dr. Suprapto SH, Hasyim Rachman, husni, dan Bambang Sukawati Dewantara.

Sebelum dikirim ke Pulau Buru, mereka dikumpulkan terlebih dulu di Nusakambangan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Para tapol yang berumur lebih dari 40 tahun atau yang fisiknya kurang sehat tidak disertakan untuk dikirim ke Pulau Buru.

---

21. *Minggu Cbas*, Oktober 1969

Sejak para tapol tiba di Tefaat Buru, dilakukan pembinaan mental agama dan mental ideologi Pancasila oleh para rohaniwan dari Departemen Agama dan Team Bintal Tahanan G30S/PKI. Sampai tahun 1974 sejumlah tapol telah tercatat menganut agama, yaitu yang menganut agama Islam sebanyak 5.039 orang, Roma Katholik 1.728 orang, Protestan 2.908 orang, Hindu dan Budha 185 orang. Adapun sarana dan tempat ibadah dibangun di seluruh unit Tefaat. Di sana terdapat masjid sebanyak 11 buah, musholla tujuh buah, gereja 17 buah, dan pagoda/wihara sekitar lima buah. Para rohaniwan yang bekerja di Tefaat Buru terdiri atas rohaniwan Islam berjumlah enam orang, Roma Katholik empat orang, Protestan dua orang, dan rohaniwan Hindu/Budha tidak ada.

Kegiatan yang dilaksanakan para tapol di Inrehab Buru ialah bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Mengenai prasarana yang ada sudah dibangun secara bertahap sejak 1969 sampai dengan 1974 berupa waduk sebanyak 57 buah dan bendungan 40 buah.

Setelah perkembangan kehidupan sosial ekonomi di Inrehab Pulau Buru cukup baik, maka dalam rangka penyatuan keluarga tahanan G30S/PKI pemerintah mengijinkan para istri dan anak-anaknya secara sukarela menyusul suaminya ke Pulau Buru. Sampai tahun 1975 terdapat sekitar 309 orang istri dan 567 oorang anak menyusul ke Pulau Buru. Dengan demikian kehidupan di Inrehab Pulau Buru menjadi semakin ramai ramai yang lengkap dengan segala sarananya. Kondisi ini memang belum sepenuhnya memuaskan, tetapi keadaannya tidaklah seburuk apa yang digambarkan oleh pers asing di luar negeri. Banyak hal-hal yang oleh sementara kalangan pers asing dibesar-besarkan, seolah-olah para tapol itu diperlakukan di luar perikemanusiaan. Mereka membandingkan Inrehab Pulau Buru sama dengan Internerings Kamp Digul yang ada pada jaman kolonial/Belanda.

Bagaimanapun para tapol itu adalah manusia dan bangsa Indonesia juga. Pelbagai pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani para tapol ini berlandaskan

falsafah negara kita, Pancasila. Terdorong oleh tanggungjawab tersebut, pada tanggal 9 Oktober 1973 Pangkopkamtib Jenderal TNI Soemitro beserta rombongan melakukan peninjauan ke Pulau Buru. Dalam peninjauan tersebut, rombongan peninjau dibagi menjadi tiga. Rombongan pertama merupakan Team Teknis, Psikologi terdiri atas sarjana-sarjana psikologi Universitas Indonesia dan sejumlah perwira yang bertugas di bidang pembinaan mental. Team Teknis ini diketuai oleh Prof. Dr. Fuad Hassan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Rombongan ini berangkat seminggu lebih dulu.

Rombongan kedua, berangkat dari Jakarta yaitu Jaksa Agung Ali Said SH, selaku Ketua Bapreru, Brigjen Waldy, Ketua Perencana Bapreru, dan Mzayjen Drs. Oemar Said, Komandan Satuan Tugas Operasi Mental Kopkamtib. Dalam rombongan ini ikut serta juga delapan orang wartawan senior seperti Rosihan Anwar (Pedoman), Mochtar Lubis (Indonesia Raya), Jakob Oetama (Kompas), SH. Noto (The New Standard), Supeno Sumardjo mewakili B.M. Diah (Merdeka), Sunardi DM (Berita Yudha), Masdun Pranoto (Angkatan Bersenjata), dan Saban Siagian (Sinar Harapan).

Rombongan ketiga, yaitu Pangkopkamtib Jenderal TNI Soemitro disertai sejumlah perwira tinggi seperti Pangkowilhan IV Laksda TNI Soesatyo Mardi, Mayjen Pol. Drs. Socyoed bin Wahyoe, Irjen Hankam, Marsda TNI Muchammad Lud Asisten Operasi Kopkamtib, Mayjen Vharis Soehoed Asisten Intel Kopkamtib, Brigjen Suprapto Deputy II Bakin, dan Brigjen Drs. Sudarwo dari Kopkamtib. Dalam rombongan ini juga ikut serta tiga orang wanita sarjana psikologi yang merupakan anggota Team Teknis Psikologi yaitu Dra. Saparinah Sadli, Dra. Mely Suwondo, dan Dra. Nur Popoy. Adapun tujuan mereka melakukan peninjauan ke Pulau Buru tersebut untuk melihat dari dekat perkembangan mental para tapol serta dalam rangka mempercepat proses pembebasan para tapol Golongan B tersebut.[22]

---

22. *Kompas*, 19 Oktober 1973, *lihat juga Angkatan Bersenjata*, 26 Oktober 1973

Daerah yang dikunjungi oleh Pangkopkamtib bersama rombongan tersebut di antaranya ialah Unit I Wanapura, Unit II Wanareja Jaya serta Desa Savana Jaya. Desa Savana Jaya pembangunannya baru mulai pada tahun 1973 yang berdasarkan Surat Perintah Pangkopkamtib Nomor : Prin-173/Kopkam/XI/1973. Desa Savana Jaya tidak lain adlah Unit IV dari XVII unit tempat di mana para tapol golongan B tinggal di Tefaat Pulau Buru. Kemudian desa ini berkembang menjadi tempat penampungan para tapol yang telah berkumpul dengan keluarganya, sehingga merupakan desa dan masyarakat biasa yang bukan tapol. Keluarga tapol yang pertama datang pada bulan Juli 1972. Segala keperluan dan kebutuhan yang sangat pokok bagi mereka seperti pangan danperumahan dipersiapkan oleh pemerintah.

Perkampungan Savana Jaya ini bisa dikunjungi oleh orang luar. Istri-istri atau keluarga tapol pun, yang memang berstatus bebas, juga bepergian bebas kemana saja melakkan aktivitasnya, seperti menjual hasil pertanian dan peternakannya. Di Savana Jaya ini juga setiap hari Senin dan Kamis diadakan "pasar" di mana kebutuhan keluarga tapol dapat diperoleh dari toko-toko yang diselenggarakan oleh Bapreru.

Di desa Savana Jaya pendidikan dasar dan pendidikan agama, diselenggarakan bagi keluarga dan anak-anak tapol. Sampai tahun 1974 terdapat satu TK, satu SD, dan satu Madrasah, dengan jumlah murid masing-masing TK 32 orang, SD 112 orang, dan Madrasah 99 orang. Adapun anak-anak yang melanjutkan sekolah di Namlea ialah : SMP sebanyak 14 orang, SMEP delapan orang, dan SPG Alhilal satu orang. Mereka ditampung di Wisma Kartini Namlea dengan dibiayai oleh Inrehab Buru (Pemerintah). Melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku No.265 tanggal 20 Maret 1974; SD di Savana Jaya dinyatakan sebagai SD Negeri.

Di desa Savana Jaya, Jenderal Soemitro melakukan "wawancara" dengan beberapa orang tapol yang tergolong "intelek". Di samping itu, ia juga melakukan bincang-bincang dengan para keluarga tapol di rumah tempat tinggal mereka. Kesehatan dan kegiatan para tapol

di Tefaat Buru merupakan masalah yang sangat diperhatikan oleh Pangkopkamtib. Ia juga mengatakan, bahwa ia merasa senang dan bangga melihat para tapol dalam keadaan sehat, segar, bersemangat, dan penuh harapan. Ia berpesan "Jangan patahkan harapan itu". Kemudian dia menegaskan bahwa : "Kekuatan dan kekuasaan itu tidak ada artinya". Ia menunjukkan fungsi dan makna mesjid serta gereja yang ada di kompleks tersebut.[23] Dalam berbincang-bincang itu, setiap orang diberi kesempatan dan kebebasan untuk menyampaikan isi hatinya. Tetapi mereka pada umumnya tidak begitu banyak berbicara. Kepada para tapol yang tergolong "terpelajar" ini dijelaskan pula tentang maksud kunjungannya. Bahwa dalam rangka penyelesaian masalah tapol Golongan B itu, Pemerintah telah membuat perencanaan-perencanaan sesuai dengan landasan yang telah digariskan oleh Ketetapan MPRS. Dalam penyelesaiannya diusahakan agar tidak merugikan keamanan tetapi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Proyek Inrehab Pulau Buru dengan penghuni-penghuninya diarahkan agar mereka berswakarya dan berproduksi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Kepada mereka juga ditekankan untuk "bertepo seliro", dan diyakinkan bahwa mereka tinggal di tempat tersebut hanya sementara. Pada saatnya nanti para tapol akan menikmati kebebasan. Di Inrehab para tapol harus menciptakan kehidupan sendiri dalam menuju hidup barunya di luar Pulau Buru. Para tapol diyakinkan bahwa kami (Pemerintah) mencintai bangsanya sendiri, yang baik maupun yang jelek. Cinta kami adalah cinta "genuine" cinta murni. Tidak seperti cintanya orang luar terhadap kita.

Panglima Kopkamtib juga menyampaikan informasi tentang perkembangan yang terjadi di dalam negeri maupun perubahan-perubahan internasional. Diinformasikan bahwa Pemerintah Orde Baru telah mencapai berbagai kemajuan pembangunan baik di bidang fisik maupun mental. Juga diinformasikan perkembangan-perkembangan politik yang terjadi di dalam negeri maupun di

23. *Pedoman*, 26 Oktober 1973

luar negeri. Mulai dari Golkar, Pemilu, penyederhanaan partai, profesionalisasi, dan sidang pertama MPR hasil pemilu. Begitu pula tentang pendekatan-pendekatan politis yang dilakukan oleh negara-negara Amerika dengan RRC, serta hubungan RRC dengan Uni Sovyet yang saling bertentangan.

Setelah berbagai informasi diberikan, percakapan/wawancara dengan para tapol kemudian dibagi menjadi dua group. Pramoedya Ananta Toer, Syarifudin SH, dan Muljono SH, berdialog dengan Muchtar Lubis, Rosihan Anwar, serta wartawan lainnya di tempat lain. Sedangkan Prof. Suprapto SH, Basuki Effendi dan yang lainnya tetap meneruskan percakapan dengan Jenderal Soemitro, Prof. Fuad Hassan, serta rombongan lainnya.

Pada sore harinya percakapan dilanjutkan di pinggir pantai Namlea. Jenderal Soemitro ditemani Prof. Fuad Hassan, Dra. Saparinah Sadli, dan anggota Team Teknis lainnya, secara santai melakukan percakapan dengan beberapa orang tapol yang tergolong "nakal" atau dengan kata lain "mental dan ideologi"[24] mereka belum berubah (die hard). Di antara mereka yang dikategorikan "nakal" terdapat sastrawan Lekra Rivai Apin, Pramoedya Ananta Toer, dan Karel Supit. Mereka tinggal dalam Tefaat khusus di Jiku Kecil dengan kawan-kawannya yang berjumlah sekitar 100 orang.[25]

Rivai Apin adalah sastrawan Angkatan 45, dengan kumpulan sajaknya yang terkenal Tiga Menguak Takdir, yang ditulis bersama Chairil anwar dan Asrul Sani. Rivai berpendapat tentang Gerakan 30 September/ PKI itu hanyalah "semacam bencana saja" dan "G30S/PKI hanya ketololan saja". Rivai Apin tidak merasa sebagai anggota PKI. Ia masuk Lekra hanya ingin lebih dekat bersama rakyat; dan melalui Lekra ia hanya mengisi kebudayaannya saja. Adapun Basuki Effendi (sutradara) menyampaikan keinginannya untuk segera bebas dan dapat menyumbangkan keahliannya sebagai sutradara. Ia ingin meyakinkan pemerintah/Pangkopkamtib bahwa

24. *Berita Yudha*, 30 Oktober 1973
25. *Angkatan Bersenjata*, 25 Oktober 1973

ia bukan PKI dengan menunjuk kepada film-filmnya seperti "Pulang" dan "Si Pincang" yang pernah disutradarainya. Prof. Suprapto tapol lainnya mengemukakan pendapatnya tentang Marxisme, bahwa baginya Marxisme hanyalah ilmu saja di bidang sosial ekonomi. Dia mengambilnya bila ada yang cocok. Ia pun berusaha meyakinkan bahwa ia bukanlah PKI,[26] meskipun dalam pengadilan peristiwa Bandar Betsi, ia jadi pembela yang sangat gigih. Sedangkan Pramoedya mengemukakan tentang kehidupan di Buru tidak sependapat dengan para ahli yang telah melakukan survey di daerah tersebut. Menurutnya, Pulau Buru masih muda tanahnya, tanpa mengemukakan argumentasi tentang pendapatnya itu. Pramoedya masih sempat menulis novel tentang periode kebangkitan nasional. Ia juga menerangkan bahwa setiap hari dapat menulis selama 15 menit dan membaca selama lima menit. Lebih dari itu tidak bisa, sebab sudah kecapaian seharian bekerja di ladang.

Dalam pertemuan terakhir dengan para tapol, berlangsung percakapan antara Pangkopkamtib dengan beberapa orang seniman muda. Pada kesempatan itu Jenderal Soemitro menanyakan tentang perubahan hidup yang mereka alami selama empat tahun sejak mereka datang di Pulau Buru. Para tapol seniman ini menyatakan bahwa mereka dalam rangka berswakarya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka juga dapat dengan bebas berkarya di bidang masing-masing. Ada yang berkarya membuat patung dari kertas dan tanah liat, juga ada yang membuat lukisan-lukisan. Hasil karya-karya seni para tapol tersebut cukup baik. Pangkopkamtib pun memberikan harapan-harapan kepada para tapol setelah menyaksikan sendiri keinginan dan kesulitan yang dihadapi oleh seniman tersebut, terutama kesulitan mengenai bahan bakunya. Untuk itu pemerintah menjanjikan akan memberikan segala apa yang mereka butuhkan tersebut. Demikian pula kepada tapol Prof. Mr. Suprapto SH, bekas pengacara dan dosen Universitas

26. Mr. Suprapto, adalah tokoh PKI (Jousoeps), yang melakukan pemberontakan di Cirebon pada Februari 1946, bersama Buyung Saleh Puradisastra. Ia pernah membuka kantor pengacara dan Pembela Utama BTI dalam peristiwa pembunuhan Peltu Sudjono di Bandar Betsi bulan April 1965.

Res Publica, dijanjikan akan diberikan kebutuhan yang diminta sesuai dengan profesinya. Pramoedya berbisik kepada Mochtar Lubis supaya dimintakan mesin tik, Rivai Apin minta diusahakan kacamata minus 4 ½. Semua permintaan para tapol itu dicatat dan ditampung oleh Komandan Tefaat Letkol Syamsi MS.[27] Para tapol seniman itu menyambut gembira atas uluran tangan Pangkopkamtib tersebut, dan mereka berjanji akan berbuat sebaik-baiknya.

Dalam pembicaraan selanjutnya seorang tapol seniman ketika ditanya mengapa dia terlibat/bergabung dengan Lekra; dia menyebutkan karena dia terdorong oleh masalah ekonomi. Sebagai mahasiswa ASRI di Yogyakarta, ia tidak lagi mendapat kiriman dari orang tuanya. Untuk membiayai hidupnya ia kemudian bergabung dengan Lekra pada waktu itu banyak pekerjaan membikin dekorasi, spanduk-spanduk, dan lain-lain. Hal senada juga dikemukakan oleh teman-temannya yang lain.

Dari hasil peninjauan dan dialog-dialog dengan tapol-tapol tertentu tentang keadaan di Pulau Buru, ternyata sudah jauh lebih baik dibandingkan ketika mereka pertama kali datang di Pulau Buru. Di bidang keamanan tidak lagi nampak menara penjagaan dan pagar kawat berduri. Masalah makanan pun tidak menjadi masalah. Pada saat mereka datang, mereka mendapatkan jatah bulgur dan ikan asin. Setelah berhasil dalam swasembada, para tapol cukup makan nasi, jagung, ubi, kacang-kacangan, ikan, dan telur dari hasil usaha mereka sendiri.

Pulau Buru yang semula merupakan hutan yang lebat dan sunyi, maka setelah diubah menjadi tefaat-tefaat itu merupakan perkampungan yang rapi dan lengkap. Jalan lingkungan, lapangan olah raga, sekolah, tempat ibadah, poliklinik serta bangunan dan taman tempat rekreasi sudah tersedia dan cukup baik.[28]

Begitu pula para tapol pada umumnya merasa lebih lega dan bebas di tempat yang baru ini, dibandingkan dengan waktu mereka

---

27. *Kompas*, 22 Oktober 1973, *dan Pedoman*, 22 Oktober 1973
28. *Angkatan Bersenjata*, 22 Oktober 1973

masih menghuni lembaga pemasyarakatan di Pulau Jawa. Tempat baru ini memberikan harapan dan kehidupan baru bagi para tapol dan kemudian bagi keluarganya.

Keadaan tanah garapan yang semula terdiri dari tanah yang penuh dengan alang-alang dan tanah bekas penebangan hutan, kemudian ditanami dengan tanaman padi, jagung, pisang, singkong, dan sayur-sayuran. Tanam-tanaman tersebut tumbuh dengan subur, begitu pula dengan sawah yang ditanami bibit jenis PB-5. Produksi beras dalam satu musim (enam bulan) paling rendah 798,6 ton, sedangkan konsumsi para tapol dalam satu tahun sekitar 1.260 ton. Surplus (kelebihan) beras di Tefaat Buru setiap tahun (dua kali panen) paling sedikit sekitar 337 ton.[29] Semuanya itu adalah merupakan perwujudan dari hasil kemauan kerja para tapol yang ditunjang dan diarahkan oleh pemerintah melalui petugas-petugas Bapreru secara terus-menerus.

Untuk memenuhi segala permintaan kebutuhan para tapol dan janji Pangkopkamtib ketika mengadakan peninjauan ke Pulau Buru, Presiden Soeharto memberikan bingkisan berupa alat-alat keperluan yang diminta beserta surat pribadi Presiden kepada Pramoedya Ananta Toer beserta para rekannya di Pulau Buru. Dalam suratnya kepada Pramoedya itu, Presiden Soeharto antara lain menyatakan, bahwa beliau telah menerima laporan dari Pangkopkamtib Jenderal TNI Soemitro tentang keadaan para tapol di Pulau Buru. "Kekhilafan bagi seorang manusia adalah wajar. Namun kewajaran itu harus pula ada kelanjutan yang wajar, yakni kejujuran, kebenaran, an kemampuan untuk menemukan kembali jalan yang benar dan dibenarkan". Surat itu kemudian ditutup dengan do'a : "Semoga Tuhan Yang Maha Besar lagi Kasih memberikan perlindungan dan bimbingan kepada saudara-saudara dalam menemukan jalan tersebut.[30]

Adapun tempat penampungan sementara bagi tahanan G30S/PKI Golongan B wanita di Pulau Jawa yaitu Plantungan

---

29. *Angkatan Bersenjata*, 18 Oktober 1973
30. *Angkatan Bersenjata*, 9 November 1973

Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Untuk menangani masalah ini ditentukan secara khusus pokok-pokok organisasi dan prosedur "Tempat Resetlemen Sementara Tahanan G30S/PKI Golongan B Wanita di Plantungan". Organisasi ini adalah Badan Pelaksana Kopkamtib yang bertugas untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan bimbingan mental tahanan G30S/PKI Golongan B Wanita ke arah mental Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari kebijaksanaan ini diharapkan agar pada saat pembebasannya mereka sudah mempunyai bekal yang lengkap guna menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat di tempat tinggalnya.

Setelah melihat perkembangan mental dan ideologi para tapol sesuai dengan hasil penilaian dan pemilahan yang dilakukan sejak bulan Oktober 1972, maka pada permulaan tahun 1974 pemerintah mulai mempertimbangkan pembebasan tahanan G30S/PKI Golongan B secara selektif tergantung dari kondisi serta sikap mental masing-masing tahanan tersebut. Begitu pula pelaksanaan pembebasan secara masssal tapol Golongan B dapat dipertimbangkan apabila kondisi sosial politik telah benar-benar menunjukkan kecenderungan yang positif. Selain itu juga apabila para tahanan tersebut telah dapat dinilai sebagai orang yang dapat menerima Pancasila.

BAB VI
OPERASI TERHADAP SISA-SISA KEKUATAN PKI

1. Operasi Penangkapan Para Tokoh PKI

Untuk menghancurkan kegiatan PKI sesudah gagalnya kudeta G30S/PKI, ABRI melakukan operasi-operasi intelijen yang ditujukan terutama kepada para tokoh PKI yang menjadi otak dari gerakan PKI untuk mengembalikan kekuatannya. Pengejaran terhadap tokoh nomor satu PKI D.N. Aidit dengan operasi intelijen membuahkan hasil dengan ditangkapnya Ketua CC PKI tersebut di Solo pada tanggal 23 November 1965. Brigjen Supardjo ditangkap pada tanggal 12 Januari 1967 di Jakarta. Demikian juga tokoh-tokoh PKI lainnya yang umumnya ditangkap melalui operasi intelijen.

a. Operasi Penangkapan Ketua CC PKI D.N. Aidit

Ketua CC PKI D.N. Aidit merasa usaha kudetanya di Jakarta menemui kegagalan, segera menyingkir ke Jawa Tengah tanggal 2 Oktober 1965 dinihari dengan menggunakan pesawat udara. Di Jawa Tengah orang-orang kepercayaannya sudah menunggu untuk menyelamatkan dirinya. Tanpa diketahui oleh PKI, seorang intelijen bernama Sriharto alias Liem Han Koen menyusup memasuki lingkungan orang-orang PKI yang akan melindungi D.N. Aidit. Dengan demikian kedatangan D.N. Aidit ke Jawa Tengah telah diketahuinya. Selanjutnya Sriharto melaporkan sekaligus membuka identitas dirinya selaku anggota Direktorat Khusus Staf Angkatan Bersenjata/Kompartemen Pertahanan Keamanan untuk daerah "Jaringan Operasi (Jarop) Lebah" Surakarta (yang meliputi wilayah Surakarta, Yogyakarta, Magelang, dan Cilacap) kepada Kolonel Yasir Hadibroto selaku Komandan Pelaksana Kuasa Perang (Dan Pekuper) di Lojigandrung-Solo, bahwa ia telah menyusup ke dalam tubuh PKI. Ia mendapat kepercayaan dari PKI untuk menyelamatkan Ketua CC PKI D.N. Aidit. Sriharto disusupkan ke dalam tubuh PKI melalui SBIM (Serikat Buruh Mesin dan Metal) di Purwosari.

Organisasi ini berada di bawah naungan SOBSI, selain anggota SBIM Sriharto pun menjadi Wakil Ketua Partai Indonesia (Partindo) cabang Karanganyar yang mengantarkan dirinya menjadi anggota legislatif (DPR-GR). Dengan demikian penetrasi ke dalam tubuh PKI berjalan mulus, sehingga Sriharto menjadi orang penting dalam tubuh PKI sejak tahun 1963, sesuai dengan sasaran yang dituju.

1) Rencana Operasi Penangkapan

Setelah mempelajari laporan dan rencana penangkapan, Kolonel Yasir Hadibroto yang didampingi oleh Kasi I Pekuper Kapten Hartono, disetujui suatu rencana operasi penangkapan. Dalam rencana operasi tersebut pengawal-pengawal Aidit sepenuhnya harus percaya bahwa ketuanya aman di tangan Sriharto, sehingga tiba saatnya penangkapan, kemungkinan terjadinya kegagalan dapat dieleminir sekecil mungkin. Karena sasaran yang dituju bukan hanya Aidit tetapi juga pengawal-pengawalnya dan orang-orang yang melindungi Aidit serta mengorek sebanyak mungkin informasi yang diperlukan dari Aidit.

Untuk suksesnya operasi dibuat skenario yang memanfaatkan kondisi yang ada waktu itu dengan cara membuat kepanikan-kepanikan Aidit dari bahaya yang mengancam keselamataanya. Skenario sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga dengan "jasa" Sriharto, tokoh tersebut akan selalu dapat "terhindar" dari penangkapan, dan selanjutnya Aidit akan makin percaya dan pasrah. Untuk dapat terlaksana seperti yang diharapkan, Sriharto bersikap seperti orang yang serba tahu soal-soal operasi yang akan dilakukan oleh militer.

2) Jalannya Operasi Penangkapan

Setelah menyusun rencana operasi penangkapan D.N. Aidit di Markas Brigif 4 Lojigandrung, Sriharto mulai melaksanakan tugas tersebut tanggal 12 Nopember 1965 sore. Ia menemui Siswadi di rumahnya. Siswadi anggota Biro Khusus PKI yang juga pengurus Baperki yang menangani bidang kesenian. Siswadi inilah yang meminta Sriharto untuk melaksanakan "Tugas berat

tapi mulia" yaitu menyelamatkan Ketua CC PKI D.N. Aidit, selanjutnya Sriharto diperkenalkan dengan Sudarmo seorang pengawal Aidit. Pada saat itu Sudarmo memberikan rincian tentang pemindahan Ketua CC PKI tersebut, sehubungan dengan keadaannya yang tidak mungkin lagi diam di tempat persembunyiannya. Sudarmo memerintahkan apabila tempat baru sudah siap supaya menghubungi kembali Siswadi. Selanjutnya Sudarmo memberikan surat kepada Sriharto sebagai tanda untuk mengambil Aidit dari tempat persembunyiannya. Isi surat tersebut adalah sebagai berikut: "Supaya radio yang diperbaiki disini dapat diserahkan kepada pembawa surat ini". Demikian pertemuan dengan Siswadi dan Sudarmo, sebelum Sriharto melapor kepada Kolonel Yasir Hadibroto.

Selanjutnya pada pertemuan tanggal 12 Nopember 1965 sore hari di rumah Siswadi, Sriharto berusaha menarik kepercayaannya. Sriharto menyatakan bahwa Siswadi sudah termasuk dalam daftar serta target penangkapan, karena Pekuper sudah menemukan daftar pengurus Baperki Surakarta. Begitu mendengar bahwa dirinya akan ditangkap, Siswadi menjadi panik karena persoalannya akan meluas juga kepada keselamatan Ketua CC PKI . Dalam suasana demikian, Sriharto memberikan jalan keluar. Untuk sementara agar Siswadi menyingkir dahulu, karena sifat dari operasi itu hanya seketika dan sekali itu saja. Mengenai operasi pelaksanaannya pun Sriharto sudah mengetahui secara keseluruhan. Setelah memberikan jalan keluar pada sore hari itu juga Siswadi di bawa ke suatu tempat di sekitar Palur dengan menggunakan sepeda motor.

Sesuai dengan rencana, maka pada tanggal 12 Nopember 1965 malam, di kampung Kerten dilaksanakan Operasi oleh ABRI dengan dalih untuk menangkap Siswadi. Pelaksanaan operasi dipimpin oleh Kapten Hardijo dari Brigif 4. Pada pukul 24.00 Tim Operasi menggeledah dan memasuki rumah-rumah penduduk, setelah esok harinya Sriharto menjemput kembali Siswadi, dan menyatakan bahwa situasi telah aman bagi dirinya.

Dengan kejadian tersebut ternyata Siswadi semakin yakin dan percaya terhadap kemampuan Sriharto dalam membaca situasi gawat. Selanjutnya ia menuruti apa saja yang disarankannya, terlebih lagi ia menjadi yakin apabila Aidit di tangannya akan aman.

Pada tanggal 14 Nopember 1965, Siswadi dan Sudarmo bertemu dengan Sriharto di rumahnya, untuk membicarakan pemindahan Aidit dari tempatnya, karena sudah terlalu lama tinggal di tempat tersebut. Baru ketika itulah Sudarmo memberitahukan tempat persembunyian Aidit yaitu kampung Sambeng di rumah kontrakan Hardjomartono alias Kasim seorang anggota SBKA. Setelah menganalisa dan mengevaluasi berbagai kemungkinan serta yang menyangkut internal dan eksternal security dicapai kata sepakat di antara mereka bertiga bahwa keesokan harinya tanggal 15 Nopember 1965 pukul 10.00 akan dilaksanakan penjemputan serta pemindahan Aidit dari kampung Sambeng ke Kerten di rumah Sriharto.

Mengingat tindakan mereka juga menggunakan taktik pendadakan, maka Sriharto segera melaporkan secepatnya perkembangan tersebut kepada Kolonel Yasir Hadibroto di Lojigandrung. Untuk meyakinkan atas kebenaran semua rencana dari pihak Aidit, maka Sriharto meminta agar diadakan *tailing* (mengawasi, mengikuti dan melaporkan setiap gerakan mereka) oleh pihak Intel Brigif 4, maksudnya untuk mengetahui secara pasti tentang diri Aidit dan hubungannya dengan eksternal security. Kemudian Kolonel Yasir Hadibroto memerintahkan Letda Ning Prajitno untuk mengawasi secara terus-menerus lokasi Aidit berada. Hal ini dilakukan untuk mencegah Aidit meninggalkan tempat persembunyiannya secara tiba-tiba.

Sesuai dengan rencana, datanglah Sudarmo ke rumah Sriharto pada pukul 09.00 pagi tanggal 15 Nopember 1965. Dengan memakai jaket dengan badge GPTP (Gabungan Pejuang Tentara Pelajar), Sriharto berangkat membonceng Sudarmo yang berseragam dril, berkacamata hitam serta berpeci hitam sehingga

sulit dikenali, perjalanan hanya 10 menit, mereka tiba di rumah Hardjomartono.

Sudarmo langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan Sriharto ditemani Harjomartono alias Kasim di ruang depan. Karena sudah ada kontak, pembicaraan langsung membicarakan soal radio yang sedang diperbaiki, dimana Sriharto langsung dapat menanggapinya sehubungan telah diberi "Bon" pengambilan radio. Di dalam rumah ternyata ada adegan tukar-menukar pakaian. Pakaian Sudarmo dipakai oleh Aidit. Begitu Aidit keluar langsung memberi kode kepada Sriharto dengan cara mengangguk. Pergantian pakaian tersebut merupakan suatu upaya untuk mengelabui, bahwa orang yang datang dan pergi dari rumah tersebut adalah orang yang sama, dengan skuter melalui route jalan besar Sambeng-Gondang-Manahan dan terakhir di Kerten rumah Sriharto, mereka sampai dengan selamat.

Kembali kepada rencana yang sudah dibuat, setelah Aidit meninggalkan kampung Sambeng pada tanggal 15 Nopember 1965 di kampung itu dilakukan operasi umum oleh Brigif 4 di bawah pimpinan Kapten Hardijo dengan dalih untuk mencari senjata. Padahal tujuan pokoknya adalah untuk mengetahui situasi di dalam rumah Hardjomartono, sambil membuat sket di mana Aidit bersembunyi, karena di dapat informasi Aidit akan dibawa kembali ke tempat semula. Kapten Hardijo telah ditunjuk untuk memimpin operasi penangkapan.

Pada tanggal 16 Nopember 1965 esok paginya, kira kira jam 09.00, Hardjomartono datang ke rumah Sriharto di Kerten dengan becak. Ia melaporkan kepada Aidit tentang adanya aksi penggerebegan pada malam harinya di Sambeng. Ternyata kejadian tersebut tidak dicurigai oleh pihak Aidit. Pada tanggal 17 Nopember 1965 Hardjomartono datang kembali ke rumah Sriharto dengan mengantar seorang kurir dari Jakarta, yang mengaku anggota Cakrabirawa yang melaporkan hasil-hasil pertemuan di Jakarta kepada D.N. Aidit. Orang tersebut selain melaporkan situasi juga menyerahkan revolver Colt 38 kepada

Aidit. Selanjutnya revolver tersebut diserahkan kepada Sriharto dengan ucapan "Pakailah perlengkapan ini baik-baik selama Bung mengawal saya!".

Sesuai dengan tugas yang diemban oleh Sriharto untuk menangkap Aidit, maka semua pembicaraan dan kejadian diingat secara baik untuk disusun sebagai laporan. Semua laporan disampaikan kepada Kolonel Yasir Hadibroto. Selama Aidit di rumah Sriharto anggota Intel Brigif 4 yang dipimpin oleh Letda Ning Prajitno secara ketat mengawasi lokasi itu yang bertujuan :

a) Untuk mengetahui hal hal yang tidak diketahui oleh Sriharto yang berada di dalam rumah.
b) Kemungkinan terjadinya perubahan situasi secara mendadak.

Pada tanggal 20 Nopember 1965 setelah lima hari lima malam Ketua CC PKI D.N. Aidit berada di rumah Sriharto, pihak kita telah beberapa kali dihubungi oleh pihak- pihak tertentu. Selanjutnya Sriharto menyusun lagi rencana yang sudah disepakati, bahwa di daerah Kerten di mana lokasi tempat Aidit tinggal akan diadakan penggeledahan. Sriharto memberikan saran supaya Aidit pindah dan kembali ke tempat semula di Sambeng. Alasannya adalah dari pada mencari lokasi baru yang belum tentu aman. Apalagi tempat tersebut telah digeledah oleh pihak pemerintah, sehingga tidak akan ada dua kali diperiksa. Saran Sriharto diterima oleh Aidit. Pemindahaan dilaksanakan tanggal 20 Nopember 1965 pukul 14.30

Sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 20 Nopember 1965 kira-kira pukul 13.00, Sudarmo berangkat terlebih dahulu dengan becak dari rumah Sriharto dengan menggunakan pakaian Aidit (celana wool dan kemeja tetoron abu-abu tua) menuju kampung Sambeng dengan tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kemungkinan aman atau tidaknya kampung tersebut. Setelah dinyatakan aman tepat pukul 14.30 berangkatlah Sriharto dengan sekuter membonceng Aidit yang mengenakan pakaian

drill milik Sudarmo, berkaca mata hitam dan berpeci menuju rumah Hardjomartono alias Kasim di kampung Sambeng. Untuk penyamaran terhadap orang-orang di sekitar rumah itu, pada saat Sriharto pulang kembali, Sudarmo yang ganti dibonceng dengan pakaian sendiri yaitu drill warna khaki, berkaca mata hitam dan berpeci.

Setelah memindahkan Aidit, Sudarmo minta diantar ke rumah Mayor Kaderi (Dan Yon K) di Jalan Slamet Riyadi untuk bersembunyi. Setelah itu Sriharto menjemput Siswadi untuk disembunyikan di rumah Mayor Kaderi.

3) Penentuan waktu dan hari penangkapan Aidit

Setelah melalui tahapan-tahapan pendahuluan sampai dengan pemindahaan kembali D.N. Aidit ke persembunyian semula, tibalah saatnya untuk melakukan penangkapan terhadap D.N. Aidit sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Tanggal 23 Nopember 1965 hari Senin pukul 03.00 adalah merupakan hari H dan jam D-nya. Komandan operasi penangkapan adalah Kapten Hardijo dari Brigif 4.

Pelaksanaan operasi dimajukan satu hari menjadi hari Minggu pukul 20.00. Dalam penggerebegan di rumah Hardjomartono alias Kasim, ternyata Aidit tidak ditemukan sekalipun seluruh rumah diobrak-abrik. Akan tetapi bagi Letda Ning Prajitno beserta beberapa anggotanya yakin bahwa D.N. Aidit belum meninggalkan tempat tersebut, karena mereka secara terus-menerus mengawasi tempat Aidit berada.

Sehubungan dengan tidak tepatnya rencana semula, maka langkah yang lain secara mendadak dilakukan, yaitu menangkap Sudarmo dan Siswadi yang berada di rumah Mayor Kaderi, untuk mengorek keterangan lebih jauh tentang D.N. Aidit. Sriharto yang berperan sebagai kawan mereka diborgol seolah-olah tertangkap. Ia dibawa ke rumah Mayor Kaderi untuk menangkap Siswadi dan Sudarmo. Namun usaha penangkapan terhadap kedua orang itu tidak berhasil, yang tertangkap hanya Sudarmo,

sedangkan Siswadi lolos. Sriharto memberitahukan kepada tim ketika tiba di Lojigandrung, bahwa di kamar Sudarmo ada koper yang berisi uang penuh dengan lembaran ribuan serta dokumen-dokumen penting milik Aidit. Oleh karena itu pasukan kembali lagi kesana ternyata unag dan dokumen sudah tidak ada lagi. Dalam penggeledahan Siswadi dapat ditemukan sedang bersembunyi di kolong tempat tidur yang ditutupi sprei. Keduanya lalu diinterogasi untuk mengetahui di mana Aidit disembunyikan.

Setelah kegagalan operasi pertama, maka pasukan yang dipimpin Kapten Hardijo ditarik ke posnya kembali. Namun regu pengintai yang dipimpin oleh Letda Ning Prajitno masih berada di sekitar itu. Oleh karena selama pengepungan tidak ada orang yang lolos dari pengamatannya, maka Letda Ning Prajitno masuk ke rumah Hardjomartono alias Kasim sekitar pukul 02.00 untuk memaksa Hardjomartono agar menunjukkan dimana sebetulnya Aidit bersembunyi. Setelah dipaksa dengan kekerasan ia menunjukkan tempat persembunyian Aidit yaitu di sebuah senthong yang di tutupi lemari. Ketika lemari di geser oleh Letda Ning Prajitno beserta Sertu Idit Sukardi, terlihatlah Aidit di belakangnya. Selanjutnya Aidit di tangkap dan diikat tangannya untuk dibawa ke Markas Brigif 4 di Lojigandrung.

Dengan tertangkapnya Ketua CC PKI D.N. Aidit, maka berakhir pula rencana PKI untuk menjadikan Solo sebagai basis perjuangan merebut kekuasaan. Perjalanan panjang dan sulit untuk menangkap Aidit tersebut karena pada saat itu sulit membedakan kawan dan lawan. Kegagalan penangkapan yang pertama adalah adanya unsur-unsur komunis di pihak kita.

b. Operasi Penangkapan Mantan Brigjen Supardjo

Operasi Kalong adalah sebutan suatu operasi untuk menangkap dan mengejar para tokoh G30S/PKI yang masih bebas setelah kudeta tanggal 1 Oktober 1965. Operasi Kalong dilancarkan sejak tanggal 15 Agustus 1966. Dalam pelaksanaan operasi ini semua unsur

Intel ABRI bekerjasama. Sesuai dengan namanya "Kalong", maka operasinya lebih banyak dilakukan pada malam hari.

Mantan Brigjen Supardjo yang menjabat wakil ketua Dewan Revolusi pada kudeta yang gagal itu, sejak tanggal 1 Oktober 1965 menghilang dan menjadi buronan ABRI. Ia terpaksa harus menghindar dari sergapan ABRI dan rakyat. Untuk beberapa lamanya Supardjo dapat lolos dari sergapan ABRI karena perlindungan dari oknum-oknum yang mendukung G30S/PKI.

Pada tanggal 2 Oktober 1965, Supardjo keluar dari wilayah basis PKI di Pondok Gede menuju ke daerah Senen. Ia tinggal sehari di sebuah gang sebelah Gedung Sandiwara Miss Cicih. Karena ada penangkapan terhadap orang-orang PKI di daerah ini, ia pindah ke Kramat Sentiong. Selanjutnya Supardjo dibawa oleh Udi seorang kurir ke rumah Marto Suwandhi seorang anggota PKI di Jalan Gunung Sahari. Di tempat ini ia tinggal selama satu bulan dan mulai banyak berhubungan dengan orang- orang PKI lainnya. Untuk keamanan selanjutnya Supardjo dibawa oleh orang yang bernama Saleh ke Cilincing dan tinggal di rumah Slamet Bernard seorang anggota PKI. Selanjutnya pindah ke rumah Sunardi, masih di daerah Cilincing.

Daerah Cilincing rupanya aman dan Supardjo tinggal disana sampai empat bulan lamanya. Ia berpindah-pindah rumah dari rumah Slamet Bernard, rumah Mayor Laut Suwardhi dan ke rumah Kapten Laut Ir. Nandang Safei untuk menghindari penggerebegan yang tiba-tiba diadakan oleh ABRI maupun rakyat. Atas usaha Sunardi, ia memperoleh kartu penduduk Kelurahan Semper atas nama Syarief.

Operasi "Kalong" yang terus mengejar para tokoh PKI, membuahkan hasil dengan banyaknya teman-teman Supardjo tertangkap. Dari hasil pemeriksaan dan informasi yang di dapat, banyak tempat persembunyian dan pos perlindungan orang-orang PKI yang digerebeg oleh Kalong. Akibatnya ruang gerak Supardjo semakin sempit. Oleh karena daerah Cilincing sudah dianggap berbahaya, maka Supardjo berusaha menyingkir dari daerah itu tanggal 2 Januari 1967, ia datang ke sekitar Halim untuk mencari tempat persembunyiannya yang baru. Ia menyamar sebagai pedagang

radio dengan nama Ibrahim. Lain halnya dengan rekan Supardjo, Amir Anwar Sanusi bekas Wakil Sekjen Front Nasional, yang terkenal dengan ucapan-ucapannya menjelang kudeta G30S/PKI bahwa "Ibu Pertiwi sedang dalam keadaan hamil tua", ia menyamar sebagai tukang buah yang berpenampilan kumal. Anwar Sanusi pun sedang dalam kejaran operasi Kalong. Ia mengganti namanya dengan Udin alias M. Amin yang dilengkapi pula dengan kartu penduduk. Keduanya sama-sama sedang berusaha untuk bersembunyi di daerah Halim.

Dalam perjalanan dari Cilincing ke sekitar Halim, Supardjo dijemput oleh Syawaludin (anggota PKI) di Kramatjati. Kemudian Syawaludin mengantarkan Supardjo ke rumah Kopral Udara Sutarjo di Kompleks Dwikora, Halim. Tenyata kedatangan Supardjo tercium oleh intel-intel Kalong yang dikerahkan mencarinya. Sebagai unsur pelaksana operasi "Kalong" Komandan Kodim 0501 Letkol Sudjiman, mengadakan koordinasi dengan Pangkowilu V dan Komandan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Kepada Kapten Inf. Suroso diperintahkan memimpin tim "Kalong" dengan tujuh orang anggotanya sekaligus mengadakan koordinasi dengan Komandan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Kolonel Rusman. Dari hasil koordinasi dengan Pangkowilu V Komodor Udara Saleh Basarah menugaskan empat orang intelnya dipimpin oleh Letnan Udara I Moch. Tohir dan delapan orang Polisi Angkatan Udara (Pol-AU) dipimpin oleh Kapten Udara Wihardono dan Letnan Udara I Basuki,[1] untuk diperbantukan dalam pelaksanaan operasi. Keikutsertaan unsur AURI sangat penting mengingat daerah yang akan dimasuki adalah Pangkalan Udara Halim.

Untuk menyesuaikan keadaan, anggota Angkatan Darat yang tergabung dalam tim operasi "Kalong" mengenakan seragam Angkatan Udara. Maksudnya agar penghuni rumah di Kompleks Halim tidak curiga terhadap orang luar yang datang memasuki Halim. Demikian juga kendaraan yang digunakan adalah Jeep Nissan milik AURI.

1. Pancawarsa Hari Perhgatan Kesaktian Pancasila, Dep. Hankam (Dokumen)

Tepat pada pulul 03.00 tanggal 12 Januari 1967 subuh, di suatu tempat di dekat Kompleks Halim, Kapten Inf. Suroso memberikan komando agar semua anggota menaiki dua buah Jeep Nissan AURI yang sudah dipersiapkan. Tetapi di tengah perjalanan salah satu kendaraan itu mogok. Berkat jasa seorang anggota AURI yang ikut dalam Tim, berhasil dicari kendaraan lain sebagai pengganti Jeep yang mogok itu. Akhirnya perjalanan dapat dilanjutkan.

Mendekati arah sasaran, mereka di perintahkan turun dan menyusun formasi. Menurut perkiraan Supardjo tidak akan menyerah begitu saja karena ia mempunyai sepucuk senjata jenis AK. Ada dua rumah yang menjadi sasaran yang diperkirakan tempat persembunyian Supardjo. Sasaran pertama yakni rumah Kopral Yatimin. Ketika diadakan penggerebegan dan penggeledahan rumah itu kosong. Kapten Suroso yakin kemungkinan besar Supardjo ada di rumah yang kedua yakni rumah Kopral Udara Sutarjo. Tepat pukul 05.00 rumah kedua digerebeg. Kapten Suroso, Peltu Rosyadi, Lettu Udara Basuki dan Lettu Udara Moch. Tohir memasuki rumah Kopral Udara Sutarjo. Ketika ditanya, Kopral Sutarjo mengatakan tidak kenal dengan Brigjen. Supardjo.

Kemudian Kapten Suroso memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa rumah tersebut. Di dalam rumah didapati tulisan-tulisan, guntingan pengumuman serta koran-koran yang di tempelkan didinding tembok kamar, bunyinya antara lain "Eks Brigjen Supardjo segera tangkap hidup atau mati". Selain itu di salah satu sudut kamar yang lain tergantung sebuah kemeja berwarna putih. Dari dalam saku kemeja tersebut didapati sebuah kartu penduduk atas nama M. Syarief. Tidak jauh dari kamar didapati sepucuk senjata AK. Kemudian kartu penduduk diambil dan senjata AK diamankan.

Ketika melihat kartu penduduk itu, Kapten Suroso yang lebih dulu mengenali Supardjo, semakin yakin bahwa buronannya masih ada di sekitar tempat itu. Dengan keyakinannya Kapten Suroso memerintahkan semua anggotanya meningkatkan kewaspadaan baik yang di luar maupun di dalam rumah, karena pihak lawan jelas masih mempunyai jenis senjata AK yang biasa digunakan oleh PKI.

Penjagaan disusun secara berlapis walaupun saat itu Tim "Kalong" hanya berkekuatan 20 orang dan bersenjata pistol.

Berkat pengalaman Tim "Kalong" yang umumnya bergerak di malam hari dengan orang-orang yang terlatih, pemeriksaan di atas para-para rumah tidak dilewatkan, karena pemeriksaan di dalam rumah Supardjo tidak ditemukan, maka Kapten Suroso memerintahkan Sersan Sukirman naik ke atas para-para. Apalagi di dinding kamar mandi terlihat jejak telapak kaki yang masih basah.[2]

Sersan Sukirman melaporkan tidak melihat apa-apa diatas karena cuaca di dalam para-para sangat gelap sekali. Ia diperintahkan turun. Selanjutnya Kapten Suroso memerintahkan Peltu Rosadi agar naik memeriksanya sekali lagi. Dalam keadaan remang-remang Peltu Rosadi melihat ada benda putih di sudut para-para , sedangkan Kapten Suroso dari bawah mendengar bunyi yang mencurigakan diatasnya. Peltu Rosadi kemudian berteriak, "Kalau manusia menyerah, kalau bukan saya tembak!". Akhirnya benda putih itu yang tidak lain adalah Supardjo berkata "Ya saya menyerah!". Peltu Rosadi selanjutnya memerintahkan ia turun. Supardjo yang hanya memakai baju kaos putih tanpa leher dan celana pendek putih tiba di bawah dan berkata, "Yah, sampai disini perjuangan saya".

Setelah yakin yang ditangkap Supardjo, Kapten Suroso menanyakan dimana dokumen disembunyikan. Supardjo menjawab "ada di dalam para-para". Kapten Suroso memerintahkan kembali anak buahnya untuk mengambil dokumen di dalam para-para. Ternyata ketika Supardjo bersembunyi di dalam para-para tidak membawa senjata, ia membawa radio transistor kecil. Para-para itu selain dipakai tempat persembunyian rahasia, juga berfungsi untuk menyimpan buku dan dokumen-dokumen penting.

Kemudiam Supardjo dipersilahkan memakai pakaian. Dengan memakai kemeja warna putih, celana wool dan sandal warna coklat,

2. M. Nurdin As, *Supardjo direnggut Kalong*, PT. Varia, Jakarta, 1967, hal.44

ia mengucapkan Selamat Hari Lebaran kepada Kapten Suroso dan mengatakan bangga terhadap intel ABRI yang menangkapnya.

Penangkapan Supardjo oleh Tim "Kalong" berlangsung setengah jam dari pukul 05.00 sampai pukul 05.30 pagi. Kemudian Supardjo dibawa ke Kodim 0501 dengan dikawal oleh Kapten Suroso bersama empat anggota AURI. Sedangkan Lettu Udara Moch. Tohir memimpin anggota lainnya menuju jalan Mustang Halim dengan kendaraan yang satunya untuk menangkap Anwar Sanusi yang bersembunyi di tempat itu.

c. Operasi penangkapan Amir Anwar Sanusi

Amir Anwar Sanusi adalah tokoh PKI yang merupakan buruan penting dari operasi "Kalong". Anwar Sanusi mempunyai nama samaran alias M. Amin telah melakukan kegiatan politiknya, dan menyamar sebagai pedagang buah-buahan. Selama berbulan-bulan ia bisa bebas bergerak tanpa diketahui. Setiap hari ia berjalan kaki tanpa sepatu dan hanya berkain sarung serta berpakaian kumal sambil memikul buah-buahan. Tetapi ketajaman intel ABRI akhirnya membongkar rahasia dirinya. Ia bersembunyi di Kompleks Halim. Operasi penangkapan dipimpin oleh Lettu Udara Moch. Tohir yang langsung berangkat ke sasaran setelah menangkap Supardjo.

Tempat tertangkapnya Supardjo dengan jalan Mustang hanya berjarak ± 2 km. Dengan berkendaraan Jeep anggota Tim menuju ke sasaran. Kurang dari 100 meter dari sasaran, terlihat sebuah mobil keluar dari jalan Mustang dan langsung dikejar, ternyata di dalamnya tidak ada Anwar Sanusi, tetapi Letnan Muda Udara Hasan Sagala beserta keluarganya yang hendak pergi sembahyang Idul Fitri, Jeep kembali ke tujuan. Sampai di rumah Letnan Muda Udara Sukarjo, terlihat seorang laki-laki keluar menuju kebun singkong. Lettu Moch. Tohir memerintahkan anak buahnya mengepungnya. Ketika dipanggil, laki-laki itu lari kembali masuk ke dalam rumah. Segera Lettu Udara Moch. Tohir dan Peltu Rosadi dari Kodim 0501 langsung menangkap orang tersebut.

Sewaktu ditanya siapa namanya, dijawab "M. Amin, pekerjaan tukang buah", dari jawaban itu makin jelaslah bagi para petugas bahwa orang yang mengaku bernama Amin itu, tidak lain Anwar Sanusi yang sudah lama dicari-cari. M. Amin alias Udin si tukang buah itu segera dibawa ke Kodim 0501 di Jalan Budi Kemuliaan. Sekali pun ia tetap mengaku nama Amin alias Udin, Tim Kalong tidak bisa dibodohi. Untuk meyakinkan Supardjo dan M. Amin dikonfrontirkan di dalam suatu ruangan, tidak salah lagi bahwa M. Amin alias Udin adalah Anwar Sanusi.

Berbeda dengan penampilan Supardjo, penyamaran Anwar Sanusi sebagai M. Amin alias Udin yang pekerjaannya "tukang buah" sempurna sekali. Tubuhnya kurus, matanya seperti orang yang kurang tidur dan pakaiannya kumal. Dengan kemeja kuning, kain sarung warna coklat, tanpa alas kaki, rokoknya daun jagung, pandangannya seperti orang bodoh dan duduk di kursi panjang seperti orang sakit. Tidak mengesankan bahwa ia seorang tokoh penting PKI. Walaupun dengan cara itu, para petugas tidak bisa dikelabui, sehingga berakhirlah riwayat petualangan Anwar Sanusi. Ia ditangkap setengah jam setelah Supardjo ditangkap yakni pukul 06.00 pagi tanggal 12 Januari 1967, tepat pada hari Idul Fitri. Oknum-oknum AURI yang menyembunyikan Supardjo dan Anwar Sanusi yaitu Kopral Udara Sutarjo dan Letnan Muda Udara Sukarjo ditangkap dan ditahan oleh Polisi AURI.

d. Operasi Penangkapan Mbah Suro

Desa Nginggil terletak di tepi Bengawan Solo antara Ngawi dan Cepu perbatasan Kabupaten Blora dan Ngawi merupakan desa yang terisolasi. Di desa inilah Mbah Suro membuka praktek "pedukunan" yang dijadikan "sarang" bagi orang-orang pelarian PKI. Mbah Suro adalah bekas Kepala Desa dengan nama Mulyono. Karena propaganda orang-orang PKI, ia diangkat sebagai seorang tokoh sakti yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Propaganda disebarkan dari mulut ke mulut bahwa Mbah Suro adalah orang yang sakti. Desa Nginggil diubah menjadi tempat pertapaannya.

Demikian hebatnya propaganda itu, pelbagai kalangan masyarakat datang ke desa Nginggil untuk berobat atau untuk keperluan lain.

Oleh PKI untuk Mbah Suro diciptakan "murid-murid" atau propagandis yang menyebarluaskan berita bahwa ia merupakan dukun yang terkenal. Setelah gagalnya G30S/PKI, ajaran klenik Mbah Suro ini dijadikan alat untuk menghimpun kekuatan dan dana. Perkembangan selanjutnya "pertapaan" Mbah Suro dijadikan tempat penampungan pelarian orang-orang PKI. Berkat usaha propagandis itu, Mbah Suro bukan saja dianggap sebagai dukun yang sakti, tetapi sudah merupakan setengah dewa dan setengah raja. Kondisi yang diciptakan PKI seperti itu membuat tidak sembarang orang dengan mudah dapat menemui Mbah Suro. Bila orang ingin bertemu harus melalui perantara atau cantrik. Selain itu pada upacara resmi Mbah Suro di persilahkan berpidato dan memberikan wejangan yang pokok-pokoknya sudah ditetapkan oleh PKI. Isi dari wejangan-wejangan tersebut ternyata menghasut dan membakar massa untuk berontak. Di antaranya disebutkan yang menjadi musuh-musuh PKI adalah ABRI, KAPPI, KAMI, NU dan golongan agama.

Untuk menghadapi musuh-musuh itu, PKI melalui tangan Mbah Suro membentuk Pasukan yang di beri nama "Banteng Ulung" (laki-laki) dan "Banteng Sarinah" (wanita). Mereka bersenjatakan senjata api dan golok yang sudah dijampi oleh Mbah Suro. Tidak ketinggalan pula ilmu kekebalan diberikan kepada anggota-anggota pasukannya itu. Oleh karena itu "pertapaan" Mbah Suro menjadi basis kekuatan PKI yang berbahaya.

Panglima Kodam VII/Diponegoro (sekarang Kodam IV), Mayor Jenderal Widodo segera memerintahkan "Penutupan" pertapaan Nginggil. Perintah itu dilaksanakan oleh Kodim 0721 selaku Pembantu Pelaksana Perang Kabupaten Blora. Perintah dari Kodim 0721 itu tidak dihiraukan oleh Mbah Suro beserta pengikut atau cantrik-cantriknya. Langkah selanjutnya Kodim Blora mengutus Sersan Salim untuk menemui Mbah Suro. Utusan ini malah dianiaya hingga luka-luka. Kemudian Kodim mengirim dua anggota yaitu

Pelda Tego dan Sersan Prapto yang telah kenal Mbah Suro, tetapi mereka pun kembali lagi dengan nihil. Begitu juga dengan utusan selanjutnya yaitu dengan mengirim Ajun Inspektur Polisi I (Peltu) Dharsono, Brigadir (Sersan Polisi) Widodo dan Brigadir (Sersan Polisi) Satam.

Pemerintah masih tetap bersabar walaupun beberapa utusan tidak ditanggapi. Selanjutnya Mbah Suro dikirimi surat agar dia mau insaf dan diajak untuk menyelesaikan persoalan pertapaan dengan baik serta penyelesaian pembunuhan- pembunuhan yang dilakukan oleh cantrik-cantrik Mbah Suro, serta penghentian propaganda partai terlarang PKI.

Himbauan ini pun tidak ditanggapi. Bagi pemerintah tidak ada jalan lain selain harus bertindak represif. Pada tanggal 5 Maret 1967, Pangdam VII/Diponegoro mengeluarkan Surat Perintah untuk menangkap Mbah Suro beserta pengikut- pengikutnya di "Padepokan Nginggil". Batalyon 410, sebagian Batalyon 408 dan Batalyon 409 serta Kompi RPKAD yang di BP-kan Kodam diperintahkan untuk melakukan operasi penangkapan. Komandan pasukan dalam operasi ini ialah Mayor Sumardi. Tugas pasukan ditetapkan sebagai berikut :

1) Yon 408 , 409 dan 410 mengadakan penutupan di seberang Bengawan Solo, sebelah utara dan selatan desa Nginggil dengan tujuan menghambat jalan pemunduran musuh.
2) Kompi RPKAD dipimpin Letnan Satu Feisal Tanjung ditugaskan menyusup ke desa Nginggil dengan tujuan agar musuh mau menyerah dan penyelesaian secara damai.

Dalam perintah operasi ini diberi catatan agar sejauh mungkin dihindari pertempuran . Tetapi karena pengikut Mbah Suro pasukan "Banteng Ulung" dan "Banteng Sarinah" begitu percaya bahwa mereka kuat dan kebal terhadap peluru, maka mereka menyerang pasukan RPKAD dengan senjata. Dengan terpaksa RPKAD membalas serangan mereka, sehingga terjadi kontak senjata ± 1/2 jam. Pasukan Banteng Ulung dan Banteng Sarinah tidak berdaya dan menyerah.

Semula Mbah Suro tidak mau menyerah karena merasa dirinya sakti dan kebal. Tetapi setelah melihat cantrik-cantriknya banyak yang mati, ia keluar dari persembunyiannya dan menyerah. Dengan menyerahnya Mbah Suro, berakhirlah kampanye dan konsolidasi PKI di desa Nginggil melalui praktek pedukunannya yang meracuni masyrakat.

e. Operasi Penangkapan Nyono

Dari pembersihan-pembersihan yang dilakukan dalam Garnizun Jakarta Raya, berhasil ditangkap orang-orang PKI dan Pemuda Rakyat yang bergabung dengan G30S/PKI di Lubang Buaya. Tertangkap pula di antaranya tokoh penting komunis yaitu Nyono bersama teman-temannya yaitu Sanjoyo, Sucahyo dan Sugi Wiratmo. Nyono ditangkap pada tanggal 3 Oktober 1965 oleh operasi ABRI di Jakarta. Pada waktu ditangkap, Nyono mengaku bernama Sugiyono. Ada kisah unik saat terungkapnya Nyono sebagai tokoh PKI yang mengaku bernama Sugiyono itu.

Sugiyono ditangkap sebagai anggota PKI biasa yang tidak dikualifikasikan berat. Ketika petugas tahanan hendak memasukkan Sugiyono ke dalam kualifikasi kelas ringan yang segera akan dibebaskan, ia diminta menandatangani suatu daftar. Orang yang mengaku bernama Sugiyono itu telah menandatangani dan menuliskan namanya dengan jelas pada daftar tersebut dengan nama Nyono.[3]

Para petugas tahanan yang tidak mengenal wajah Nyono, pada saat itu juga memeriksa kembali orang yang bernama Sugiyono. Karena diyakini dialah tokoh PKI yang bernama Nyono itu, maka terbongkarlah kedok Nyono. Saat itu juga ia dimasukkan sebagai tahanan berkualifikasi berat.

---

3. *Berita Yudha*, Rabu, 1 Desember 1965

f. Operasi Penangkapan Mantan Kolonel Inf. A. Latief

Operasi pembersihan terhadap G30S/PKI beserta tokoh-tokohnya dilakukan ke segenap pelosok wilayah Kodam V/Jaya (sekarang Kodam Jaya). Operasi dilakukan bekerjasama dengan Angkatan lain serta organisasi massa.

Setelah gerakan mereka dinyatakan gagal, mantan Kolonel Inf. A. Latief bersama mantan Letkol Untung dan Kapten Inf. Suradi melarikan diri kearah selatan sampai di daerah Cipayung, Pasar Rebo, Jakarta. Setelah menanam senjata-senjatanya, pada tanggal 4 Oktober 1965 mereka pindah ke desa Kebon Nanas, Bogor. Tanggal 5 Oktober 1965, A. Latief kembali ke Jakarta untuk mencari hubungan dengan Presiden Sukarno melalui Supardjo.

Karena usahanya tidak berhasil, pada tanggal 9 Oktober 1965, ia menginap di rumah iparnya di Bendungan Hilir Pejompongan, Jakarta. Ia sempat mengirim surat kepada Mayjen Pranoto Reksosamudro untuk meminta perlindungan dan bila dianggap perlu agar dapat dikirim ke luar negeri. Kedatangan mantan Kolonel A. Latief di tempat itu rupanya telah tercium oleh operasi ABRI yang mengejarnya. Pada tanggal 9 Oktober 1965, satu Peleton dari Yon 328 bergerak ke Bendungan Hilir untuk menangkap A. Latief. Pukul 18.00 Latief dapat ditangkap, karena ia melakukan perlawanan, ia terpaksa ditembak dan mengenai lututnya sebelah kiri, kemudian ia dirawat di RSPAD sebelum diperiksa lebih lanjut.[4]

g. Operasi Penangkapan Mantan Letnan Kolonel Untung

Diantara para tokoh PKI yang menyelamatkan diri dari kejaran operasi ABRI ialah Komandan Dewan Revolusi Letkol Untung. Dari Kebon Nanas Bogor, ia kembali ke Jakarta tanggal 10 Oktober 1965. Ia pergi ke rumah Syam untuk membicarakan rencana selanjutnya.

---

4. *Berita Yudha*, 14 Oktober 1965

Selama di Jakarta, Untung berpindah-pindah tempat yaitu di Polonia Jatinegara, Utan Kayu, dan Pejompongan. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 1965, ia lari ke Jawa Tengah. Tetapi ketika menumpang bus "Mujur" menuju Semarang, di sekitar Brebes ia kaget karena melihat tentara yang duduk disamping sopir. Selanjutnya ia melompat keluar dari bus karena dirinya merasa diawasi. Dua orang anggota Hansip yang melihat ada orang meloncat dari bus tersebut, meneriaki maling. Untung lari ke sawah dan dikejar oleh Hansip beserta rakyat, akhirnya ia tertangkap dan dibawa ke kantor Polisi setempat. Kepada Polisi ia mengakui terus terang sebagai Letkol Untung, Pengawal Presiden; ia minta supaya jangan diserahkan kepada rakyat.

Kemudian ia dibawa ke Cirebon. Selanjutnya dengan menggunakan panser dan pengawalan kuat, ia dibawa ke Bandung kemudian ke Jakarta untuk diserahkan kepada Panglima Kostrad. Berakhirlah pelarian Letnan Kolonel Untung di daerah Tegal pada tanggal 11 Oktober 1965.[5]

2. Operasi Terhadap Sisa-sisa PKI di Kalimantan Barat

Setelah gagalnya pemberontakan G30S/PKI yang bertujuan untuk menggulingkan Pemerintah RI yang sah, maka sebagai konsekuensinya PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan dibubarkan. Upaya pemerintah selanjutnya adalah mengadakan penumpasan di seluruh pelosok tanah air. Khususnya di daerah Kodam XII/Tanjungpura, Kalimantan Barat, telah dilaksanakan operasi penumpasan melalui Operasi Tertib I, Operasi Tertib II, Operasi Sapu Bersih I, Operasi Bersih II dan Operasi Bersih III. Operasi penumpasan yang dilaksanakan secara gabungan tersebut belum sepenuhnya tuntas. Hal ini terbukti karena belum semua tokoh PKI di wilayah Kalimantan Barat dapat ditangkap. Sekali pun operasi ini telah dilaksanakan sejak tahun 1966 sampai tahun 1973, namun salah seorang tokoh utama PKI di Kalimantan Barat

5. *Berita Yudha*, 13 Oktober 1965.

bernama S.A. Sofyan alias Tai Kao, ketua CDB Kalimantan Barat ternyata masih belum berhasil tertangkap.

Ketika mulai diadakan operasi penumpasan terhadap PKI oleh Operasi Gabungan ABRI, S.A. Sofyan bersama Wong Hon salah seorang anggota Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS) berhasil melarikan diri dan kemudian membentuk pasukan yang diberi nama "Pasukan Bara". Pasukan ini berlokasi di Bukit Bara, bagian timur Kabupaten Sambas yang beranggotakan 90 orang PKI dan 60 orang dari PGRS di bawah pimpinan S.A. Sofyan.

Pada tanggal 17 Juni, S.A. Sofyan dengan pasukan Bara yang dibantu oleh Wong Hon, The Wa Sa mengadakan penyerangan terhadap Pangkalan Udara Singkawang, milik AURI di Sanggau Ledo. Penyerangan yang dilaksanakan secara mendadak itu berhasil merampas senjata api sejumlah sekitar 150 pucuk, terdiri atas berbagai jenis/merek antara lain Getmi, LE, serta sejumlah amunisi dan membunuh empat orang anggota AURI yang sedang jaga. Peristiwa ini merupakan pukulan berat bagi Kodam XII/Tanjungpura, khususnya AURI. Kejadian ini sangat disesalkan, karena dengan hilangnya ratusan senjata tersebut akan membuat PKI semakin bertambah kuat persenjataannya.

Peristiwa tersebut memberikan gambaran bahwa hasil pelaksanakan Operasi Gabungan ABRI saat itu yang diprakarsai oleh Kodam XII/Tanjungpura belum memenuhi target sesuai yang diharapkan. Kekurang berhasilan tersebut merupakan cambuk untuk mengadakan koreksi penyempurnaan ke depan pada pelaksanaan operasi berikutnya.

Sejak itu situasi mulai berubah, setelah secara nasional dirasakan adanya ancaman bahaya yang akan timbul dari gerombolan sisa-sisa PKI, dan perhatian serius semakin tertuju kepada masalah tersebut, terutama setelah tanggal 26 hingga 28 Juli 1967 Presiden Soeharto sendiri memimpin rapat Penguasa Daerah/Pangdam se-Indonesia di Istana Negara yang dihadiri pula oleh Pangdam XII/Tanjungpura Brigjen TNI Ryacudu. Dalam laporannya Pangdam XII/Tanjungpura mengatakan bahwa setelah Peristiwa Sanggau

Ledo, maka keadaan berubah, secara strategis maupun taktis kita dalam keadaan defensif.

Laporan Pangdam XII/Tanjungpura tersebut, ditanggapi secara serius dari Pemerintah Pusat. Secara berangsur-angsur pelaksanaan operasi militer diperkuat dan jumlah personelnya mencapai 4.000 orang. Pasukan tersebut didatangkan dari Pusat antara lain adalah sebagai berikut :

a. 1 Ki Passuad/RPKAD, tiba di Pontianak tanggal 22 Juli 1967.
b. 1 Ki Kopasgat/AURI, tiba di Pontianak tanggal 11 Agustus 1967.
c. Group De Piad, tiba di Pontianak tanggal 26 Agustus 1967.
d. 1 Yon Para R.600, tiba di Pontianak tanggal 11 September 1967.
e. 1 Ki Zipur 6, tiba di Pontianak tanggal 11 September 1967.
f. 1 Ki Yon Para R.328/Siliwangi, tiba di Pontianak tanggal 28 Nopember 1967.
g. 1 Ki Yon Para R.100/Koanda Sumatera, tiba di Pontianak tanggal 22 Oktober 1967.
h. 1 Ki KKO-AL, tiba di Pontianak tanggal 14 Nopember 1967.
i. 1 Ki Keslap

Operasi Gabungan ABRI yang dilancarkan pada bulan September 1967, berhasil menyita dokumen-dokumen milik PKI yang bertuliskan huruf Cina yang berisi propaganda ajaran Mao Ze Dong serta dokumen- dokumen lainnya yang berisi rencana pemberontakan di daerah Hulu Kapuas.[6]

Pembagian tugas dalam Operasi Gabungan tersebut, khusus KKO-AL titik berat tugasnya pada usaha pencegahan infiltrasi dari luar, terutama mencegah masuknya pengiriman perbekalan dan senjata. Sedangkan Satuan Tempur Kopasgat yang merupakan pasukan cadangan ditempatkan di daerah isolasi antara Bess dan Bima, sekaligus memperkuat pertahanan Pangkalan Udara Singkawang II dan Pangkalan Udara Pontianak. Khusus untuk

6. Drs. Saleh As'ad Djamhari, *Ichtisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945-sekarang)*, Dep. Hankam, Pusjarah ABRI, 1971, hal.150

keperluan dropping pasukan, dukungan logistik, pengintaian udara, dan keperluan lainnya yang memerlukan gerakan cepat, pihak AURI telah memberikan bantuannya yang terdiri 1 Skwadron Helli, 4 Mi-6, pesawat Gelatik dan beberapa buah pesawat Dakota. Di samping itu bantuan untuk pelaksanaan operasi tersebut juga datang dari Polri dengan mengirim YON 837 Brimob AKRI dari Komdak XI/Kalimantan Barat, dan Angkatan Laut melalui Ko Sub Massional 604 dengan unsur-unsur tempur laut dan daratnya.

Sekalipun operasi dilaksanakan secara terus-menerus, namun orang yang selama ini dicari-cari masih belum juga tertangkap. Sejak peristiwa Sanggau Ledo, S.A. Sofyan bersama Tan Bun dan The Bu Kiat masih sempat mengadakan Training Centre (TC) di atas sungai Duri, Singkawang. Di tempat inilah ia berhasil membentuk PKI gaya baru dengan kader-kadernya, antara lain A. Lung.

Sebagai seorang tokoh utama PKI, S.A. Sofyan merasa dirinya tidak aman karena selalu dikejar-kejar oleh Satuan Tugas ABRI di Kalimantan Barat. Untuk menghilangkan jejak dari kejaran ABRI, kemudian S.A. Sofyan pindah ke Gunung Tembaga dan Jaratsemata di Segedong. Di tempat inilah ia berhasil memperoleh dukungan massa cukup banyak, sehingga tanggal 25 Mei 1967 dapat mengorganisir pemyebaran pamflet. Melalui penyebaran pamflet tersebut, Satuan Tugas ABRI dapat mengungkap lebih jauh organisasi gaya baru dan bahkan diketahui pula bahwa sebagian besar aktivis-aktivisnya adalah orang-orang Cina WNI Kalimantan Barat.

Sekalipun Operasi Militer dilaksanakan secara terus-menerus di wilayah Kalimantan Barat, namun demikian masih banyak pula yang berhasil meloloskan diri. Bahkan lolosnya S.A. Sofyan dari operasi penangkapan adalah berkat bantuan orang-orang Cina penebang kayu. Sejak itu operasi penghancuran dinilai sudah tidak tepat lagi, sehingga dialihkan menjadi Operasi Intelijen dan Operasi Teritorial. Melalui kedua operasi itu ternyata lebih banyak hasilnya, misalnya tokoh-tokoh seperti Yap Chung Hoo dan Yacob

berhasil di tembak mati, sedangkan Wong Kie Chok yang saat itu menguasai daerah Sektor Timur bersama 200 orang pendukungnya berhasil di hancurkan.

Dengan dilaksanakannya Operasi Intelijen dan Teritorial, sesungguhnya merupakan langkah maju menuju situasi konsolidasi dan stabilisasi di wilayah Kalimantan Barat. Sejak itu tampak situasi kaum pemberontak mulai menurun. Hal ini terlihat dari banyaknya di antara mereka yang menyerah, ditawan, kemampuan tempur menurun, banyaknya senjata yang dirampas atau dihancurkan dan jalur-jalur komunikasi dipotong dan dihancurkan oleh Satuan Tugas Operasi Gabungan ABRI. Bahkan pasukan ABRI berhasil pula memaksa kaum gerombolan untuk mengadakan dislokasi secara terpencar-pencar, dan memisahkan mereka dari masyarakat.

Berdasarkan informasi dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap gerombolan yang menyerah atau ditawan, dapat disimpulkan bahwa gerakan-gerakan mereka tidak hanya bersifat lokal. Mereka mempunyai hubungan dalam rangka suatu strategi gerakan Komunis Internasional (Komintern) untuk menguasai daerah-daerah Asia Tenggara. Sehubungan dengan itu mereka memerlukan basis-basis untuk memungkinkan ekspansinya.

Sementara itu melalui Operasi Intelijen upaya untuk menangkap tokoh utama PKI gaya baru, S.A. Sofyan tetap dilancarkan. Pada tahun 1973 , Operasi 001 dilancarkan oleh Kodam XII/Tanjungpura dengan satuan ABRI lainnya serta dukungan rakyat. Dari laporan Satuan Intelijen serta informasi dari rakyat, diperoleh kesimpulan bahwa S.A. Sofyan sedang bersembunyi di daerah rawa-rawa, di daerah Tarentang, sebelah Tenggara Pontianak. Penyergapan segera dilakukan dengan menugaskan dua regu anggota ABRI yang mayoritas anggotanya adalah anggota RPKAD. Pada tanggal 12 Januari 1974, satuan RPKAD menyergap tempat persembunyian S.A. Sofyan. Ia mencoba melawan, tetapi berhasil di tembak mati. Pengawalnya yang mencoba melarikan diri, akhirnya berhasil ditangkap. Dengan tertembak matinya S.A. Sofyan, maka berakhirlah impian PKI untuk kembali menghidupkan partai terlarang tersebut dan tamat pulalah riwayat PKI Gaya Baru di Kalimantan Barat.

3. Penumpasan Gerakan PKI Malam Iramani di Purwodadi

Seperti halnya di Jawa Timur, maka Jawa Tengah pun telah digarap oleh sisa-sisa G30S/PKI, untuk dijadikan basis-basis utama untuk perjuangan bersenjata menentang Pemerintah RI. Salah satu daerah di Jawa Tengah yang sudah dipersiapkan secara baik dan kuat oleh PKI adalah daerah-daerah sekitar Purwodadi. Dacrah Purwodadi dipilih olch PKI scbagai daerah basis karena kondisi sosial ekonomi daerah ini pada waktu itu amat menguntungkan PKI untuk melanjutkan perjuangan. Daerahnya kering dan tandus, sehingga mudah bagi PKI untuk mempengaruhi rakyat desa yang miskin di daerah ini, yang tidak mengenal poltik. Dalam menghadapi gerakan-gerakan ilegal PKI di daerah Purwodadi, Laksus Pangkopkamtib / Peperda Jateng (Kodam VII/ Diponegoro), telah melancarkan beberapa operasi seperti : Operasi Kikis I yang berlangsung dari tanggal 4 Juli 1967 sampai dengan akhir tahun 1967. Dalam operasi ini telah berhasil dihancurkan Tentara Perlawanan Rakyat (TPR) Purwodadi yang meliputi Kecamatan Teroh dan Penawangan. Di samping itu juga dihancurkan penyusunan kekuatan liar di Kecamatan Grobogan Utara oleh seorang ex Kopral KKO Suparman cs. Di daerah itu telah diselenggarakan sekolah-sekolah Perlawanan Rakyat yang terdapat di desa-desa Ngrumpung, Putatsari dan Hutan Lebak. Operasi Kikis II (27 Juni 1968 sampai dengan 7 Juli 1968), telah berhasil membongkar Komando Basis yang terletak di daerah Purwodadi yang meliputi Wirosari, Kuwu, Kradenan, dan Sulursari.[7]

Dalam rangka konsolidasi untuk membangun kembali PKI di daerah Purwodadi, maka sisa-sisa orang PKI yang masih ada berusaha terus dengan melakukan kegiatan-kegiatan dengan menghimpun kembali para bekas tahanan G30S/PKI. Gerakan PKI malam (ilegal) di Purwodadi dimulai setelah Operasi Kikis I dan II yakni pada tahun 1968. Mereka berusaha membangun kembali organisasi baru dalam bentuk lain. Mereka telah berhasil mempengaruhi penduduk

7. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban "Laporan Kopkamtib kepada sidang Kabinet Paripurna RI tentang "Persoalan Purwodadi", tanggal 20 Maret 1969 (dokumen).

setempat yang kebanyakan masih belum mengenal politik dan dalam kehidupan ekonomi yang sulit. Organisasi baru ini mereka namakan "Pembangunan Tentara Pembebasan Rakyat" (PTPR) yang berpusat di daerah Cepu Utara, di bawah pimpinan Budi Harsono. Namun, pembentukan organisasi baru itu mengalami kegagalan dengan tertangkapnya Buratno. Sisa-sisa PKI yang masih ada kemudian menyingkir ke arah barat dengan membentuk "Comite Pangkalan Kecil" (CPK) di Demak yang dipimpin oleh Mustakim alias Darso alias Saleh, Jupri, dan Rokhayah, bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPR-D-GR) Purwokerto, yang telah berhasil ditangkap di Demak.

Setelah GPK Demak terbentuk, maka Mustakim pindah ke Wonoharjo, Boyolali. Pada bulan Februari 1969, ia pindah lagi ke Purwodadi. Di Purwodadi, sisa-sisa pimpinan mereka yaitu Samsudin alias Iramani, menghubungi kembali bekas tahanan G30S/PKI. Mereka berhasil membina kembali PKI di daerah Purwodadi, karena daerah ini sangat menguntungkan bagi kegiatan PKI, antara lain adalah sulitnya komunikasi pada waktu itu dan ditambah lagi dengan sulitnya keadaan sosial ekonomi masyarakat desa. Untuk melindungi agar kerahasiaan kegiatan mereka tetap terjaga, maka para pemimpinnya berkelompok dalam rombongan-rombongan yaitu rombongan Samsudin alias Iramani, rombongan Mustakim dan rombongan Senen. Dari ketiga rombongan ini hanya rombongan Samsudin yang berhasil membina kembali para bekas tahanan G30S/PKI dan mereka mendirikan pos-pos di beberapa desa. Pos-pos tersebut adalah Pos Welar beranggotakan tujuh orang, Pos Nguter beranggotakan empat orang, Pos Kenteng beranggotakan satu orang, dan Pos Ngemplak beranggotakan dua orang.[8]

Oleh karena adanya gerakan operasi secara terus-menerus dilancarkan oleh ABRI sejak bulan Agustus 1968, maka Samsudin dan kawan-kawannya tinggal di dalam hutan sampai tahun 1969.

---

8. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Jateng dan DIJ; "Tentang Hasil Ops Intel/Ops Teritorial terhadap Gerakan PKI ilegal di Purwodadi tahun 1972/1973" (dokumen)

Kekuatan mereka pada waktu itu tinggal lima orang. Namun pada Bulan April 1969 rombongan Samsudin bertemu kembali dengan rombongan Senen, kemudian mereka berhasil membentuk "Petugas Organisasi Desa" (POD) di desa Ngemplak yang beranggotakan tiga orang dan membentuk pos penghubung di desa Kenteng, Ngemplak, Asem Rudung, dan Sumber Agung.

Sebelum gerakan mereka ini berkembang, terjadi perpecahan diantara mereka mengenai taktik kerja gerakan, yakni kerja legal dan kerja ilegal. Tetapi pada bulan Februari 1970 kedua rombongan ini yakni rombongan Samsudin, Senen, dan Mungkar dengan kelompok Markum, Dopo, Saman dan Damin telah bergabung kembali di Kemusu (Boyolali). Di Kemusu mereka berhasil membangun kembali organisasi partai yang di mulai dari "Pembentukan Comite Pangkalan Kecil" (CPK) yang membawahi kelompok Gerilya Desa (Gerda) dan Kesatuan Regu Gerilya (KRG). Setelah berhasil di Boyolali, kemudian mereka kembali lagi ke Purwodadi pada bulan Agustus 1971. Pada bulan Februari 1972 organisasinya disempurnakan menjadi Comite Pangkalan Kecil (CPK) membawahi Pimpinan Daerah Kecamatan (PDK), yang membawahi Petugas Desa (PTD). PTD membawahi Gerilya Desa (Gerda) dan kelompok Tiga Belas. Pada bulan Mei 1972 mereka menyempurnakan organisasinya, yaitu Comite Pangkalan Kecil (CPK) diganti dengan "Comite Pangkalan Mobil" (CPM). Pimpinan Daerah Kecamatan (PDK) diganti dengan Pimpinan Kecamatan (Piket). Petugas Desa (PTD) diganti dengan Petugas Organ Desa (POD). Kemudian Kelompok Regu Gerilya (KRG) diganti dengan Prajurit Gerilya (Praga), sedangkan Gerilya Desa (Gerda) diganti dengan Prajurit Desa (Prada).

Dengan organisasi baru ini mereka berhasil menambah jumlah anggotanya, CPM beranggotakan enam orang. Di Purwodadi telah berhasil dibentuk tiga Pimpinan Kecamatan (Piket) yang beranggotakan tiga orang, empat Piket Persiapan, 49 POD, delapan POD Persiapan, Prada 149 orang, Praga 185 orang dan massa 6.009 orang. Jumlah keseluruhan mencapai 6.470 orang.[9]

9. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Jateng dan DIJ, "Berita Acara Pemeriksaan terhadap Paing alias Mungkar, 1973, Somat alias Kancil 1973" (dokumen).

Di Daerah Boyolali telah berhasil dibentuk sembilan POD dengan 27 orang anggota, Praga 31 orang, Prada 27 orang, dan massa 723 orang. Jumlah pengikut mereka di Boyolali adalan 808 orang. Di Sragen telah terbentuk satu Piket, tiga Piket Persiapan, lima POD, dan satu POD Persiapan, sehingga jumlah anggota keseluruhan 415 orang. Kegiatan Piket ini ditujukan untuk menarik simpati dan sekaligus mengintimidasi rakyat, antara lain dengan :

- Membuat ladang di Hutan.
- Mengadakan Pendidikan.
- Melakukan penyuntikan massa dengan bayaran yang murah Rp 50,- (limapuluh rupiah) untuk dewasa dan Rp 25,- (duapuluh lima rupiah) untuk anak-anak dan gratis bagi yang tidak mampu.
- Mengadakan sidang dan diskusi Comite Pangkalan Mobil.

Para bekas tahanan G30S/PKI yang telah berhasil dibina kembali oleh PKI diantaranya bernama Sawiyo alias Ayub dan Parman. Mereka ini kemudian menghubungi kawan-kawannya yang juga bekas tahanan G30S/PKI di dusun Ngrebo, desa Kedungrejo, Kecamatan Purwodadi bernama Sojo bin Kasio, Supardjo dan Suwignyo. Selama berada dalam persembunyian di rumah Sojo, Sawiyo berhasil mendaftar kembali 16 orang anggota. Tanpa disengaja seorang anak Sojo yang masih duduk di sekolah Taman Kanak-Kanak menceritakan kepada gurunya (Nyonya Sumpeni) bahwa Pakdenya punya tembakan. Nyonya Sumpeni kemudian melaporkan cerita tersebut kepada Kepala Desa yakni pada tanggal 23 Nopember 1972.[10] Dari laporan tersebut maka dapat diketahui adanya gerakan gerakan PKI ilegal yang dipimpin oleh Samsudin alias Iramani di sekitar Purwodadi. Sejak itu pula diadakan operasi teritorial dan operasi intel untuk menggulung kegiatan tersebut. Namun Sawiyo berhasil meloloskan diri. Operasi pengejaran terhadap Sawiyo terus dilakukan dengan melibatkan seluruh aparat desa. Akhirnya Sawiyo berhasil ditangkap di desa

10. Wawancara dengan Ibu Sumpeni, bekas guru TK dusun Ngrebo pada tanggal 23 Juli 1991 di dusun Ngrebo desa Kedungrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purwodadi.

Kandangan, Kecamatan Purwodadi di rumah seorang penduduk yang bernama Sumokarsidi. Bersama Sawiyo ditangkap pula empat orang lainnya yakni Ngadimin, Boko, Sudio dan Pardjan.[11] Dari pengakuan mereka yang tertangkap, maka terbukalah tabir kegiatan PKI malam yang mereka mulai sejak tahun 1968, yakni dengan menghimpun kembali para bekas tahanan G30S/PKI. Mereka melakukan kegiatan-kegiatannya dengan cara menyebarkan para pimpinan PKI malam ke daerah-daerah yang dinilai tetap berpihak kepada PKI. Mereka mendatangi para bekas tahanan G30S/PKI dengan memberikan penjelasan tentang masalah-masalah kesulitan hidup, sulit mencari uang dan selanjutnya mereka diajak untuk meneruskan perjuangan lama yang telah gagal dengan jalan Garis Pendem (bawah tanah) dengan prinsip 3 R yaitu Rapih , Rapet , Rampung. Paing alias Dulmanan alias Nungker alias Tjokro seorang petani dari dusun Nguter desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Boyolali, bekas anggota BTI yang pernah ditahan karena terlibat G30S/PKI, didatangi oleh seorang yang mengaku bernama Mulsarwi yang memberikan penjelasan tentang kesulitan-kesulitan tersebut diatas. Kemudian ia dipertemukan dengan Senen alias Joyo dan kemudian menghimpun "Kawan Lama" di Rejosari (Kuwu), Kenteng, Ngemplak, Sumber Agung dan Ngrudung di daerah Purwodadi. Karena adanya operasi yang dilancarkan oleh ABRI secara terus-menerus, maka mereka menyelamatkan diri ke dalam hutan dangan selalu berpindah-pindah tempat. Mereka tinggal di hutan Genderuwo selama tiga bulan. Di hutan ini kelompok Senen bertemu dengan Iramani, Warsidi dan kawan- kawannya, sehingga jumlah mereka menjadi 12 orang, antara lain Iramani, Markum, Hardi, Warsidi, Pak Bejo alias Sarip, Joyo, Damin alias Tris, Paing dan Basuki. Di tempat ini mereka mengadakan pembagian tugas, yaitu :

- Melanjutkan hubungan massa, pengembangan massa pindah ke barat (derah Kenteng), karena hubungan massa di timur sulit, dan ikut membantu produksi kaum tani.

---

11. Wawancara dengan Bapak Suwadi, bekas Lurah Kedungrejo, pada tanggal 23 Juli 1991 di dusun Ngrebo desa Kedungrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purwodadi

- Mereka juga membagi wilayah tugas masing-masing yakni: Tris dan Paing "memelihara" Ngemplak, Markum dan Bejo ditugasi memelihara Asemrundung, Joyo dan Setu memelihara Ngledok dan Sumberagung, Warsidi dan Basuki memelihara Jemblokan sedangkan Iramani bertugas Mobil.

Dari hutan Genderuwo mereka pindah ke hutan Mlaken, dan tinggal di hutan ini selama 6 bulan.

Setelah peristiwa Ngrobo, Sawiyo dan kawan-kawannya tertangkap di desa Kandangan, maka gerombolan pindah ke daerah Gundih desa Asemrudung dukuh Saren, Ngledok. Mereka tetap melakukan kegiatan- kegiatan di daerah itu, juga di Kecamatan Gayer. Pada tanggal 13 Desember 1972, Mantri Polisi Gayer Rusman[12] mendapat laporan dari Pamong Desa Karanganyar dan Bangsri bahwa ada gerombolan yang bersembunyi di dukuh Pepe desa Ngrandu. Setelah diadakan penyergapan bersama Muspika setempat, anggota gerombolan tersebut mengaku bernama Sariyo alias Tanto alias Warto alias Darno alias Yadi alias Tomin. Dari yanto inilah kemudian diketahui adanya jaringan kegiatan gerakan Iramani yang menamakan gerakan "Pembangunan PKI Kembali" Struktur organisasinya disusun sebagai berikut :

a. Dewan Harian Comite Pangkalan Mobil (CPM), di bagi menjadi tiga bagian yaitu :
   - Bagian Politik, diketuai oleh Samsudin alias Achmadi alias Sutiyo alias Samidi alias Iramani alias Djokolelono alias Margono.
   - Bagian Organisasi, diketuai oleh Mustakim alias Saridjo alias Jadi alias Tamin alias Tanto alias Warto.
   - Bagian Perjuangan Bersenjata (Perjuta), diketuai oleh Samsudin alias Iramani.

12. Wawancara dengan Bapak Rusman, bekas Camat Gejer, pada tanggal 22 Juli 1991 di Kabupaten Purwodadi

b. Pleno, Comite Pangkalan Mobil (CPM)
   - Samsudin alias Iramani, Mustakim alia

c. Pimpinan Kecamatan Gundih (Piket Guno)
   - Bagian Organisasi : Paing alias Dul.
   - Bagian Agitprop : Sastro Sadi alias Gozali.
   - Bagian Perjuta : Samad alias Kancil.

d. Pimpinan Kecamatan Pojok (Piket Parjo)
   - Bagian Organisasi : Senen alias Joyo.
   - Bagian Agitprop : Sarip alias Salam.
   - Bagian Perjuta : Markam alias Kiwanto alias Supeno.

e. Pimpinan Kecamatan Purwodadi (Piket Purwo)
   - Bagian Organisasi : Damin alias Tris.
   - Bagian Agitprop : Sawiyo alias Ayub.
   - Bagian Perjuta : Damin alias Tris.

f. Prajurit Gerilya (Praga) berkekuatan satu regu, terdiri atas :
   - Komandan Regu Praga
   - Wakil Komandan Regu
   - Komisaris Politik
   - Anggota Regu

g. Koordinator (KDT), bertugas membentuk Pimpinan Desa (PD) yang diawasi langsung oleh CPM, telah terbentuk 3 KDT.

h. Koordinasi Daerah (KDT) bertugas mengkoordinasikan diskusi dan laporan.

i. Petugas Organisasi Desa (POD)
   Di Purwodadi dan Boyolali telah terbentuk 42 POD yang tersebar di beberapa Kecamatan.[13]

Setelah Tanto tertangkap, maka sisa-sisa gerombolan yang masih ada menuju Grapyak, Gentasgeneng. Di daerah itu telah berkumpul 31 orang. Dalam suatu rapat yang dipimpin oleh Iramani, antara

13. Wawancara dengan Bapak Ruswadi, Sekwilkam Kecamatan Geyer, pada tanggal 23 Juli 1991 di Kecamatan Geyer Gundih, Purwodadi

lain diputuskan agar buku-buku supaya di kumpulkan dan dititipkan kepada massa, meneruskan garis mundur ke hutan Jatibagus Cacingan dan mencari hutan untuk ditempati, agar senjata tetap disimpan tanpa jejak dan gerombolan agar tetap berhubungan dengan massa. Kepada anggota yang tertangkap dianjurkan agar tidak membuka rahasia partai. Gerombolan tersebut berada di Getasgeneng selama satu bulan .

Gerombolan selalu berpindah dari hutan satu ke hutan lain untuk menghindari pengintaian petugas. Dari hutan Jatibagus, mereka mundur ke Wonoharjo, dan pindah ke hutan Bubat di Kedungjati. Karena persembunyian mereka diketahui oleh polisi hutan, mereka pindah lagi ke hutan Prahu. Dari hutan ini Markam ditugasi untuk mengadakan hubungan dengan massa, tetapi Markam tertangkap. Pada tanggal 24 Maret 1973, seorang warga desa bernama Suti melaporkan kepada Rukun Keluarga setempat bahwa ada gerombolan-gerombolan yang berada di dalam hutan. Laporan ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Markam yang berhasil ditangkap bahwa gerombolan Iramani akan bergerak menuju ke arah barat melewati dusun Ngasem desa Monggot, Kecamatan Geyer.[14]

Setelah menerima informasi tersebut, Lurah Monggot segera melakukan persiapan agar gerombolan tersebut tidak lolos. Lurah Monggot mengerahkan rakyat desa dan Wanra agar bersiap-siap melakukan penghadangan terhadap gerombolan. Pada waktu gerombolan ini tiba di desa Ngasem, mereka telah di kepung oleh rakyat. Dengan bersenjata pentungan dan senter, pada pukul 04.00 dini hari rakyat mulai mengepung gerombolan yang melewati jalan setapak dan menyeberang ke sebelah barat jurang dan hutan jati. Mereka lari kocar-kacir tetapi rakyat terus mengejar dengan membawa pentungan. Terjadilah perkelahian antara rakyat dengan gerombolan. Dalam penghadangan ini banyak anggota gerombolan yang tertangkap. Gerombolan yang berhasil lolos terus dikejar oleh rakyat. Dalam keadaan lemah dan lapar mereka meminta-minta

13. Wawancara dengan Bapak Ruswadi, Sekwilkum Kecamatan Geyer, pada tanggal 23 Juli 1991 di Kecamatan Geyer Gundih, Purwodadi

makanan pada rakyat desa dan akhirnya mereka pun menyerah. Dalam penghadangan ini Iramani beserta tujuh anggota gerombolan bernama Krido, Sogol, Kromoparjan, Slamet Tanti, Asih, Sarip, Satipto alias Saman berhasil lolos ke desa Bubak. Pada pengejaran itu telah berhasil ditangkap sejumlah 30 orang dan kemudian diserahkan kepada Komandan Distrik Militer Purwodadi untuk diusut lebih lanjut. Akhirnya gerombolan PKI Malam Iramani ini berhasil ditumpas oleh massa rakyat kabupaten Purwodadi sekitar bulan Maret 1973.[15]

15. *Ibid*

BAB VII
KEGIATAN ILLEGAL SISA-SISA PKI DAN SIMPATISANNYA DI LUAR NEGERI

1. Kegiatan Sisa-Sisa PKI dan Simpatisannya di Republik Rakyat Cina (RRC)

Setelah kudeta G30S/PKI gagal, tokoh-tokoh PKI bercerai-berai menyelamatkan diri ke berbagai daerah bahkan ada yang berhasil menyusup ke luar negeri. Di luar negeri mereka melakukan konsolidasi partainya kembali. Diluar negeri sisa-sisa PKI secara aktif melancarkan aksi subversif mereka, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini terutama karena situasi dan kondisi negara yang ditempati memberikan bantuan kepada oknum-oknum pelarian PKI dan simpatisannya itu. Mereka leluasa bergerak dan beragitasi mendiskreditkan pemerintah RI. Dengan bantuan perwakilan-perwakilan negara yang se-ideologi, para kader PKI dijadikan pelaksana dari gerakan komunisme Internasional.[1]

Kegiatan sisa-sisa PKI dan simpatisannya di RRC antara lain dilakukan oleh Djawoto mantan Duta Besar RI di Beijing (Peking). Setelah mengundurkan diri, ia bekerja untuk kepentingan negara asing. Djawoto yang dikenal sebagai anggota PKI, diangkat sebagai Direktur Kursus Wartawan Asia Afrika oleh Pemerintah RRC. Kursus ini sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah RRC. Peserta kursus selain orang Indonesia juga berasal dari Tanzania, Kongo dan beberapa orang Afrika Selatan serta Afrika Barat Daya. Tempat kursus sengaja dipilih oleh Pemerintah RRC di dekat Kedutaan Besar RI dengan maksud agar segala kegiatan Djawoto selalu dapat dilihat oleh Wakil Pemerintahan Indonesia.

Pelajar-pelajar Indonesia pendukung G30S/PKI yang berada di RRC diwajibkan mengikuti "Akademi Bahasa Asing" yang sebenarnya hanya mempelajari bahasa Cina. Hal ini dimaksudkan agar mereka

---

1. *Duapuluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945-1970*, disusun oleh Panitia Penulisan Sejarah Departemen Luar Negeri, Jakarta, 1971, hal.342

tidak salah dalam menafsirkan ajaran-ajaran Mao Ze Dong (Mao Tze Tung) yang pada waktu itu sedang giat-giatnya dipaksakan di daratan Cina. Selain itu mereka juga ditugaskan untuk menerbitkan buletin "Suara Pemuda Indonesia" yang isinya anti pemerintahaan Orde Baru. Hal ini memang disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah RRC yang anti pemerintahan Orde Baru.

Ada sekitar 700 orang anggota pelarian PKI yang berkumpul di RRC. Pada umumnya mereka adalah orang-orang yang lolos dari pengejaran, karena sebelum diadakan operasi-operasi pembersihan mereka telah berhasil meninggalkan Indonesia.

Kegiatan dan sikap permusuhan mereka terlihat dalam siaran berita-berita yang bersifat provokatif dan fitnahan dengan maksud mengadu domba antara kekuatan-kekuatan Orde Baru di Indonesia. Buletin-buletin yang diterbitkan di Beijing dikirim ke Indonesia lewat pos. Tujuannya agar menimbulkan ketegangan-ketegangan di dalam masyarakat Indonesia.

Kepada sisa-sisa anggota PKI di Indonesia diinstruksikan untuk selalu mendengarkan instruksi-instruksi dari radio Beijing yang berisi kutipan-kutipan "ucapan-ucapan Ketua Mao". Cina komunis memang meningkatkan kegiatan subversinya di Indonesia, sejalan dengan keputusan Sidang Pleno CC Partai Komunis Cina (PKC) yang diadakan bulan April 1969 yang telah menentukan Indonesia sebagai musuh utama No.3 (setelah Uni Sovyet dan Amerika Serikat). Dikatakan dalam ajaran- ajaran itu bahwa Pemerintah Cina Komunis akan terus berusaha mengembalikan kekuatan PKI di Indonesia.

Sebenarnya kegiatan subversi Cina Komunis di Indonesia ini telah berlangsung jauh sebelum terjadinya G30S/PKI. Kegiatan-kegiatan itu dikoordinir oleh Kedutaan Besar RRC di Jakarta dan konsulat-konsulatnya di daerah-daerah. Organisasinya bernama "Gerakan Pembantu Partai (PKI)". Bantuan mereka terutama dalam bidang peralatan, logistik, pembinaan mental dan idelogi komunis berikut ajaran Mao Ze Dong tentang perjuangan bersenjata.[2]

---

2. *Mingguan Chas*, 2 Mei 1969

Selain itu, para pelarian oknum PKI melancarkan kampanye-kampanye di forum Internasional. Di antaranya mereka menyelenggarakan Konferensi Pengarang Asia Afrika (KPAA) dan konferensi Wartawan Asia Afrika (KWAA). Kegiatan ini didominasi oleh sisa-sisa PKI dengan tujuan menghantam kekuatan Orde Baru yang sedang berkembang dan dibina Indonesia.

Kegiatan mereka juga dilakukan melalui Kedutaan Besarnya di Jakarta. Dari Kedutaan ini disebarkan majalah yang diberi nama *"Tiongkok Rakyat"*. Majalah ini di terbitkan dan dicetak di Beijing. Dalam majalah ini dapat dibaca artikel-artikel yang isinya penuh dengan cacian dan makian kepada pemerintah Orde Baru. Artikel tersebut ditulis oleh Renin Ribau dengan judul *"Kepada Siapakah Golongan Kawan Indonesia Mengabdi"*,,dan memuat kegiatan,oknum-oknum PKI, seperti Djawoto, sewaktu mengadakan Konferensi Pengarang Asia Afrika yang diadakan di Beijing. Selain itu majalah itu juga berisi seruan pemerintah RRC agar rakyat Indonesia (Orla/PKI) menggulingkan yang mereka sebut "Rezim Facis Soeharto" dengan kekerasan senjata.[3] Untuk itu diperintahkan kepada seluruh sisa-sisa PKI supaya mengalihkan perjuangan dari kota ke desa-desa untuk melakukan pemberontakan bersenjata. Mereka yakin aksi itu akan berhasil kalau aksi itu dibimbing oleh pikiran-pikiran Mao Ze Dong. Berdasarkan pikiran ini mereka harus menolak individualisme, mengadakan Fronf Persatuan dengan kaum pekerja sebagai intinya dan petani sebagai dasarnya.

Dalam bulan Januari 1967, Kedutaan RI di Beijing (Peking) didemonstrasi oleh Cina-Cina perantauan dari Indonesia yang digerakkan oleh penguasa RRC. Mereka melempari batu dan panah berapi ke kantor Atase Militer RI. Selama kurang lebih tiga hari kantor perwakilan dikepung oleh barisan Pengawal Merah. Untungnya anggota-anggota perwakilan RI mendapat

3. *Berita Yudha*, 10 Juli 1966

bantuan makanan dari Staf Kedutaan Belanda, sehingga mereka dapat terhindar dari bahaya kelaparan.[4]

Pada pertengahan bulan April 1967 ratusan pemuda Cina di Beijing menempelkan plakat-plakat dan poster-poster anti pemimpin dan pemerintah Indonesia di tembok Kedutaan Besar Indonesia. Pada tanggal 24 April 1967 Kuasa Usaha RRC di Jakarta Yao Teng Shan dan Konsul Jenderal Hsu Jen diusir dari Indonesia. Bersamaan dengan peristiwa itu di Beijing (Peking) pada tanggal tersebut terjadi demonstrasi terhadap KBRI selama lima hari berturut-turut, di mana turut serta orang-orang pelarian dari Indonesia yang diberi suaka oleh RRC. Kemudian Kuasa Usaha RI Baron Sutadisastra dan kepala Bagian Penerangan Sumarno diusir oleh RRC. Di Lapangan terbang Beijing (Peking) maupun selama mereka di Kanton dalam perjalanan ke Hongkong, mereka didemonstrasi oleh beribu-ribu orang bahkan kemudian menyeret Baron ke luar dari kamar hotelnya di Kanton untuk dicaci-maki dan dipukuli. Pada tanggal 27 April 1967 di Beijing telah diadakan rapat umum anti Republik Indonesia di stadion buruh yang dihadiri oleh 100.000 orang. Dalam rapat umum itu telah berpidato Wakil Perdana Menteri / Menteri Keamanan Hsieh Fu Chih dan Djawoto, yang mecaci-maki pemimpin dan pemerintah Indonesia. Selama dan sesudah kejadian tersebut, Staf Kedutaan RI beserta keluarga mengalami perlakuan yang kasar dari orang-orang setempat. Mereka tidak mau melayani orang-orang Indonesia yang akan memakai lift, begitu juga di rumah makan dan di tempat-tempat lain. Mobil-mobil kedutaan dan mobil-mobil pribadi ditempeli plakat-plakat anti RI. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka diputuskan untuk mengungsikan seluruh keluarga Staf KBRI ke Hongkong.

Pada Tanggal 5 Agustus 1967 terjadi lagi demonstrasi terhadap KBRI di Beijing (Peking) selama lima hari berturut-turut. Kali ini disertai dengan pengerusakan dan pembakaran. Selama demonstrasi

4. Mayjen TNI (Purn) R.M. Jono Hatmojo, *Sejarah Pengalaman Pribadi selama Menjabat dalam TNI AD maupun sebagai anggota Karyawan ABRI 1945–1983*, tanpa tahun, hal.62

yang berlangsung lima hari lima malam, di sekeliling gedung Kedutaan Indonesia dipasang beberapa loudspeaker yang terus-menerus meneriakkan maki-makian terhadap Indonesia. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 1967 Deplu memberitahukan kepada pihak RRC, bahwa Pemerintah Indonesia telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Beijing (Peking).[5]

Selain sebagai tempat kegiatan gerilya politik (gerpol), Beijing (Peking) dijadikan pula sebagai tempat pelarian anggota PKI dari negara- negara lain. Pada tanggal 26 Januari 1966, mantan Ketua Comite Central PKI Yusuf Ajitrop SH, menerima tokoh-tokoh PKI Ibrahim Isa, Willys, Umar Said, dan lain lain. Mereka itu datang darti Kuba, setelah pemerintah Indonesia mencabut hak kewarganegaraan Ibrahim Isa, Fangidays, Willys, Umar Said, dan lain-lain. Mereka itu dari Kuba, setelah pemerintah Indonesia mencabut hak kewarganegaraan Ibrahim Isa dan kawan-kawan, karena mencemarkan nama baik Indonesia di Konferensi Tiga Benua di Havana. Tindakan mereka itu memang sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah RRC. Dalam Kongres Partai Komunis Cina pada tanggal 1 April 1969 yang berlangsung di Beijing (Peking) ditegaskan bahwa pemerintah RRC akan mengadakan hubungan- hubungan persahabatan dengan negara Sosialis, serta akan mendukung setiap perjuangan revolusioner (pemberontakan Komunis) di manapun saja termasuk Indonesia.

Pada tanggal 23 Mei 1969 di Beijing, sisa-sisa PKI menyelenggarakan HUT ke-49 PKI dipimpin oleh Yusuf Ajitorop. Pada saat itu dikatakan bahwa PKI tidak bisa dibasmi meskipun mengalami "serangan teror putih" yang paling ganas dan paling besar sepanjang sejarah PKI. Oleh karena itu sepantasnyalah sisa-sisa PKI dan para pimpinan RRC menghormati mereka yang telah gugur untuk kepentingan kebebasan rakyat Indonesia dan cita-cita Komunisme.

---

5. *Persepsi*, Tahun I, Nomor 2, Juli, Agustus, September, 1979, hal 41-43

2. Kegiatan sisa-sisa PKI dan Simpatisannya di Uni Sovyet

Akibat terjadinya persaingan antara RRC dan Uni Sovyet, tatkala kudeta G30S/PKI 1965 terjadi, maka Uni Sovyet memberikan reaksi yang lunak. Kemudian terbukti Uni Sovyet memberikan bantuannya kepada para mahasiswa Indonesia yang bersimpati kepada negara itu. Sebaliknya kepada mereka yang bersimpati terhadap Indonesia, mendapat perlakuan yang tidak wajar dari pemerintah Uni Sovyet. Akibat dari tekanan-tekanan itu, mereka minta untuk dipindahkan ke negara lain atau ditarik ke tanah air. Surat pengajuan tersebut terpaksa ditulis oleh mahasiswa Indonesia pada tanggal 30 September 1966, dan ditandatangani oleh Boy Darwin, Syamsul Bakri, Farid, Tanak, K.R. Purba, dan Bambang Krisdarmaji.

Di Universitas Patrice Lumumba, Moskow, sisa-sisa PKI mendirikan suatu gerakan yang mereka beri nama "Gerakan Mahasiswa Revolusioner Universitas Persahabatan" yang terang-terangan anti Pemerintah Indonesia.

Pada tanggal 9 November 1967, secara tegas pemerintah Uni Sovyet dengan PKUS beserta mass medianya telah mengambil alih gerakan komunis Indonesia dan menjadikan mereka sebagai tenaga pimpinan untuk mengadakan operasi di dunia Internasional. Tindakan ini nampaknya diambil sebagai bagian dari usaha untuk memberikan harapan dan instruksi-instruksi kepada mereka yang masih tetap bergerak di Indonesia.

Pada saat Kongres Partai Komunis sedunia dilangsungkan di Moskow pada bulan Juni 1969, PKUS menyampaikan "Salam Revolusioner" kepada mereka yang gugur di Indonesia, menjadi korban "teror berdarah". Di samping itu, disampaikan juga rasa solidaritas kepada bekas-bekas PKI yang masih tetap berjuang. Mereka juga percaya pada suatu saat mesti PKI kembali akan berkuasa kembali.

Akan tetapi bekas anggota PKI yang masih "berjuang" untuk menghidupkan kembali PKI, dihadapkan kepada persaingan antara PKC dan PKUS. Mereka ini juga berusaha merebut pengaruh di antara sisa- sisa PKI yang masih ada, baik di dalam negeri maupun di

luar negeri. Akibatnya di antara bekas-bekas PKI terjadi perpecahan. Ada bekas-bekas PKI yang pro Uni Sovyet dan yang pro RRC. Para bekas PKI yang pro Uni Sovyet menyatakan, bahwa sejak kegagalan G30S/PKI, mereka memutuskan untuk mengikuti garis Moskow, karena Beijing (Peking) ternyata telah menjerumuskan PKI ke dalam kesulitan. Hal ini kemudian dibalas oleh Radio Beijing (Peking) siaran Indonesia dengan menyiarkan sebuah rekaman dari salah satu pidato D.N. Aidit yang memuji-muji Beijing (Peking). Di samping itu pemerintah RRC mengecam keras Moskow, karena telah mengirimkan senjata kepada Indonesia yang kemudian digunakan oleh pemerintah Indonesia guna menumpas G30S/PKI.

Seperti halnya RRC, Pemerintah Uni Sovyet juga ikut campur dalam masalah dalam negeri Indonesia. Pada tanggal 14 Februari 1969, Galukov seorang dosen Ilmu Teknik di Universitas Patrice Lumumba, Moskow, menyatakan bahwa PKI akan hidup kembali asal dengan tegas berpegang pada prinsip-prinsip Marxisme / Leninisme serta mengadakan kerjasama dengan kekuatan demoktratis yang progresif lainnya.

3. Kegiatan Sisa-sisa PKI dan Simpatisannya di negara-negara Eropa Barat dan Eropa Timur

Peristiwa G30S/PKI tahun 1965, dampaknya tidak hanya terbatas di dalam negeri, tetapi juga bergaung sampai ke Nederland. Dengan terjadinya kudeta itu, masyarakat Indonesia di Negeri Bunga Tulip itu harus menyatakan sikap dan pandangan politiknya terhadap perkembangan di tanah air. Mereka yang setia pada Pancasila dan UUD '45 dengan tegas menyatakan berpihak kepada Orde Baru dan mendukung Pemerintahaan Soeharto. Sebaliknya mereka yang mempunyai sangkut paut dengan PKI atau ormas-ormas yang bernaung di bawahnya atau mereka yang meragukan Pancasila dan UUD '45, secara tegas atau diam diam memihak pada G30S/PKI serta gigih mempertahankan Orde Lama. Jumlah mereka sangat kecil sekali dibandingkan dengan yang memihak Orde Baru. Namun mereka tetap berbahaya untuk masa yang akan datang.

Sejarah nasional telah mencatat perkembangan perjuangan dua tokoh PKI, yaitu Muso dan D.N. Aidit. Dari catatan sejarah itu kita mengetahui bahwa Muso pun lama berada di luar negeri dan begitu tiba di tanah air, ia terus meledakkan pemberontakan PKI di Madiun (1948). Begitu juga D.N. Aidit, menurut penelitian Brackman dalam bukunya tentang komunisme Indonesia, Aidit juga menyingkir ke luar negeri setelah pemberontakan Madiun gagal.[6] Begitu Aidit pulang ke tanah air, ia berhasil menduduki jabatan pimpinan tertinggi partai. Partainya menjadi besar dan kuat serta ditakuti, lalu menganggap situasinya sudah "hamil tua", dan melakukan kudeta G30S/PKI pada tahun 1965.

Sisa-sisa PKI yang berada di luar negeri, jumlah mereka masih ratusan. Meskipun paspor mereka telah dicabut oleh KBRI setempat, ternyata mereka masih berkeliaran dan bebas melakukan gerakan dan kegiatan-kegiatannya. Gerakan dan kegiatan mereka pada umumnya dilakukan dan dikendalikan oleh para mahasiswa dan cendekiawan kiri Belanda dan mahasiswa-mahasiswa komunis Indonesia yang datang dari negara-negara Eropa Timur. Oknum-oknum kiri Belanda yang bersimpati dan memihak PKI, berdalih membela Hak Azasi Manusia (HAM), sangat berperanan dalam membesarkan dan memperkuat posisi sisa-sisa PKI di Nederland. Meskipun jumlah mereka kecil namun dampak yang ditimbulkannya telah banyak merugikan reputasi Pemerintah RI di forum Internasional.[7]

Kegiatan yang dilakukan sisa-sisa PKI atau simpatisannya di antaranya adalah melakukan *gerpol (gerilya politik)* yang tidak hanya bertujuan merusak citra dan menjatuhkan reputasi Indonesia, tetapi juga mempersulit posisi pemerintahan Orde Baru di forum Internasional. Terutama dalam memperoleh bantuan ekonomi dan keuangan dari luar negeri, khususnya dari Nederland. Saat itu bantuan ekonomi dan keuangan sangat dibutuhkan oleh pemerintah Orde Baru.

---

6. Jakto Oetomo, Drs., "Kesan-kesan Perdjalanan : Mahasiswa Kita di Eropa" (12), *Kompas*, 18 Juni 1966
7. Disjarah TNI AD, *Komunisme dan Kegiatannya di Indonesia*, Disjarah TNI AD, Bandung, 1985, hal.370

Untuk mencapai tujuan tersebut, sisa-sisa PKI dan simpatisannya berusaha mempengaruhi Pemerintah Nederland, agar bantuan ekonomi dan keuangan terhadap Pemerintah Indonesia dibatalkan atau minimal ditangguhkan untuk sementara. Selain dengan alasan membela Hak Azasi Manusia (HAM), sisa-sisa PKI dan simpatisannya menuntut pertanggungan jawaban Pemerintah Orde Baru terhadap apa yang mereka namakan "pembunuhan komunis" di Indonesia. Perlu dijelaskan berita-berita mengenai pembunuhan massal di Indonesia (baca Purwodadi), untuk pertama kalinya diisukan oleh H.J.C. Princen (waktu itu belum haji), yang kemudian di kutip oleh pers di dalam dan luar negeri, termasuk pers di Nederland. Isu-isu yang diekspos H.J.C. Princen dibantah keras oleh Gubernur Jawa Tengah, Mayjen TNI. Munadi. Dalam wawancara pers pada tanggal 4 Maret 1969, Mayjen TNI. Munadi dengan tegas mengatakan bahwa berita-berita mengenai pembunuhan massal di Purwodadi adalah isapan jempol belaka dan mempunyai maksud-maksud tertentu[8] terhadap pemerintahan Soeharto.

Bantahan Munadi diperkuat oleh Frank Palmos dan Judy Williams, masing-masing watawan *Melbourne Herald* (Australia) dan wartawan *New York Times* (Amerika Serikat) yang keduanya telah mengadakan peninjauan ke Jawa Tengah selama beberapa hari di bulan Februari-Maret 1969. Kedua watrawan asing itu telah mengadakan tanya jawab dengan sejumlah penduduk di sepanjang jalan antara Purwodadi dengan Kuwu dan tempat-tempat lain di sekitar Semarang. Dari hasil peninjauan itu, kedua wartawan menyebutkan bahwa mereka tidak melihat tanda- tanda adanya pembunuhan massal di daerah Kuwu-Purwodadi dan daerah sekitarnya.[9]

Isu tentang pembunuhan massal anggota-anggota PKI yang diekspos oleh H.J. C. Princen ternyata membawa dampak yang cukup besar tidak hanya di negara-negara komunis di Eropa Timur dan RRC, tetapi juga di Nederland. Sementara itu surat

8. *Berita Yudha*, 5 Maret 1969
9. *Ibid*

kabar Belanda Trouw pada penerbitannya tanggal 19 April 1969 memberitakan, bahwa sekelompok kiri Belanda menyebarkan sebuah "surat terbuka" dari Het Comite Indonesie (Komite Indonesia), sebuah organisasi yang bertujuan mengadakan gerilya politik terhadap Pemerintah RI. surat terbuka yang di tanda tangani oleh Ketua Comite Dr. J.M. Pluvier, yang berisi pernyataan, bahwa di kalangan rakyat Belanda telah timbul keresahan, karena niat kaum pengusaha Belanda dan Pemerintah Nederland untuk mengadakan hubungan kerjasama ekonomi dengan Pemerintah RI. Dalam surat terbuka yang disiarkan melalui majalah Vietnam Buletin-Indonesia Informatie itu dikemukakan, keresahan itu timbul karena Pemerintah Indonesia dikatakannya bertanggung jawab atas penangkapan- penangkapan dan teror kaum kiri serta diskriminasi terhadap orang-orang Cina, Kristen, dan sebagainya.[10] Menurut Comite tersebut, kerjasama dengan Pemeritah Indonesia akan berarti membenarkan kejahatan, dan Indonesia juga disebut tidak akan bertanggung jawab atas dasar moral.[11]

Pendapat dan tuduhan golongan kiri Belanda itu, juga dibantah oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mr. Hugo Scheltema. Mr. Hugo yang pada bulan Maret-April 1969, selama sebulan berada di negerinya untuk menjadi penasehat delegasi Pemerintahan Nederland pada Konferensi ke-6 IGGI di Scheveningen, dalam suatu wawancara dengan harian pagi *Rottterdam Algemeen Dagblad* menjelaskan, bahwa di Indonesia terdapat kebebasan pers dan setiap orang bebas mengkritik pemerintah dan pemerintah itu sendiri suka mendengarkan kritik (luistert graag naar kritiek). Mr. Hugo sangat menyesalkan sikap sementara orang di negerinya, yang sering menyebutkan pemerintahaan Soeharto sebagai pemerintahan militer, karena dalam kabinet Indonesia kaum militer merupakan minoritas. Sementara mengenai pembangunan di Indonesia, Scheltema menjelaskan bahwa Presiden Soeharto menyerahkan pembangunan ekonominya kepada intelektual

10. Disjarah TNI AD, *op.cit.*, hal.371
11. *Ibid*

(teknokrat) sipil. Karena itu "kita tidak patut dan tidak dapat menamai diktatur militer". "Apapun yang dilakukan Pemerintah Soeharto, maksudnya adalah untuk memperbaiki keadaan umum. Itulah keyakinan saya dan saya melihat setiap hari tindakan-tindakan konkrit diambil untuk maksud tersebut".[12]

Begitu juga mengenai tuduhan pembunuhan kaum komunis di Indonesia, Duta Besar H. Scheltema menjelaskan bahwa tidak pada tempatnya untuk menyatakan Pemerintah Soeharto bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan kaum komunis dan pengikut- pengikutnya. Selain hal itu terjadi untuk menggagalkan G30S/PKI, juga Indonesia ketika itu masih berada dibawah pimpinan Presiden Sukarno.[13] Atau dengan kata lain peristiwa itu semua terjadi ketika Sukarno masih resmi menjabat Presiden RI dan ia tidak bersedia untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Jenderal Soeharto, dan juga tidak bersedia bertindak terhadap kaum komunis. Hal itu dijelaskan untuk menanggapi tuduhan Prof. Dr. W.F. Wertheim dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa para Jenderal telah membunuh kurang lebih 400.000 orang. Tuduhan itu menurut Duta Besar Scheltema, kurang mengandung kebenaran.

Jika sekelompok kecil kiri Belanda memandang perkembangan politik di Indonesia negatif, maka tidak demikian halnya pandangan resmi pemerintah dan sebagian terbesar masyarakat Belanda. Mereka berpendapat perkembangan politik di Indonesia sangat positif sifatnya. Sikap positif itu bukan saja karena Indonesia berhasil menumpas G30S/PKI yang berbuat kontra revolusi, tetapi juga karena dianggapnya berhasil membebaskan diri dari dominasi pengaruh PKI dan kekuatan- kekuatan yang membuat Indonesia menjalankan politik otoriter di dalam negeri, dan politik isolasi di luar negeri serta politik ekonomi-keuangan yang tidak memperbaiki nasib rakyat. Bahkan mereka kagum

12. *Mingguan Cha*, Minggu ke-4 April 1969
13. *Ibid*

melihat kesadaran dan kemampuan bangsa Indonesia untuk menyelesaikan masalahnya tanpa campur tangan asing.

Begitu juga pernyataan-pernyataan politik Soeharto, Adam Malik dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang disertai langkah-langkah konkret. Meskipun dalam situasi dan kondisi yang kurang mendukung kebijaksanaan mereka, diterima sebagai pertanda adanya tekad sungguh- sungguh untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Konsekuensi dari penilaian itu mengakibatkan kesedian Pemerintah Nederland untuk memberikan bantuan ekonomi yang dibutuhkan Pemerintah Indonesia dalam rangka memperbaiki ekonomi rakyatnya. Sebab untuk memperbaiki ekonomi rakyat yang dikacaukan oleh politik ambisi pribadi, korupsi, dan mismanagement, dalam jangka pendek perlu dibantu.

Dalam rangka merundingkan bantuan ekonomi itu, pada tanggal 18 April 1959 dilangsungkan Indonesie Dag (Hari Indonesia) bertempat di Congress gebouw di Den Haag. Indonesie Dag adalah suatu pertemuan antara Nederland dan Indonesia yang diselenggarakan oleh Centraal Kamer Handelsbevordering, de Raad van Nederland Betrekkingen met Buitenland. Dalam pertemuan itu, Pemerintah RI diwakili oleh Menteri Ekuin Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Menteri Keuangan Drs. Frans Seda. Pada waktu pertemuan berlangsung, sekelompok kecil mahasiswa kiri Belanda mengadakan aksi unjuk rasa (demonstrasi) anti Indonesie Dag, dengan menyebarkan surat terbuka Comite Indonesie. Mereka berusaha mengggagalkan pertemuan itu. Untuk mengatasi demonstrasi beberapa orang polisi Belanda dikerahkan untuk mengeluarkan mereka dari gedung. Sementara Perserikatan Umum Pemuda Belanda *(Algemeen Nederlands Jeugd Verbond – ANJV)*, juga melancarkan reaksi yang sama kerasnya terhadap Indonesie Dag. Melalui surat yang dikirim kepada Parlemen Belanda (Tweede Kamer) Dan Pemerintah Belanda, ANJV mengecam keras kehadiran para "wakil rejim jenderal" (baca Pemerintah Republik Indonesia) dalam pertemuan yang diselenggarakan di Den Haag.[14]

14. Disjarah TNI AD, *op.cit.*, hal.317

Perlu diketahui, demonstrasi mahasiswa itu sebelumnya telah didahului oleh peristiwa (heboh) Di aula Universitas Katholik di Nijmegen. Dapat dipastikan demonstrasi mahasiswa itu merupakan kelanjutan dari peristiwa (heboh) tersebut. Peristiwa itu terjadi ketika Universitas Katholik itu merayakan Lustrumnya, dengan menyelenggarakan acara bertema "Universitas Dan Kerjasama Dalam Pembangunan". Pimpinan Universitas mengundang Menteri Keuangan RI Frans Seda dan mendapat kehormatan untuk berpidato tentang bantuan bagi pembangunan negara-negara yang sedang berkembang. Namun sebelum Frans Seda menyampaikan pidatonya, seorang mahasiswa kiri Belanda Y. Van Herte menuntut suatu keterangan. Demikian pula para mahasiswa lainnya, meminta penjelasan kepada Menteri pertanggungan jawab atas kenyataan, yang mereka namakan "pembunuhan kurang lebih 400.000 orang anggota PKI " selama Oktober 1965.

Drs. Frans Seda menyatakan kesediaannya mengadakan diskusi untuk memenuhi tuntuan para mahasiswa, dengan syarat ia akan menyampaikan pidatonya terlebih dahulu. Para mahasiswa tidak bisa menerima syarat yang diajukannya, bahkan mereka makin tidak terkendali, mereka juga menuntut diputuskannya hubungan dengan Universitas Indonesia. Akibatnya kegaduhan dan keributan tidak dapat dihindari lagi. Dalam suasana dan situasi demikian, Menteri Frans Seda diteriaki dan dicemoohkan oleh kurang lebih 300 mahasiswa kiri Belanda dengan kata-kata yang kasar : "moordenaar, moordenaar!". (pembunuh, pembunuh). Tidak itu saja, Drs. Frans Seda juga dihalangi untuk memberikan ceramahnya, selain diteriaki "pembunuh", Frans Seda juga diejek dengan menyebutnya sebagai "pengecut" ("lafaard"). Dalam situasi demikian Frans Seda tersenyum sambil berlalu meninggalkan Aula Universitas lewat pintu belakang. Ia kemudian disambut oleh Prof. Duynstee dengan tangan gemetar, yang nampaknya sangat menyesalkan sikap para mahasiswanya itu.

Akibat ulah kelompok mahasiswa kiri Belanda, sidang terpaksa diskors dan dilanjutkan sore harinya. Begitu juga mengenai materi

pembicaraan telah berubah. Pembicaraan mengenai problematik kerjasama dihapus dan diganti suatu rapat seksi. Dalam pembicaraan itu , Comite Indonesie diwakili oleh Prof. Dr. W.F. Wertheim, Dr. J.M. Pluvier, dan H.J. de Graaf. Wakil-wakil Comite Indonesie diberi kesempatan luas untuk mengucapkan dan meyampaikan tuduhan-tuduhan terhadap Pemerintah RI di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Mereka mengambil keputusan untuk berusaha menghentikan dengan segera setiap kerjasama ekonomi antara Pemerintah Nederland dengan Pemerintah Indonesia.

Rektor Universitas Nijmegen Prof. Mr. S.P.L. Baron Van Wijnbergen menyebut peristiwa dan tindakan para mahasiswa itu sebagai suatu tindakan "facistis", dan Prof. Duynstee menyatakan bahwa huru- hara itu telah dipersiapkan dengan baik dan rapi.[15] Sementara itu Dewan Kurator dan Senat Universitas Katholik itu menerangkan bahwa resolusi kongres tersebut sama sekali tidak mencerminkan pendapat Universitas. Begitu juga Prof. Wertheim, seorang penentang paling sengit terhadap Pemerintah Presiden Soeharto, yang juga pimpinan golongan kiri Nederland menyangkal telah menghasut para mahasiswa Nijmegen untuk melancarkan aksi unjuk rasa terhadap Menteri Frans Seda. Tetapi yang jelas Prof. Wertheim itu telah menolak untuk duduk bersama Frans Seda dalam sebuah seminar.

Prof. Dr. W.F. Wertheim, adalah seorang guru besar pakar sosiologi Asia pada Gemeente Universiteit Amsterdams dan pimpinan Het Comite Indonesie yang anti Presiden Soeharto. Dalam suatu wawancara dengan Bibeb dari majalah *Vrij Nederland*, Wertheim menyatakan keyakinannya bahwa satu-satunya jalan bagi negara-negara Asia untuk maju ke depan adalah melalui sesuatu yang mirip sekali dengan Komunisme.[16] Meskipun Wertheim sendiri menolak digolongkan sebagai seorang komunis, dengan alasan seorang komunis adalah orang yang terorganisasi, namun pemikiran dan tindak tanduknya dengan nyata telah mencerminkannya. Hal

15. Disjarah TNI AD, *op.cit.*, hal.372
16. Disjarah TNI AD, *op.cit.*, hal.373

itu terlihat tidak saja pemikiran, tetapi juga dari anjuran-anjurannya yang mengharapkan bangsa-bangsa Asia termasuk Indonesia agar mengikuti ideologi Marxis.[17]

Berbeda dengan Pemerintah Nederland yang menaruh kepercayaan dan kesediaannya membantu memperbaiki ekonomi Indonesia, Prof. Wertheim dan kawan-kawan yang bergabung dalam organisasi kiri Het Comite Indonesie, tidak menyetujui bantuan ekonomi diberikan kepada Pemerintah Indonesia. Wertheim mengatakan tidak sependapat sama sekali, kalau Presiden Soeharto akan berhasil menstabilkan keadaan ekonomi Indonesia. Politik stabilisasi harga beras di Indonesia, menurutnya justru akan membawa bahaya bagi produksi pangan Indonesia. Menurut Wertheim, harga beras yang stabil pada tingkat harga rendah akan menyebabkan banyak petani produsen beras beralih menjadi produsen tanaman-tanaman dagang, sehingga akan terjadi kemerosotan beras dalam tahun 1969.[18] Pendapat Wertheim ternyata tidak mengandung kebenaran, karena selain produksi beras terus meningkat dengan harga yang terjangkau oleh rakyat, keadaan ekonomi Indonesia juga semakin mantap dan stabilisasi harga-harga dapat dipertahankan.

Menjelang Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) di Irian Barat (Irian Jaya), pada tahun 1969, sisa-sisa PKI golongan kiri di Nederland meningkatkan ofensif gerilya politiknya. Sisa-sisa PKI dan kelompok Het Comite Indonesie yang anti Indonesia mempergunakan kesempatan itu untuk mempersulit posisi Indonesia dalam segala hal di luar negeri. Untuk melancarkan gerpolnya, Het Comite Indonesie yang dipimpin oleh Prof.Dr. W.F. Wertheim menerbitkan majalah *Vietnam Buletin-Indonesie Informatie.*[19] Isi buletin itu hampir sama dengan siaran-siaran gerpol G30S/PKI Peking dan negara-negara blok Timur lainnya, yang secara terang-terangan bertujuan politik anti Indonesia. Dalam setiap penerbitannya Het Comite Indonesie menyatakan bahwa

17. Disjarah TNI AD, *op.cit.*,
18. *Suara Pers dan Radio Luar Negeri*, No.13669/SPR/Senin, 25 Agustus 1969 dari TV Hilversum II (Belanda), Minggu, 6 Agustus 1969
19. *Mingguan Cbas*, Minggu ke-3 Juni 1969

organisasinya bertujuan *membantu musuh-musuh Orba dan menentang atau menghambat bantuan ekonomi dan politik terhadap Pemerintah Indonesia yang sekarang* (baca Orde Baru).

Prof. Dr. W.F. Wertheim sebagai seorang pakar sosiologi Asia berhasil mengelabui banyak wartawan luar negeri, sehingga mereka dengan tidak menyadari telah ikut membantu menyiarkan gerpol-gerpol yang telah dirancang oleh Het Comite Indonesie. Gerpol-gerpol yang mereka isukan dan ekspos secara aktif adalah mengenai tapol-tapol (tahanan politik) dan keadaan umum Indonesia yang hanya dikutip dari pers Indonesia yang anti Orde Baru, seperti *El Bahar* dan *Suluh Marhaen.*

Dalam suatu siaran bersama di TV Nederland, Prof. J. Verkuyl, Prof. H.J. De Graaf, dan Domine de Grand, Wertheim menyatakan bahwa tidak ada kerjasama dengan suatu rezim yang membiarkan adanya 80.000 sampai 100.000 orang tahanan politik, dan teror keluarbiasaan yang dilakukan oleh "rode barctten" (baret merah pasukan RPKAD) di bulan November 1965. Begitu juga Prof. H.J. de Graaf, pada kesempatan itu menuduh Pemerintah Orde Baru dengan tuduhan melakukan pembunuhan-pembunuhan menyeramkan, yang mengakibatkan sekitar 300.000 sampai dengan 400.000 orang telah kehilangan nyawanya dalam gerakan pembersihan tersebut.

Organisasi-organisasi di Nederland yang sering menggugat mangenai masalah tapol (tahanan politik), pada umumnya adalah organisasi-organisasi kiri, meskipun ada di antaranya yang berdalih Hak Azasi Manusia. Melalui buletin-buletin yang diterbitkan, gerpol itu mendengung-dengungkan bahwa Tapol seperti di Rumah tahanan Chusus Salemba , Bukitduri, dan Tangerang hanya mendapat "delapan sendok nasi" setiap makan, dengan biaya Rp. 2,50.-(dua rupiah limapuluh sen) sehari. Selain itu dinyatakan pula, bahwa Tapol-tapol itu mengalami penganiayaan, sedangkan wanita-wanita Tapol mengalami pelecehan sexual.[20] Organisasi-organisasi gerpol itu menyiarkan seolah-olah RTC (Rumah Tahanan Chusus) tersebut

20. *Mingguan Chas*, Minggu ke-3 Juni 1969

adalah "kamp-kamp konsentrasi" di mana anggota-anggota PKI diperlakukan "di luar perikemanusian".[21]

Keadaan Tapol-tapol itu ternyata jauh lebih baik dari yang digambarkan oleh gerpol-gerpol dan beberapa surat kabar di luar negeri. Kenyataan menunjukkan, Tapol-tapol itu diperlakukan cukup baik, sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Indonesia. Meskipun makanan yang diterima para tapol tidak dapat dikatakan mewah, jumlahnya boleh dikatakan lumayan. Biaya sehari untuk mereka adalah Rp. 25,00.- per orang. Bila di bandingkan jumlah itu dengan lauk-pauk seorang prajurit ABRI yakni Rp. 30,00.- sehari perorang, maka jumlah tersebut tidak jauh berbeda dari mereka.[22]

Di tengah hangatnya gerpol kiri Belanda menggugat soal Tapol di Indonesia (1969), dengan alasan membela hak-hak azasi manusia, pers Nederland dan pers beberapa negara lainnya menghebohkan kejahatan perang Belanda pada waktu revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1950.[23] Baik pers Nederland, maupun pers terkemuka Inggris dan Amerika Serikat menyediakan halaman-halaman depannya untuk mengupas soal kejahatan perang Belanda itu. Pemberitaan tersebut menjadi santer, karena Perdana Menteri Belanda De Jong akan menyampaikan sebuah laporan yang akan diperdebatkan di depan Parlemen Belanda. Masyarakat Belanda umumnya kaget, karena ternyata tentara-tentara mereka "tidak lebih baik" dari tentara Jerman pada waktu perang dunia II. Cara-cara yang penuh kekejaman dimuat dalam laporan Perdana Menteri De Jong. Laporan itu disusun atas permintaan Parlemen, setelah persoalan tersebut disiarkan oleh televisi. Siaran televisi itu menuduh bahwa pasukan-pasukan Belanda melakukan kejahatan perang di Indonesia antara tahun 1945 – 1950. Meskipun reaksi umum terhadap persoalan itu hangat, tetapi golongan-golongan kiri Belanda dan Het Comite Indonesie diam seribu bahasa. Mereka tetap mencoba meributkan persoalan Tapol G30S/PKI dan Pepera

21. *Ibid*
22. *Ibid*
23. *Mingguan Cbat*, Minggu ke-4 April 1969

Irian Barat. Dengan demikian jelas sekali bahwa Het Comite Indonesie dan golongan kiri Belanda itu sebenarnya tidak berniat "membela hak-hak azasi manusia" sebagaimana mereka dengung-dengungkan.

Sementara itu, Prof. Ernest Utrecht, seorang pakar hukum Internasional keturunan Indo bekas KNIL yang WNI, adalah tokoh HSI yang pernah menjadi Rektor Universitas Tawangalun Jember. Dialah yang berusaha membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Universitas Negeri Jember tahun 1964. Setelah Kudeta G30S/PKI gagal ia melarikan diri ke Australia. Dalam pelbagai ceramahnya di Australia, ia menjelek-jelekkan Indonesia. Setelah berada di Nederland ia menjadi tokoh anti Republik Indonesia. Ia kemudian menggabungkan diri dengan grup Wertheim dan bersama-sama mahasiswa Komunis Indonesia dari negara-negara Eropa Timur giat melakukan gerpol anti Republik Indonesia. Gerpol itu disampaikan melalui ceramah-ceramah, pidato- pidato dan tulisan-tulisan yang dimuat dalam koran kiri Belanda, seperti *Vrij Nederland*, Het Parpol. Melihat kegiatannya yang kelewat batas itu, KBRI dalam hal ini Atase Pers Juzahar Sirie tidak tinggal diam, Ia menyanggah segala ocehan Utrecht melalui surat kabar *De Trouw*.

Meskipun gerpol sisa-sisa PKI dan simpatisannya tidak henti-hentinya menjelek-jelekkan Indonesia, ternyata Pemerintah dan Rakyat Belanda tetap menaruh perhatian besar terhadap Indonesia. Perhatian yang positif itu makin bertambah baik dalam bentuk kerjasama dan saling pengertian dalam segala tingkat.

Pangeran Bernhard turut membuat hubungan baik itu bertambah erat melalui laporan-laporan dan kesan-kesan yang didapatnya selama berkunjung ke Indonesia. Tampaknya grup Prof. Wertheim berusaha untuk merenggangkan hubungan Indonesia-Belanda yang sedang baik itu.

Untuk mengenal Indonesia lebih dekat, pada tanggal 17 April 1970 di Aula Universitas Katholik di Nijmegen telah diadakan diskusi *Indonesia Informatie Avond (Malam Informasi Tentang*

Indonesia) yang diselenggarakan oleh beberapa kelompok studi tentang Indonesia, seperti *Nesbic Politeia, SJ, dan KEN.*[24] Pembicara utama dalam diskusi itu adalah Prof. Dr. Utrecht dan bertindak sebagai pendebat adalah Drs. Frans Kho Mariakasih. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang dikoordinasikan oleh PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) hadir dan ikut serta dalam perdebatan itu. Malam diskusi itu hanya dihadiri sekitar 120-150 orang, yang sebagian besar adalah pemuda dan mahasiswa. Lebih dari separuh yag hadir bukan orang Belanda. Kebanyakan yang hadir adalah pengikut Utrecht dan Wertheim yang terdiri atas mahasiswa- mahasiswa Belanda, Suriname, Nederland; Antilien, dan Belanda Indo. Kelompok studi telah menetapkan tiga pokok bahasan yang akan diperdebatkan dalam diskusi, yaitu :

a. Bantuan untuk pembangunan bagi Indonesia oleh negara-negara kreditor sehubungan dengan diadakannya Konfrensi IGGI di Rottterdam pada tanggal 20 April 1970.
b. Dapatkah Pemerintah Indonesia memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya ?
c. Kedudukan Indonesia di Asia Tenggara.[25]

Prof. Utrecht yang menjadi pembicara pertama, dengan nada tinggi menghantam Pemerintah Indonesia dengan menitik beratkan serangan-serangannya pada segi-segi ekonomi. Dalam serangan-serangannya itu, Utrecht mengatakan bahwa Inflasi merajalela di Indonesia dan produksi beras turun. Sedangkan mengenai "Repelita" dikatakannya "omong kosong" (Repelita isonzin). Begitu juga mengenai bantuan ekonomi luar negeri, oleh Utrecht dikemukakan bahwa bantuan ekonomi untuk pembangunan adalah sama dengan imperialisme ekonomi. Utrecht mengakhiri serangannya dengan menuduh Pemerintah Republik Indonesia telah masuk blok kapitalis Barat.

Serangan-serangan Utrecht terhadap Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat diterima oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia.

---

24. *Mingguan Chas*, Minggu ke-5 Juli 1970
25. *Ibid*

Drs. Frans Kho Mariakasih yang bertindak sebagia pendebat, menyangkal serangan-serangan itu dengan mengemukakan fakta-fakta kongkret, laporan-laporan penyelidikan dan penelitian yang obyektif, yang dengan jelas memberikan bukti-bukti, angka-angka dan kenyataan-kenyataan tentang kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Pemerintah Indonesia.[26] Mengenai bantuan ekonomi, Frans Kho mengemukakan bantuan ekonomi adalah perlu bagi negara-negara yang sekarang sedang berkembang, apalagi Indonesia yang telah mengalami kehancuran ekonomi pada masa pemerintahan yang lalu. Dalam menanggapi struktur politik dan Pemerintahan di Indonesia, Frans kho menegaskan, bahwa Pemerintah Indonesia telah bertekad akan melaksanakan Pemilu dalam tahun 1971. Sementara mengenai Inflasi, Drs. Frans menjelaskan, bahwa tidak ada Inflasi seperti yang dikenal di Indonesia, dalam masa pemerintahan yang lalu. Laju Inflasi dua tahun terakhir adalah yang paling rendah. Produksi beras cukup, bahkan meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa pencapaian yang menggembirakan juga terjadi dibidang-bidang sosial, kesejahteraan, perdagangan, keamanan, kemerdekaan pers, dan politk. Diskusi diakhiri tanya jawab, yang disertai perdebatan-perdebatan seru antara Utrecht dan kawan-kawan dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Demikan hangatnya perdebatan dan suasana diskusi itu, sehingga terjadi insiden kecil, karena pengikut Utrecht mencoba mengambil tape recoder milik seorang mahasiswa, Teuku Rusli.

Pada esok harinya tanggal 18 April 1970, pengikut-pengikut Utrecht dan Wertheim mengadakan demonstrasi dengan tema, antara lain : Melawan Imperialisme di Asia Tenggara", "Demi Gerakan-gerakan Pembebasan di Asia Tenggara" dan "Melawan Agresi Amerika Serikat". Peserta demonstrasi hampir sama jumlahnya dengan peserta diskusi, karena pesertanya itu-itu juga. Demonstrasi berlangsung di suatu tempat di Nijmegen dan pada itu tampil tiga orang pembicara, yaitu Drs. Arthur Ten Berger (dari

26. *Ibid*

Institut Politik Universitas Groningen), Marcel Kross (mahasiswa di Nijmegen asal Suriname), dan Prof. Dr. W.F. Wertheim (guru besar Sosiologi Universitas Amsterdam).[27] Demonstrasi yang tidak diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia, memulai aksinya pada pukul 15.00 waktu setempat. Mereka membawa spanduk-spanduk yang ditujukan untuk Indonesia, yang berbunyi "Bantuan Pembangunan Indonesia Kembali lagi jadi Jajahan", "80.000 Tahanan tanpa Proses". Karena sedikitnya peminat dan perhatian terhadap kegiatan mereka, rombongan demonstrasi memperalat anak-anak di bawah umur untuk membawa spanduk-spanduk. Begitu juga dari tiga orang yang telah direncanakan akan berbicara, hanya Arthur Ten Berger saja yang tampil. Ia diberi kesempatan 45 menit berbicara mengupas soal Asia Tenggara, namun dari waktu 45 menit yang disediakan, hanya 30 menit digunakannya untuk berkampanye menjelek-jelekan Indonesia. Perlu diketahui pada waktu Ten Berger sedang berbicara di depan para demonstran, dua orang mahasiswa Indonesia menyebarkan pamflet- pamflet yang berisi argumentasi yang menentang pidato Arthur Ten Berger.

Di samping mengadakan pidato dan ceramah kampanye anti Indonesia, yang berbahaya adalah tulisan Utrecht dalam harian *Liberal Aglemeen Handelsblad* pada tanggal 27 Juni 1970, yang dengan sengaja memutar balikan urut-urutan Pancasila. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikannya menjadi Sila Kelima, sehingga bagi Utrecht, Pancasila itu urut-urutanya adalah : (1) Nasionalisme, (2) Internasionalisme, (3) Demokrasi, (4) Keadilan Sosial, dan barulah (5) Ketuhanan Yang Maha Esa,[28] urutan Pancasila yang diakui PKI. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Nederland telah mengambil inisiatif serta aktif mengadakan perlawanan terhadap aksi-aksi anti Indonesia yang disponsori oleh Utrecht dan Wertheim serta pengikut-pengikutnya. Namun, cara-cara yang ditempuh adalah sopan dan menurut ketentuan-ketentuan serta sesuai dengan forum perjuangan.

---

27. *Ibid*
28. *Ibid*

Menjelang kunjungan Presiden Soeharto ke Nederland pada awal September 1970, Wertheim serta pengikut-pengikutnya meningkatkan segala kegiatannya. Mereka berusaha menggagalkan kunjungan itu agar hubungan Indonesia-Nederland yang sedang baik menjasi renggang. Untuk mecapai tujuan tersebut mereka meningkatkan fitnah dan ocehan yang menjelek-jelekkan nama Indonesia.

Beberapa hari menjelang kedatangan Presiden Soeharto di "Negeri Bunga Tulip" itu, aksi gertak sambal atau gerpol kaum komunis Belanda meningkat. Sekelompok anggota sayap kiri Perlemen Belanda merencanakan "Aksi Parlemen", jika Presiden Soeharto dalam kunjungan itu mengucapkan pidato di depan Parlemen Belanda.[29] Sementara itu sejumlah kecil pemuda kiri Belanda, mulai melakukan kampanye anti RI dengan menyebarkan pamflet-pamflet. Selain itu, mereka juga membentuk *Comite Soeharto Ongewenst (Komite Anti Soeharto)* yang berusaha mencegah Presiden Soeharto mengunjungi Nederland.[30] Menaggapi aksi-aksi yang direncanakan kaum kiri Belanda itu, Menteri Luar Negeri Adam Malik mengatakan, bahwa Indonesia bukanlah anak kecil untuk digertak dengan cara-cara tersebut.

Dengan meningkatkan aksi aksi kaum kiri di Nederland, Surat kabar Belanda *De Telegraaf* dalam suatu tajuknya menulis, bahwa Komite Anti Soeharto yang berusaha mencegah Presiden RI mengunjungi Nederland, hampir seluruhnya terdiri atas orang-orang yang ultra kiri. Mereka secara terbuka atau diam-diam menyokong komunisme dan menentang Amerika Serikat. Karena itu bukan suatu kebetulan kalau mereka tidak pernah kedengaran memprotes terhadap rejim-rejim ditaktorial di Rusia dan Jerman Timur, yang juga mempunyai tahanan-tahanan politik dalam jumlah besar.[31] Mereka hanya aktif memprotes keadaan buruh di negara-negara yang tidak termasuk blok komunis. Ini menandakan bahwa yang

29. *Berita Yudha*, 11 Agustus 1970
30. *Ibid.*, 20 Agustus 1970
31. *Ibid*

menyebabkan mereka turun kejalan bukanlah karena membela Hak Azasi Manusia, melainkan karena sebab-sebab politis.

Ditengah meningkatnya aksi aksi gerilya politik (gerpol), sisa-sisa PKI dan simpatisannya itu, Presiden Soeharto mengadakan kunjungan resminya. Pada tanggal 4 september 1970, Presiden Soeharto beserta Nyonya Tien Soeharto dan rombongan tiba di Nederland. Kedatangannya disambut oleh Ratu Juliana bersama Pangeran Bernhard dengan suatu upacara kenegaraan. Pemerintah dan rakyat Belanda sangat menaruh perhatian besar terhadap perkembangan di Indonesia. Mereka mendukung program pembangunan Indonesia dan melanjutkan bantuan-bantuan kreditnya. Pada saat itu sebagai ketua IGGI, Pemerintah Belanda selalu mempelopori pemberian bantuan di kalangan negara-negara kreditor IGGI, dengan sikap penuh pengertian terhadap masalah-masalah yang di hadapi Indonesia.

Sebaliknya sisa-sisa PKI dan kaum kiri Belanda simpatisannya, tidak menginginkan kedatangan Presiden Soeharto di negeri itu. Karena kedatangan Presiden Soeharto dan rombongannya dikecam dan dikritik keras dengan "bernada marah" oleh sisa-sisa PKI dan simpatisannya. Meskipun harus diakui bahwa sisa-sisa PKI dan golongan kiri/komunis di Nederland sangat kecil dan tidak berpengaruh baik terhadap Indonesia maupun terhadap hubunngan Indonesia-Belanda, tetapi kita harus waspada. Karena itu Indonesia tidak dapat mengnggap enteng terhadap sisa-sisa PKI di Nederland dan di negara-negara lainnya. Karena bagaimanapun juga, sisa-sisa PKI itu tetap berbahaya di masa mendatang. Sisa-sisa PKI itu adalah bibit-bibit PKI untuk masa depan. Selain itu pengalaman sejarah Indonesia juga membuktikan bahwa masuknya idelogi Marxis ke Indonesia adalah dari Nederland yang dilakukan oleh seorang yang berkebangsaan Belanda.

Sementara itu masalah Tapol G30S/PKI yang sudah lama terlupakan dan tidak dipersoalkan lagi, pada tahun 1981 secara tiba-tiba muncul dan menghangat kembali, setelah sisa-sisa PKI dan simpatisannya di Nederland menghebohkannya. Meskipun berbeda

dengan gerpol mereka sebelumnya, sekali ini yang menjadi fokus sorotannya adalah mengenai dilarang beredarnya dua buah novel karya Pramoedya Ananta Toer, yang naskahnya ditulis ketika ia menjadi tapol di Pulau Buru. Selama menjadi tapol di Pulau Buru, Pramoedya memang tidak pernah dilarang oleh pemerintah untuk menulis karya-karyanya. Kedua novelnya itu diterbitkan pada tahun 1979, setelah Pramoedya dibebaskan sebagai tapol, masing-masing diberi judul Bumi manusia dan Anak semua Bangsa. Setelah sempat beredar beberapa lama, pada bulan Mei 1981 kedua novel itu oleh Jaksa Agung Ismail Saleh SH dilarang beredar di Indonesia.[32] Sebanyak 10.000 copy novel yang belum terjual di perintahkan untuk disita dan dibakar.[33]

Kejaksaan Agung melarang kedua novel itu beredar di Indonesia, bukan karena penulisnya kebetulan seorang mantan Tapol, melainkan semata-mata karena isinya yang dinilai bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia dan TAP MPRS mengenai komunisme. Keputusan Jaksa Agung itu di tentang keras oleh sejumlah pendukung-pendukung Pramoedya di Nederland, yang juga simpatisan PKI. Di antara pendukungnya itu terdapat seorang mantan Tapol Pulau Buru yaitu Carmel Budiardjo yang setelah dibebaskan sebagai Tapol tinggal di Inggris. Di sana ia mensponsori terbitnya buletin yang berjudul TAPOL yang isinya mendiskreditkan Pemerintah Republik Indonesia. Ia dan kelompoknya menuntut Pemerintah Indonesia agar segera mencabut larangan beredarnya kedua novel tersebut.[34] Selain itu mereka juga menuduh Pemerintah Indonesia, bahwa dalam banyak hal tetap melakukan tindakan diskriminatif terhadap mantan Tapol, termasuk kebebasan menulis. Namun Pemerintah Indonesia tidak berniat mencabut larangan itu, karena tidak ingin mempertaruhkan stabilitas politik dan keamanan yang sudah dicapai menjadi rusak, hanya demi kedua novel Pramoedya Ananta Toer tersebut.

---

32. *Asia Week*, 6 November 1981, hal.21
33. *Ibid.*, 20 *A*
34. *The Guardian*, 1 November 1981

4. Kegiatan Sisa-sisa PKI dan Simpatisannya di beberapa Negara

Kegiatan sisa-sisa PKI dan simpatiasnnya yang sangat mencolok dijumpai di bebrapa negara, seperti di RRC, Uni Sovyet, dan Nederland. Namun hal itu tidak berarti, bahwa di negara-negara lain tidak terdapat kegiatan sisa-sisa PKI dan simpatisannya. Setelah beberapa waktu kehancurannya G30S/PKI itu, sisa-sisa PKI dan partai komunis di beberapan negara lebih banyak bersikap diam. Sambil mereka masing-masing menentukan kiblatnya ke RRC atau Uni Sovyet. Akan tetapi begitu RRC membuka suara dan bersikap membantu sisa-sisa PKI, Uni Sovyet kemudian mengikuti langkah dan sikap yang telah diambil oleh RRC. Uni Sovyet dan RRC tampaknya bersaing dalam usaha menanamkan pengaruhnya terhadap sisa-sisa PKI. Hal itu terbukti pada waktu terjadinya G30S/PKI tahun 1965, dari 120 orang mahasiswa/Traine Comunis dan IKM (Ikatan Keluarga Marhaen) di Uni Sovyet, 80 orang diantaranya menyeberang ke RRC dan mengadakan kegiatan-kegiatan di Beijing (Peking).

Demikian pula mahasiswa-mahasiswa Komunis Indonesia di Eropa Timur, aksi-aksinya meningkat sekali. Kegiatan gerilya politik yang mereka lakukan, adalah menerbitkan dan mengedarkan buletin, stensilan, koran, dan majalah yang memuat propaganda komunis yang disusun dan diterbitkan di Peking, Moskow, Praha, Havana, dan Tirana. Melalui buletin, koran, majalah khusus itu, mereka tidak hanya menyebarkan propaganda dan ajaran komunis tetapi juga mendiskreditkan Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Soeharto.

Sejalan dengan gerpol sisa-sisa PKI, itu golongan PNI-ASU di luar negeri yang menamakan diri sebagai Perwakilan Front Marhaenis, juga menerbitkan sebuah buletin stensilan berjudul "Marhaen Menang". Tulisan-tulisan dalam buletin itu berisida anti-RI dengan mengemukakan garis strategi komunis, serta menonjolkan semboyan-semboyan dan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Karena itu, dalam siaran-siaran gerpol "Marhaen

Menang",[35] senantiasa menyambut dan mengutip tulisan-tulisan yang berisikan sorotan-sorotan dan kritikan-kritikan destruktif pemerintahan RI dan juga tulisan-tulisan yang menyanjung Pemimpin Besar Revolusi Sukarno dan membela ajaran Revolusinya. Beberapa suratkabar terbitan Jakarta, yang menurut "Marhaen Menang" adalah kawan-kawan sejiwa dan seperjuangan mereka yang setia kepada ajaran- ajaran Pemimpin Besar Revolusi Sukarno, antara lain "Dwiwarna", "Srikandi", "El-Bahar", dan "Warta Harian".

Sampai pertengahan tahun 1967, buletin-buletin yang diterbitkan oleh gerpol sisa-sisa PKI dan gerpol PNI-ASU, banyak yang beredar di Indonesia. Beberapa di antaranya dapat disebutkan seperti buletin "API", yang berisi ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme (Komunisme) dan mendiskreditkan pemerintahan Orde Baru di bawah pemimpin Pejabat Presiden Soeharto. Buletin "Marhaen Menang" yang diterbitkan di Moskow, berisi ajaran Pemimpin Besar Revolusi Sukarno dan tulisan-tulisan yang bernada anti-RI (baca Orba). Kedua buletin itu oleh Kopkamtib dan Kejaksaan Agung telah dilarang beredar di Indonesia sejak tanggal 6 Agustus 1967. Larangan itu dikeluarkan, selain karena kedua buletin itu membuat tulisan-tulisan yang bernada anti-RI, juga karena memuat ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme yang sudah dinyatakan sebagai ajaran terlarang di seluruh Indonesia. Buletin-buletin terbitan luar negeri terlarang lainnya yang dilarang beredar di Indonesia, antara lain "Indonesia Berjuang", "Suara Pemuda Indonesia", Indonesia Tribune", "Tekad Rakyat", dan "Tricontinental". Buletin-buletin itu dikirim kepada pejabat-pejabat KBRI di berbagai negara, sedang yang dikirim ke Indonesia pada umumnya pos kota Roma, Helsinki, atau kota-kota Eropa lainnya.

Dalam melancarkan kegiatan-kegiatan gerpolnya, sisa-sisa PKI mendapat bantuan moril tidak saja dari negara-negara komunis, tetapi juga dari golongan komunis yang berada di negara-negara non komunis. Di negara-negara yang berideologi komunis seperti

35. *Ibid*, Minggu ke-4, Desember 1970

di Cuba, pemerintahannya secara terang-terangan membantu kegiatan gerpol sisa-sisa PKI. Hal itu terlihat dengan jelas ketika berlangsungnya Konferensi Solidaritas Rakyat Asia-Afrika-Amerika Latin (Konferensi AAA) yang pertama di Havana. Pada konferensi AAA yang berlangsung di Ibukota Cuba pada bulan Januari1966 itu, Ketua Panitia Internasional Konferensi yang juga merangkap Ketua Panitia Nasional Konferensi AAA Cuba, menolak delegasi resmi Indonesia dalam KAAA. Sebaliknya mereka menerima delegasi palsu yang terdiri atas sisa-sisa PKI yang diketuai oleh Ibrahim Isa. Tindakan pemerintah Cuba itu sudah barang tentu menunjukkan sikap permusuhannya terhadap Indonesia, yang secara politis mendiskreditkan Indonesia di forum Internasional. Karena itu DPR-GR bereaksi keras dan mendesak Panitia Nasional Organisasi Setiakawan Rakyat Asia Afrika dan Organisasi Setiakawan Rakyat Asia Afrika-Amerika Latin, agar memprotes Panitia Persiapan Internasional Konferensi pertama solidaritas AAA, karena sudah terang-terangan memusuhi delegasi Indonesia,[36] yang berarti juga memusuhi Republik Indonesia.

Keberhasilan gerpol sisa-sisa PKI di Cuba tidak terlepas dari peranan yang dimainkan oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI di Havana, A.M. Hanafi (seorang anggota Dewan Harian Nasional Angkatan '45 yang komunis). Karena gerilya politik yang dimainkan oleh Hanafi, Pemerintah Cina setelah hancurnya PKI tahun 1965 secara terang-terangan memberikan dorongan moral dan fasilitas terhadap sisa-sisa komunis Indonesia. Sebagai solidaritas negara komunis, Cuba berusaha agar PKI yang sudah hancur itu dapat bangkit kembali di Indonesia. Namun aksi yang dilakukan oleh sisa-sisa PKI yang di bantu sepenuhnya oleh Pemerintah Cuba, tidak dapat bertahan lama dan menemui kegagalan. Duta Besar A.M. Hanafi kemudian dipanggil pulang oleh Kementerian Luar Negeri RI untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena beberapa kali tidak memenuhi panggilan Pemerintah, A.M. Hanafi akhirnya dibebaskan dari jabatannya sebagai Duta Besar

36. *Berita Yudha*, 14 Februari 1966

sejak 1 Juni 1966. Mantan Dubes itu kemudian meninggalkan Cuba untuk melanjutkan gerpolnya di RRC dan negara-negara Blok Timur lainnya.

Sebagaimana halnya di Cuba, kegiatan gerpol sisa-sisa PKI di Rumania juga tidak dapat dipisahkan dari peranan yang dimainkan oleh Sukrisno (mantan wartawan KBN "Antara" yang komunis). Ketika menjabat sebagai Duta Besar dan Berkuasa Penuh RI untuk Vietnam (RDV), Sukrisno selain membawa istri dan anak-anaknya, juga membawa beberapa Pemuda Rakyat, yang kemudian menjadi mahasiswa dan tenaga staf lokal. Mereka itu antara lain Sumardi, Widodo, Subardjo. Widodo yang diangkat menjadi staf lokal, selain ditugasi mengurus bidang penerangan, juga membina mahasiswa untuk kepentingan komunis.[37] Sebagai penasehat istimewa pribadi Dubes Sukrisno ditunjuk Subardjo, seorang tokoh Pemuda Rakyat dari Jakarta.[38]

Setelah kudeta G30S/PKI Sukrisno dipecat dari jabatannya sebagai Duta Besar RI sejak 1 Juni 1966,[39] setelah beberapa kali menolak panggilan Pemerintah RI dan terang-terangan mendukung G30S/PKI. Mantan Duta Besar itu kemudian meninggalkan Hanoi, dan melakukan gerpol terhadap RI di Rumania bersama kader-kader dan mahasiswa-mahasiswa komunis Indonesia, yang telah berhasil dibinanya. Karena itu ketika terjadi peristiwa G30S/PKI tahun 1965, masyarakat mahasiswa Indonesia yang berjumlah 42 orang yang tergabung dalam PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) Rumania terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok mahasiswa Pancasilais yang memihak Orde Baru bergabung dalam PPI Pancasilais dan jumlahnya hanya belasan orang (antara lain : Hudaja Nizam , Djaffar, dan Suhantoro). Kelompok yang memihak G30S/PKI terdiri atas mahasiswa-mahasiswa pendukung PNI-ASU. PPI Rumania dikuasai oleh kaum komunis, jumlahnya puluhan orang.

---

37. *Mingguan Chas*, Minggu ke-3 Maret 1971
38. *Ibid*
39. *Kompas*, 28 Juni 1966

Pada waktu G30S/PKI meletus tahun 1965, PPI Rumania diketuai oleh Subroto dan wakil ketuanya Wadja Mangaratua Simorangkir.[40] Karena sudah dikuasai oleh golongan mahasiswa komunis, PPI Rumania dengan tegas dan terbuka bersikap memihak dan selanjutnya akan membantu kegiatan-kegiatan sisa-sisa PKI di Rumania. PPI Rumania dalam rangka gerilya politiknya dibantu sepenuhnya oleh Pemerintah Rumania, organisasi pemuda dan mahasiswa Rumania. PPI Rumania menciptakan pertemuan "Solidaritas Mahasiswa Asia Afrika" di Bucharest pada tahun 1966. Sebuah "resolusi" yang dikeluarkan sudah dapat diduga isinya, yaitu mengutuk "Pemerintah Republik Indonseia" (baca Orde Baru) dibawah pimpinan Jenderal Socharto.[41]

Mahasiswa-mahasiswa komunis yang melakukan kegiatannya di Rumania dipimpin oleh satu kelompok, yang terdiri atas Subardjo, Widodo, dan Mintardjo. Kelompok ini mencaplok PPI Rumania yang kegiatan-kegiatan mereka itu berjalan seiring dengan kampanye yang dilancarkan oleh sisa-sisa PKI di luar negeri bersama dengan Gerakan Komunis Internasional, yakni kampanye anti Republik Indonesia (maksudnya Orde Baru). Kampanye anti Orde Baru juga dilakukan oleh *Het Comite Indonesie* di Nederland, SDS di Jerman Barat, Youth Againts War dan Fascism di Amerika Serikat, gerakan kaum *New Left* (kiri baru) di berbagai negara. Karena terlibat dalam gerakan PKI, maka Ketua dan Wakil Ketua PPI Rumania Subroto dan Wadja Mangaratua Simorangkir beserta para anggota lainnya seperti Wimpi Munandar, Joko Sulistijo, Syamsudin Arifin, Kartowo, dan Kartali sebagai mahasiswa beasiswa Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), tidak memenuhi panggilan KBRI di Bucharest pada waktu skrining diselenggarakan pada tahun 1966 terhadap semua warga negara RI yang berada di Rumania . Akibat perbuatan mereka yang memusuhi negara RI, mereka tidak berani muncul di KBRI. Pihak KBRI terpaksa mencabut paspor-paspor mereka, meskipun demikian mereka masih

40. *Ibid*
41. *Ibid*

bebas bergerak di Rumania, karena pemerintah negara itu berpihak kepada mereka.

Pelarian dan sisa-sisa PKI dan PNI-ASU serta Partindo terus berusaha mengadakan gerpol untuk menjelek-jelekan nama Indonesia. Selain itu mereka juga berusaha menggagalkan misi Presiden Soeharto yang akan mengadakan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara Eropa pada tahun 1969. Hal itu dapat dilihat dari penerbitan-penerbitan yang mereka siarkan, seperti "Marhaen Menang" yang diterbitkan Gerakan Pembela Ajaran Sukarno (Gepas) di Bucharest. Produk penerbitan itu mereka kirim kepada organisasi-organisasi dan orang-orang Indonsia di seluruh dunia. Namun penerbitan-penerbitan itu tidak mendapat pasaran, karena isinya berbeda dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di Indonesia.

Sementara itu Partai Komunis di Albania yang secara terang-terangan memberikan dorongan moril dan fasilitas kepada sisa-sisa PKI, secara terbuka menyerang Pemerintah Indonesia. Melalui Kantor Berita Resmi Albania ATA, Partai Komunis Albania menuduh Indonesia dengan tuduhan apa yang disebutnya "melakukan teror putih yang kontra revolusioner terhadap kaum komunis". Selanjutnya dalam Kongres V Partai Komunis Albania tahun 1966 di Tirana, dikeluarkan resolusi yang isinya mendesak Pemerintah Indonesia agar "membebaskan orang-orang komunis yang dipenjarakan". Resolusi itu juga menyebut Pemerintah RI "rejim militer fascis" yang katanya "naik ke tampuk kekuasan" dengan bantuan imperialisme Amerika Serikat dan didukung revisionis-revisionis golongan Khruschev dan Tito, yang mengubah Indonesia menjadi negeri tempat pembunuhan, penyiksaan, pemburuan manusia, dan pemenjaraan secara sepihak orang-orang komunis, kaum patriot dan rakyat progresif lainnya.

Seperti di negara-negara komunis lainnya, kegiatan utama sisa-sisa PKI di Albania ialah melakukan gerilya politik (gerpol) terhadap Pemerintah RI. Mereka tidak bosan-bosannya berkampanye menjelek-jelekan nama Indonesia melalui penerbitan buletin yang isinya tidak berbeda dengan siaran-siaran Radio Beijing. Buletin

yang diterbitkan di Tirana, antara lain "Indonesia Tribune" dan "Suara Indonesia" oleh OISRA (Organisasi Internasional Setiakawan Rakyat Asia Afrika) serta "Marhaen Menang" yang diterbitkan oleh PNI-ASU.

Seperti halnya dengan kelompok PKI di Romania dan Albania, kelompok lainnya di Jerman Barat, Polandia, Hongaria, Cekoslowakia, dan Bulgaria ditugasi membina mahasiswa-mahasiswa anggota, calon anggota, dan simpatisannya PKI di negara itu masing-masing. Jumlah mahasiswa komunis Indonesia di negara-negara Eropa Timur cukup banyak yaitu, 117 orang di Cekoslowakia, 11 orang di Polandia , 11 orang di Bulgaria, lima orang di Hongaria, 27 orang di Bulgaria, 16 orang di Jerman Timur.[43] Untuk mengurus kelompok PKI tersebut di bentuk Komite PKI Eropa Timur yang berkedudukan di Praha (Cekoslowakia). Komite PKI tersebut terdiri atas Sugiri (wakil SOBSI di WFTU- World Federation of Trade Union di Praha), Margono (wakil pemuda rakyat di WFDY-World Federation of Democratic Youth di Budapest) dan Suhardjo (wartawan "Harian Rakjat" di Praha.[44] Tampaklah betapa luas , rapi , dan rapatnya jaringan jaringan sisa-sisa PKI di luar negeri, terutama di negara-negara komunis , bahkan berkat gerakannya yang licin mereka mampu menerobos ke negara-negara non komunis, seperi Jerman Barat dan Jepang.

Sementara itu PPI Beijing yang sudah demisioner dan tidak diakui lagi oleh Pemerintah RI sebagai organisasi mahasiswa Indonesia, terus melancarkan ofensif terhadap mahasiswa Indonesia di Eropa Barat. Pengurus PPI di Brunschweig (Jerman Barat) mengatakan, buletin PPI Beijing yang dikirimkan kepada mereka, isinya persis siaran-siaran Radio Beijing. Isinya hampir 80% ucapan-ucapan Mao Ze Dong, yang pola temanya bahwa yang benar dan revolusioner adalah G30S/PKI dan yang salah adalah Orde Baru.[45] Untuk mencegah meluasnya peredaran buletin PPI Beijing itu di

43. *Mingguan Chas*, Minggu ke-4 Juni 1970
44. *Mingguan Chas*, Minggu ke-3 Maret 1971
45. *Kompas*, 18 Juni 1966

kalangan mahasiswa di Jerman Barat, KBRI di Bonn telah mengambil tindakan pengamanan. KBRI mengumumkan barang siapa yang menerima buletin semacam itu agar segera membakarnya.

Di Jerman Barat terdapat 900[46] lebih mahasiswa Indonesia yang belajar sambil bekerja. Dari jumlah itu sekitar 80–90 % terdiri atas mahasiswa Indonesia keturunan Cina.[47] Kebanyakan ketua-ketuanya terdiri atas kelompok mereka, karena pemilihan dilakukan menurut prosedur demokratis biasa. Pecahnya G30S/PKI tahun 1965, ternyata tidak kecil dampaknya terhadap kemahasiswaan Indonesia di negara itu. Mereka terpecah-belah dan terseret oleh kubu-kubu politik Internasional yang mengelola soal G30S/PKI menjadi sumber interes politik yang paling buruk dan peka. Secara obyektif harus diakui bahwa situasi buruk akibat G30S/PKI itu di luar negeri tidak dapat dikontrol. Namun sikap politik mahasiswa-mahasiswa itu tercermin pada sikap mereka sebagai warga negara Indonesia yang berwatak, berpikiran, dan berbuat seperti orang Indonesia.

Sebagian besar mereka yang menduduki pimpinan pengurus PPI pasca G30S/PKI memang masih tetap berwatak, berpikiran, dan berbuat seperti orang Indonesia. Namun ada sebagian yang masih terpengaruh oleh oknum dan unsur Baperki yang berpihak kepada G30S/PKI. Mereka melaksanakan operasinya dari kota Freiburg, Jerman Selatan. Sikap PPI Eropa Barat umumnya dan PPI Jerman Barat khususnya, sudah mencerminkan sikap KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) di tanah air. Mereka telah mengadakan pemilihan pengurus baru baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang. Sambutan Deputy Menteri PTIP Mashuri, S.H. pada konferensi PPI se-Eropa di Paris pada tahun 1966 telah dijadikan pedoman kerja. Mereka ini kemudian menjadi tenaga pendobrak, yaitu mendobrak sementara pejabat pada perwakilan-

46. Mengenai jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Jerman Barat, belum terdapat angka yang pasti. Sumber lain menyebutkan 2.300 orang (lihat Chas Minggu, September 1969)

47. *Kompas*, 18 Juni 1966

perwakilan diplomatik Indonesia yang berdasarkan fakta-fakta terlibat G30S/PKI.

Jika di Jerman Barat tidak terkesan adanya campur tangan pemerintahan atau oknum pejabat resmi setempat dalam urusan intern PPI di negara itu, sebaliknya di Jerman Timur kesan demikian sangat terasa kuat sekali. Pengurus PPI di Republik Demokrasi Jerman (RDD) itu dalam rapatnya pada bulan Oktober 1966 memutuskan untuk memprotes keras campur tangan pemerintahan / pejabat resmi RDD dalam urussan intern PPI di Jerman Timur Protes keras itu dikeluarkan, karena pemerintahan/pejabat resmi RDD itu menghalangi pelaksaan skrining yang dilakukan oleh Kedutaan Besar RI untuk Cekoslwakia dan RDD terhadap orang-orang Indonesia yang berada di Jerman Timur. Selain itu, mereka juga melarang PPI melakukan pemecatan dan schorsing anggota PPI di RDD, dalam rangka pembersihan terhadap tubuh PPI dari oknum oknum dan simpatisan G30S/PKI yang masih berkelliaran di Republik Demokrasi Jerman.[48] Larangan tersebut disertai sanksi pembubaran PPI di Jerman Timur sebagai organisasi resmi yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. Tidak hanya itu saja, larangan itu juga disertai ancaman akan dikeluarkan dari sekolah.

Meskipun mendapat tekanan keras dari pemerintah Jerman Timur, tetapi PPI bertekad tidak akan mundur, PPI dalam rapatnya tersebut dengan tegas telah memutuskan bahwa PPI Jerman Timur akan terus melanjutkan pengganyangan terhadap oknum-oknum dan simpatisan G30S/PKI yang masih berkeliaran di luar negeri umumnya, di Republik Jerman khususnya. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Amiruddin Anwar dan Hendarno Tjipto, masing-masing Ketua Umum dan Sekretaris II PPI Jerman Timur.[49]

Di luar negara-negara komunis tidak hanya di Jerman Barat, tetapi juga di Jepang terdapat sisa-sisa PKI dan simpatisannya. Di

48. *Berita Yudha*, 26 Oktober 1966
49. *Ibid*

"negeri Matahari Terbit " itu kegiatan gerpol sisa-sisa PKI dan simpatisannya tidak kalah hebatnya dengan di negara-negara lainnya. Mereka tidak hanya melakukan gerpol, tetapi juga teror terhadap pengurus KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) di Tokyo dan sejumlah masyarakat Indonesia pendukung Orde Baru di kota itu. Meskipun teror tidak menimbulkan korban manusia, tetapi sejumlah rumah tempat tinggal mereka mengalami kerusakan berat, dengan terjadinya teror itu pengurus KASI di Jepang telah mendesak Pemerintah RI (Deplu) untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap staf KBRI di Tokyo dan sejumlah masyarakat Indonesia di Jepang yang dicurigai.[50]

Polisi Metropolitan Tokyo dan alat alat negara Jepang yang bertanggung Jawab atas keamanan berusaha menyingkap tabir yang menyelimuti teror tersebut. Polisi dan alat alat negara Jepang mencurigai oknum-oknum komunis Jepang berada dibelakang teror, secara diam diam mengumpulkan bukti bukti kerja sama antara Partai Komunis Cina, sisa-sisa PKI dan oknum-oknum komunis Jepang. Dugaan polisi tidak meleset dan dengan tertangkapnya beberapa oknum komunis Jepang, yaitu Reiji Nagata dan kawan-kawan, terungkaplah teror tersebut. Ternyata Nagata dan kawan-kawannya bukan hanya anggota perkumpulan persahabatan Jepang-Cina, tetapi juga biang keladi teror. Jauh sebelum G30S/PKI tahun 1965 Nagata dan kawan-kawannya[51] telah dipergunakan oleh PKI untuk kepentingan mereka di Jepang. Reiji Nagata adalah agen PKI yang ditugasi mengawasi tindak tanduk petinggi Indonesia yang berkunjung Ke Jepang, mengumpulkan fakta-fakta mengenai foya-foya rombongan Presiden Sukarno dan sebagainya. Sesudah G30S/PKI hingga tertangkapnya, Nagata ditugasi membantu pelarian sisa-sisa PKI, mengumpulkan informasi mengenai Indonesia untuk disalurkan kepada sisa-sisa PKI di Beijing, dan juga mengadakan kegiatan intelejen untuk kepentingan RRC.[52]

---

50. *Berita Yudha*, 3 Juli 1966
51. *Minggguu Chai, Minggu ke-3 Juni 1966*
52. *Ibid*

Sementara itu kegiatan-kegiatan gerpol sisa-sisa PKI di kalangan Mahasiswa Indonesia masih terus berlangsung, kegiatan-kegiatan gerpol yang dikendalikan oleh Badan Koordinasi Perhimpunan Pelajar Indonesia (BK-PPI) se- Eropa "tandingan" yang dipimpin oleh Tahet Pakuwibowo dan kawan-kawan, yang berpusat di Praha Cekoslowakia. Perlu diketahui PPI se-Eropa tersebut adalah hasil pembentukan Konferensi PPI di Bucharest tahun 1965, yang kepengurusanya didominsai oleh mahasiswa-mahasiswa komunis. Dengan kebangkitan pelajar/mahasiswa eksponen 66 di tanah air melawan G30S/PKI dan Orde Lama, maka mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang Pancasilais di Eropa juga tidak mau ketinggalan. Mereka menyadari selama PPI itu masih didominasi mahasiswa-mahasiswa komunis, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dominasi kaum komunis dalam kepengurusan PPI mutlak harus diruntuhkan. Kepengurusan PPI se-Eropa harus ditangan pendukung Orde Baru.

Pada tanggal 19 sampai dengan 24 Agustus 1969, para pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PPI se-Eropa telah melangsungkan Konferensinya yang ke 8 di St.. Poltyn dekat Wina, Austria.[53] Konferensi itu diikuti oleh 16 cabang PPI dari negara-negara Eropa, secara aklamasi telah membubarkan Badan Koordinasi Perhimpunan Pelajar Indonesia (BK-PPI) se-Eropa dan sebagai gantinya telah di bentuk suatu wadah baru yang mereka namakan *Kerjasama Perhimpunan Pelajar Indonesia (KPPI)* di Eropa. Wadah baru tersebut menitikberatkan kerjasama terutama pada bidang-bidang ilmiah, kemahasiswaan dan kesenian. Dengan suksesnya Konferensi PPI ini, ambisi gerpol sisa-sisa PKI untuk menguasai PPI dengan memecah belah kekuatan-kekuatan mahasiswa Indonesia di luar negeri dapat digagalkan. Hal itu membuktikan bahwa mayoritas mahasiswa Indonesia di luar negeri masih lebih cinta pada tanah air dan ideologi negaranya yaitu Pancasila, ketimbang ideologi asing Marxisme-Leninisme.

---

53. *Mingguan Chas, Minggu ke-4 September 1969*

Dengan runtuhnya dominasi mahasiswa komunis dari tubuh PPI, gerpol sisa-sisa PKI mengalihkan kegiatannya ke negara-negara di Eropa Barat, karena mahasiswa-mahasiswa di Eropa Timur sudah menarik garis pemisah yang tegas, yaitu antara yang pro dan kontra G30S/PKI. Sedangkan mahasiswa-mahasiswa di Eropa Barat kebanyakan diantara mereka belajar dengan biaya sendiri, yang perasaan kebebasan pribadinya menonjol, sehingga sukar membedakan antara yang Pancasilais dan pendukung G30S/PKI. Begitu juga suasana kehidupan dan kebebasan berpikir yang terdapat di negara itu dan timbulnya gerakan gerakan golongan kaum kiri baru (New Left), memungkinkan mereka mudah dipengaruhi dengan berita-berita negatif yang digerpolkan oleh sisa-sisa PKI. Alasan lain yang menyebabkan mahasiswa-mahasiswa di negara-negara Eropa Barat lebih diperhatikan oleh mahasiswa-mahasiswa sisa-sisa PKI, karena jumlah mereka lebih banyak dibandingkan dengan di negara-negara Eropa Timur. Anggota PPI di seluruh Eropa tahun 1969 diperkirakan berjumlah 3.140 orang, hampir 90 % diantaranya terdapat di Eropa Barat dan 2.300 orang merupakan anggota PPI Jerman Barat.[54]

Sementara itu nasib sisa-sisa kaum komunis Indonesia dan kaum yang mengaku pendukung Sukarno (Sukarnois) makin lama makin bertambah buruk dan menyedihkan, keadaan mereka pada akhir tahun 1971 menjadi berantakan karena timbulnya pertentangan dan bentrokan di antara mereka itu sendiri, sudah menjadi rahasia umum bahwa pertentangan dan permusuhan di antara sisa-sisa PKI di luar negeri telah lama berlangsung, karena terbawa oleh permusuhan yang terdapat antara negara induk semang masing masing yaitu Uni Sovyet dan RRC, Demikianlah telah terjadi pertentangan sisa-sisa PKI yang bermukim di Beijing yakni antara kelompok Ajitorop yang menyebut dirinya sebagai Ketua Delegasi PKI di RRC dengan kelompok Sugiri mantan wakil SOBSI di Praha. Pertentangan ini menimbulkan perpecahan yang menyebabkan Sugiri menyingkir dari RRC menuju negara-negara Eropa Timur, antara lain Cekoslowakia, Jerman Timur,

54. *Ibid*

Hongaria dan Rumania. Jika Ajitorop menamakan diri sebagai ketua delegasi PKI di RRC, maka Swie Siauw Poh (Slamet Suryo Prawiro) dan Ernest Pinontoan serta kawan-kawan di Tirana, Albania telah mendirikan GKI-LN (Gerakan Komunis Indonesia Luar Negeri) sebagai tandingan gerakan kaum komunis yang berkiblat ke Moskow.[55]

Kaum komunis yang memihak kepada Uni Sovyet, oleh kelompok kaum komunis pro RRC dijuluki sebagai kelompok *renegat* munafik yang dibina "klik revisionis sosial imperialis Uni Sovyet". Caci-maki juga dilontarkan kepada Thomas Sinuraya-Ali Hanafiah dan kawan-kawannya yang dianggap sebagai "benggolan-benggolan kelompok *Renegat* yang terkutuk", karena menyebarkan bahan-bahan beracun dengan tulisan- tulisan seperti "Untuk Jalan Yang Benar Bagi Revolusi Indonesia dan tugas tugas mendadak bagi Gerakan Komunis Indonesia". Sebaliknya kaum komunis yang pro Moskow mengancam kaum komunis pro Beijing sebagai "orang-orang bebal yang mengekor kaum komunis Cina yang menjalankan politik petualangan dan pengkhianatan terhadap perjuangan Komunis Internasional ". Selain itu mereka menuduh kaum komunis Cina sebagai pihak yang telah menjerumuskan PKI ke lembah kehancuran.[56]

Selain terjadi perpecahan sejak tahun 1972 kaum komunis Indonesia pun menghadapi kenyataan-kenyataan yang mengecewakan dan membuat mereka tidak saja bingung, tapi juga frustasi. Mereka kecewa terhadap kenyataan bahwa negara-negara komunis seperti Uni Sovyet, Cekoslowakia, Jerman Timur, Polandia Romania, Bulgaria dan Hongaria telah memperbaiki hubungan dipolomatiknya dengan Republik Indonesia. Bahkan RRC dan Korea Utara oleh mereka dianggap tidak lagi menunjukkan sikap politik yang semula bertindak sebagai pelindung mereka, sudah berkurang perhatian dan bantuan yang diberikan kepada mereka. Semata-mata sebagai suatu imbalan jasa dari pihak yang menyuruh kepada pihak

55. *Mingguan Cõas*, Minggu ke-2 April 1972
56. *Ibid*

yang memusuhi Indonesia. Demikian pula negara-negara , partai-partai komunis, organisasi-organisasi, sudah berkurang perhatiannya terhadap nasib hidup dan kegiatan-kegiatan mereka, semata-mata sebagai suatu imbalan jasa dari pihak yang menyuruh kepada pihak yang disuruh melakukan suatu pekerjaan, yaitu melakukan perang urat syaraf terhadap Republik Indonesia. Bentuk perang urat syaraf tersebut berupa gerpol untuk merongrong dan menjatuhkan reputasi RI secara politik di forum internasional, dengan cara mempengaruhi pendapat umum di berbagai negara asing, dengan menonjolkan " keburukan-keburukan Rakyat Indonesia". Namun yang pasti sejumlah kaum komunis Indonesia dan kaum Sukarnois yang telah menyadari kesalahannya terhadap bangsa, tanah air dan negaranya, menyatakan kebingungan dan putus asa karena menghadapi penderitaan yang tidak tertahankan di negeri asing. Mereka telah terbuang jauh dari tanah air dan bangsanya, yaitu Indonesia. Ibarat pepatah "tangan mencencang bahu memikul", itulah nasib mereka.

BAB VIII
KEGIATAN SISA-SISA PKI PASCA PULAU BURU DAN TINDAKAN PEMERINTAH

1. Heboh Sastra Karya Pramoedya Ananta Toer

Tahap terakhir tahanan politik Pulau Buru dibebaskan pada tanggal 20 Desember 1979, termasuk di antaranya beberapa sastrawan. Di antara sastrawan yang menonjol adalah Pramoedya Ananta Toer seorang novelis tokoh Lekra PKI. Tulisan terakhir Pramoedya Ananta Toer sebelum ditahan di Pulau Buru berjudul *Persembahan Untuk Partai* (1965). Di Pulau Buru ia termasuk kategori tahanan yang nakal dan die hard (kepala batu) yang terpaksa diisolasi. Namun, ia seorang penulis yang menghasilkan beberapa naskah karya sastra. Naskah-naskahnya kemudian diterbitkan dengan judul : *Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah,* dan *Rumah Kaca,* yang diterbitkan oleh PT. Hasta Mitra pada tahun 1980, suatu percetakan milik Hasyim Rachman yang juga rekan Pramoedya Ananta Toer di Pulau Buru. Ia seorang mantan wartawan *Bintang Timur* surat kabar dari Partindo yang pro PKI.

Buku-buku itu sangat menarik perhatian orang awam, karena ditulis oleh seorang sastrawan terkenal yang baru dibebaskan dari Pulau Buru. Oleh karena itu karyanya ramai, dan banyak muncul resensi di berbagai media massa. Para kritisi sastra menyambut karya Pramoedya Ananta Toer dengan tanggapan yang berbeda. Tanggapan juga datang dari kalangan mass media seperti harian *Sinar Harapan, Kompas,* yang semuanya menyuarakan pro dan kontra terhadap karya Pramoedya Ananta Toer tersebut.

Buku *Bumi Manusia* menggambarkan bagaimana cara melawan sikuat (pengusaha) dengan taktik komunis melalui seni, pers, dan lain-lain media. Tampaknya sasaran yang hendak dituju oleh penulis adalah generasi muda, yang diharapkan sebagai simpatisan baru.

Buku lainnya, yang berjudul *Anak Semua Bangsa* merupakan kelanjutan dari buku *Bumi Manusia* yang tema dan isinya tidak

berbeda, dengan menyanjung revolusi Perancis dengan cita-cita kebebasannya. Kebebasan di sini diartikan sebagai sarang untuk menawarkan kebebasan, demokrasi yang membantu memberikan ruang dan waktu untuk kemungkinan hidupnya kembali organisasi terlarang, termasuk organisasi yang beraliran Marxisme-Leninisme atau komunisme. Propaganda mengenai demokrasi dan kebebasan adalah ciri khas orang-orang komunis pada awal mendirikan partainya.

Uraian mengenai penindasan terhadap petani miskin yang tanah garapannya sewaktu-waktu dirampas oleh penguasa, mengingatkan kita propaganda dan aksi sepihak PKI di masa ofensif revolusioner tahun 1964-1965. Ketika itu PKI mengindoktrinasi petani agar membenci dan anti penguasa (pemerintah). Petani diperalat untuk kepentingan politiknya.

Pramoedya Ananta Toer melalui kemampuan sastranya berusaha membentuk opini publik dan menarik simpati masyarakat dengan mengangkat tema kebebasan demokrasi, penindasan, ketidakadilan, dan kontradiksi yang patut diwaspadai. Buku-buku Pramoedya Ananta Toer karya Pulau Buru ini bukanlah sekedar buku sastra, melainkan buku tentang ideologi dan politik komunis yang dikemas dengan gaya sastra. Aliran sastra Pramoedya adalah aliran realisme sosialis yang khas dianut oleh orang-orang komunis sebagai "seni perjuangan" klas. Bagi pengikut komunis buku tersebut bisa dianggap petunjuk teknis berorganisasi dan sikap yang harus dilakukan oleh pengikut komunis.

Dalam tajuk rencananya, harian Merdeka tanggal 23 Oktober 1980 menentang terbitnya karya Pramoedya Ananta Toer dari Pulau Buru. *Harian Merdeka* menyebutkan bahwa *Bumi Manusia* merupakan tesis strategis dan suatu himbauan untuk merehabilitasi salah satu kekuatan politik PKI yang telah mengalami kehancuran.[1]

Reaksi atas terbitnya karya Pramoedya Ananta Toer juga datang dari Prof. Dr. Hamka Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang

1. *Merdeka*, 23 Oktober 1980

dimuat dalam harian Berita Buana tanggal 20 November 1980. Hamka mendukung pelarangan buku Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa oleh Departemen P dan K, dengan argumen yang sama yaitu mengandung ide pertentangan kelas yang merawankan stabilitas nasional. Selain pendapat-pendapat pribadi, juga golongan tertentu dalam masyarakat, menolak atas terbitnya buku karangan Pramoedya Ananta Toer.

Buku Bumi Manusia yang dikarang Pramoedya Ananta Toer di Pulau Buru, pada garis besarnya menggambarkan sejarah kehidupan sosial di Hindia Belanda awal abad 20, menjelang kebangkitan nasional. Pada waktu itu suasana masyarakat diwarnai dengan konflik antara rakyat dan penguasa kolonial; antara petani dan pemilik modal yang pada dasarnya penulis berusaha menajamkan suasana pertentangan kelas. Penulis juga menyuguhkan permasalahan-permasalahan pokok yang harus dilawan oleh orang komunis, yaitu :

a. Egoisme dan ambisi pribadi,
b. Hukum penguasa melahirkan ketidakadilan, kesewenang-wenangan terhadap masyarakat yang tertindas.

2. Upaya Mengenalkan Kembali Tokoh-Tokoh PKI ke Masyarakat

Salah satu kegiatan orang-orang komunis pada pasca Pulau Buru adalah kegiatan intelektual dan menuliskan kembali sejarah, khususnya biografi tokoh-tokoh PKI. Kegiatan ini adalah salah satu metode agitasi dan propaganda untuk mempengaruhi dan mengubah pendapat umum terhadap PKI dan tokoh PKI.

Propaganda ini sasarannya adalah generasi muda, generasi yang lahir pada pasca 1965, tidak mengetahui dan memahami tingkah laku politik para pemimpin PKI yang agresif dan destruktif terhadap ideologi negara, Pancasila, dan bangsa Indonesia. Gerakan ini dimulai sejak tahun 1982. Para mantan tahanan PKI Pulau Buru melakukan "ofensif" terhadap masyarakat mengenalkan kembali biografi tokoh-tokoh yang diselingi dengan tokoh-tokoh lain yang bukan PKI

tentunya. S.I. Poeradisastra alias Buyung Saleh, sastrawan dan tokoh PKI kelompok 1946, menulis mengenai "Tingkah laku Politik Jenderal Soedirman" versi PKI. Penulis lain Hersri yang nama aslinya Anom Sastrodihardjo bersama Joebaar Ajoeb, tokoh Lekra menulis "SM. Kartosuwiryo, Orang seiring bertukar Jalan". Dari Semarang, ada usaha memperkenalkan pasukan PKI dalam pemberontakan Madiun 1948. Kemudian muncul tulisan biografi D.N. Aidit, pimpinan PKI dalang dari G30S/PKI, dan biografi Amir Sjarifuddin yang juga dalang pemberontakan PKI di Madiun 1948.

Isi dari biografi-biografi singkat tersebut menyatakan bahwa mereka (tokoh-tokoh PKI) adalah tokoh "pejuang" (komunis). Tujuan dari penulisan tersebut adalah, bahwa para penulis (orang PKI) "menghimbau" masyarakat untuk menafsirkan kembali peran tokoh yang ditulis, dan menilai kembali akan kepeloporannya. Kampanye penulisan biografi ini patutlah diwaspadai sebagai kasus yang serius, karena pada kesimpulannya para penulisnya menyatakan kepada masyarakat bahwa tokoh-tokoh PKI yang diperkenalkan kembali itu sebagai tokoh yang tidak "bersalah". Kampanye semacam ini pun pernah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal CC PKI Alimin pada tahun 1951. Alimin meminta rehabilitasi tokoh-tokoh yang terbunuh karena pemberontakan di Madiun pada 1948, dan hal yang sama juga dilakukan oleh D.N. Aidit sendiri.

Sebagai kesimpulan kasus penulisan biografi tokoh, sejarah, dan sastra yang ditulis oleh orang-orang PKI sudah pasti ditafsirkan berdasarkan komunisme (Marxisme-Leninisme). Tulisan itu pada umumnya berisi pembelaan, rehabilitasi, dan propaganda mengenai tokoh PKI dan organisasi PKI-nya.

Demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, pandangan hidup dan ideologi negara, Pancasila, bangsa Indonesia wajib waspada dan mengenali segala upaya dan usaha orang-orang komunis yang merongrong Pancasila, melalui pelbagai metode dan taktiknya.

3. Larangan Terhadap Karya-Karya Pramoedya Ananta Toer

Buku-buku yang dihasilkan oleh Pramoedya Ananta Toer selama di Pulau Buru itu oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dilarang beredar di lingkungannya dengan Surat Edaran Nomor : 73106/Sekjen PDK/1980 tanggal 27 September 1980. Menteri P dan K menginstruksikan kepada seluruh jajaran instansi P dan K untuk tidak membeli dan tidak menyimpan buku *"Bumi Manusia"* karangan Pramoedya Ananta Toer.

Tindakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disambut baik dan didukung oleh Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Kopkamtib memandang perlu untuk menampung dan sekaligus menanggapi reaksi-reaksi yang terjadi dalam masyarakat. Dasar dukungan Kopkamtib adalah Ketetapan MPRS Nomor : XXV/MPRS/1966 Jo Ketetapan-ketetapan MPR Nomor : V/MPR/1973 dan Nomor : IX/MPR/1978 tentang pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi DKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan dan mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.

Di samping itu, petunjuk dari Pangkopkamtib yaitu Petunjuk Pelaksanaan Pangkopkamtib Nomor : Pelak-002/Kopkam/10/1968 jo Petunjuk Pelaksanaan Pangkopkamtib Nomor : Pelak-001/ Kopkam/X/ 1971 tentang kebijaksanaan penyelesaian tahanan-tahanan G30S/PKI, serta Petunjuk Pelaksanaan Pangkopkamtib Nomor : Jukdak 04/Kopkam/11/1974 tentang pengawasan atas bekas para tahanan dan narapidana G30S/PKI yang dikembalikan ke masyarakat dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.

Akhirnya berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh Kopkamtib bersama-sama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dan setelah dievaluasi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dikeluarkan larangan beredarnya kedua buku tersebut (Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa) berdasarkan Surat Keputusan Kejaksaan agung Nomor : Kep-052/JA/1981, tanggal 29 Mei 1981 untuk seluruh wilayah Indonesia.

Alasan pelarangan buku tersebut, karena Pramoedya Ananta Toer bukan hanya seorang sastrawan, namun juga seorang ideolog komunis yang gigih mengeluarkan karya-karya politiknya sekali pun telah mengalami sebagai tahanan politik selama lebih dari 10 tahun di Pulau Buru. Momentum menerbitkan karya-karyanya tersebut memang tepat, tatkala terjadi kelangkaan bacaan sastra. Kemampuan proses mengemas dan menyajikan ajaran komunis dalam bentuk sastra memanfaatkan momentum tersebut untuk menarik simpati masyarakat. Karena di dalam ajaran komunis tidak mengenal istilah kalah, yang baginya adalah istilah pasang dan surutnya perjuangan.

PENUTUP

Dari kelima buku yang telah kita baca, setidak-tidaknya ada beberapa peristiwa yang perlu kita garis bawahi dan kita renungkan sebagai hasil dari pengalaman di masa lampau. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, khususnya pada awal abad ke-20, PKI telah beberapa kali melakukan aksi, gerakan dan pemberontakan yang merugikan bangsa dan negara, dalam rangka merebut kekuasaan politik sebagai program maksimumnya. Sedangkan program minimum adalah pelbagai gerakan dan aksi dalam rangka mencapai program maksimum.

Pertama, pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, karena PKI merasa menjadi partai politik berpengaruh, pada tahun 1926 PKI melakukan pemberontakan. Pemberontakan merupakan pencerminan sikap komunis yang lebih mengutamakan kepentingan ideologi politik asing daripada kepentingan perjuangan bangsanya. Akibatnya organisasi-organisasi perjuangan dibatasi aktivitasnya, ribuan kader pergerakan nasional yang tidak tahu-menahu dengan pemberontakan diasingkan, dibuang dan dipenjarakan. Pemimpin-pemimpin utama pergerakan nasional diasingkan. Organisasi-organisasi pergerakan kemerdekaan lumpuh akibat ketatnya pengawasan pemerintah Kolonial Belanda.

Kedua, ketika seluruh bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan, pada akhir 1945 dan awal 1946 serta pertengahan tahun 1948, PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah RI. Tanpa memandang apakah perbuatan itu pantas dilakukan terhadap bangsanya sendiri, terbukti PKI lebih mengutamakan kepentingan politiknya daripada kepentingan bangsa Indonesia yang sedang dalam keadaan berjuang melawan penjajah. Kader-kader PKI melakukan pemberontakan di daerah-daerah, seperti Banten, Tangerang, Cirebon, Pekalongan, Kendal, Bojonegoro, Sumatra Timur dengan tujuan mendirikan soviet-soviet atau pemerintah di daerah-daerah yang telah "dibebaskan".

Orang-orang PKI menganggap bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 itu revolusinya kaum borjuis. PKI mengulangi pemberontakannya pada bulan September 1948. Ternyata ABRI dan rakyat berhasil menumpas pemberontakan itu dalam waktu singkat. Namun, PKI terbebas dari tindakan hukum karena tidak lama sesudah peristiwa itu, Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua, sehingga seluruh kekuatan rakyat Indonesia tercurah kepada peristiwa itu.

Ketiga, ketika PKI merasa dirinya menjadi partai komunis terbesar di luar kubu negara-negara komunis dan berhasil mendominasi kehidupan politik di tanah air pada tengah dasawarsa tahun 60-an, kembali PKI mendalangi dan melakukan kudeta terhadap pemerintah RI melalui "Gerakan 30 September" pada 1 Oktober 1965. Kudeta ini berhasil digagalkan oleh ABRI bersama rakyat. Hal ini berarti untuk ketiga kalinya pula, PKI gagal total dalam mewujudkan programnya merebut kekuasaan politik di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa aksi-aksi teror, intimidasi, agitasi, dan propaganda orang-orang komunis yang demikian rapi dan sistematis tidak menggoyahkan keteguhan bangsa Indonesia dalam menghayati nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pandangan hidup dan panutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akhirnya PKI dibubarkan, dan ajarannya dilarang melalui TAP MPRS No.25/1966.

Komunisme yang terdiri atas tiga unsur, ideologi, organisasi, dan gerakan, dalam abad globalisasi ini dengan cermat wajib kita waspadai. Karena ciri dan watak komunisme ini mampu dan mau menunggu, sampai ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Dengan segala daya dan cara, kader-kader komunis melakukan pelbagai aktivitas baik di kalangan bawah maupun di kalangan atas. Di samping itu, aksi penyusupan kader ke dalam organisasi massa atau partai politik merupakan aksi yang tidak asing lagi. Mereka berusaha untuk merebut simpati untuk mendominasi kekuatan dalam tubuh partai yang disusupi untuk diarahkan sesuai programnya. Pada masa awal pergerakan nasional, PKI melakukannya terhadap Sarekat Islam, sehingga partai yang paling besar dan berpengaruh pada masa

pergerakan nasional itu pecah. Pada tahap akhir, pola yang sama diterapkan terhadap partai politik yang dianggap pesaingnya dan juga terhadap aparatur pemerintah dan ABRI, sekalipun dengan bentuk yang berbeda-beda.

Buku ini ditulis untuk memberikan informasi tentang bahaya laten komunisme dan gerakan komunis serta mengingatkan kepada seluruh golongan masyarakat khususnya bangsa Indonesia umumnya, agar tidak lengah dan tidak meremehkan terhadap komunisme dan gerakannya. Kelengahan sekecil apapun bisa memberikan peluang bagi ideologi dan gerakannya. Gerakan komunis pun sudah pasti memanfaatkan era globalisasi ini, dengan menawarkan ide-ide dan melontarkan isu, demokratisasi, keterbukaan, hak-hak azasi, keadilan dan kesenjangan kepada masyarakat dalam rangka mematangkan kondisi untuk manifes (muncul) kembali.

Sebagai penutup marilah kita terus meningkatkan kewaspadaan dengan mengenali secara dini setiap gejala dari gerakan komunis dan melengkapi diri dengan penuh keyakinan terhadap Pancasila falsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

DAFTAR SUMBER

BUKU

Aidit, D.N., *Untuk Demokrasi Persatuan Mobilisasi,* Dep. Agitrop CC PKI, Jakarta, 1962 .

A.S. M. Nurdin, *Supardjo Direnggut Kalong,* PT. Varia, Jakarta , 1967.

Disjarah AD, *Komunisme dan Kegiatannya di Indonesia,* Disjarah TNI AD, Bandung 1985.

Dinas Sejarah Kodam VIII / Brawijaya, *Sam Karya Bhirawa Anoraga,* Surabaya, 1974

Djamhari, Saleh As'ad, Drs, *Ichtisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945-Sekarang),* Dep. Hankam, Pusat Sejarah ABRI, 1971.

Jono Hatmojo, R.M., Mayjen Purn. *Sejarah Pengalaman Pribadi selama menjabat dalam TNI-AD maupun sebagai anggota Karyawan ABRI,* 1945-1983, tanpa tahun.

Kopkamtib, *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia,* Jakarta 1978.

MPRS RI, *Buku keenam, Sidang Umum MPRS Keempat tahun 1966, Jilid I-A, Bahan-bahan Musyawarah,* Penerbitan MPRS, tahun 1972.

MPRS-RI, Buku keenam, *Sidang Umum MPRS keempat tahun 1966, Jilid I-3, Bahan-bahan Musyawarah,* Penerbitan MPRS, tahun 1972.

Nasution, A.H., DR, *Memenuhi Panggilan Tugas,* Jilid 6, CV. Haji Masagung, 1984.

Notosusanto, Nugroho, *Pejuang dan Prajurit,* Sinar Harapan, Jakarta, 1984.

Panitia Penulisan Sejarah Departemen Luar Negeri, *Dua Puluh*

Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945–1970, Jakarta, 1971.

Politbiro CC PKI, *Perang Rakjat djalan Kemenangan Revolusi Indonesia*, Jakarta, 1967.

Ramelan, *Mbah Suro Nginggil-Kisah hancurnya Petualangan Dukun Klenik Mbah Suro*, Matoa, Jakarta, 1967.

Salam, Abdul, *Komunisme Cina*, Yayasan Pancasila Sakti, Jakarta, 1982.

MAJALAH

Advokasi, 2008

Panca Warsa Hari Peringatan Kesaktian Pancasila (Buletin), 1970.

Persepsi, 1979, 1989.

Suara Pers dan *Radio Luar Negeri* (Buletin), 1969.

SURAT KABAR

Angkatan Bersendjata, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973.

Asia Week, 1981.

Berita Yudha, 1965, 1966, 1967, 1969, 1972, 1973.

Chas, 1969, 1970, 1971, 1972.

Indonesia Raya, 1969.

Kompas, 1965, 1966, 1968, 1973.

Merdeka, 1980.

Pedoman, 1976.

PAB (Pemberitaan Angkatan Bersenjata), 1968.

Sinar Harapan, 1965

The Guardian, 1981.

ARTIKEL

Leclere, Jacques, " Aidit dan Partai pada tahun 1950 ", *Prisma*, LP3ES, 1982 .

Octama, Jakob, Drs, "Kesan-kesan Perjalanan Mahasiswa Kita di Eropa (12), *Kompas* 18 Juni 1966 .

Soebijanto, " Strategi Sisa-sisa Partai Komunis Indonesia Setelah Kegagalan Gerakan 30 September 1965 ", *Persepsi*, No.1 Th. IX, Januari, Pebruari, Maret 1987 .

MANUSKRIP

Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat, Lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966, tanpa tahun .

Pusat Sejarah ABRI, Lahirnya Orde Baru, 1985 .

WAWANCARA

Amir Machmud, Jenderal Purn. Jakarta, 14 April 1983 .

Hadiwidjojo Darsono, Matrowi, Sadimin, Suyat, dan Setu, Purwodadi, 23 Juli 1991 .

Rusman, mantan Camat Geyer, Purwodadi, 22 Juli 1991 .

Ruswadi, Sekwilcam Kecamatan Geyer, Purwodadi, 23 Juli 1991

Soeharto, Presiden, Jakarta, 3 Maret 1976 .

Sumpeni, mantan guru TK Dusun Ngrebo, Purwodadi, 23 Juli 1991 .

Suwandi, mantan Lurah Kedung Rejo, Purwodadi, 23 Juli 1991 .

DOKUMEN

Beberapa Catatan Tentang Penyelesaian Perkara G30S / PKI serta Pokok-pokok Program Kerja Terpadu 1975 / 1976, Kopkamtib .

Himpunan Daftar Nominatif Penyelesaian Perkara-perkara G30S / PKI Golongan "A" dari tahun 1975 s/d 1980 oleh Todsapu-Todsada, Kopkamtib, Jakarta, 1980 .

Kebijaksanaan Tindak Screening Dalam Rangka Penertiban / Pembersihan Tubuh Aparatur Pemerintah / Negara Dari sisa-sisa G30S / PKI, Nomor Juklak 02 / Kopkam /II /1974 Kopkamtib Team Oditur / Jaksa Pusat.

Kejaksaan Agung RI, Penyelesaian Singkat Tentang Badan Pelaksanaan Re- Settlement Buru (Bapreru) dalam rangka expose di Staf Kopkamtib, Jakarta, 1974 .

Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Jateng dan DIJ, Berita Acara Pemeriksaan terhadap Paing alias Mungkar serta Samat alias Kancil, 1973 .

Komando Operasi Pemulihan keamanan dan ketertiban Daerah Jateng dan DIJ, tentang Hasil Ops.Intel / Ops Teritorial Terhadap Gerakan PKI Illegal di Purwodadi, tahun 1972 / 1973 .

Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Laporan Kopkamtib Kepada Sidang Kabinet Paripurna RI tentang " Persoalan Purwodadi ", tanggal 20 Maret 1969 .

Laporan Chusus Kodam VII / Diponegoro No. Lc.PKP-073 / 010 / 3 / 1967 .

Laporan Chusus Korem 073, Pelaksana Kuasa Perang "Ba Korin" .

Laporan Chusus Tentang Pertapaan Mbah Suro di Desa Nginggil Randublatung Blora.

Laporan Ops Kamtib pada Obyek Mbah Suro di desa Nginggil.

Petunjuk Pelaksanaan Penyelesain Sidang Institusional Masalah

Tahanan / Tawanan G30S /PKI, Kopkamtib, Team Oditur / Jakarta Pusat .

Sudisman, Kritik Oto Kritik .

Tindak lanjut Kebijaksanaan Penyelesaian Tahanan Politik G30S / PKI No. Juklak-01 / Kopkam / 11 / 1974, Kopkamtib, Team Oditur / Jaksa Pusat.

INTERNET

Wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas, www. id.wikipedia.org

INDEX

A

ABA (Akademi Bahasa Asing), 178
Abdullah, Saadi bin Ali, 136
ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 16, dst
Aceh, 127, 135
Achmadi (Menteri Penerangan), 22, 184
AD (Angkatan Darat), 37, 55, 80, 114, 124, 190, dst
Adjie, Ibrahim (Jenderal), 41
Agitprop (Agitasi Propaganda), 74, 89, 100, 184,
Aidit, D.N., 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 27, 57, dst
Adjitorop, Yusuf, S.H., 191, 223
Ajoeb, Joebhaar, 228
AKRI (Angkatan Kepolisian Republik Indonesia), 11, 176, 239
Aktivis PKI, 1
Aktivitas Subversip, 47
AL (Angkatan Laut), 176, 239
Aliarcham, 133
Alimin, 63, 228
alternatif, 9
Ambon, 134, 137, 139
Amerika Serikat, 62, 188, 195, 203, 207, 209, 216, 217
Amin, M alias Udin, 158, 159
Ampera, 20, 38, 42, 44, 48, 240

Amsterdam, 207, 240
Anak Semua Bangsa (Novel), 3, 225, 226, 227, 229
Ananta Toer, Pramoedya, 3, 144, 149, 152, 210, 225, 226, dst
Angkatan Bersenjata (surat kabar), 138
ANJV (Algemeen Nederlands Jeugd Verbond), 198, 199
Anti Manipol, 1
Anti Pancasila, 1
Anwar, Amiruddin, 220
Anwar, Chairil, 149
Anwar, Rosihan, 146, 149
Api (Buletin), 28
Apin, Rivai, 149, 150, 151
Arbitor, 36
Arifin, Syamsuddin, 223
Arjuno, 91
Arto, Sugih (Jaksa Agung), 141
Asem, Rudung, 108, 109, 180, 240
Asia Afrika, 187, 189, 213, 217, 240
Asia Tenggara, 177, 205, 207
Asim, 110
Aster (Asisten Teritorial), 122
ATA (Kantor Berita Albania), 217
athcis, 4
atheisme, 22
AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia), 37, 58, 164, 165, 167, 168, 174, 176

Austria 211
Australia, 195, 204
Avonturisme Militer, 2
Avonturisme MKTBP, 63
Ayam Alas, 111, 112, 241

B

Bakar, 73
BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara), 129
Bakoksi Cepu, 76
Bakri, Syamsul, 192
Bali, 137
Balikpapan, 136
Banda Aceh, 135
Bandar Betsi, 150
Bandung, 10, 11, 38, 80, 108, 114, 132, 133, 136, dst
Bangsri, 184
Banjarmasin, 133, 136
Baperki, 37, 156, 157, 219
Bapreru (Badan Pelaksana Resettlement Buru), 139, 140, 141, dst
Bardi, H.S., 72, 73, 242
Barisan Pengawal Merah, 180
Barisan Sukarno, 39, 40, 41, 43,
Baru Tanyu, 137
Basarah, Saleh (Komodor Udara), 164

Basrev (Basis Revolusi), 2, 83, 84, 90
Basuki (Letnan Udara), 164
Batalyon 408, 170
Batalyon 409, 170
Batalyon 410, 170
Batalyon 531 / Raiders Brawijaya, 115
Beijing, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 217, 218, 221, 223
Bejo alias Sarip, 183
Belanda, 62, 146, 190, 194, 196, 197, 198, 199, dst
Belanda Indo, 205
Belanda Trouw, 196
Belgia, 66
Bendungan Hilir, Pejompongan, 172
Bengawan Solo, 76, 99, 168, 170
Berger, Arthur Tem, Drs, 207, 242
Berita Buana (surat kabar), 227
Berita Yudha (surat kabar), 9, 13, 36, 84, 88, 140, 146, dst
Bernard, Slamet, 163
Bess, 176
Bima, 176
Bintang Timur (surat kabar), 36, 225
Bintoro, Ny, 90, 91, 113
Biro Chusus CC PKI, 132
Biting, 72
BPPPI (Badan Koordinasi Perhimpunan Pelajar Indonesia), 210, 211

Blitar Selatan, 2, 72, 74, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, dst
Blok Kapitalis Barat, 196
Blok Timur, 214
Blora, 73, 76, 77, 78, 79, 168, 170.
Blora Selatan, 73
Bogor, 11, 12, 18, 21, 24, 25, 26, 31, 39, 40, dst
Boko, 182
Bonn, 218
Bono alias Waluyo, 10
borjuis, 58
Boyolali , 73, 75, 179, 180, 181, 183, 185
BPI (Badan Pusat Intelijen), 36
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), 56
Brebes, 173
Brigade Jadau, 76
Brigade TLRI (Tentara Laut Republik Indonesia), 76
Brigif Linud, 104, 112
Brunschweig, 218
BTI, 1, 37, 101, 112, 136, 150, 183
Bubak (desa), 186
Bubat (hutan), 185
Bucharest, 214, 215, 216, 221.
Budapest, 218
Budiardjo, Carmel, 210
Bukit Bara, 174

Bukit duri, 193
Bulgaria, 217, 224
Bumi Manusia (Novel), 3, 225, 226, 227, 229
Bung Karno, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dst
Buratno, 179

C

Cakrabirawa, 129, 159, 130
Cantrik, 74
CC PKI, 2, 7, 9, 10, 14, 57, 59, 60, 62, 63, 68, dst
CDB (Comite Daerah Besar), 14, 72, 73, 89, 90, 91, 92
CDR (Comite Djakarta Raya), 58
Cekoslowakia, 217, 221, 223, 224
Cenko (Central Komando), 7
Central Comite PKI Blitar Selatan, 72
Cepu, 76, 168, 179
Cepu Utara, 179
CGMI (Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia), 36, 37
Character Building, 24
Chen, David, 18
Cibulan, 58
Cilacap, 155
Cilincing, 163, 164
Cina, 3, 60, 62, 66, 81, 82, 90, 113, 176, 177, dst
Cipayung, 172

Cirebon, 88, 150, 173, 231
CMPO (Cara Membuat Plan Operasi), 91
Collapse, 19
Combat Intel, 112
Comite Indonesia, 189, 190, 194
Comite Proyek Kelud, Kawi dan Arjuna (KKA), 91, 92
Comite Proyek Lawu, 91, 100
Comite Proyek Merapi Merbabu, 72
Comite Proyek Muria, 72
Comite Proyek Pandan, 91, 92, 98
Comite Proyek Raung, 92
Comite Proyek Semeru, 92
Comite Proyek Sindoro, Sumbang, 72
Comite Proyek Tandes, 92
Comite Seksi Blitar, 95
Comite Seksi Malang selatan, 95
Comite Sub Seksi Binangun, 95
Comite Sub Seksi Donomulyo, 90
Comite Sub Seksi Kalipare, 90
Comite Sub Seksi Maron, 90
Comite Sub Seksi Ngeni, 90
Comite Sub Seksi Sumbermanjing, 90
Comite Sub Seksi Suruhwadang, 90
Comite Sub Seksi Wates, 90
Compro (Comite Proyek), 72, 74, 75, 83, 89, 91, dst

Compro Blitar Selatan, 92, 102, 115
Compro Gunung Pandan 108
Conefo (Confrence of the New Emersging Forces), 54
Congressebouw, 198
CPK (Comite Pangkalan Kecil), 179, 180, 181
CPM (Comite Pangkalan Mobil), 78, 79, 181, 184, 185
CSS (Comite Sub Seksi), 101
Cubba, 182, 202, 203, 204

D

Dairi (Kabupaten), 135
Damin alias Tris, 180, 183, 184, 185
Dan Dim Pandeglang, 103
Dan Dim 072 / Pepekuper Blora, 78, 79
Dan Pekuper (Komandan Pelaksana Kuasa Perang), 155
Dan Rem 018, 98
Darman, 100
Darsimin, Mus, 135
Darwin, Boy, 192
Dawuhan, 112
Deklarasi Pendukung Pancasila, 22
Demak, 73, 179
Demokrasi, 1, 52, 208, 215, 220
Demokrasi Terpimpin, 1, 52
demokratis, 5

demisioner, 218
Denhag, 188, 189
Denpasar 10, 133, 137
De Oceaan Van de Revolutie, 18
Departemen Agama, 145
Departemen Dalam Negeri, 40, 117, 142
Departemen Sosial, 117
Deplu (Departemen Luar Negeri), 191, 220
Destruktif, 1
De Telegraaf (surat kabar), 208
Detgc (Detasmen Gerilya), 69, 78, 84, 87, 89, 90, 95
De Trouw (surat kabar), 204
Dewan Harian CC PKI, 2
Dewan Harian Politbiro CC PKI, 57
Dewan Jenderal, 11, 26, 27
Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, 43
Dewan Pertimbangan Agung (DPA), 55, 56
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 38, 55, 56, 179
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), 38
Dewan Revolusi, 9, 13, 18, 125, 163, 173
Dhani, Omar (Laksamana, ex-Men / Pangau), 13, 18, 125, 132
Dharsono (Inspektur Polisi I / Peltu), 170
DHM (Dialektika Historis Materialisme), 73
Diah, B.M., 146
dialektisdenken, 50

Die Hard (garis keras), 3
Diinfiltrasi Ideologi Komunis, 1
DIPIAD (Dinas Pelaksana Intelijen Angkatan Darat), 104
Djaffar, 215
Djaib (Serma), 109
Djawa Dipa, 76
Djawoto (Duta Besar RI di Beijing), 187, 189, 190
Djemani, 100
Djimbung, 78
Djoekardi, Didi (Kolonel), 133
Djojo, 70
Domine de Grand, 202
Donomulyo, 95, 105
Dopo, 180
Dringus (sungai), 110
Dugel, 110
Dukuh Pepe, 174
Dukuh Tombak, 108
Duwur, Ke / Ontowiryo, 90, 113
Duynstee, Prof., 200
Dwikora, 8, 12, 14, 18, 19, 38, 39, dst
"Dwi Warna" (surat kabar), 202

E

Effendi, Basuki, 149, 150
Ekonomi Nasional (surat kabar), 36
Eksistensi, 1
El Bahar (surat kabar), 202
Emosionasl, 2
Engels, 71, 83
Eropa, 3, 193, 194, 196, 204, 211, dst
Eropa Barat, 3, 193, 218, 219, 222, 223
Eropa Timur, 193, 194, 196, 204, 211, 217, 222, 223

F

Fact Finding Commission (FFC), 22
Farid, 192
Fatah, Kyai Abdul, 18, 98
feodalisme, 50, 65
Freiburg, 219
Front Marhaen, 201
Front Nasional (FN), 11, 45, 164
Front Pancasila, 15, 16, 37, 38, 41, 42
Front Persatuan Nasional, 62, 65, 72
Front Persatuan Revolusioner, 71, 83
Front Selatan, 73
Front Tengah, 73
Front Utara, 73

G

Gadung (perkebunan), 96
Galuhov, 184
Gama (Universitas Gajah Mada), 136
Garis Pendem(Bawah tanah), 183
Garongan (jalan), 100
Gas, 82
Gelora Indonesia (surat kabar), 36
Gemeente Universitas Amsterdam, 191
Genderang (Buletin), 88
Genderuwo, 183
Gentong, 109
Gepas (Gerakan Pembela Ajaran Sukarno), 216
Gerakan Kebudayaan Baru, 65
Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), 48
Gerakan Togog, 88
Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), 36, 37, 100, 135
Gerda (Gerilya Desa), 84, 95, 100, 180, 181
Gerpol (Gerilya Politik), 202, 204
Gestapu, 21, 22, 40, 41, 42, 43, 46, 54, 86, 88, 117
Gestapu / PKI, 82
Gestok (Gerakan Satu Oktober), 21, 39, 40, 44
Getasan, 73
Getas Geneng, 175
Geyer (Kecamatan), 183, 185, 186

Giman alias Boediman, BA, 96
Girot, Markum alias Martimo alias Wowor, 134
GKI - LN (Gerakan Komunis Indonesia Luar Negeri), 223
Golkar Progresif Revolusioner, 40
Gondang, 159
Gorang - gareng, 68, 94, 95
GP. Ansor (Gerakan Pemuda Ansor), 98
BPTP (Gabungan Pejuang Tentara Pelajar), 158
Graaf, H.J. de, Prof, 200, 202
Grapyek, 175
Griwo, 73
Grobogan Utara (kecamatan), 179
GTM (Gerakan Tutup Mulut), 74
Gubernur Maluku, 148
Gunawan, 107, 108
Gundih (Kecamatan), 183, 184, 185, 186
Gunung Asem, 108, 109
Gunung Gede, 109
Gunung Kidul, 73
Gunung Luweng, 111
Gunung Sahari, 163
Gunung Slamet, 74
Gunung Tembaga, 177
Gunung Wilis, 98

H

Hadibroto, Yasir (Kolonel), 155, 156, 157, 158, 160
Hadisuwignyo, Ngading (Lettu Inf), 132
Halim Perdana Kusuma, 8, 13, 25, 27, 57, 164, 165, 167
HAM (Hak Azasi Manusia), 194, 195
Hamengkubuwono IX, Sri Sultan, 198
Hamim, 10, 72, 73, 74
Hamin, 68
Hamka, Prof.Dr., 227
Hanafiah, Ali, 133, 223, 252
Hanafiah, Amar, 133, 223, 252
Hanafi, A.M. (Duta Besar), 214
Hanoi, 215
Hardjomartono alias Kasim, 158, 159, 161, 162
Hadijo (Kapten), 94, 99, 111, 113, 115, 133, dst
Harian Pedoman, 137, 140
Harian Rakyat (surat kabar), 24, 36, 207
Harsono, Bardi, 18, 179
Hartono (Kapten), 156
Hasan (Letnan Muda Udara), 167,
Hasan, Fuad , Prof, Dr., 146, 149
Hayana, 182, 201, 203
Helsinki, 213
Herlambang, Sri Muljono (Laksamana Muda), 52
Hermanses (Menteri Agraria), 22

Hersri, 228
Herte, Y. van, 199
Het Parpol, 204
Hidayat, Ratu Aminah, 18, 133
Hidayat, Tamuri (Peltu Pensiunan), 18, 133
Himpunan Sarjana Indonesia (HSI), 36
Hindia Belanda, 227, 231
HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), 204
Hodoyo, 108
Hongaria, 217, 223, 224
Hongkong, 190
Hsien Fu Chin (Wakil Perdana Menteri / Menteri Keamanan), 181
Hsin Hua, 48
Hulu Kapuas, 176
Husni, 136
Hutan Lebak, 179
Hutapea, B. Oloan, 10, 63, 89, 90, 91, 92, 103, 110

I

Ibrahim, 41, 164, 191, 213
IBU (Ikatan Bajingan Ulung), 87
Ideolog, 3
Ideologi, 61, 143
IGGI, 196, 205, 209
IKM (Ikatan Keluarga Marhaen), 211

Imperialisme, 207
impulsif, 2
Imron, Achmad bin Ki Agus Husin, 135
Inggris, 66, 75, 203, 210
individu, 5, 121
Indonesia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 23, 29, 30, 31, dst
"Indonesia Berjuang" (Buletin), 213
Indonesia Dag (Harian Indonesia), 188, 189
Indonesia Informatie Avond (Malam Informasi tentang Indonesia), 205
"Indonesia Tribune" (Buletin), 213, 217
Inrehab (Instalasi Rehabilitasi), 138, 143, 145, 147, 148
Institut Politik Universitas Groningen, 207
Intelektual Komunis, 3
Internerings Kamp Digul, 146
IPKI, 15, 16, 18
IPPI, 108
Iramani, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186
Irian Jaya, 201
Isa, Ibrahim, 191
Ismoyo, Argo, 136
Isno, 107
Isra Mi'raj, 20
Istana Bogor, 21, 24, 40, 51
Istana Merdeka, 45, 48
Istora Senayan, 45

J

Jakarta, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 35, 38, 39, dst
Jaratseata, 167
Jaringan Operasi (Jarop) Lebah, 155
Jasin, Fatah, 18, 103, 105, 114
Jasin, M. (Mayjen), 97, 100
Jati Anom, 69
Jatibagus Cacingan (hutan), 185
Jatinegara, 173
Jati Plosorejo (hutan), 112
Jatno alias Sabar, 184
Jawa Barat, 10, 11, 41, 43, 74, 86, 136, 144
Jawa Tengah, 7, 9, 10, 11, 22, 57, 72, 73, 74, 75, dst
Jawa Timur, 22, 86, 88, 89, 90, 91, 92, dst
Jejak Langkah, 3, 225
Jemblokan, 183
Jepang, 218, 220,221
Jerman Barat, 216, 217, 218, 219, 220, 223
Jerman Selatan, 219
Jerman Timur, 209, 217, 219, 220, 223, 224
Jombang, 99, 115
Jong, De (Perdana Menteri Belanda), 203
Joo, 174
Judodihardjo, Sutjipto (Jenderal Polisi), 22
Jupri, 179
Jusuf, M (Brigjen), 7, 8, 16, 18, 22, 24, 35, 40, 50, 51, dst

K

Kabinet Dwikora, 12, 18, 19, 38, 39, 46
Kabinet Gestapu, 46
Kademangan (Desa), 96, 104, 105, 111, 112
Kaderi (Mayor), 161
Kadir, Abdul Munir (Sertu), 88, 101, 133
Kadir alias Soemardi, 101
Kalibentak, 109
Kalibenjeng, 108
Kalipare (Kecamatan), 95, 105
Kalitidu (Kecamatan), 99
Kaliwadir (Kecamatan), 95
Kalong, 162, 163, 164, 166, 167, 168
Kamaruzaman, Syam, 132
Kandangan, 96, 98, 182, 183
Karanganyar, 156, 184
Karno, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 28, dst
Karsabalak, 110
Karso, 113
Karsobrondol, 96
Kartali, 216
Kartawinata, Arudji (Menteri / Ketua DPR-GR), 18
Kartini alias Widji, Ny., 113, 147
Kartosuwiryo, S.M., 228
Kartowo, 216

karya intelektual, 3
Kasmudjan, 93
Kasmidjan alias Kardjo (eks kapten), 98, 99, 113, 115
kaum intrik, 41
Kawi, 91, 92, 102
Kayu awet Rawasari, 9
KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia), 190, 194, 204, 213, 214, 216, 218
Kebon Nanas Bogor, 173
Kebudayaan Buruh (surat kabar), 36
Kedaton (Kecamatan), 98, 99
Kediri, 77, 94, 96
Kedung Banteng (desa), 96
Kedungrejo (desa), 182
Kejaksaan Agung, 142, 210, 212
Kelud, 91, 92, 102
Kemalang, 73
Kemah, 72
Kemusu, 75, 180, 183
Kemantren Suruhwadang, 106
Ken, 195
Kendal, 153, 231
Kendeng, 76, 77, 102
Kenteng (desa), 180, 183
kepala batu (Die Hard), 144
kepala staf koti, 26

Kepolisian, 31, 79, 87, 109
Kerjen (desa), 73
Kerten (kampung), 157, 158, 159, 160
Kesepuhan (desa), 87
Kesatuan Aksi Buruh Becak Indonesia (KABBI), 16
Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), 16
Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), 16
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), 16, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 169
Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), 16, 169
Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), 16, 220
Khruschov, 206
KKA (Kelud-Kawi-Arjuna), 92, 102, 136
KKM (Kerja di Kalangan Musuh), 85, 88
KKO - AL, 166
KKPR (Kursus Kilat Perang Rakyat), 90, 91
Klaten, 73
Klino (desa), 98, 99
KNIL, 204
Kodam V / Jaya, 172
Kodam VII / Diponegoro, 78, 96, 169, 178
Kodam VIII / Brawijaya, 99, 101, 102, 104, 105, 114
Kodam CII / Tanjungpura, 164, 165, 168
Kodim Blora, 78, 170
Kodim 0501, 164, 167, 168
Kodim 0808 / Blitar, 90, 96, 99

Kodim 0818 / Malang, 99
Kodim 9721 / Pepekuper, 75, 161
Kodim 9807 / Tulungagung, 97, 99
Koesno (Perlda), 100, 101
Komandan Tefaat, 139, 151
Komando Aksi Pengganyangan Kontra Revolusioner, 15
Komando Aksi Ganyang Malaysia (KOGAM), 47
Komando Operasi Tertinggi (KOTI), 21, 22, 24, 27
Komando Strategis Tjadangan Angkatan Darat(Kostrad), 9, 51, 118, 173
Komdak XI / Kalimantan Barat, 176
Komintren (Komunis Internasional), 177, 216, 224
Kompas (surat kabar), 15, 16, 18, 43, 52, 113, 146, 147, 151; dst
Kompleks Dwikora, 164
Kompi C / 521, 101
Kompi D / 521, 101
Komunis, 3, 7, 12, 29, 30, 31, 57, 58, 59, 60, 62, dst
Komunisme, 5, 62, 191, 194, 201, 212, 234
Konferensi anti Pangkalan Militer Asing (KIAPMA), 14
Konferensi Havana, 41
Konferensi Solidaritas Rakyat Asia-Afrika-Amerika Latin, 213
Kongo, 187
Kontra Revolusi (Kontrev), 41, 42, 260
Kontrev Gestapu / PKI, 41, 42
Kopasgat, 175, 176

Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), 38, 58, 59, 72, 73, 77, 93, dst
Koppig, 30
Koramil Binangun, 99
Koramil Donomulyo, 99
Koramil Kademangan, 99
Koramil Kalidawir, 99
Koramil Kalipare, 99
Koramil Menden, 78
Koramil Sumbermanjing Kulon / Pagar, 99
Korea Utara, 224
Korem (Komando Resort Militer), 75, 79, 99, 237, 261,
Korem 074, 75
Korem 081, 99
KoSub nasional, 104
Kotabaru, 135
KPAA (Konferensi Pengarang Asia Afika), 189
KPPI (Kerjasama Perhimpunan Pelajar Indonesia), 222
Kradenan, 179
Kramatjati, 164
Kramat Sentiong, 163
KRG (Kesatuan Regu Gerilya), 181
Krido, 186
Krisdarmaji, Bambang, 192
Kritik Oto Kritik (KOK), 2, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 83
Kromoparjan, 186

Kross, Marcel, 207
Kruschev, 62
Kusno alias Judo, 96; 102
Kuwu, 179, 183, 195

L

Laksus Pang Kopkamtib, 102
Laredo (Suruhwadang) desa, 96
Lasido, 137
Latief, A. (Kolonel Inf), 7, 27, 172
Lawu, 72, 91, 100, 101, 102
Ledo, 174, 175, 176
Ledoksari (desa), 74
legalitas, 11, 27, 81
Legi (Letda BT), 77
Leimena, Dr.(Waperdam II), 8, 25, 50, 51, 53, 54
LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat), 36
Lenin, 5, 59, 71, 83
Lestahuu, Umar, 128
Liberal Algemeen Handelsblad (harian), 187
liberated, area, 87
Liem Hong Min alias Karni, 113
Lie Tun Tjong alias Hatyana, 136
Lojigandrung, 155, 156, 158, 162
Lubang Buaya, 171

Lubis, Muchtar, 164, 149, 151
Lud, Muchammad (Marsda TNI), 146
Lukman, M. H, 7, 9, 10, 14, 18, 57, 61, 63, 129
Lumajang, 136
luweng, 111, 112, 252

M

Machmud, Amir (Brigjen), 50, 51, 53, 236
machtsvorming, 81
Madiun, 1, 30, 63, 76, 77, 98, 120, 194, 228
Madiun Timur, 98
Magelang, 136, 155
Magetan, 100, 101
Mahmillub, 119, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
Mahmilti, 119, 133
Majenang, 74
Malebar, 55
Malang, 77, 94, 95, 96, 102, 105, dst
Malaysia, 47, 54
Malik, Adam, 198, 208
Maluku, 128, 137, 138, 141, 148
Maluku Selatan, 138
Manahan, 159
Manifes, 2
Manipol, 15, 23, 68

Mansur, Zaini, 22
Mao, 60, 62, 71, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 176, dst
Mao Ze Dong, 60, 75, 81, 82, 84, 85, 176, 188, 189, 218
Mardjohan, 18
Mardjoko, 115
Marhaenisme, 48
Marhaen Menang (bulettin), 212, 216, 217
Mardi, Soesatya (Laksda TNI), 146
Margono, 184, 218
Mariakasih, Frans Kho, Drs., 205
Marianah, Aminah, 135
Markam alias Kiwatno alias Supeno, 184, 185, 186
Markum, 180, 183
Maron (Kecamatan), 95, 104, 106, 107
Marsudidjojo, Supeno, 132
Marxis, 48, 50, 59, 60, 66, 70, 82, 91, 201, 210
Marxis-Leninis, 59, 60, 66, 70, 82, 91
Marxisme, 48, 49, 59, 61, 63, 64, 67, 68, 69, dst
Marxisme-Leninisme, 59, 61, 64, 67, 68, 69, 70, dst
Mashuri, S.H., 219
Masiman (Lettu), 133
Masjid Baiturrahim, 45
Masyumi, 63
Matal alias Alirejo alias Triman, 112, 113
Mbah Suro, 75, 76, 77, 78, 79

Mbah Suro alias Mulyono alias Surodihardjo, 76
MDH (Materialisme Dialektika Historis), 91
Medan, 91, 105, 133
Memimpin Perang Rakyat (diklat), 90
Menden, 76, 78
Merbabu Merapi Kompleks, 86
Merbourne Herald, 186
Merdeka (surat kabar), 45, 48, 146, 226
Mintardjo, 216
Miss Cicih (Gedung Sandiwara), 163
MKTBP (Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan), 62, 63, 64, 65
MMC (Merapi Merbabu Compleks), 74
Moenahir (Mayor), 100
Moenajat (Lettu), 110
Moenir alias Sodin, 111
Momentum, 230
Mongot (desa), 176
Moskow, 192, 193, 212, 223
MPG (Memimpin Perang Gerilya), 90
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), 149, 229
MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara), 18, 49, 54, 55, 56, 148, 210, 229
Muda Dalam, Yusuf (Menteri Bank Central RI), 132
Muhammad, Abdulgani, 135
Muhammadiyah, 15, 49
Mujur (bus), 173

Muklar, Ishak, 136
Muljono S.H., 52, 125, 132, 149
Muljono bin Ngali alias Waluyo, 125, 132
Mulsarwi, 183
Mulyadi (Laksamana), 24
Munadi (Mayjen TNI), 82, 86, 190, 195
Munandar, Wimpi, 216
Mungkar, 180, 181
Munir, Mohammad, 133, 134, 226
Muspika, 184
Mustakim alias Saridjo alias Jadi alias Tamin alias Tahto alias Warto, 179, 180, 184, 226
Mustakim alias Darso alias Saleh, 179, 180, 184, 226
Musso, 59, 61

N

Namlea, 147, 149, 226
Nasakom, 10, 14, 15, 19, 20, 30, 33, 47, 63, 67
Nasionalis, 19
Nasution, A.H. (Jenderal), 11, 18, 37, 40, 46, 55, 82
National Union of Student (NUS), 44
Nazir, Mohammad alias Amir, 133
Nederland, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 201, 202, 203, dst
Nederland Antilen, 195
Nekolim (Neo Kolonialisme, Imprelialisme), 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 41, dst

Nesbix Politeia, 195
New Left (Kiri Baru), 216, 222
New York Times, 195
Ngadimin, 182
Ngadirenggo, 108, 109
Ngasem (dusun), 186
Ngawi, 76, 105, 168
Ngemplak, 180, 183
Nginggil (desa), 75, 76, 77, 78, 79, 168, 169, 170, 171
Ngledok, 183
Ngrandu (desa), 184
Ngrebo (dusun), 182
Ngrejo (desa), 90
Ngrobo, 183
Ngrudung, 183
Ngrumpung (desa), 179
Ngunut (Kecamatan), 95
Nguter (dusun), 180, 183
Nikita Kruschev, 62
Nijmegen, 199, 200, 205, 207
Nizam, Hudaja, 215
Njoto, 7, 9, 13, 18, 46, 57, 61, 63, 129
Noto, S.H., 146
NU (Nahdatul Ulama), 15, 16, 18, 22, 36, 169
Nugroho Notosusanto (Brigjen), 24

Nusakambangan, 145
Nusa Tenggara, 120
Nuryadin, Roesmin (Marsekal), 124
Nuttige Idioten (orang awam yang berguna), 4
Nyono, 129, 171, 172
Nyono bin Sastrorcdjo, 129

O

oceaan, 12, 15
Oei Tjoe Tat, S.H., 4, 22, 46
Oetama, Jakob, 146
ofensif, 1, 201, 218, 226
Oisra (Organisasi Internasional Setiakawan Rakyat Asia Afrika), 206
Ontowiryo alias Kek Duwur, 90, 113, 249
Operasi Ayam Alas I, 111
Operasi Combat, 103
Operasi Intelijen, 101, 106, 177, 178
Operasi Kalong, 162
Operasi Kikis II, 179
Operasi Ksatria, 131
Operasi Militer, 106, 177
Operasi Militer, 106, 177
Operasi Teritorial, 105, 106, 177
Operasi Trisula, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 113, 114, 115
Operasi Yustisional, 118

oportunis, 59, 67, 69
oportunisme, 61, 70
Orde Baru, 3, 11, 149, 188, 189, 193, 195, 202, 212, 215, dst
Orde Lama, 48, 49, 193, 221
OTB (Organisasi Tanpa Bentuk), 88
OTM (Operasi Tutup Mulut), 74

P

Padang, 133
Padepokan Mbah Suro, 79
Padmo alias Basuki, 101
Pardede, 18, 63, 129
Paing alias Dulmanan alias Nungkar alias Tjokro, 183, 184, 185
Pekanbaru, 135
Pak Gendut, 101
Pakuwibowo, Taher, 221
Palaunsoeka, FC., 18
Palembang, 133, 135
Palmos, Frank, 195
Palur, 157
Panca Azimat Revolusi, 15
Pancasila, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 22, 23, 28, dst
Panca Tunggal, 15
Pangdam VII / Diponegoro, 79, 170
Pangdam XII / Tanjungpura, 175

Pangdam XV / Pattimura, 139
Pangeran Bernhard, 205, 209
Pangkowilu V, 164
Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), 103, 118, 126, 127, 139, 140, dst
Panggungrejo (Kecamatan), 89, 103
Panglima ABRI, 8, 41, 42, 52, 138
Panglima Angkatan Darat, 14, 26, 27
Panglima Angkatan Udara, 18, 26
Panglima Kodam VII / Diponegoro, 169
Panglima Kostrad, 118, 173
panitia Adhoc, 21
Panji Perang Rakyat, 90
Pantai Cermin (Kecamatan), 135
Pardede, Peris, 63, 129
Pardjan, 182
Paripurna Kabinet Dwikora, 18
Paris, 219
Parkindo (Partai Kristen Indonesia), 18, 22
Parman, 182
Partindo (Partai Indonesia), 4, 156, 216, 225
Partisan (buletin), 88
Pasaman, 133
Pasar Rebo, 172
Pasukan Bara, 174
Pasuruan, 105

Pati Utara, 73
Pejompongan, 172, 173
Pekalongan, 87, 134, 231
Peking, 187, 189, 190, 191, 193, 202, 211, 212
Pekuper, 155, 156, 157
Pemuda Rakyat (PR), 36, 37, 171, 214
Panawangan (Kecamatan), 179
Pendito Gunung Kendeng, 76
Pengemban Supersemar, 54
Pepelrada Jawa Barat, 43
Pepera (Penentuan pendapat Rakyat), 201, 204
Peperda Jawa tengah, 73, 74
Perancis, 216
Perjuangan Tani Bersenjata, 2
Perjuta (Perjuangan Bersenjata), 71, 77, 83, 90, 91, 92, 95, dst
Perjuta komunis, 77
Persembahan Untuk Partai (novel), 3, 225
Perti, 16, 18
P dan K (Pendidikan dan Kebudayaan), 117, 129, 227, 229
PGRS (Pasukan Gerilya Rakyat Serawak), 174
PGRS (Pasukan Gerilya Rakyat Surabaya), 96
PGT (Pasukan Gerak Tjepat), 105, 106
Piket (Pemimpin Kecamatan), 181, 184
Piket Guno, 184
Piket Parjo, 184

Piket Purwo, 184
Pinontoan Ernest, 212
PKC (Partai Komunis Cina), 60, 188, 192
PKI (Partai Komunis Indonesia), 3, 7, 12, 29, 30, 31, dst
PKUS (Partai Komunis Uni sovyet), 62, 192
Plantungan, 153
Pleno Central Comite, 90
Ploso, Jombang, 99
Pluvier, J.M. Dr., 196, 200
PNI (Partai Nasional Indonesia), 15, 16, 18, 22; 63, 212, 215, 216, 217
PNI – ASU, 212, 215, 216, 217
PNI OSA – USEP, 15
POD (Petugas Organisasi Desa), 180, 181, 185
Poeradisastra, S.I. alias Buyung Saleh, 228
Pojok, 184
Polandia, 217, 224
Polisi Metropolitan Tokyo, 220
Politbiro, 57, 59, 60, 68, 71, 72; 81, 89, dst
Politbiro CC PKI, 57, 59, 60, 68, 71, 129, 136
Politbiro Central, 89, 90
Politbiro Defiences, 47
Politbiro Solution, 43
Polonia, 173
Pondok Gede, 7, 57, 163
Pono (Supono), 7, 9, 10, 72, 73, 90

Pontianak, 136, 175, 176, 178
Popoy, Nur, Drs., 147
Pos Kenteng, 180
Pos Ngemplak, 180
Pos Nguter, 180
Pos Welar, 180
PPI (Persatuan Pelajar Indonesia), 205, 215, 216, 218, 219, 220
PPI Beijing, 218
PPI Eropa Barat, 219
PPI Jerman Barat, 219, 223
PPI Jerman Timur, 220
PPI Rumania, 215, 216
Prada (Prajurit Desa), 181
Pradigdo, Sujono, 10, 58
Praga (Prajurit Gerilya), 181, 185
Praha, 212, 217, 218, 221, 223
Prahu (hutan), 185
Prajitno, Ning (Letda), 158, 160, 161, 162
Pramon (desa), 99
Pranoto, Masedun, 9, 25, 26, 27, 146, 172, 173
Pranoto (Sersan), 76, 166, 170
Prasetyo, Pujo, 137
Pratomo (ex Letkol), 90, 91, 100, 103
Presiden, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 16, 17, dst
Presiden Soeharto, 24, 25, 140, 152, 157, 197, 200, 201, 208, 209, 212, 216

Princen, H.J.C., 195, 196
progresif revolusioner, 17, 19, 23, 41, 42
proletar, 61, 64, 69
prota (Propaganda Bersenjata), 102
PSII, 15, 16, 18
psikologis, 3
PTD (Petugas Daerah), 181
PTIP (Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan), 16, 216, 219
PTPR (Pembangunan Tentara Pembebasan Rakyat), 179
Pulau Buru, 3, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, dst
Pumpungan (desa), 99
Puntukrejo (desa), 74
Puradisastra, S.I., (Buyung Saleh), 3
Purba, 192
Purwodadi, 73, 75, 178, 179, 180, 181, 182, dst
Purwokerto, 179
Purwosari, 156
Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat), 95
Putatsari, 179

R

Rachmat, Basuki (Mayjen), 50, 51, 53
Rachman, Hasim, 50, 51, 53
Radio Ampera, 48
Raja Kayeli, 142

Raja Lilialy, 142
Ramelan, Utomo, 76, 133
Rempelombo, 104
Ratu Juliana, 209
Raung, 92, 102
RDD (republik Demokrasi Jerman), 219, 220
RDV (Repunlik Demokrasi Vietnam), 215
Redjotangan (Kecamatan), 95
reformis, 65
reinterprestasi, 4
Rejosari, 183
REKAM (Regu kerata Api dan Mobil), 85
REKASTRA (Regu Kader Strategi), 85
Reksosamudro, Pranoto (Mayjen), 9, 172
Rektor Universitas Tawangalun Jember, 204
Rendeng, 88
Rencana Operasi Ksatria, 118
REPAN (Regu Penculik), 85
Reshuffe! Kabinet, 48
RETERA (Regu Telekomunikasi dan Radio Amatir), 80
Retool Kabinet Dwikora, 38
Retooling, 37
Retrogresif, 23
Revolusi Nasional, 41
Revolusioner, 15, 60, 71, 83, 90, 192

revisionis, 59, 62, 63, 69, 217, 223
Revosionisme, 68
Rewang, 58, 89, 90, 91, 92, 103, 113, 134
Rewang alias Kalimin Suparto, 113
Rezim facis Soeharto, 183
Rimpel, 15
Ringin bandulan, 105
Rivai, Djohan (Mayor), 133, 144, 149, 150, 151
RKH (Rahasia Kucing Hitam), 87
Roda Baretten (Baret merah Pasukan RPKAD), 192
Rosnadi (Pelda), 104
Rokhayah, 179
Roma, 145, 213
kontra revolusi, 1, 17, 20, 35, 36, 40, 48, 56, 124, 197
Rosyadi (peltu), 165
Rotterdam, 195
Rotterdam Algemeen Dugblad (harian pagi), 187
RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat), 105, 170, 171, 175, 178, 202
RRC (Republik Rakyat Cina), 48, 149, 187, 188, 190, 191, dst
RRI (Radio republik Indonesia), 8, 10, 39, 52, 85
RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat), 173
RTC (Rumah Tahanan Chusus), 203
"Rumah Kaca" (novel), 3, 225
Rumania, 214, 215, 216, 217, 223, 224
Rusman (kolonel), 164, 183

Rusman (Mantri Polisi), 184
Rusia, 3, 62, 209
Rusli, Teuku, 206
Rustomo, 90, 91, 92, 98, 99
Ryacudu (Brigjen TNI), 175

S

Sabur (Brigjen), 50, 51
Sadar, 87
Sadli, Saparinah, Drs., 146, 149
Safei, Nandang, Ir. (Kapten Laut), 163
Said, Ali, S.H. (Jaksa Agung), 146, 191
Said, Oemar, Drs., 132, 146
Said, Umar, 137, 191
Sakirman, 63, 108
Sakirman, Ir., 46, 97, 106, 107, 108, 163
Salam, 90, 184, 192
Salatiga, 73
Saleh, 3, 50, 51, 150, 163, 176, dst
Saleh, Chairul, 50, 51
Saleh, Ismail, S.H. (Jaksa Agung), 210
Salemba, 203
Salim (Sersan), 170
Samad alias Kancil, 184
Saman, 180, 186

Sambas (Kabupaten), 174
Sambeng (kampung), 158, 159, 160, 161
Samsudin alias Iramani, 180, 182, 184
Sanggau, 174, 175, 176
Sani, Asrul, 149
Sanjoyo, 171
Sanusi, Amir Anwar, 129, 164, 167, 168
Sapta Marga, II
Sarangan, 100
Sarbini (Mayjen), 52
Saren, 183
Sariyo alias Tanto alias Warto alias Darno alias Yadi alias Tomin, 184
Sarip alias Salam, 183, 184, 186
Sarlan alias Lie Wie Cung, 108
Sarwan (Serma Purn), 112
Sasmito, B. (Letkol,) 104, 108
Sastro, 73, 136, 184
Sastrodihardjo, Anom, 228
Sastro, Sadi alias Gozali, 73, 136, 184
Satam (Brigadir-Serse Polisi), 170
Satipto alias Saman, 186
Savana Jaya (desa), 147, 148
Sawignyo, 172
Sawiyo alias Ayub, 182, 183, 185
SBIM (Serikat Buruh Mesin dan Metal), 156

SBKA (Serikat Buruh Kereta Api), 158
SDS, 216
Scheltema, Hugo, Mr., 196, 197
Scheveningen, 196
Seda, Frans, Drs., 198, 199, 200
Segedong, 177
Sekar (perkebunan), 96
Sekjen Fron Nasional, 155
Semarang, 77, 88, 125, 173, 195
Semper, 163
Semeru Selatan, 102, 136
Senen (daerah), 163, 180, 183, 184
Senen alias Joyo alias Rebo, 183, 184
Seno alias Munir, 101
Setu, 183, 186
Siagian, Sabam, 146
Sidikalang, 135
Silaban, Manganar, 135
Simorangkir, Wadja Mangaratua, 18, 215, 216
Sinar Harapan (surat kabar), 19, 20, 21, 22, 126, 146
Singkawang, 174, 176
Sinuraya, Thomas, 223
Siswadi, 156, 157, 158, 161, 162
Syarifuddin, Amir, 50, 51, 53, 164, 167, 228
Sleman, 72

Slamet, 74, 109, 110, 161, 163, 186
Slamet Riyadi (jalan), 161
SMN (Suruhwadang Maron-Ngeni), 104
Suara Pemuda Indonesia (buletin), 188, 213
Subandi akias Martolelo, 113
Subardjo, 214, 215
Subekti, Iskandar, 89, 90, 103
Subroto, 215
Subyektivisme, 61
Sucahyo, 171
Suciptadi, 94
Sudarmo, 157, 158, 159, 160, 161, 162
Sudarwo, Drs. (Brigjen), 146
Sudiarto (Letkol), 219
Sudio, 182
Sudiono (Kolonel U), 132
Sudirgo, Suwardiningsih alias Asiah alias Mariam alias Buda, 133
Sudisman alias Suharno Tedy alias Tarno alias Toha, 2, 7, 9, 10, 57, 58, 59, 61, dst
Sudjiman (Letkol) , 164
Sugi, 171
Sugijono, 162
Sugiri, 218, 223
Sugito, 96
Suhadi (Serma), 134
Suhantoro, 215

Suhardjo, 135, 218
Suhardjo, Harmen (Kapten Purn), 135
Suharno, 113, 132
Sukadi, 58
Sukarman, 90, 91, 92
Sukarno (Sukarnois), 223, 224
Sukarjo (Letnan Muda Udara), 167, 168
Sukatno, 58, 90, 91, 103, 134
Sukawati, Dewantara, Bambang, 144
Sukirman, 166
Sukirman (Sersan), 76, 166, 170
Sukirno alias Sumanto alias Kadir, 88
Sukrisno (Duta Besar), 214, 215
Sulawesi Selatan Tenggara, 120
Sulawesi tengah, 120
Suluh Marhaen (surat kabar), 202
Sulursari, 179
Sulistijo, Djoko, 216
Sumardi, 100, 170, 214
Sumardi (mayor), 161
Sumardjo, Bambang, 146
Sumarno, 22, 40, 190
Sumatra, 7, 57, 127, 135
Sumatra bagian Selatan, 119
Sumatra barat dan Riau, 119

Sumatra Utara, 7, 135
Sumber Agung, 180, 183
Sumberkotom (desa), 102
Sumberejo (desa), 111
Sumberjati (desa), 112
Sumbermanjing (Kecamatan), 95, 105
Sumokarsidi, 182
Sumpeni, Ny., 182
Sunandar, 91
Sunardi, 146, 163
Sungai Duri, 167
Sunarjo (exKapten), 94
Supardi (capa), 111
Supardjo, 7, 8, 130, 132, 155, 162, 163, 164, 165
Suparlan, S.H. (Letkol), 125
Suparman, 100, 102, 179
Suparman (Kopral), 164, 165, 168, 179
Supit, Karel, 149
Supono, 72, 73, 100, 132
Suprapto (Brigjen / Deputy II Bakin), 144, 146, 150, 151
Suprapto, S.H. Prof. Dr., 136, 140, 142
Surabaya, 77, 96, 102, 108, 133, 136, 139
Suradi (Kapten Inf), 133, 164, 165, 172
Suradi (Letda BT), 77
Surakarta, 133, 155, 157

Suratmin, 72, 74
Suriname, 205, 207
Suripto, 97
Suroso, Ny. , 107
Suruhwadang (Kecamatan), 95, 96, 104, 106, 112
Susilo bin Sumanto Sastrosendjojo, Drs., 136
Sutadisastra, Baron (Kuasa Usaha RI), 190
Sutan, Buyung Ketek Gelar, 135
Sutardjo Tomo, Gatot, Ny., 113
Sutardjo (Kopral), 113, 115
Sutaryo, Gatot, 90, 91, 103
Suti, 186
Sutikno, 90, 100
Sutjiptadi (Kapten), 113
Suto, 73
Sutojayah (Kecamatan), 105
Sutrisno, 96, 100, 113
Sutrisno, S.H., 96, 100, 113
Suwandhi, Marto, 163
Suwandhi (Mayor Laut), 163
Suwandi alias Djoyo, 90, 91, 92, 103, 134
Suwarno, 94, 113
Suwarno alias Bintoro , 90, 90, 113
Suwito bin Ronowasito (Kapten), 133
Suwiyo, 136

Suwondo, Mely, Dra., 146
Suyono, 58, 100, 132

T

Tahir, 102
Takeran, 100
Taman Kebonsirih (jalan), 55
Tanak, KR, 192
Tan Bun, 176
Tangerang, 203
Tanjung, Faisal (Letnan Satu), 161
Tan Ling Djie, 63
Tanti, Slamet, 186
Tanto, 184, 185
Tanzania, 187
Tapak, 101
Tap MPRS, 200
Tapol (Tahanan Politik), 121, 122, 142, 144, 203, 204, 210, 211
Tarenteng (daerah), 168
Tasripin, Kyai, 93
Tata tempur Slagorde Front Pancasila, 45
Tavip, 15
Tawangmangu, 87
TC (Training Centre) , 176
Team Intel Rem 082 , 94

Tebingtinggi, 127
Tefaat (Tempat Pemanfaatan), 139, 145, 147, 148, 149, 151, 152
Tefaat Buru, 145, 148, 152
Tego (Pelda), 170
"Tekad Rakyat" (buletin), 213
Teningda (Team Screening Daerah), 123
Teningpu (Team Screening Pusat), 123
Teperda (Team Pemeriksa Dacrah), 110, 111 , 113
Teperpu (Team Pemeriksa Pusat) 118, 119, 121, 122
Teroh (Kecamatan), 179
Teses Perjuta, 89
Thayab, Syarif (Brigjen), 15
The Bu Kiat, 176
Theis Perjuta, 89
The New Standard (surat kabar), 146
Thesis Perang Rakyat, 91
The Wasa, 165
Tidjan, Ny., 113
Tien Soeharto, Ny. , 209
Tiga Menguak Takdir (sajak), 149
Tim Intel Rem 081, 99, 101
Tirana, 212, 217, 223
"Tiongkok", 64, 189
"Tiongkok Rakyat" (majalah), 189
Tito, 217

Tirtayasa (jalan), 58
Tingkah Laku Politik Jenderal Soedirman (buku), 219
Tjipto, Hendarno, 220
Tjokroaminoto, Harsono, 18
Tjugito alias Badrun, 89, 90, 103, 111, 134
TNI – AD, 52
TODSADA (Team Oditur / Jaksa Daerah), 113, 119
TODSAPU (Team Oditur / Jaksa Pusat), 110, 111, 113, 119, 120
Tohir, Moch. (Letnan Udara I), 164, 167, 168
Tokyo, 220
Tomang (jalan), 58
Topo, 73
Towidjan, 72, 73, 74
TPR (Tentara pembebasan Rakyat), 83, 84, 179
TPR (Tentara Perlawanan Rakyat), 179
Transkop, 117
Trenggalek, 95
Tricontinental (buletin), 213
Tri Panji, 2, 57, 59, 71, 83, 88
Tri Panji Partai (buletin), 57, 59, 71, 83, 88
Triko, 102
Trisakti, 15
Trisnadi (Mayor), 135
Tritura (Tri Tuntutan Rakyat), 38, 39, 48
Truni / Babad (desa), 99

Tuban, 98, 99
Tulungagung, 95, 102, 104, 105, 108
Tulungagung Selatan, 95
Tumpak Kepuh (hutan), 106
Tumpak Oyot, 108
Timpak Waru, 106
Tweede Kamer, 198

U

Udi, 163
Udin alias , M. Amin, 164, 168
Ujung Pandang, 137
Uni Sovyet, 62, 149, 188, 192, 193, 211
Unit I Wanapura, 147
Unit II Wanareja Jaya, 147
Universitas Indonesia (UNI), 38, 43, 146, 199
Universitas Khatolik, 189, 195
Universitas Patrice Lumumba, 192, 193
Untung, Djoko, Ny., 107
Untung, Djoko, 90, 91, 113, 135
Untung bin Syamsuri (Letkol), 7, 10, 117, 121, 163, 164
Usdek, 15
Utan Kayu, 173
Utrecht, Ernest, Prof., 204, 205, 206
UUD 1945, 3, 5, 16, 41, 53, 54, 55, 56, 193

W

Wagimin (Sertu), 113
Wahyono, Teguh (Lettu), 91
Waldy (Brigjen, Ketua Bapreru), 146
Wanjakti, 27
Wandi, 8, 10
Wardi, 73
Warsidi, 183
Warta Bhakti, 36
Wates (Kecamatan), 95
Werdoyo, K, 3
Wertheim, W.F., Prof.Dr., 197, 200, 201, 202, 204, 205, 207, 208
WFDY (World Federation of Trade Union), 218
Widjajasastra, Ruslan, 2, 83, 89, 90, 103
Widjanarko, Bambang (Kolonel), 25, 53
Widodo, 169, 170, 214, 216
Widodo (Brigadir – Sersan Polisi), 161
Widodo (Mayjen), 160
Wihardono (Kapten Udara), 164
Wijnbergen, S.P.L. Baron van , Prof.,Mr. , 200
Williams, Judy, 195
Willys, 191
Wina, 222
Winata (Kapten), 134
Wiratmo, 171

Wirosari, 179
Wiryawan, Wing (Brigjen), 139
Wisma Kartini Namlea, 147
Witarmin (Kolonel), 104, 105, 106, 113, 114
Wong Hon, 174
Wong Kie Chok, 177
Wonoharjo (desa), 179, 183, 185
Wonosobo, 87

V

Vietcong, 106
Vietnam Bulletin Indonesia Informatie (majalah) , 186, 192
Vergeleken Met De Oceaan, 15
Verkuyl, J. Prof., 202
Vested Interest, 39
Vrij Nedeland, 194

Y

Yacob, 177
Yani, A. (Jenderal), 11, 25, 37, 38, 40, 46, 47, 55, dst
Yanto, 174
Yao Teng Sham, 181
Yap Chung Hoo, 177
Yap Sin Kok, 113

Yatimin (Kopral), 165
Yogyakarta, 72, 87, 133, 136, 151, 155
Yon Inf 328, 163
Yon Inf 511, 103
Yon Inf 421, 98, 101, 105
Yon 837 Brimob-AKRI, 167

Z

Zein, Mohammad Amin, 135

Pada tanggal 12 Maret 1966 Partai Komunis Indonesia (PKI) dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh Indonesia, yang kemudian disusul dengan gerakan penumpasan terhadap PKI dan ormas-ormasnya baik di pusat maupun di daerah-daerah. Hal itu semakin mempersulit posisi PKI.

Namun demikian, tokoh-tokoh PKI tidak tinggal diam, mereka berusaha membangkitkan kekuatan kembali partainya dengan mengadakan semacam introspeksi diri, koreksi diri terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan PKI untuk memperbaiki diri. Untuk itu, Sudisman, salah seorang anggota Dewan Harian Polit Biro CC PKI pada bulan September 1966 berhasil menyusun suatu konsepsi pemikiran baru berupa Kritik Oto Kritik (KOK), yang mengkritik G30S/PKI sebagai "petualangan" dan "avonturisme militer" DN. Aidit. Ia menganjurkan agar PKI melakukan konsolidasi partai, walaupun tidak diperbolehkan kembali secara formal. PKI diharuskan mencari jalan keluar untuk membangun kembali partai dengan strategi yang dikenal dengan "TRI PANJI PARTAI" 1965, yakni pembangunan kembali partai, perjuangan bersenjata (perjuta) dibawah pimpinan klas buruh dan front persatuan revolusioner atas dasar persekutuan klas buruh dan Tani dibawah pimpinan buruh. Konsepsi Sudisman ini berhasil disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia dalam waktu yang relatif singkat.

Setelah Sudisman tertangkap dan diadili Mahmillub pada bulan Juli 1966, Ketua CC PKI baru Ruslan Widjajasastra menerapkan konsepsi pemikiran Sudisman dengan menitik beratkan pada panji kedua perjuangan tani bersenjata dan memilih daerah Blitar Selatan sebagai Basis Revolusi (Basrev).

Di samping itu, aktivitas PKI pasca G30S/PKI dilakukan pula oleh tokoh-tokoh yang masih hidup di luar negeri seperti di RRC, Uni Soviet, Nederland, Cuba dan Rumania. Aksi-aksi tersebut dilakukan baik secara individual maupun bersama-sama (kelompok), dengan melakukan serangan yang bersifat ideologis terhadap Pancasila dan UUD 1945, dan serangan-serangan politik terhadap pemerintah Orde Baru.

Pemerintah bertindak tegas berusaha menghancurkan PKI dan sisa-sisanya. Di samping membubarkan PKI, yang kemudian disusul dengan penangkapan terhadap tokoh-tokohnya, dilaksanakan pula berbagai langkah secara yuridis, terhadap tokoh-tokoh yang terlibat langsung pemberontakan G30S/PKI (gol. A) seperti Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub). Terhadap mereka yang tidak terlibat langsung dalam pemberontakan (gol. B) mereka ditempatkan dalam Instalasi Rehabilitasi (Inrehab) Pulau Buru, daerah Maluku Selatan sebagai tahanan politik (Tapol gol. B).

Pramoedya Ananta Toer, salah seorang tapol Pulau Buru, seorang sastrawan, ideolog dan intelektual komunis yang produktif. Dalam tahanan ia berhasil menyelesaikan beberapa hasil karya sastra yang menghebohkan masyarakat yaitu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Buku Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa menimbulkan reaksi dari masyarakat dikarenakan isinya dianggap mengandung pertentangan kelas, yangdapat menimbulkan kerawanan dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, kedua buku tersebut dilarang beredar di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kejaksaan Agung dengan Nomor : Kep-052/JA/1981, tanggal 29 Mei 1981.

ISBN 978-602-95565-2-0
9 786029 556520

Disusun Oleh : Pusjarah TNI
Diterbitkan Oleh : Pusjarah TNI, bekerjasama dengan :
Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB)
Desain Visual & Tata Letak : Sidisi, Jakarta
(Materi Siap Cetak)